

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	31 Juli 2023	Masa Perdagangan Waran Seri I	:	8 Agustus 2023 – 3 Agustus 2027
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 Agustus – 4 Agustus 2023	– Pasar Reguler dan Negosiasi	:	8 Agustus 2023 – 3 Agustus 2027
Tanggal Penjatahan	:	4 Agustus 2023	– Pasar Tunai	:	8 Agustus 2023 – 5 Agustus 2027
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	7 Agustus 2023	Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 Agustus 2024 – 6 Agustus 2027
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I	:	8 Agustus 2023	Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I	:	6 Agustus 2027

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ITSEC ASIA TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



PT. ITSEC ASIA TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Jasa dengan Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat :

Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3
Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung
Kavling E.4.2 No 2, Mega Kuningan
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia 12950

Fasilitas Security Operations Centre (SOC):

The Icon Business Park Blok J Nomor 006
Jl. Raya Cisauk Lapan, Sampora
Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang
Banten, Indonesia 15345

Telepon : 021-29783050

Website : <https://www.itsec.asia>

Email : corpsec@itsecasia.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 1.008.734.800 (satu miliar delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 15,64% (lima belas koma enam empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesanan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp100.873.480.000,- (seratus miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 504.367.400 (lima ratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 9,27% (sembilan koma dua tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan Rp400,- (empat ratus Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 6 Agustus 2027. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp201.746.960.000,- (dua ratus satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

PENJAMIN EMISI EFEK

- PT Sucor Sekuritas - PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PELANGGAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PT ITSEC ASIA, Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat nomor 343/ADM/ITSECASINIII/2023 tanggal 10 April 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 (“UUPM”), sebagaimana telah diubah sebagian oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“Undang-Undang PPSK”), dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-05307/BEI.PP2/07-2023 tanggal 5 Juli 2023. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Emisi Efek, dan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, seluruhnya dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN	ix
RINGKASAN.....	xi
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	12
III. PERNYATAAN UTANG	15
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	21
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN.....	25
VI. FAKTOR RISIKO.....	49
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	54
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	55
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN.....	55
B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	57
C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN	59
D. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING.....	62
a. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Afiliasi.....	62
b. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga.....	62
E. ASURANSI.....	65
F. ASET TETAP PERSEROAN.....	65
G. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL.....	65
H. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN.....	66
I. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN.....	67
J. TATA KELOLA PERUSAHAAN (<i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i>).....	72
K. SUMBER DAYA MANUSIA.....	80
L. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	84
M. INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM.....	84
N. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK.....	85
1. Umum	85
2. Jaringan Distribusi.....	86
3. Prospek Usaha	86
4. Kegiatan Usaha Perseroan.....	87
5. Keunggulan Kompetitif	89
6. Persaingan Usaha	90
7. Strategi Usaha	90
8. Pemasaran	91
9. Proses Usaha	91
10. Riset dan Pengembangan Bisnis.....	92
11. Kecenderungan Usaha Perseroan	92
12. Keterangan Tentang Entitas Anak.....	93
13. Tinjauan Industri.....	94
IX. EKUITAS	129
X. KEBIJAKAN DIVIDEN.....	130
XI. PERPAJAKAN.....	131
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK.....	134

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	136
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	138
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS.....	156
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS.....	162
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM.....	163
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	165

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (“UUPPSK”) yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan; c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
“Akuntan Publik”	: berarti Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPPSK.
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
“Bapepam”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal <i>juncto</i> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/ KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPPSK, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 4/2023, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK.
“Emisi”	: berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham pada Pasar Perdana guna dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
“Entitas Anak”	: berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
“Harga Penawaran”	: berarti harga Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu Rp100,- (seratus Rupiah).
“Hari Bank”	: berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
“Hari Bursa”	: berarti hari dimana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional atau hari libur lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pemerintah atau Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender gregorius termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.
ITSEC Australia	: berarti ITSEC Australia Pty Ltd
ITSEC Singapore	: berarti ITSEC Services Asia PTE. LTD
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Genio Atyanto & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang akan bertindak sebagai Partisipan Admin, di mana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti jangka waktu di mana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui Sistem e-IPO.

“Menkumham”	: berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
“OJK”	: berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU OJK.
“Partisipan Admin”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
“Partisipan Sistem”	: berarti Perusahaan Efek yang memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa keuangan atau pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Pasal 1 angka 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
“Pasar Perdana”	: berarti pasar terjadinya penawaran dan penjualan atas Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran Umum Perdana Saham sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
“Pasar Sekunder”	: berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti suatu ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan dan/atau perkiraan Harga Penawaran.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual saham kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UU No. 4/2023 dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti Perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham atas nama Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan bagian penjaminan dengan memperhatikan syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

- “Peraturan No. IX.A.2” : berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7” : berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.J.1” : berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 7/2017” : berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No. 8/2017” : berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No. 10/2017” : berarti Perubahan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 25/2017” : berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 30/2015” : berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No. 32/2014” : berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No. 33/2014” : berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 34/2014” : berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 35/2014” : berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No. 55/2015” : berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
- “Peraturan OJK No. 56/2015” : berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Peraturan OJK No. 17/2020” : berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Perjanjian Pendaftaran Efek” : berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-024/SHM/KSEI/0323 tanggal 5 Mei 2023 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE” : berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 1 tanggal 3 April 2023, *juncto* Salinan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 16 tanggal 8 Mei 2023, *juncto* Salinan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi No. 28 tanggal 7 Juli 2023, *juncto* Salinan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan

Emisi No. 112 tanggal 26 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.

- "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS" : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 2 tanggal 3 April 2023, *juncto* Salinan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 29 tanggal 7 Juli 2023, *juncto* Salinan Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 113 tanggal 26 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, termasuk segala perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari.
- "Pernyataan Penerbitan Waran Seri I" atau "PPW" : berarti Salinan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 3 tanggal 3 April 2023, *juncto* Salinan Akta Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 17 tanggal 8 Mei 2023, *juncto* Salinan Akta Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 44 tanggal 14 Juni 2023, *juncto* Salinan Addendum Ketiga Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 30 tanggal 7 Juli 2023, *juncto* Salinan Addendum Keempat Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 114 tanggal 26 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn, Notaris di Provinsi DKI Jakarta, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- "Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I" atau "PAW" : berarti Salinan Akta Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT ITSEC ASIA Tbk No. 4 tanggal 3 April 2023, *juncto* Salinan Akta Addendum Pertama Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT ITSEC ASIA Tbk No. 45 tanggal 14 Juni 2023, *juncto* Salinan Akta Addendum Kedua Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT ITSEC ASIA Tbk No. 31 tanggal 7 Juli 2023, *juncto* Salinan Akta Addendum Ketiga Pengelolaan Administrasi Waran Seri I PT ITSEC ASIA Tbk No. 115 tanggal 26 Juli 2023, yang seluruhnya dibuat dihadapan Dr. Sugih Haryati, SH, M.Kn, Notaris di Jakarta.
- "Pernyataan Pendaftaran" : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- "Perseroan" : berarti PT ITSEC ASIA Tbk, berkedudukan di Jakarta, suatu Perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- "Perusahaan Efek" : berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.
- "Profesi Penunjang Pasar Modal" : berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- "Prospektus" : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, dengan isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam UU No. 4/2023 dan Peraturan OJK No. 8/2017.
- "Prospektus Awal" : berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, porsi penjaminan emisi efek atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.

“Prospektus Ringkas”	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal dalam isi dan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 8/2017.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPPSK serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 1.008.734.800 (satu miliar delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pemesan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham dan didistribusikan secara elektronik paling lambat satu hari sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran dana hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan di Pasar Perdana oleh Partisipan Admin kepada Perseroan, yang akan dilakukan paling lambat satu hari sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat satu Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi.
“Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan”	: berarti tanggal untuk pengembalian uang pemesanan pembelian Saham Yang ditawarkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek melalui Penjamin Emisi Efek kepada para pemesan yang sebagian atau seluruh pesanannya tidak dapat dipenuhi karena adanya penjatahan atau dalam hal Penawaran Umum Perdana Saham dibatalkan atau ditunda. Tanggal pengembalian uang pemesanan tidak boleh lebih lambat dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penjatahan atau 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti tanggal penjatahan Saham Yang Ditawarkan, yang dilaksanakan secara otomatis oleh Sistem e-IPO dengan memperhatikan SEOJK No. 15/2020, yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dengan Perpu Cipta Kerja.
“UUPPSK”	: berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023, Tambahan Lembaran No. 6845.

“Waran” : Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan.

“WIB” : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

DEFINISI DAN SINGKATAN YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

AI	: <i>Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan)</i>
MSS	: <i>Managed Security Services</i>
MSSP	: <i>Managed Security Services Provider</i>
PSS	: <i>Professional Security Services</i>
IT	: <i>Information Technology (Teknologi Informasi)</i>
TI	: <i>Teknologi Informasi</i>
TO	: <i>Teknologi Operasional</i>
ISP	: <i>Internet Service Provider</i>
ISPM	: <i>Information Security Process Management</i>
SDWAN	: <i>Software Defined Wide Area Network</i>
DNS	: <i>Domain Name System</i>
TLS	: <i>Transport Layer Security</i>
SSL	: <i>Secure Software Layer</i>
DPI	: <i>Deep Packet Inspection</i>
SIEM	: <i>Security Information and Event Management</i>
IDS	: <i>Intrusion Detection System</i>
MDR	: <i>Manage Detection and Response</i>
IR	: <i>Incident Response</i>
BC	: <i>Business Continuity</i>
DR	: <i>Disaster Recovery</i>

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.

Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

UMUM

PT ITSEC ASIA Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan kantor pusat beralamat di Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Timur, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 7 tanggal 12 April 2010, dibuat di hadapan Iman Refizal, SH, MHum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menhukham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-23544.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034711.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010 serta telah diumumkan pada Berita Negara Nomor: 29, dan Tambahan Berita Negara No. 9911 tanggal 12 April 2011. ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Rakhmayanti Esther Makainas, SH, LLM	250	250.000	50,00
2. Ir. Ibnu Pratomo	250	250.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	500	500.000	100,00
Saham Dalam Portepel	500	500.000	-

Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 77 tanggal 28 Februari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014658.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0048062.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0098452 tanggal 3 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0048062.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023, ("**Akta Nomor 77 tanggal 28 Februari 2023**"), menyetujui antara lain:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
2. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
 - a. perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT ITSEC ASIA, Tbk.
 - b. Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan.
 - c. pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 1.008.734.800 (satu miliar delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 15,64% (lima belas koma enam puluh empat persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran- Umum.
 - d. menyetujui untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 504.367.400 (lima ratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) Waran Seri I atau setara dengan sebanyak-banyaknya 9,27% (sembilan koma dua puluh tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran

dalam rangka Penawaran Umum, dimana setiap pemegang 2 (dua) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.

- e. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
- f. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Jo. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
- g. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Keterangan selengkapnya mengenai Kegiatan Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Perseroan menawarkan jasa keamanan siber dalam tiga tahap, yaitu (1) Penilaian, (2) Implementasi, dan (3) Analisis, untuk memastikan perlindungan atas infrastruktur Teknologi Informasi (“TI”) perusahaan-perusahaan terhadap serangan siber dengan tetap mematuhi peraturan kepatuhan dari pemerintah.

Perseroan menawarkan serangkaian portfolio jasa keamanan siber, dan telah menjalin kemitraan dengan perusahaan dan badan pemerintah untuk menciptakan infrastruktur keamanan siber yang dapat diandalkan.

Secara umum, portfolio penawaran Perseroan dapat dikategorikan ke dalam enam kategori di bawah ini:

Portofolio ITSEC

<i>Managed Security Services (MSS)</i>	<i>Professional Security Services (PSS)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan Jaringan Perusahaan Terkelola • Pemantauan Keamanan/Pemantauan Keamanan <i>Cloud</i> • Proteksi dan Deteksi <i>Malware</i> Tingkat Lanjut • Perangkat Keamanan Terkelola • Pemantauan dan Pengelolaan <i>Firewall</i> • SIEM Terkelola • IDS/IPS • Manajemen Log • Pengumpulan Log • Penyimpanan, Rotasi, dan Retensi Log • Pemantauan, Analisis, dan Pelaporan Log • <i>Vulnerability Management/Vulnerability Scanning</i> • Pemindaian Aplikasi Web Terkelola • Pengelolaan Keamanan <i>Endpoint</i> • Pencegahan Ancaman <i>Endpoint</i> Tingkat Lanjut • Deteksi Ancaman <i>Endpoint</i> Tingkat Lanjut • Deteksi dan Respons <i>Endpoint</i> Tingkat Lanjut • <i>Managed Detection and Response (MDR)</i> 	<i>Pengujian Penetrasi & Red Teaming</i>	<i>Audit, Tata Kelola, Risiko & Kepatuhan Keamanan TI</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengujian Penetrasi Aplikasi Web • Pengujian Penetrasi Aplikasi Seluler • Pelatihan Keamanan Siber • Pemburuan Ancaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Audit Keamanan Informasi • Layanan Kepatuhan • Implementasi ISO 27001 • Kepatuhan terhadap POJK • Kepatuhan terhadap PCI DSS
	<i>Keamanan Aplikasi</i>	<i>Pengembangan Arsitektur & Proses</i>
	<ul style="list-style-type: none"> • Peninjauan Kode Sumber • DevSecOps • Penilaian Keamanan Basis Data • Penguatan Keamanan Basis Data 	<ul style="list-style-type: none"> • Desain Arsitektur Keamanan • Penguatan Keamanan dan Pembentukan <i>Baseline</i> • Pengembangan Rencana IR • Analisis Rencana BC/DR
	<i>Forensik Digital & Respons Insiden</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Respons Insiden • Layanan Respons Cepat • Investigasi Forensik Digital 		

Keterangan selengkapnya mengenai Kegiatan Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN ANAK

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Berdiri	Tahun Penyertaan	Status Beroperasi	Kontribusi Terhadap Pendapatan (%)
<i>Perusahaan Anak</i>							
1.	ITSEC Services Asia Pte. Ltd	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	100% (Kepemilikan langsung)	2018	2022	Beroperasi secara komersial	20,20
2.	ITSEC Australia Pty Ltd	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	100% (Kepemilikan langsung)	2018	2022	Beroperasi secara komersial	6,74

Keterangan selengkapnya mengenai Perusahaan Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

PROSPEK USAHA

Sejalan dengan program pemerintah Indonesia yang saat ini sedang mendorong perkembangan industri digital, Perseroan memandang pertumbuhan industri teknologi keamanan siber di Indonesia juga akan meningkat dengan pesat. Tingkat digitalisasi yang tinggi juga meningkatkan risiko serangan siber. Menurut data dari Frost & Sullivan, sebanyak 49% organisasi di Indonesia pernah mengalami serangan siber, merugikan Indonesia sebesar US \$ 43,2 miliar, atau 3,7% dari total PDB Indonesia. Untuk Indonesia, diperlukan strategi dan taktik keamanan siber yang efektif, karena Indonesia merupakan negara ketiga yang paling rentan terhadap serangan malware. Keamanan siber harus menjadi bagian dari rencana transformasi digital pada setiap organisasi di Indonesia, dimana disinilah peran dan sekaligus menjadi peluang pertumbuhan bisnis perusahaan.

Prospek pertumbuhan industri teknologi keamanan siber di Indonesia masih sangat luas. Faktor-faktor yang mendukung hal tersebut antara lain:

Prospek Usaha *Managed Security Services (MSS)*

Transformasi digital telah meningkatkan penggunaan teknologi seperti *cloud*, *IoT*, dan aplikasi berbasis web pada perusahaan-perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi di setiap area operasi bisnis. Namun, tingkat adopsi teknologi yang cepat menyebabkan infrastruktur TI pada perusahaan menjadi lebih kompleks dan ancaman siber bertumbuh lebih luas dan canggih, sehingga keamanan semakin sulit untuk dikelola. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan menjadi semakin rentan terhadap serangan siber.

Kombinasi dari adopsi penggunaan teknologi yang sangat cepat, potensi serangan siber yang semakin canggih, dan kurangnya tenaga profesional keamanan siber yang berkualitas di industri saat ini, telah memaksa Perusahaan untuk menunjuk penyedia layanan keamanan siber untuk membantu mengatasi tantangan ini. Dengan mengalihdayakan operasi keamanan mereka, organisasi mendapatkan akses ke berbagai *Managed Security Services (MSS)* dan *Professional Security Services (PSS)* seperti pemantauan keamanan 24x7x365, *threat management*, respon insiden dan manajemen kepatuhan, serta wawasan dari ahli-ahli keamanan siber yang berpengalaman.

Banyak perusahaan memutuskan untuk bermitra dengan *Managed Security Services Providers (MSSP)* terutama disebabkan oleh kurangnya jumlah karyawan dan keahlian internal. MSSP memberikan skala ekonomi yang memungkinkan organisasi yang mereka layani dapat lebih efisien dengan mengizinkan MSSP untuk mengelola, memelihara, merekrut, melatih, dan mempertahankan tenaga profesional keamanan siber yang berpengalaman.

Pasar MSS telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan tren ini diperkirakan akan berlanjut di tahun-tahun mendatang. Kebutuhan akan MSS didorong oleh beberapa faktor:

- Sedikitnya Tenaga Profesional Keamanan Siber yang Berkualitas:** Hal ini mendorong perusahaan untuk mengalihdayakan perlindungan keamanan siber mereka karena semakin sulit untuk merekrut dan mempertahankan tenaga profesional keamanan siber. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi MSSP karena dapat menawarkan berbagai solusi dan layanan keamanan dengan *scope* layanan yang luas. Perusahaan-perusahaan dapat memanfaatkan pengalaman dan keahlian yang disediakan oleh MSSP sehingga dapat berkonsentrasi pada aktivitas bisnis inti dan menghemat biaya yang cukup besar yang kemungkinan akan dikeluarkan untuk mengembangkan dan memelihara *Security Operations Center (SOC)* internal.
- Meningkatnya Kompleksitas Produk dan Solusi Keamanan Siber:** Rentanya kejahatan-kejahatan siber menyebabkan pengembangan solusi keamanan siber menjadi semakin kompleks. Untuk melindungi perusahaan dari kejahatan siber tersebut memerlukan pengalaman, pengetahuan, dan spesialisasi khusus yang menyebabkan perusahaan akan terus mencari solusi keamanan siber.

- c. **Kelanjutan Penerapan Remote Working:** Pandemi telah mempercepat transformasi digital dan mengubah cara organisasi menjalankan bisnisnya. Banyak perusahaan telah beralih ke sistem *Remote Working* yang sudah menjadi hal yang normal. Perusahaan perlu menerapkan strategi keamanan siber yang mencakup *Managed Detection and Response* (MDR), simulasi pembobolan dan serangan siber, *zero trust frameworks*, dan banyak solusi dan layanan lain untuk mendukung *Remote Working* tersebut. Cara terbaik untuk memastikan perencanaan dan implementasi yang benar dari strategi tersebut adalah dengan cara bermitra dengan MSSP. MSSP dapat menyediakan layanan ini beserta rangkaian keahlian keamanan siber lainnya dengan biaya lebih rendah dibandingkan SOC internal.
- d. **Kepatuhan terhadap Peraturan:** Perusahaan-perusahaan melibatkan MSSP untuk aktivitas seperti audit, layanan kepatuhan, respon insiden, dan pengujian penetrasi untuk memastikan bahwa mereka tetap mematuhi undang-undang perlindungan data dan peraturan yang berlaku pada industri. Perusahaan-perusahaan akan mengandalkan MSSP untuk memperoleh akses terhadap para ahli pengendalian dan pemantauan keamanan siber untuk membantu mereka dalam mengembangkan strategi keamanan yang sesuai dengan persyaratan kepatuhan.
- e. **Masalah Geopolitik Mendorong Serangan yang Disponsori Negara:** Perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung meningkatkan kebutuhan akan keamanan siber perusahaan dan pemerintahan. Peningkatan serangan yang disponsori negara menyoroti pentingnya langkah-langkah keamanan siber yang proaktif. Metode keamanan siber tradisional mungkin sudah tidak memadai untuk memberikan perlindungan terhadap serangan yang sangat canggih dan terarah. Jumlah serangan yang disponsori negara dapat meningkat, hal ini dapat mendorong kebutuhan perusahaan atau pemerintahan untuk bermitra dengan MSSP yang dapat berintegrasi dengan lingkungan OT/IoT.

Prospek Usaha *Professional Security Services* (PSS)

Professional Security Services (PSS) telah menjadi komponen penting dari strategi keamanan siber bagi bisnis di seluruh industri. PSS mencakup serangkaian layanan, termasuk penilaian risiko, *vulnerability testing*, pengujian penetrasi, audit keamanan, dan respon insiden.

Layanan yang tersedia mencakup keterlibatan strategis dalam respon insiden siber, penilaian postur keamanan siber, dan perencanaan strategis untuk meningkatkan ketahanan siber. Layanan ini merupakan proyek dengan cakupan yang ditentukan. Penyedia pada umumnya menyediakan *vulnerability management* dan layanan respon insiden berdasarkan perjanjian layanan berjangka (*retainer*). Mengingat ancaman siber terus berkembang dan menjadi lebih canggih, PSS menjadi semakin dibutuhkan.

Adopsi PSS telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir karena perusahaan-perusahaan semakin sadar akan risiko yang ditimbulkan oleh ancaman siber. Seiring dengan banyaknya bisnis yang menyimpan data sensitif dan menjalankan operasinya secara daring, kebutuhan akan langkah-langkah keamanan siber yang kokoh menjadi sangat penting. PSS menyediakan berbagai layanan yang dirancang untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem dan mencegah serangan siber. Melalui kemitraan dengan penyedia PSS, perusahaan-perusahaan dapat memperoleh manfaat dari teknologi dan keahlian keamanan canggih tanpa harus membangun dan mengelola tim keamanan siber secara internal.

Kedepannya, persyaratan kepatuhan akan tetap menjadi pendorong utama pasar PSS. Pemberlakuan undang-undang privasi data atau peraturan keamanan siber yang diperbarui di banyak negara secara global mendorong perusahaan untuk memanfaatkan PSS mengingat PSS menyediakan akses terhadap ahli eksternal untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terbaru. Pengujian penetrasi dan tata kelola serta kepatuhan risiko dapat membantu perusahaan dalam menghindari sanksi yang dikarenakan terjadinya pembobolan data. Penilaian keamanan yang menyeluruh, termasuk pengujian penetrasi menggunakan mesin dan secara manual, serta penawaran CISO-as-a-service, muncul sebagai generasi baru layanan keamanan profesional.

STRATEGI USAHA

ITSEC telah membangun jaringan mitra yang kuat untuk menyampaikan layanan keamanan siber kepada pelanggan di seluruh dunia, terutama di Asia Pasifik. Jaringan tersebut mencakup pemasok teknologi paling canggih yang memiliki produk dan solusi keamanan yang telah teruji dalam keamanan jaringan, keamanan *endpoint*, *threat intelligence*, keamanan surel, *gateway*, perlindungan beban kerja *cloud*, keamanan aplikasi, pengelolaan kata sandi, *vulnerability management*, dan lain-lain. Untuk meningkatkan jangkauan pasar dan memberdayakan bisnis melalui produk-produk keamanan tersebut, ITSEC membangun jaringan mitra aliansi yang luas di berbagai negara. Mitra aliansi memperluas jangkauan geografis gabungan ITSEC, mengembangkan pasar, mendukung proses penjualan, dan meningkatkan penawaran keamanan siber. Melalui mitra yang kuat dan jaringan penjualan kanal tersebut, ITSEC mampu melayani merek-merek terdepan dalam industri perbankan, perusahaan asuransi, dan operator telekomunikasi terkemuka.

KETERANGAN TENTANG PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Penawaran Umum	:	Sebanyak 1.008.734.800 (satu miliar delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) Saham Biasa Atas Nama.
Persentase Penawaran Umum	:	Sebanyak 15,64% (lima belas koma enam empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	:	Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham.
Harga Penawaran	:	Rp100,- (seratus Rupiah) per saham.
Nilai Emisi	:	Sebanyak Rp100.873.480.000,- (seratus miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah).
Periode Penawaran Umum	:	2 Agustus 2023 sampai 4 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan di BEI	:	8 Agustus 2023

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPPSK.

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

PENERBITAN WARAN SERI I

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Rasio Saham dengan Waran Seri I	:	2 : 1, setiap pemegang 2 (dua) saham baru akan memperoleh 1 (satu) waran Seri I.
Jumlah Waran Seri I	:	Sebanyak 504.367.400 (lima ratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) waran Seri I.
Harga <i>Exercise</i> Waran Seri I	:	Rp400,- (empat ratus Rupiah).
Total Hasil <i>Exercise</i> Waran Seri I	:	Sebanyak-banyaknya Rp201.746.960.000,- (dua ratus satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).
Periode Pelaksanaan Waran Seri I	:	8 Agustus 2024 sampai 6 Agustus 2027
Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I	:	6 Agustus 2027

Persentase Waran Seri I terhadap keseluruhan jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan adalah sebanyak 9,27% (sembilan koma dua tujuh persen).

Keterangan selengkapnya mengenai Waran Seri I dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pendiriannya, hingga diterbitkannya Prospektus ini. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 97 tanggal 30 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-0006456.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020164.AH.01.11.Tahun 2023 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 00436 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 12 ("Akta No 97 tanggal 30 Januari 2023"), struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	21.763.359.608	544.083.990.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. INV Management Pte. Ltd.	3.139.336.097	78.483.402.425	57,70
2. MB Investment Management Pte. Ltd.	1.772.934.657	44.323.366.425	32,59
3. Matthew Owen Marsden	160.975.197	4.024.379.925	2,96
4. Alvin Jude Rafferty	33.593.951	839.848.775	0,62
5. Andri Utama Putra	38.000.000	950.000.000	0,70
6. Bambang Susilo	38.000.000	950.000.000	0,70
7. Radius Suharta	38.000.000	950.000.000	0,70
8. Bima Kurniawan	38.000.000	950.000.000	0,70
9. Antonius Andy Wijaya	25.000.000	625.000.000	0,46
10. Atik Pilihanto	25.000.000	625.000.000	0,46
11. Eko Prasudi Widiyanto	25.000.000	625.000.000	0,46
12. Eko Prasetyo	10.100.000	252.500.000	0,19
13. Rio Aseptia	10.100.000	252.500.000	0,19
14. Muhammad Ray Ramadhan	10.100.000	252.500.000	0,19
15. Junior Lazuardi	10.100.000	252.500.000	0,19
16. Augusta Bogie Satria Nugroho	5.300.000	132.500.000	0,09
17. Victor Christian Mamuaya	6.300.000	157.500.000	0,11
18. Henky Tornado	3.800.000	95.000.000	0,06
19. Doni Mora	4.500.000	112.500.000	0,08
20. Chia Ping Boon	19.000.000	475.000.000	0,35
21. Lim Juat Chong	19.000.000	475.000.000	0,35
22. Mariusz Marcinkiewicz	8.700.000	217.500.000	0,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.440.839.902	136.020.997.550	100,00
Saham Dalam Portepel	16.322.519.706	408.062.992.650	-

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	21.763.359.608	544.083.990.200		21.763.359.608	544.083.990.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. INV Management Pte. Ltd.	3.139.336.097	78.483.402.425	57,70	3.139.336.097	78.483.402.425	48,67
2. MB Investment Management Pte. Ltd.	1.772.934.657	44.323.366.425	32,59	1.772.934.657	44.323.366.425	27,49
3. Andri Utama Putra*	38.000.000	950.000.000	0,70	38.000.000	950.000.000	0,59
4. Bambang Susilo*	38.000.000	950.000.000	0,70	38.000.000	950.000.000	0,59
5. Bima Kurniawan*	38.000.000	950.000.000	0,70	38.000.000	950.000.000	0,59
6. Eko Prasudi Widiyanto*	25.000.000	625.000.000	0,46	25.000.000	625.000.000	0,39
7. Doni Mora*	4.500.000	112.500.000	0,08	4.500.000	112.500.000	0,07
8. lain-lain (dibawah 5%)	351.475.197	8.786.879.925	7,07	351.475.197	8.786.879.925	5,97
9. Masyarakat	-	-	-	1.008.734.800	25.218.370.000	15,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.440.839.902	136.020.997.550	100,00	6.449.574.702	161.239.367.550	100,00
Saham Dalam Portepel	16.322.519.706	408.062.992.650		15.313.784.906	382.844.622.650	

*Keterangan:

Berdasarkan Pasal 22 UU P2SK, adapun pemegang saham Perseroan yang merupakan Afiliasi, antara lain:

1. Andri Utama Putra : Presiden Direktur Perseroan
2. Bambang Susilo : Direktur Perseroan
3. Bima Kurniawan : Direktur Perseroan
4. Doni Mora : Direktur Perseroan
5. Eko Prasudi Widianto : Direktur Perseroan

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi, berikut proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I:

Keterangan	Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) Setiap Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	21.763.359.608	544.083.990.200		21.763.359.608	544.083.990.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. INV Management Pte. Ltd.	3.139.336.097	78.483.402.425	48,67	3.139.336.097	78.483.402.425	45,14
2. MB Investment Management Pte. Ltd.	1.772.934.657	44.323.366.425	27,49	1.772.934.657	44.323.366.425	25,50
3. Andri Utama Putra*	38.000.000	950.000.000	0,59	38.000.000	950.000.000	0,55
4. Bambang Susilo*	38.000.000	950.000.000	0,59	38.000.000	950.000.000	0,55
5. Bima Kurniawan*	38.000.000	950.000.000	0,59	38.000.000	950.000.000	0,55
6. Eko Prasudi Widianto*	25.000.000	625.000.000	0,39	25.000.000	625.000.000	0,36
7. Doni Mora*	4.500.000	112.500.000	0,07	4.500.000	112.500.000	0,06
8. lain-lain (dibawah 5%)	351.475.197	8.786.879.925	5,97	351.475.197	8.786.879.925	5,53
9. Masyarakat	1.008.734.800	25.218.370.000	15,64	1.008.734.800	25.218.370.000	14,51
10. Waran Seri I	-	-	-	504.367.400	12.609.185.000	7,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	6.449.574.702	161.239.367.550	100,00	6.953.942.102	173.848.552.550	100,00
Saham Dalam Portepel	15.313.784.906	382.844.622.650		14.809.417.506	370.235.437.650	

*Keterangan:

Berdasarkan Pasal 22 UU P2SK, adapun pemegang saham Perseroan yang merupakan Afiliasi, antara lain:

1. Andri Utama Putra : Presiden Direktur Perseroan
2. Bambang Susilo : Direktur Perseroan
3. Bima Kurniawan : Direktur Perseroan
4. Doni Mora : Direktur Perseroan
5. Eko Prasudi Widianto : Direktur Perseroan

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- Sekitar 87% (delapan puluh tujuh persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung perluasan tim *cybersecurity* di Indonesia, Singapura dan Australia, dan untuk membangun tim baru serta menyewa kantor di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, Perseroan akan menginvestasikan modal kerja untuk pemasaran, pembiayaan proyek, serta sertifikasi dan akreditasi untuk mendorong pertumbuhan pendapatan di masa depan. Selain itu, Perseroan bermaksud untuk menginvestasikan modal kerja dalam membangun tim *Research and Development* (R&D) untuk mengembangkan produk, alat, dan layanan *cybersecurity* baru.
- Sekitar 13% (tiga belas persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk mendukung perluasan tim *cybersecurity* di Indonesia, Singapura dan Australia, serta untuk melakukan ekspansi di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, Perseroan akan menginvestasikan belanja modal untuk renovasi kantor R&D, pengembangan laboratorium *cybersecurity* di Noble House, Lantai 11, serta pembelian peralatan dan perlengkapan laboratorium.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan untuk:

- Sekitar 86% (delapan puluh enam persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung perluasan tim *cybersecurity* di Indonesia, Singapura dan Australia, dan untuk membangun tim baru serta menyewa kantor di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, Perseroan akan menginvestasikan modal kerja untuk pemasaran, pembiayaan proyek, serta sertifikasi dan akreditasi untuk mendorong pertumbuhan pendapatan di masa depan. Selain itu, Perseroan bermaksud untuk menginvestasikan modal kerja dalam membangun tim *Research and Development* (R&D) untuk mengembangkan produk, alat, dan layanan *cybersecurity* baru.
- Sekitar 14% (empat belas persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk mendukung ekspansi lebih lanjut tim *cybersecurity* di Indonesia, Singapura dan Australia, serta untuk ekspansi di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, Perseroan akan terus menginvestasikan belanja modal untuk pengembangan laboratorium *cybersecurity* dan peralatannya di Noble House, Lantai 11.

Keterangan selengkapnya mengenai Rencana Penggunaan Dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari: (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan, (firma anggota Allinial Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1023) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian, (ii) Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum disajikan kembali, diaudit oleh diaudit KAP Drs Bambang Sudaryono & Rekan, yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam Rupiah)

	31 Januari		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Jumlah Aset	99.345.970.122	170.026.387.832	73.162.705.507	46.729.836.889
Jumlah Liabilitas	63.882.790.154	207.768.800.425	113.043.700.281	80.305.811.224
Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal)	35.463.179.968	(37.742.412.593)	(39.880.994.774)	(33.575.974.335)
Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas (Defisiensi Modal)	99.345.970.122	170.026.387.832	73.162.705.507	46.729.836.889

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
PENDAPATAN BERSIH	9.282.591.159	6.678.446.549	187.020.275.669	118.316.460.489	73.519.176.313
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(7.125.637.001)	(2.941.402.974)	(115.984.518.527)	(65.225.293.019)	(55.101.769.939)
LABA KOTOR	2.156.954.158	3.737.043.575	71.035.757.142	53.091.167.470	18.417.406.374
Beban umum dan administrasi	(7.616.408.277)	(5.695.359.383)	(75.687.667.820)	(55.257.751.706)	(36.975.679.196)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	2.757.149.393	(449.264.501)	(4.392.756.680)	(2.731.154.181)	(2.070.439.454)
RUGI USAHA	(2.702.304.726)	(2.407.580.309)	(9.044.667.358)	(4.897.738.417)	(20.628.712.276)
Pendapatan keuangan	278.324.261	8.936.919	1.594.145.291	1.020.026.512	3.333.465.859
Beban keuangan	(594.596.928)	(31.587.075)	(1.429.878.176)	(462.506.337)	(376.570.124)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(3.018.577.393)	(2.430.230.465)	(8.880.400.243)	(4.340.218.242)	(17.671.816.541)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(265.957.806)	-	(2.461.988.178)	-	-
Tangguhan	64.115.216	516.508.051	487.903.149	(2.569.565.703)	2.285.384.714

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(201.842.590)	516.508.051	(1.974.085.029)	(2.569.565.703)	2.285.384.714
RUGI BERSIH SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	(3.220.419.983)	(1.913.722.414)	(10.854.485.272)	(6.909.783.945)	(15.386.431.827)
Efek Penyesuaian Proforma	-	(65.819.036)	11.561.923.344	9.606.646.446	5.261.282.019
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	(3.220.419.983)	(1.979.541.450)	707.438.072	2.696.862.501	(10.125.149.808)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(1.364.948.516)	(1.147.079.016)	270.229.672	(60.202.645)	250.698.709
Pajak penghasilan terkait	300.288.674	252.357.384	(59.450.528)	13.244.582	(55.153.716)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Efek translasi mata uang asing	(1.042.699.221)	-	-	-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	(2.107.359.063)	(894.721.632)	210.779.144	(46.958.063)	195.544.993
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	(5.327.779.046)	(2.874.263.082)	918.217.216	2.649.904.438	(9.929.604.815)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	(0,59)	(19,80)	7,07	26,97	(101,25)

*tidak diaudit

Rasio

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Rasio Profitabilitas					
Marjin Laba Kotor ^A	23,24%	55,96%	37,98%	44,87%	25,05%
Marjin Laba Bersih ^B	-34,69%	-29,64%	0,38%	2,28%	-13,77%
Laba Bersih ^C /Jumlah Ekuitas	-108,97%	N/A	N/A	N/A	N/A
Laba Bersih ^C /Jumlah Aset	-38,90%	-30,70%	0,42%	3,69%	-21,67%
Rasio Likuiditas					
Rasio Kas ^D (x)	0,09	0,03	0,08	0,10	0,02
Rasio Lancar ^E (x)	1,76	0,48	0,44	0,55	0,34
Rasio Solvabilitas					
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x)	0,64	1,55	1,22	1,55	1,72
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x)	1,80	-2,83	-5,50	-2,83	-2,39
Rasio Cakupan Utang atau <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) ^G (x)	-9,01	-34,01	-0,85	0,64	-6,55
Rasio Cakupan Bunga atau <i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR) ^H (x)	-4,08	-75,94	-5,21	-8,38	-45,93
Pertumbuhan^E					
Pendapatan Bersih	38,99%	8,57%	58,07%	60,93%	52,07%
Laba Kotor	-42,28%	-39,31%	33,80%	188,27%	22,78%
Laba Bersih	62,69%	102,18%	-73,77%	126,64%	-219,57%
Jumlah Aset	-41,57%	5,76%	132,39%	56,57%	115,72%

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Jumlah Liabilitas	-69,25%	5,85%	83,80%	40,77%	54,92%
Ekuitas	193,96%	-6,03%	5,36%	-18,78%	-11,27%

A: Marjin laba kotor dihitung dari laba (rugi) bruto dibagi pendapatan

B: Marjin laba bersih dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi pendapatan

C: Laba bersih merupakan laba (rugi) tahun berjalan/ laba (rugi) periode berjalan yang disetahunkan

D: Rasio Kas merupakan kas dan setara kas dibagi total liabilitas jangka pendek

E: Rasio Lancar total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek

F: Rasio Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada periode sebelumnya untuk pendapatan bersih, laba kotor, dan laba bersih, serta membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada tahun sebelumnya untuk jumlah aset, jumlah liabilitas, dan ekuitas.

G: Rasio Cakupan Utang merupakan EBITDA yang disetahunkan dibagi total liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan beban pendanaan sewa yang disetahunkan dan beban pendanaan yang disetahunkan.

H: Rasio Cakupan Bunga merupakan laba sebelum beban pendanaan dan pajak dibagi total beban pendanaan sewa dan beban pendanaan .

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

FAKTOR RISIKO

Risiko usaha dan risiko umum yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Reputasi
2. Risiko Persaingan
3. Risiko Kegagalan Produk baru
4. Risiko Kegagalan Implementasi
5. Risiko Perubahan Teknologi
6. Risiko Kepatuhan

C. Risiko Umum

1. Risiko perubahan kondisi perekonomian secara lokal, regional dan global
2. Tuntutan atau gugatan hukum
3. Kebijakan Pemerintah
4. Risiko Bencana Alam
5. Risiko perubahan kurs valuta asing (depresiasi nilai tukar rupiah)
6. Risiko yang timbul dari Peraturan Negara lain atau Peraturan Internasional

D. Risiko Bagi Investor

1. Kondisi pasar saham di Indonesia dapat memengaruhi harga dan likuiditas saham Perseroan; besaran *public float* dapat menyebabkan rendahnya likuiditas saham.
2. Fluktuasi harga saham Perseroan.
3. Perubahan nilai Rupiah terhadap USD atau terhadap mata uang lainnya.
4. Penjualan saham Perseroan di masa depan dapat merugikan harga pasar saham Perseroan.
5. Hukum di Indonesia memiliki ketentuan yang dapat mencegah pengambilalihan Perseroan.
6. Penerapan peraturan OJK terkait benturan kepentingan dapat mengakibatkan pembatalan beberapa transaksi yang merupakan kepentingan terbaik Perseroan.
7. Investor mungkin dibatasi oleh hak pemegang saham minoritas.

Keterangan selengkapnya mengenai Faktor Risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 10% (sepuluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

A. PENAWARAN UMUM SAHAM

Sebanyak 1.008.734.800 (satu miliar delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham atau sebanyak 15,64% (lima belas koma enam empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp100.873.480.000,- (seratus miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 504.367.400 (lima ratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 9,27% (sembilan koma dua tujuh persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 6 Agustus 2027. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp201.746.960.000,- (dua ratus satu miliar tujuh ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh ribu Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.



PT. ITSEC ASIA TBK
(“Perseroan”)

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang Jasa dengan Kegiatan Usaha Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat :

Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3
Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung
Kavling E.4.2 No 2, Mega Kuningan
Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi
Jakarta Selatan, Indonesia 12950

Fasilitas Security Operations Centre (SOC):

The Icon Business Park Blok J Nomor 006
Jl. Raya Cisauk Lapan, Sampora
Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang
Banten, Indonesia 15345

Telepon : 021-29783050

Website: <http://www.https://www.itsec.asia>

Email: corpsec@itsecasia.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP PELANGGAN. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan sejak pendiriannya, hingga diterbitkannya Prospektus ini. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 97 tanggal 30 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-0006456.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020164.AH.01.11.Tahun 2023 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 00436 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 12 ("Akta No 97 tanggal 30 Januari 2023"), struktur permodalan dan komposisi susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	21.763.359.608	544.083.990.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. INV Management Pte. Ltd.	3.139.336.097	78.483.402.425	57,70
2. MB Investment Management Pte. Ltd.	1.772.934.657	44.323.366.425	32,59
3. Matthew Owen Marsden	160.975.197	4.024.379.925	2,96
4. Alvin Jude Rafferty	33.593.951	839.848.775	0,62
5. Andri Utama Putra	38.000.000	950.000.000	0,70
6. Bambang Susilo	38.000.000	950.000.000	0,70
7. Radius Suharta	38.000.000	950.000.000	0,70
8. Bima Kurniawan	38.000.000	950.000.000	0,70
9. Antonius Andy Wijaya	25.000.000	625.000.000	0,46
10. Atik Pilihanto	25.000.000	625.000.000	0,46
11. Eko Prasudi Widiyanto	25.000.000	625.000.000	0,46
12. Eko Prasetyo	10.100.000	252.500.000	0,19
13. Rio Aseptia	10.100.000	252.500.000	0,19
14. Muhammad Ray Ramadhan	10.100.000	252.500.000	0,19
15. Junior Lazuardi	10.100.000	252.500.000	0,19
16. Augusta Bogie Satria Nugroho	5.300.000	132.500.000	0,09
17. Victor Christian Mamuaya	6.300.000	157.500.000	0,11
18. Henky Tornado	3.800.000	95.000.000	0,06
19. Doni Mora	4.500.000	112.500.000	0,08
20. Chia Ping Boon	19.000.000	475.000.000	0,35
21. Lim Juat Chong	19.000.000	475.000.000	0,35
22. Mariusz Marcinkiewicz	8.700.000	217.500.000	0,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.440.839.902	136.020.997.550	100,00
Saham Dalam Portepel	16.322.519.706	408.062.992.650	-

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) Setiap Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	21.763.359.608	544.083.990.200		21.763.359.608	544.083.990.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. INV Management Pte. Ltd.	3.139.336.097	78.483.402.425	57,70	3.139.336.097	78.483.402.425	48,67
2. MB Investment Management Pte. Ltd.	1.772.934.657	44.323.366.425	32,59	1.772.934.657	44.323.366.425	27,49
3. Andri Utama Putra*	38.000.000	950.000.000	0,70	38.000.000	950.000.000	0,59
4. Bambang Susilo*	38.000.000	950.000.000	0,70	38.000.000	950.000.000	0,59
5. Bima Kurniawan*	38.000.000	950.000.000	0,70	38.000.000	950.000.000	0,59
6. Eko Prasudi Widiyanto*	25.000.000	625.000.000	0,46	25.000.000	625.000.000	0,39
7. Doni Mora*	4.500.000	112.500.000	0,08	4.500.000	112.500.000	0,07
8. lain-lain (dibawah 5%)	351.475.197	8.786.879.925	7,07	351.475.197	8.786.879.925	5,97
9. Masyarakat	-	-	-	1.008.734.800	25.218.370.000	15,64
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.440.839.902	136.020.997.550	100,00	6.449.574.702	161.239.367.550	100,00

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Saham Dalam Portepel	16.322.519.706	408.062.992.650		15.313.784.906	382.844.622.650	

***Keterangan:**

Berdasarkan Pasal 22 UU P2SK, adapun pemegang saham Perseroan yang merupakan Afiliasi, antara lain:

1. Andri Utama Putra : Presiden Direktur Perseroan
2. Bambang Susilo : Direktur Perseroan
3. Bima Kurniawan : Direktur Perseroan
4. Doni Mora : Direktur Perseroan
5. Eko Prasudi Widiyanto : Direktur Perseroan

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 504.367.400 (lima ratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) Waran Seri I Atas Nama atau sebesar 9,27% (sembilan koma dua tujuh persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran disampaikan. Waran Seri I ini diberikan secara Cuma-Cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan, 4 Agustus 2023. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Perjanjian Penerbitan Waran Seri I.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan harga pelaksanaan Rp400,- (empat ratus Rupiah) per saham selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 8 Agustus 2024 – 6 Agustus 2027. Pemegang Waran tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi, berikut proforma struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I:

Keterangan	Modal Saham Dengan Nilai Nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) Setiap Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Waran Seri I			Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	21.763.359.608	544.083.990.200		21.763.359.608	544.083.990.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
1. INV Management Pte. Ltd.	3.139.336.097	78.483.402.425	48,67	3.139.336.097	78.483.402.425	45,14
2. MB Investment Management Pte. Ltd.	1.772.934.657	44.323.366.425	27,49	1.772.934.657	44.323.366.425	25,50
3. Andri Utama Putra*	38.000.000	950.000.000	0,59	38.000.000	950.000.000	0,55
4. Bambang Susilo*	38.000.000	950.000.000	0,59	38.000.000	950.000.000	0,55
5. Bima Kurniawan*	38.000.000	950.000.000	0,59	38.000.000	950.000.000	0,55
6. Eko Prasudi Widiyanto*	25.000.000	625.000.000	0,39	25.000.000	625.000.000	0,36
7. Doni Mora*	4.500.000	112.500.000	0,07	4.500.000	112.500.000	0,06
8. lain-lain (dibawah 5%)	351.475.197	8.786.879.925	5,97	351.475.197	8.786.879.925	5,53
9. Masyarakat	1.008.734.800	25.218.370.000	15,64	1.008.734.800	25.218.370.000	14,51
10. Waran Seri I	-	-	-	504.367.400	12.609.185.000	7,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	6.449.574.702	161.239.367.550	100,00	6.953.942.102	173.848.552.550	100,00
Saham Dalam Portepel	15.313.784.906	382.844.622.650		14.809.417.506	370.235.437.650	

***Keterangan:**

Berdasarkan Pasal 22 UU P2SK, adapun pemegang saham Perseroan yang merupakan Afiliasi, antara lain:

1. Andri Utama Putra : Presiden Direktur Perseroan
2. Bambang Susilo : Direktur Perseroan
3. Bima Kurniawan : Direktur Perseroan
4. Doni Mora : Direktur Perseroan
5. Eko Prasudi Widiyanto : Direktur Perseroan

Keterangan mengenai Waran Seri I di bawah ini merupakan rangkuman dari Pernyataan Penerbitan Waran Seri I, namun bukan merupakan salinan selengkapnya dari keseluruhan ketentuan dan persyaratan yang tercantum di dalam Perjanjian Penerbitan Waran Seri I tersebut. Adapun salinan selengkapnya dapat diperoleh atau dibaca di kantor Perseroan dan kantor Pengelola Administrasi Waran Seri I pada setiap hari dan jam kerja.

Keterangan Tentang Waran Seri I

A. Definisi

- a. Waran Seri I berarti Surat kepemilikan Waran Seri I atau bukti kepemilikan yang merupakan tanda bukti yang memberikan hak kepada pemegangnya yang untuk pertama kalinya merupakan pemegang saham yang berasal dari saham yang ditawarkan/dijual melalui penawaran umum, untuk membeli saham hasil pelaksanaan sesuai dengan syarat dan kondisi serta penerbitan Waran Seri I dan dengan memperhatikan peraturan pasar modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.
- b. Surat Kolektif Waran Seri I berarti bukti pemilikan sejumlah Waran Seri I dalam kelipatan tertentu yang diterbitkan oleh Perseroan yang memuat nama, alamat, dan jumlah Waran Seri I serta keterangan-keterangan lain sehubungan dengan Waran Seri I.
- c. Pelaksanaan Waran Seri I berarti pelaksanaan hak membeli saham baru oleh Pemegang Waran Seri I.
- d. Harga pelaksanaan berarti harga setiap saham yang harus dibayar pada saat pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham Perseroan.
- e. Saham Hasil Pelaksanaan berarti saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak-hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan hak-hak pemegang saham Perseroan lainnya, dengan memperhatikan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia yang berlaku.

B. Hak Atas Waran Seri I

- a. Setiap Pemegang Saham yang memiliki 2 (dua) saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada tanggal penjatahan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma.
- b. Selama Waran Seri I belum dilaksanakan (belum di-*exercise*) menjadi saham baru, Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas pembagian dividen Perseroan, tidak berhak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari kapitalisasi laba, dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan di kemudian hari.

C. Bentuk dan Denominasi

Ada 2 (dua) bentuk Waran Seri I yang akan diterbitkan oleh Perseroan, yaitu:

- a. Bagi Pemegang Yang Berhak yang sudah melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Kolektif Waran Seri I, melainkan akan didistribusikan secara elektronik dengan melakukan pengkreditan Waran Seri I ke Rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perseroan Efek yang ditunjuk masing masing Pemegang Waran Seri I di KSEI dan dibuktikan dengan Surat Konfirmasi Waran Seri I;
- b. Bagi Pemegang Yang Berhak yang belum melakukan penitipan sahamnya secara kolektif pada KSEI, maka Waran Seri I akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Waran Seri I yang mencantumkan nama dan alamat pemegang waran, jumlah waran yang dimiliki, jumlah waran yang dapat dipergunakan untuk membeli saham dan keterangan lain yang diperlukan;
- c. Setelah lewat Periode Pelaksanaan Waran Seri I, maka setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku lagi untuk keperluan apapun juga dan Pemegang Waran tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi apapun dalam jumlah berapapun dan dengan alasan apapun kepada Perseroan dan Perseroan tidak lagi mempunyai kewajiban untuk menerbitkan Saham Baru Hasil Pelaksanaan Waran Seri I.

D. Hak Untuk Membeli Saham Perseroan dan Jangka Waktu Waran Seri I

- a. Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham biasa dengan cara melakukan Pelaksanaan Waran Seri I, setiap Hari Kerja selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp400,- (empat ratus Rupiah) setiap saham, dengan memperhatikan ketentuan ketentuan Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pemegang Waran Seri I berhak melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham selama Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I yang tanggalnya sebagaimana dimuat dalam Prospektus yang diterbitkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
- c. Setiap Waran Seri I Yang Belum Dilaksanakan melalui cara sebagaimana ditentukan selambat-lambatnya tanggal 6 Agustus 2027 pada pukul 16.00 (enam belas) WIB pada Tanggal Jatuh Tempo, menjadi batal dan tidak berlaku lagi untuk kepentingan apapun juga dan Pemegang Waran Seri I tersebut tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

E. Jangka Waktu Waran Seri I

Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 12 (dua belas) bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 6 Agustus 2027 pada pukul 16:00 WIB.

F. Prosedur Pelaksanaan Waran Seri I

- a. Pada jam kerja yang umumnya berlaku selama Jangka Waktu Pelaksanaan, setiap Pemegang Waran Seri I dapat melakukan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru yang dikeluarkan dari saham portepel yang dipegangnya menjadi Saham Hasil Pelaksanaan berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Akta Penerbitan Waran Seri I.
- b. Pelaksanaan Waran Seri I dapat dilakukan di kantor pusat Pengelola Administrasi Waran Seri I.
- c. Pada Tanggal Pelaksanaan, Pemegang Waran Seri I yang bermaksud untuk melaksanakan Waran Seri I nya menjadi saham baru, wajib menyerahkan Dokumen Pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I. Formulir Pelaksanaan dilekatkan pada setiap Surat Kolektif Waran Seri I. Bukti Pembayaran Harga Pelaksanaan adalah bukti telah dibayarnya harga pelaksanaan oleh Pemegang Waran Seri I kepada Perseroan. Atas penyerahan Dokumen Pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan bukti telah diterimanya Dokumen Pelaksanaan.
- d. Dokumen Pelaksanaan yang sudah diterima oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I tidak dapat ditarik kembali.
- e. Pemegang Waran Seri I yang tidak menyerahkan Dokumen Pelaksanaan dalam masa berlaku Pelaksanaan tidak berhak lagi melaksanakan Pelaksanaan Waran Seri I menjadi Saham.
- f. Dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen pelaksanaan serta kebenaran tentang terdaftaranya pemegang Waran Seri I dalam Daftar Pemegang Waran Seri I. Pada hari kerja berikutnya, Pengelola Administrasi Waran Seri I meminta konfirmasi dari:
 1. Bank dimana Perseroan membuka rekening khusus, mengenai pembayaran atas harga pelaksanaan telah diterima dengan baik, dan
 2. Perseroan mengenai dapat atau tidaknya Waran Seri I dilaksanakan.
- g. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerimaan dokumen pelaksanaan, Pengelola Administrasi Waran Seri I memberikan konfirmasi kepada Pemegang Waran Seri I mengenai diterimanya atau ditolaknya permohonan untuk pelaksanaan. Selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah Pengelola Administrasi Waran Seri I menerima persetujuan dari Perseroan, maka para pemegang Waran Seri I dapat menukarkan bukti penerimaan dokumen pelaksanaan dengan saham hasil pelaksanaan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I dan Pengelola Administrasi Waran Seri I wajib menyerahkan saham hasil pelaksanaan kepada pemegang Waran Seri I.
- h. Dalam hal pelaksanaan sebagian jumlah Waran Seri I yang diwakili dalam Surat Kolektif Waran Seri I, terlebih dahulu harus diadakan pemecahan atas sertifikat tersebut maka pemecahan atas sertifikat tersebut menjadi biaya pemegang Waran Seri I yang bersangkutan. Saham hasil Pelaksanaan memberikan hak kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham yang mempunyai hak yang sama seperti saham lainnya dalam Perseroan.
- i. Perseroan berkewajiban untuk menanggung segala biaya sehubungan dengan pelaksanaan Waran Seri I menjadi saham baru dan pencatatan saham hasil pelaksanaan pada BEI.
- j. Pemegang Waran Seri I yang akan melaksanakan Waran Seri I menjadi Saham Biasa atas nama, dapat melakukan pembayaran harga pelaksanaan dengan cek, bilyet giro, bank transfer, pemindah bukuan ataupun setoran tunai (*in good fund*) kepada rekening Perseroan:

Bank: PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
 Cabang: Jakarta Ambassador
 a/n PT ITSEC Asia Tbk
 No. Rek. 102 001 126 3008

G. Penyesuaian Harga Pelaksanaan dan Jumlah Waran Seri I

Berdasarkan POJK 32/2015, jumlah Waran Seri I tidak akan mengalami penyesuaian kecuali dalam hal terjadi sebagai berikut di bawah ini:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (stock split)

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Pembagian saham bonus atau saham dividen, konversi atau efek lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{C}{(C + D)} \times Z$$

C = jumlah saham yang disetor penuh dan beredar sebelum pembagian saham bonus, saham dividen

D = jumlah saham baru yang disetor penuh dan beredar yang merupakan hasil pembagian saham bonus atau saham dividen atau penambahan saham akibat konversi

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

Penyesuaian tersebut mulai berlaku pada saat saham bonus atau saham dividen mulai berlaku efektif yang akan diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas.

Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas

$$\text{Harga Waran Seri I baru} = \frac{(E - F)}{E} \times Z$$

E = harga pasar saham sebelum pengeluaran pengumuman penawaran umum terbatas

Z = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

F = harga teoritis *right* untuk 1 (satu) saham yang dihitung dengan formula:

$$F = \frac{(E - G)}{(H + 1)}$$

G = harga pembelian 1 (satu) saham berdasarkan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

H = jumlah saham yang diperlukan untuk memesan tambahan 1 (satu) saham dengan hak memesan efek terlebih dahulu (*right*)

Penyesuaian ini berlaku efektif 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum Terbatas.

Apabila Harga Pelaksanaan baru dan jumlah Waran baru karena penyesuaian menjadi pecahan maka dilakukan pembulatan ke bawah.

Penyesuaian Harga Pelaksanaan Waran tersebut di atas harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, khususnya bahwa Harga Pelaksanaan Waran tidak boleh kurang dari harga teoritis saham.

Setelah Penyesuaian terhadap jumlah Waran menjadi efektif, Perseroan akan mengumumkan tanggal penutupan Daftar Pemegang Waran dan periode penyerahan Surat Kolektif Waran tambahan hasil Penyesuaian tersebut.

H. Pengalihan Hak Atas Waran Seri I

Pemegang Waran Seri I dapat mengalihkan hak atas Waran Seri I dengan melakukan jual-beli, hibah dan warisan. Dengan melakukan transaksi jual beli di Bursa setiap orang dapat memperoleh hak atas Waran Seri I dan dapat didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I dengan mengajukan bukti-bukti yang sah mengenai hak yang diperolehnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Setiap orang yang memperoleh hak atas Waran Seri I karena hibah maupun pewarisan akibat kematian dari seorang Pemegang Waran Seri I atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I beralih, dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, untuk didaftarkan sebagai Pemegang Waran Seri I.

Dengan mengajukan bukti-bukti haknya dan dengan membayar biaya administrasi dan biaya lainnya yang dikeluarkan untuk pengalihan Waran Seri I, permohonan tersebut harus mendapat persetujuan dari Perseroan.

Apabila terjadi peralihan hak atas Waran Seri I yang dikarenakan hal-hal tersebut di atas yang mengakibatkan kepemilikan Waran Seri I oleh beberapa orang dan/atau badan maka kepada orang atau pihak atau badan hukum yang memiliki secara bersama-sama tersebut berkewajiban untuk menunjuk secara tertulis salah seorang diantara mereka sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil tersebut yang akan dimasukkan ke dalam Daftar Pemegang Waran Seri I dan wakil ini akan dianggap sebagai pemegang yang sah dari Waran Seri I yang bersangkutan dan berhak untuk melaksanakan dan menggunakan semua hak yang diberikan kepada Pemegang Waran Seri I.

Pengelola Administrasi Waran Seri I hanya dapat melakukan pendaftaran pada Daftar Pemegang Waran Seri I apabila telah menerima dokumen pendukung dengan baik dan disetujui oleh Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar modal yang berlaku.

Pendaftaran peralihan hak atas Waran Seri I hanya dapat dilakukan oleh Perseroan melalui Pengelola Administrasi Waran Seri I yang akan bertindak untuk dan atas nama Perseroan dengan memberikan catatan mengenai peralihan hak tersebut di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berdasarkan surat-surat yang cukup membuktikan mengenai pengalihan hak, termasuk bukti akta hibah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan telah disetujui oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Peralihan hak atas Waran Seri I harus dicatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I maupun pada Surat Kolektif Waran Seri I yang bersangkutan, dan mulai berlaku setelah pendaftaran dari peralihan tersebut tercatat di dalam Daftar Pemegang Waran Seri I.

I. Penggantian Waran Seri I

Apabila Surat Kolektif Waran Seri I rusak atau tidak dapat dipakai lagi atau karena sebab lain yang ditetapkan oleh Perseroan, atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada Pengelola Administrasi Waran Seri I, maka Pengelola Administrasi Waran Seri I akan memberikan pengganti Surat Kolektif Waran Seri I yang sudah tidak dapat dipakai lagi dengan yang baru, dimana Surat Kolektif Waran Seri I yang asli harus dikembalikan kepada Perseroan.

Jika Surat Kolektif Waran Seri I hilang atau musnah maka untuk Surat kolektif Waran Seri I tersebut akan diterbitkan Surat Kolektif Waran Seri I yang baru dengan terlebih dahulu menyerahkan bukti-bukti yang cukup dengan jaminan-jaminan yang dianggap perlu oleh Pengelola Administrasi Waran Seri I serta diumumkan di BEI dengan memperhatikan peraturan Pasar Modal.

Perseroan dan/atau Pengelola Administrasi Waran Seri I berhak untuk menetapkan dan menerima jaminan-jaminan tentang pembuktian dan penggantian kerugian kepada pihak yang meminta pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang dianggap perlu untuk mencegah kerugian yang akan diderita Perseroan.

Perseroan berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada OJK mengenai setiap penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran penggantian Surat Kolektip Waran Seri I yang hilang atau rusak ditanggung dan dibayar oleh mereka yang meminta penggantian Surat Kolektip Waran Seri I tersebut.

J. Pengelola Administrasi Waran Seri I

Perseroan telah menunjuk Pengelolaan Administrasi Waran Seri I sebagai berikut:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5
Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading
Jakarta Utara
Tel. : (021) 29745222
Fax. : (021) 29289961

Dalam hal ini Pengelola Administrasi Waran Seri I bertugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi Waran Seri I dan pengelolaan administrasi Saham Hasil pelaksanaan Waran Seri I.

K. Status Saham Hasil Pelaksanaan

Saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas hasil pelaksanaan Waran Seri I, dicatat sebagai saham yang telah disetor penuh yang menjadi bagian dari modal saham Perseroan, serta kepada pemegang saham yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan akan mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan Waran Seri I dalam Daftar Pemegang saham dilakukan pada tanggal pelaksanaan.

L. Penggabungan atau Peleburan

- a. Apabila dalam Jangka Waktu Waran Seri I terjadi penggabungan atau peleburan maka dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah keputusan tentang penggabungan atau peleburan tersebut diambil Perseroan berkewajiban memberitahukan kepada Pemegang Waran Seri I dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran nasional dan salah satunya beredar di tempat kedudukan Perseroan.
- b. Dalam hal Perseroan melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain maka perusahaan yang menerima penggabungan atau peleburan yang merupakan hasil penggabungan atau peleburan Perseroan wajib bertanggung jawab dan tunduk pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Waran Seri I yang berlaku dalam Syarat Dan Kondisi serta Penerbitan Waran Seri I.

M. Pemberitahuan Kepada Pemegang Waran Seri I

Setiap pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I adalah sah jika diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia, satu di antaranya berperedaran nasional dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, atau apabila tidak ditentukan lain dalam jangka waktu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum suatu tindakan atau peristiwa yang mensyaratkan adanya pemberitahuan kepada Pemegang Waran Seri I menjadi efektif. Pemberitahuan tersebut di atas wajib dilakukan oleh Perseroan. Setiap pemberitahuan dianggap telah disampaikan kepada Pemegang Waran Seri I pada tanggal pertama kali diumumkan dalam surat kabar tersebut di atas.

N. Pernyataan dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan dengan ini menyatakan dan menyetujui bahwa setiap pemegang Waran Seri I berhak atas segala manfaat dari semua janji dan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Penerbitan Waran Seri I dan Peraturan Pasar Modal dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia.

- b. Perseroan dengan ini menyatakan bahwa atas pelaksanaan Waran Seri I, baik sebagian maupun seluruh Waran Seri I, setiap waktu selama jangka waktu pelaksanaan, Perseroan wajib menerbitkan, menyerahkan dan menyediakan saham hasil pelaksanaan dalam jumlah yang cukup atau jumlah yang sesuai dengan Penerbitan Waran Seri I dengan memperhatikan ketentuan dalam Penerbitan Waran Seri I dan ketentuan Kustodian Sentral Efek Indonesia jika masuk dalam penitipan kolektif.

O. Perubahan

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Emiten dapat mengubah Penerbitan Waran kecuali mengenai Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I dan Harga Pelaksanaan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Waran yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Waran Yang Belum Dilaksanakan.
- b. Emiten wajib mengumumkan setiap perubahan Penerbitan Waran sesuai dengan Syarat Dan Kondisi pada Pernyataan Penerbitan Waran Seri I selambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum ditandatangani Perubahan Penerbitan Waran dan bilamana selambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah pengumuman tersebut, pemegang Waran lebih dari 50% (lima puluh persen) yang belum dilaksanakan tidak menyatakan keberatan secara tertulis atau tidak memberikan tanggapan secara tertulis maka Pemegang Waran dianggap telah menyetujui usulan perubahan tersebut.
- c. Setiap perubahan Penerbitan Waran harus dilakukan dengan akta yang dibuat secara notariil mengenai perubahan tersebut dan perubahan tersebut mengikat Emiten dan Pemegang Waran dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Penerbitan Waran, Syarat Dan Kondisi, serta Peraturan Pasar Modal.

P. Hukum yang berlaku

Tunduk pada hukum yang berlaku di Republik Indonesia

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 1.008.734.800 (satu miliar delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) saham atau sebesar 15,64% (lima belas koma enam empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini. Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 5.440.839.902 (lima miliar empat ratus empat puluh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 6.449.574.702 (enam miliar empat ratus empat puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus dua) saham, atau sebesar 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Bersamaan dengan pencatatan saham ini akan dicatatkan pula sebanyak 504.367.400 (lima ratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) Waran Seri I. Dengan demikian, jumlah saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya 6.953.942.102 (enam miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus dua) saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-05307/BEI.PP2/07-2023 tanggal 5 Juli 2023 apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPPSK.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif. Peraturan OJK No. 25/2017 memuat pengecualian bahwa larangan tersebut tidak berlaku bagi kepemilikan atas efek bersifat ekuitas, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau lembaga yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan memiliki kewenangan melakukan penyetoran perbankkan.

SELURUH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TELAH MELAKUKAN PENYETORAN MODAL PERSEROAN DENGAN HARGA DIBAWAH HARGA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 6 (ENAM) BULAN SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN PERTAMA KALI DISAMPAIKAN KEPADA OJK, SEHINGGA SELURUH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TIDAK AKAN MENGALIHKAN SEBAGIAN ATAU SELURUH KEPEMILIKAN SAHAMNYA DALAM PERSEROAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 25/2017.

Seluruh sebagaimana tersebut sebagaimana dimaksud di atas telah memahami dan menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif, Para Pemegang Saham tidak akan mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya di Perseroan, sebagaimana dituangkan dalam:

1. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Alvin Jude Rafferty;
2. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Chia Ping Boon;
3. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Mariusz Marcinkiewicz;
4. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Matthew Owen Marsden;
5. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Andri Utama Putra;
6. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Bambang Susilo;
7. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Doni Mora;
8. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Bima Kurniawan;
9. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Eko Prasudi Widiyanto;
10. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Eko Prasetyo;
11. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Muhammad Ray Ramadhan;
12. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Radius Suharta;
13. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Atik Pilihanto;
14. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Augusta Bogie Satria Nugroho;
15. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Rio Aseptia;
16. Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Henky Tornado;
17. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Victor Christian Mamuaya;
18. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh INV Management Pte. Ltd;
19. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Junior Lazuardi;
20. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Lim Juat Chong;
21. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh Antonius Andy Wijaya;
22. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 31 Maret 2023 oleh MB Investment Management Pte. Ltd;

Melalui Surat Pernyataan Patrick Rudolf Dannacher selaku pengendali Perseroan tanggal 31 Maret 2023, menyatakan tidak akan mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

Tidak terdapat saham Perseroan yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

Tidak dibutuhkan persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

Sekitar 87% (delapan puluh tujuh persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung perluasan tim *cybersecurity* di Indonesia, Singapura dan Australia, dan untuk membangun tim baru serta menyewa kantor di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, Perseroan akan menginvestasikan modal kerja untuk pemasaran, pembiayaan proyek, serta sertifikasi dan akreditasi untuk mendorong pertumbuhan pendapatan di masa depan. Selain itu, Perseroan bermaksud untuk menginvestasikan modal kerja dalam membangun tim *Research and Development* (R&D) untuk mengembangkan produk, alat, dan layanan *cybersecurity* baru, dengan detail sebagai berikut:

- Sekitar 23% (dua puluh tiga persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk mengembangkan tim *cybersecurity* yang sudah ada di Indonesia, Singapura dan Australia.
- Sekitar 15% (lima belas persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk merekrut tim baru dan untuk biaya operasional, termasuk penyewaan kantor di wilayah baru di mana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar.
- Sekitar 14% (empat belas persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang Perseroan, termasuk untuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak untuk pelanggan, dimana biaya-biaya yang timbul di awal akan dibayarkan menggunakan arus kas pada saat proyek berjalan.
- Sekitar 7% (tujuh persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk pemasaran dalam rangka mempromosikan layanan Perseroan dan menyelenggarakan simposium edukasi *cybersecurity*.
- Sekitar 2% (dua persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendapatkan akreditasi untuk kantor regional baru (sebagai contoh: ISO 27001, ISO 9001, dan CREST), dan untuk meningkatkan sertifikasi profesional para staf.
- Sekitar 23% (dua puluh tiga persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk membangun tim R&D untuk mengembangkan *Cloud-Based Managed Security Services* (MSS) untuk pasar UMKM, *Data Protection Services*, produk *cybersecurity* untuk pasar telekomunikasi, dan untuk mendukung bisnis yang sudah ada.
- Sekitar 12% (dua belas persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk membangun tim R&D untuk mengembangkan perangkat *cybersecurity* yang dibantu oleh Artificial Intelligence (AI) dan alur kerja otomatisasi yang didukung oleh AI.
- Sekitar 1% (satu persen) sebagai modal kerja untuk merekrut tim R&D untuk mengembangkan perangkat pelatihan *cybersecurity*.
- Sekitar 3% (tiga persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk penyewaan fasilitas R&D di Noble House, lantai 11, sesuai dengan perjanjian Nomor 006/LOO/GLI-MKT/II/2023 Tanggal 23 Februari 2023 antara Perseroan dan PT Graha Lestari Internusa.

Sekitar 13% (tiga belas persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk mendukung perluasan tim *cybersecurity* di Indonesia, Singapura dan Australia, serta untuk melakukan ekspansi di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, Perseroan akan menginvestasikan belanja modal untuk renovasi kantor R&D, pengembangan laboratorium *cybersecurity* di Noble House, Lantai 11, serta pembelian peralatan dan perlengkapan laboratorium, dengan detail sebagai berikut:

- Sekitar 16% (enam belas persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk pembelian laptop dan peralatan kantor dalam rangka mendukung pertumbuhan Perseroan di pasar yang ada di Indonesia, Singapura dan Australia.
- Sekitar 36% (tiga puluh enam persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk renovasi kantor, serta pembelian laptop dan peralatan kantor di wilayah-wilayah baru dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar.
- Sekitar 18% (delapan belas persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk renovasi fasilitas R&D di Noble House, lantai 11.
- Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk menambah peralatan dan perlengkapan laboratorium *cybersecurity* di Indonesia, termasuk untuk Laboratorium Keamanan OT (*Operational Technology*) dan Laboratorium Forensik Digital.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan untuk:

Sekitar 86% (delapan puluh enam persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung perluasan tim *cybersecurity* di Indonesia, Singapura dan Australia, dan untuk membangun tim baru serta menyewa kantor di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, Perseroan akan menginvestasikan modal kerja untuk pemasaran, pembiayaan proyek, serta sertifikasi dan akreditasi untuk mendorong pertumbuhan pendapatan di masa depan. Selain itu, Perseroan bermaksud untuk menginvestasikan modal kerja dalam membangun tim *Research and Development* (R&D) untuk mengembangkan produk, alat, dan layanan *cybersecurity* baru, dengan detail sebagai berikut:

- Sekitar 14% (empat belas persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk merekrut tim baru dan untuk biaya operasional di wilayah-wilayah baru dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar.
- Sekitar 13% (tiga belas persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk mengembangkan tim *cybersecurity* yang sudah ada di Indonesia, Singapura dan Australia.
- Sekitar 12% (dua belas persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang Perseroan, termasuk untuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak untuk pelanggan, dimana biaya-biaya yang timbul di awal akan dibayarkan menggunakan arus kas pada saat proyek berjalan.
- Sekitar 8% (delapan persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk pemasaran dalam rangka mempromosikan layanan Perseroan dan menyelenggarakan simposium edukasi *cybersecurity*.
- Sekitar 2% (dua persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendapatkan akreditasi untuk kantor regional baru (sebagai contoh: ISO 27001, ISO 9001, dan CREST), dan untuk meningkatkan sertifikasi profesional para staf.
- Sekitar 46% (empat puluh enam persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk biaya ekspansi tim R&D dalam mendukung produk pada lini bisnis yang ada, mengembangkan perangkat *cybersecurity* yang dibantu oleh Artificial Intelligence (AI) dan alur kerja otomatisasi yang didukung oleh AI, serta untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut pada produk dan layanan *cybersecurity* dan perlindungan data berbasis cloud.
- Sekitar 2% (dua persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk biaya tim R&D dalam rangka pengembangan alat pelatihan *cybersecurity*.
- Sekitar 3% (tiga persen) akan digunakan sebagai modal kerja untuk menyewa fasilitas R&D di Noble House, lantai 11, sesuai dengan perjanjian No. 006/LOO/GLI-MKT/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 antara Perseroan dan PT Graha Lestari Internusa.

Sekitar 14% (empat belas persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk mendukung ekspansi lebih lanjut tim *cybersecurity* di Indonesia, Singapura dan Australia, serta untuk ekspansi di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, Perseroan akan terus menginvestasikan belanja modal untuk pengembangan laboratorium *cybersecurity* dan peralatannya di Noble House, Lantai 11, dengan detail sebagai berikut:

- Sekitar 41% (empat puluh satu persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk renovasi dan perluasan kantor, serta pembelian laptop dan peralatan kantor di pasar-pasar yang sudah ada dan wilayah-wilayah baru dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar.
- Sekitar 22% (dua puluh dua persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk meningkatkan fasilitas *Security Operations Center (SOC)* Perseroan di Indonesia.
- Sekitar 37% (tiga puluh tujuh persen) akan digunakan sebagai belanja modal untuk menambah peralatan dan perlengkapan laboratorium *cybersecurity* di Indonesia, termasuk untuk Laboratorium Keamanan OT (*Operational Technology*) dan Laboratorium Forensik Digital.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pembiayaan dari pemegang saham StoneTree International Limited.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan alokasi dana yang akan diperoleh Perseroan dari Hasil Pelaksanaan Waran Seri I di atas merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("Peraturan OJK No. 42/2020"), namun demikian dikecualikan dari kewajiban prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan OJK No. 42/2020 dan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020, mengingat transaksi tersebut merupakan transaksi antara Perseroan dengan entitas anak Perseroan, ITSEC Australia Pty Ltd dan ITSEC Services Asia PTE. LTD yang sahamnya dimiliki Perseroan sebesar 100% (seratus persen) dari modal disetor masing-masing entitas anak Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk melaporkan transaksi Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ke OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah dilakukannya transaksi.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang belum digunakan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("Peraturan OJK No. 30/2015").

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 9,20% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,25%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 4,48%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,25%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,13%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 1,43%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,20%, dan jasa Notaris sebesar 0,14%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 2,32%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.

III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan pada tanggal 31 Januari 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp63.882.790.154,- yang terdiri dari:

Keterangan	Jumlah
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang usaha - pihak ketiga	3.133.981.285
Utang lain-lain – pihak ketiga	4.855.168.126
Utang lain-lain - pihak berelasi	2.828.407.365
Utang bank jangka pendek	9.321.424.963
Beban masih harus dibayar	10.141.976.139
Liabilitas kontrak	140.443.103
Utang pajak	9.673.893.503
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.246.927.329
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	43.342.221.813
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.041.646.708
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	17.498.921.633
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.540.568.341
JUMLAH LIABILITAS	63.882.790.154

Rincian Liabilitas

Pinjaman Jangka Pendek

1. Utang Usaha – Pihak Ketiga

Saldo utang usaha - pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp3.133.981.285,-. Adapun rincian atas saldo atas utang usaha - pihak ketiga adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Nextron Systems GmbH	1.539.625.604
PT Virtus Technology Indonesia	424.180.908
CV Bounga Solusi Informatika	354.989.100
Next Gen Distribution Pty Ltd	236.273.675
Atos (Australia) Pty Ltd	193.874.240
PT Westcon International Indonesia	151.165.684
PT Tatacyber Solusi Indonesia	125.250.000
Infinity Consulting Pte. Ltd.	121.963.644
Infinity Assurance LLP	112.107.996
PT Empat Kosong Delapan Indonesia	109.335.000
Secureworks Inc.	108.622.074
Jumlah Utang Usaha - Pihak Ketiga	3.133.981.285

2. Utang Lain-lain – Pihak ketiga

Saldo utang lain-lain – pihak berelasi pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp4.855.168.126,-. Adapun rincian atas saldo atas utang lain-lain – pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
The Inspira	1.005.194.870
PT Lippo General Insurance Tbk	895.158.000
PT Profindo Karya Utama	836.496.000
Radius Suharta	317.255.736
BPJS Tenaga Kerja	255.485.759
PT Grab Indonesia	201.189.625
Nasoetion & Atyanto	183.150.000
PT Optimal Tata Mandiri	143.761.650
JW Marriot	143.990.000
Venture Haven Pte. Ltd.	125.328.709
Infinity Consulting Pte. Ltd.	121.963.644
Infinity Assurance LLP	112.107.996
PT Empat Kosong Delapan Indonesia	109.335.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp100.000.000)	404.751.137
Jumlah Utang Lain-lain – Pihak Ketiga	4.855.168.126

3. Utang lain-lain Pihak berelasi

Saldo utang lain-lain – pihak berelasi pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp2.828.407.365,-. Adapun rincian atas saldo atas utang lain-lain – pihak berelasi adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
INV Management Pte. Ltd.	2.828.407.365
Jumlah Utang Lain-lain – Pihak Berelasi	2.828.407.365

4. Utang Bank Jangka Pendek

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp9.321.424.963,-. Adapun rincian atas saldo atas Utang Bank Jangka Pendek adalah sebagai berikut:

PT Bank Raya Indonesia Tbk

Pada tanggal 30 November 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan PT Bank Raya Indonesia Tbk. Pinjaman tetap reguler ini merupakan fasilitas pinjaman revolving dan memiliki tingkat suku bunga 12,5% per tahun. Fasilitas pinjaman tersebut digunakan selama 12 bulan dan maksimal plafon sebesar Rp10.000.000.000.

Fasilitas ini dijamin dengan SPK/PO/Invoice/ Tagihan atas nama PT ITSEC Asia dengan jumlah sebesar Rp12.500.000.000.

Selama fasilitas pinjaman masih berlaku, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Raya Indonesia Tbk, diantaranya:

- Melakukan merger, akuisisi, penjualan asset Perusahaan kepada pihak lain.
- Melakukan perubahan bentuk perusahaan atau merubah susunan pengurus dan komposisi permodalan.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain
- Melakukan penyertaan kepada perusahaan lain, kecuali yang telah ada saat ini.
- Mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.

- f. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau mengajukan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau mengajukan atau pailit diri debitur sendiri.

Berdasarkan Surat No. R.7/1002/NBU/03/2023 tanggal 27 Februari 2023, PT Bank Raya Indonesia Tbk menyetujui beberapa rencana Perusahaan seperti perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka.

Perusahaan bersama Bank Raya telah menandatangani addendum atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Raya sehubungan dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui Bank Raya di atas berdasarkan Perjanjian Addendum Membuka Kredit No. B.015/KWJ/PK-Int/07/2023 tanggal 24 Juli 2023, dibuat di bawah tangan.

5. Beban Masih Harus Dibayar

Saldo beban masih harus dibayar pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp10.141.976.139,-. Adapun rincian atas saldo atas beban masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Jasa profesional	3.529.295.100
Gaji, bonus dan tunjangan	3.204.421.670
Komisi penjualan	2.507.180.769
Lain-lain	901.078.600
Jumlah Beban Masih Harus Dibayar	10.141.976.139

6. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp9.673.893.503,-. Adapun rincian atas saldo atas utang pajak adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perusahaan	
Pajak penghasilan:	
Pasal 4(2)	104.523.900
Pasal 21	
2020	748.050.347
2021	2.263.152.681
2022	1.733.209.456
2023	608.344.458
Pasal 23	545.173.483
Pasal 25	3.518.008
Pasal 26	49.178.264
Pasal 29	
2020	-
2022	458.710.310
2023	265.957.806
Pajak Pertambahan Nilai	919.291.860
Surat Ketetapan Pajak	423.735.432
Entitas Anak	
Pajak penghasilan:	
Pajak pertambahan nilai	1.170.104.476
Pajak terkait karyawan	380.943.022
Jumlah Utang Pajak	9.673.893.503

7. Liabilitas Sewa

Saldo liabilitas sewa pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp6.288.574.037,-. Berikut ini adalah rincian liabilitas sewa:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas sewa	6.288.574.037
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	3.246.927.329
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	3.041.646.708

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	6.827.876.506
Penambahan	-
Penambahan bunga	57.606.692
Pembayaran	(596.909.161)
Saldo akhir	6.288.574.037

Analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Kurang dari satu tahun	3.590.144.814
Satu tahun sampai tiga tahun	3.455.119.209
Jumlah	7.045.264.023
Biaya keuangan mendatang	(756.689.986)
Sebagaimana dilaporkan	6.288.574.037

Berikut ini adalah jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian terkait sewa dengan aset hak-guna dan liabilitas sewa yang diakui:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Beban penyusutan aset hak-guna	299.224.209
Penambahan bunga atas liabilitas sewa	57.606.692
Jumlah	356.830.901

8. Liabilitas Diestimasi Atas Imbalan Kerja Karyawan

Saldo liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp17.498.921.633,. Berikut ini adalah rincian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan:

Pada tanggal 31 Januari 2023, Grup mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria KKA Riana dan Rekan No. 4171/III/23/KKA-RM pada tanggal 24 Maret 2023, dan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria KKA Riana dan Rekan No. 4108/III/23/KKA-RM pada tanggal 2 Maret 2023 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

Keterangan	31 Januari 2023
Usia pensiun	55 tahun
Tingkat kenaikan gaji	10,00%

Tingkat diskonto	7,25% per tahun
Tingkat mortalita	100% TMI IV 5%
Tingkat pengunduran diri	sampai usia 30 tahun kemudian menurun linear sampai dengan 0% pada usia 55 tahun

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Beban jasa kini	400.325.912
Beban bunga	94.795.963
Jumlah	495.121.875
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.364.948.516

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	15.638.851.242
Beban tahun berjalan	495.121.875
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial	1.364.948.516
Saldo akhir	17.498.921.633

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Dampak Terhadap Liabilitas Imbalan Pasti	
	Perubahan asumsi	
Tingkat diskonto		1%
Tingkat pertumbuhan gaji		1%

Ikatan dan Kontingensi

Ikatan

Berikut adalah perjanjian Sewa Operasi Perseroan per tanggal 31 Januari 2023 :

- (1) Berdasarkan Perjanjian Sewa Ruang Kantor No. 016/GLI-NH/LA/ITSEC/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022, PT Graha Lestari Internusa selaku pemilik ruang kantor menyetujui menyewakan ruang kantor kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 585 m² yang berlokasi di Gedung Noble House Lantai 11 unit No. 2 dan 3, Jakarta Selatan. Jangka waktu sewa adalah 1 Desember 2022 sampai dengan 30 November 2025.
- (2) Berdasarkan Akta Perjanjian Kontrak Ruko No. 6 tanggal 9 November 2017 yang telah diperpanjang dengan Akta Perjanjian Perpanjangan Kontrak Ruko No. 12 tanggal 18 Oktober 2021, Perusahaan menyetujui untuk menyewa bangunan ruko The Icon Business Park Blok J No. 006. Jangka waktu sewa adalah 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2023.

Kontingensi

Perseroan tidak memiliki kontingensi.

Pinjaman yang diterima Perseroan yang material setelah Laporan Keuangan tanggal 31 Januari 2023 .

Pada tanggal 1 Februari 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan StoneTree International Limited, pihak berelasi, dengan jumlah pokok pinjaman sebesar \$AS 750.000, yang ditransfer setiap bulan dari waktu ke waktu sesuai

kebutuhan untuk modal kerja Perusahaan dan entitas anak. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 4% per tahun dan akan dilunasi seluruhnya pada 1 Februari 2026.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 JANUARI 2023 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN TANGGAL 31 JANUARI 2023, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 31 JANUARI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANT*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca informasi data finansial yang dihadirkan di bawah ini yang berhubungan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan catatan yang menyertai laporan keuangan konsolidasian yang dihadirkan dalam Prospektus. Calon investor juga harus membaca Bab V Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen.

Ikhtisar data keuangan penting harus dibaca bersama-sama dengan dan mengacu pada laporan keuangan konsolidasian untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dan catatan atas laporan keuangan yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari: (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan, (firma anggota Allinial Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1023) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian, (ii) Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum disajikan kembali, diaudit oleh diaudit KAP Drs Bambang Sudaryono & Rekan, yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

1. Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	31 Januari 2023	2022	31 Desember 2021	2020
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	3.728.601.505	15.123.973.273	10.096.566.661	1.386.092.320
Piutang usaha - bersih				
Pihak ketiga	30.251.454.780	32.579.504.493	13.410.244.022	14.054.464.963
Pihak berelasi	-	-	-	-
Aset kontrak	10.732.984.691	8.259.710.289	4.415.789.596	671.757.120
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	546.893.275	464.581.609	318.135.928	206.421.722
Pihak berelasi	-	137.576.200	76.034.412	76.828.392
Biaya dibayar di muka	3.654.495.351	2.774.070.511	1.832.563.388	1.259.355.969
Uang muka	23.478.405.470	22.716.180.727	25.078.944.386	5.728.305.250
Biaya ditangguhkan	3.996.000.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	76.388.835.072	82.055.597.102	55.228.278.393	23.383.225.736
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan	3.925.252.656	3.560.848.768	3.132.396.147	5.688.717.268
Aset tetap – bersih	5.830.661.658	4.870.608.541	2.218.981.145	1.434.869.271
Aset hak-guna – bersih	6.521.280.252	6.859.368.312	4.485.127.380	6.273.042.675
Aset takberwujud – bersih	2.113.887.908	2.306.059.537	4.612.119.073	6.918.178.609
Uang muka investasi	-	65.625.490.346	-	-
Aset lain-lain	4.566.052.576	4.748.415.226	3.485.803.369	3.031.803.330
Jumlah Aset Tidak Lancar	22.957.135.050	87.970.790.730	17.934.427.114	23.346.611.153
JUMLAH ASET	99.345.970.122	170.026.387.832	73.162.705.507	46.729.836.889
LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)				
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang usaha - pihak ketiga	3.133.981.285	9.326.389.057	12.853.445.571	3.845.362.926
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	4.855.168.126	3.076.397.535	2.660.684.250	2.350.738.918
Pihak berelasi	2.828.407.365	147.089.596.956	67.692.818.448	49.230.208.483

	31 Januari		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Utang bank jangka pendek	9.321.424.963	9.952.226.431	-	-
Beban masih harus dibayar	10.141.976.139	7.008.085.210	6.710.235.109	3.382.545.630
Liabilitas kontrak	140.443.103	143.545.602	107.868.158	155.902.349
Utang pajak	9.673.893.503	8.705.831.886	8.377.266.522	6.935.570.773
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.246.927.329	3.258.168.423	2.104.936.569	2.191.637.869
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	43.342.221.813	188.560.241.100	100.507.254.627	68.091.966.948
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.041.646.708	3.569.708.083	2.023.537.519	3.671.742.219
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	17.498.921.633	15.638.851.242	10.512.908.135	8.542.102.057
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.540.568.341	19.208.559.325	12.536.445.654	12.213.844.276
JUMLAH LIABILITAS	63.882.790.154	207.768.800.425	113.043.700.281	80.305.811.224
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	136.020.997.550	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
Tambahan modal disetor	(70.171.144.260)	136.400.000	136.400.000	136.400.000
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	(15.319.918.317)	(16.540.283.282)	(7.585.358.405)
Defisit	(29.658.710.359)	(26.438.290.376)	(27.145.728.448)	(29.842.590.949)
Penghasilan komprehensif lain	(727.962.963)	1.379.396.100	1.168.616.956	1.215.575.019
JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	35.463.179.968	(37.742.412.593)	(39.880.994.774)	(33.575.974.335)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	99.345.970.122	170.026.387.832	73.162.705.507	46.729.836.889

2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
PENDAPATAN BERSIH	9.282.591.159	6.678.446.549	187.020.275.669	118.316.460.489	73.519.176.313
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(7.125.637.001)	(2.941.402.974)	(115.984.518.527)	(65.225.293.019)	(55.101.769.939)
LABA KOTOR	2.156.954.158	3.737.043.575	71.035.757.142	53.091.167.470	18.417.406.374
Beban umum dan administrasi	(7.616.408.277)	(5.695.359.383)	(75.687.667.820)	(55.257.751.706)	(36.975.679.196)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	2.757.149.393	(449.264.501)	(4.392.756.680)	(2.731.154.181)	(2.070.439.454)
RUGI USAHA	(2.702.304.726)	(2.407.580.309)	(9.044.667.358)	(4.897.738.417)	(20.628.712.276)
Pendapatan keuangan	278.324.261	8.936.919	1.594.145.291	1.020.026.512	3.333.465.859
Beban keuangan	(594.596.928)	(31.587.075)	(1.429.878.176)	(462.506.337)	(376.570.124)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(3.018.577.393)	(2.430.230.465)	(8.880.400.243)	(4.340.218.242)	(17.671.816.541)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(265.957.806)	-	(2.461.988.178)	-	-

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Tanggungan	64.115.216	516.508.051	487.903.149	(2.569.565.703)	2.285.384.714
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(201.842.590)	516.508.051	(1.974.085.029)	(2.569.565.703)	2.285.384.714
RUGI BERSIH SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	(3.220.419.983)	(1.913.722.414)	(10.854.485.272)	(6.909.783.945)	(15.386.431.827)
Efek Penyesuaian Proforma	-	(65.819.036)	11.561.923.344	9.606.646.446	5.261.282.019
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	(3.220.419.983)	(1.979.541.450)	707.438.072	2.696.862.501	(10.125.149.808)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(1.364.948.516)	(1.147.079.016)	270.229.672	(60.202.645)	250.698.709
Pajak penghasilan terkait	300.288.674	252.357.384	(59.450.528)	13.244.582	(55.153.716)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Efek translasi mata uang asing	(1.042.699.221)	-	-	-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	(2.107.359.063)	(894.721.632)	210.779.144	(46.958.063)	195.544.993
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	(5.327.779.046)	(2.874.263.082)	918.217.216	2.649.904.438	(9.929.604.815)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	(0,59)	(19,80)	7,07	26,97	(101,25)

*tidak diaudit

3. Rasio

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Rasio Profitabilitas					
Marjin Laba Kotor ^A	23,24%	55,96%	37,98%	44,87%	25,05%
Marjin Laba Bersih ^B	-34,69%	-29,64%	0,38%	2,28%	-13,77%
Laba Bersih ^C /Jumlah Ekuitas	-108,97%	N/A	N/A	N/A	N/A
Laba Bersih ^C /Jumlah Aset	-38,90%	-30,70%	0,42%	3,69%	-21,67%
Rasio Likuiditas					
Rasio Kas ^D (x)	0,09	0,03	0,08	0,10	0,02
Rasio Lancar ^E (x)	1,76	0,48	0,44	0,55	0,34
Rasio Solvabilitas					
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x)	0,64	1,55	1,22	1,55	1,72
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x)	1,80	-2,83	-5,50	-2,83	-2,39
Rasio Cakupan Utang atau Debt Service Coverage Ratio (DSCR) ^G (x)	-9,01	-34,01	-0,85	0,64	-6,55
Rasio Cakupan Bunga atau Interest Coverage Ratio (ICR) ^H (x)	-4,08	-75,94	-5,21	-8,38	-45,93

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Pertumbuhan^E					
Pendapatan Bersih	38,99%	8,57%	58,07%	60,93%	52,07%
Laba Kotor	-42,28%	-39,31%	33,80%	188,27%	22,78%
Laba Bersih	62,69%	102,18%	-73,77%	126,64%	-219,57%
Jumlah Aset	-41,57%	5,76%	132,39%	56,57%	115,72%
Jumlah Liabilitas	-69,25%	5,85%	83,80%	40,77%	54,92%
Ekuitas	193,96%	-6,03%	5,36%	-18,78%	-11,27%

A: Marjin laba kotor dihitung dari laba (rugi) bruto dibagi pendapatan

B: Marjin laba bersih dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi pendapatan

C: Laba bersih merupakan laba (rugi) tahun berjalan/ laba (rugi) periode berjalan yang disetahunkan

D: Rasio Kas merupakan kas dan setara kas dibagi total liabilitas jangka pendek

E: Rasio Lancar total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek

F: Rasio Pertumbuhan dihitung dengan membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada periode sebelumnya untuk pendapatan bersih, laba kotor, dan laba bersih, serta membandingkan kenaikan akun terkait dengan saldo akun pada tahun sebelumnya untuk jumlah aset, jumlah liabilitas, dan ekuitas.

G: Rasio Cakupan Utang merupakan EBITDA yang disetahunkan dibagi total liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan beban pendanaan sewa yang disetahunkan dan beban pendanaan yang disetahunkan.

H: Rasio Cakupan Bunga merupakan laba sebelum beban pendanaan dan pajak dibagi total beban pendanaan sewa dan beban pendanaan.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisa dan Pembahasan Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang diambil dari: (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan, (firma anggota Allinial Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1023) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi, (ii) Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum disajikan kembali, diaudit oleh diaudit KAP Drs Bambang Sudaryono & Rekan, yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

Analisa dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.

1. Umum

PT ITSEC ASIA, Tbk ("**Perseroan**"), berkedudukan di Jakarta Selatan dengan kantor pusat beralamat di Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Timur, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian No. 7 tanggal 12 April 2010, dibuat di hadapan Iman Refizal, SH, MHum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menhukham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-23544.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034711.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010 serta telah diumumkan pada Berita Negara Nomor: 29, dan Tambahan Berita Negara No. 9911 tanggal 12 April 2011. ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Sejak didirikan, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan Anggaran Dasar Perseroan terakhir diubah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 77 tanggal 28 Februari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014658.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0048062.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0098452 tanggal 3 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0048062.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023, ("**Akta Nomor 77 tanggal 28 Februari 2023**").

2. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Sampai tanggal laporan keuangan audit Perseroan diterbitkan, tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi usaha Perseroan.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Hasil Usaha dan Operasi Perseroan

Faktor-faktor utama yang secara historis mempengaruhi, dan akan tetap mempengaruhi, kinerja operasional konsolidasian Perseroan adalah:

Kemampuan Perseroan Membangun dan Memelihara Hubungan Dengan Pelanggan

Perseroan senantiasa membangun dan memelihara hubungan baik dengan para pelanggan. Sebagai contoh adalah dengan salah satu klien dari group perbankan terbesar di Indonesia, dimana jumlah pendapatan dari klien tersebut pada tahun 2022 meningkat 126% dibandingkan dengan tahun 2021.

Kemampuan Perseroan Untuk Menarik, Mempertahankan, dan Meningkatkan Penjualan

Perseroan senantiasa menjaga dan meningkatkan pertumbuhan penjualannya dari tahun ke tahun. Dalam 3 (tiga) tahun terakhir penjualan yang telah dibukukan oleh Perseroan selalu mengalami peningkatan di setiap tahunnya, dengan rata-rata pertumbuhan penjualan setiap tahunnya sebesar 57%.

Kemampuan Perseroan Mengelola Biaya dengan Memanfaatkan Skala Ekonomis

Perseroan senantiasa berusaha untuk mengelola biaya operasional secara efisien melalui pemanfaatan skala ekonomi. Pemanfaatan skala ekonomi lebih banyak berasal dari internal Perseroan. Contoh yang dapat diberikan adalah dengan menyebarkan biaya fungsi bisnis ke lebih banyak output terutama biaya-biaya administrasi dan umum. Kemudian untuk biaya sumber daya manusia yang merupakan komponen terbesar dari biaya langsung, Perseroan memiliki suatu instrumen yang memastikan agar semua tenaga kerja langsung teralokasi ke setiap *output* atau "*project*". Dengan sistem ini dapat dihindari adanya tenaga kerja langsung yang tidak teralokasi ke sumber pendapatan.

4. Analisa Operasi per Segmen

Perseroan bergerak dalam lima segmen usaha, yang terdiri dari (i) Jasa Pengelolaan Fraud / *Fraud Management Services*; (ii) Pengujian Penetrasi dan Keamanan Aplikasi / *Penetration Testing and Application Security*; (iii) Tatakelola, Risiko dan Kepatuhan / *Governance Risk Compliance* (iv) *Managed Security Services (MSS)*; dan (v) Keamanan Telekomunikasi / *Telco Security*.

Pada tanggal 31 Januari 2023, Jasa Pengujian Penetrasi dan Keamanan Aplikasi menghasilkan Rp4.016.094.569, atau 43,3% dari total pendapatan Perseroan dan Jasa MSS menghasilkan Rp5.266.496.590 atau 56,7% dari total pendapatan Perseroan.

Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, Jasa Pengelolaan Fraud menghasilkan Rp53.834.234.329, atau 28,8% dari total pendapatan Perseroan, Jasa Pengujian Penetrasi dan Keamanan Aplikasi menghasilkan Rp67.803.002.273, atau 36,3% dari total pendapatan Perseroan, Jasa MSS menghasilkan Rp56.047.955.888 atau 30% dari total pendapatan Perseroan.

Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, Jasa Pengelolaan Fraud menghasilkan Rp19.373.112.144, atau 16,4% dari total pendapatan Perseroan, Jasa Pengujian Penetrasi dan Keamanan Aplikasi menghasilkan Rp50.287.743.898, atau 42,5% dari total pendapatan Perseroan, Jasa MSS menghasilkan Rp47.184.417.835 atau 39,9% dari total pendapatan Perseroan.

Untuk Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, Jasa Pengujian Penetrasi dan Keamanan Aplikasi menghasilkan Rp26.987.934.638, atau 36,7% dari total pendapatan Perseroan, Jasa MSS menghasilkan Rp40.196.400.008 atau 67,14% dari total pendapatan Perseroan.

Tabel berikut ini menyajikan pendapatan yang dihasilkan dari lima segmen usaha Perseroan pada periode satu bulan yang berakhir tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, dan pada tiga tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam Rupiah)

	<u>31 Januari</u>		<u>31 Desember</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Jasa Pengelolaan Fraud / <i>Fraud Management Services</i>	-	53.834.234.329	19.373.112.144	-
Pengujian Penetrasi dan Keamanan Aplikasi / <i>Penetration Testing and Application Security</i>	4.016.094.569	67.803.002.273	50.287.743.898	26.987.934.638
Tatakelola, Risiko dan Kepatuhan / <i>Governance Risk Compliance</i>	-	7.682.220.571	1.471.186.612	6.334.841.667
<i>Managed Security Services</i>	5.266.496.590	56.047.955.888	47.184.417.835	40.196.400.008

	31 Januari		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Keamanan Telekomunikasi / Telco Security	-	1.652.862.608	-	-
Total Pendapatan	9.282.591.159	187.020.275.669	118.316.460.489	73.519.176.313

5. Analisa Operasi Geografis

Perseroan beroperasi pada tiga negara yaitu Indonesia, Singapore dan Australia.

Pada tanggal 31 Januari 2023, dan pada tiga tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, Indonesia memberikan kontribusi pendapatan terbesar Perseroan dengan penghasilan masing-masing sebesar Rp5.586.997.475, Rp136.626.196.785, Rp78.804.972.639, Rp48.763.290.040 atau 60,2%, 73,1%, 66,6%, 66,3% dari total pendapatan Perseroan.

Tabel berikut ini menyajikan pendapatan Perseroan yang dihasilkan dari tiga negara tersebut pada periode satu bulan yang berakhir tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, dan pada tiga tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020:

(dalam Rupiah)

	31 Januari		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Indonesia	5.586.997.475	136.626.196.785	78.804.972.639	48.763.290.040
Singapore	3.113.204.620	37.783.426.304	30.955.316.952	18.040.606.023
Australia	582.389.064	12.610.652.580	8.556.170.898	6.715.280.250
Total Pendapatan	9.282.591.159	187.020.275.669	118.316.460.489	73.519.176.313

6. Analisa Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Analisa Perseroan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Januari 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
PENDAPATAN BERSIH	9.282.591.159	6.678.446.549	187.020.275.669	118.316.460.489	73.519.176.313
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(7.125.637.001)	(2.941.402.974)	(115.984.518.527)	(65.225.293.019)	(55.101.769.939)
LABA KOTOR	2.156.954.158	3.737.043.575	71.035.757.142	53.091.167.470	18.417.406.374
Beban umum dan administrasi	(7.616.408.277)	(5.695.359.383)	(75.687.667.820)	(55.257.751.706)	(36.975.679.196)
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	2.757.149.393	(449.264.501)	(4.392.756.680)	(2.731.154.181)	(2.070.439.454)
RUGI USAHA	(2.702.304.726)	(2.407.580.309)	(9.044.667.358)	(4.897.738.417)	(20.628.712.276)
Pendapatan keuangan	278.324.261	8.936.919	1.594.145.291	1.020.026.512	3.333.465.859
Beban keuangan	(594.596.928)	(31.587.075)	(1.429.878.176)	(462.506.337)	(376.570.124)
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	(3.018.577.393)	(2.430.230.465)	(8.880.400.243)	(4.340.218.242)	(17.671.816.541)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(265.957.806)	-	(2.461.988.178)	-	-
Tangguhan	64.115.216	516.508.051	487.903.149	(2.569.565.703)	2.285.384.714
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - BERSIH	(201.842.590)	516.508.051	(1.974.085.029)	(2.569.565.703)	2.285.384.714
RUGI BERSIH SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	(3.220.419.983)	(1.913.722.414)	(10.854.485.272)	(6.909.783.945)	(15.386.431.827)
Efek Penyesuaian Proforma	-	(65.819.036)	11.561.923.344	9.606.646.446	5.261.282.019

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/ TAHUN BERJALAN	(3.220.419.983)	(1.979.541.450)	707.438.072	2.696.862.501	(10.125.149.808)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN					
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(1.364.948.516)	(1.147.079.016)	270.229.672	(60.202.645)	250.698.709
Pajak penghasilan terkait	300.288.674	252.357.384	(59.450.528)	13.244.582	(55.153.716)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Efek translasi mata uang asing	(1.042.699.221)	-	-	-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain	(2.107.359.063)	(894.721.632)	210.779.144	(46.958.063)	195.544.993
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	(5.327.779.046)	(2.874.263.082)	918.217.216	2.649.904.438	(9.929.604.815)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	(0,59)	(19,80)	7,07	26,97	(101,25)

*tidak diaudit

a. Pendapatan Bersih

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Pendapatan Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp9.282.591.159,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh sebesar 38,99% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp6.678.446.549,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh jumlah pelanggan baru Perseroan pada periode 31 Januari 2023 lebih banyak dibandingkan dengan periode 31 Januari 2022, dimana pada periode 31 Januari 2023, jumlah pelanggan Perseroan meningkat 50% dibandingkan dengan periode 31 Januari 2022.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Pendapatan Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp6.678.446.549,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, tumbuh sebesar 9,37% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp6.106.237.770,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh jumlah pelanggan baru Perseroan pada periode 31 Januari 2022 lebih banyak dibandingkan dengan periode 31 Januari 2021, dimana pada periode 31 Januari 2022, jumlah pelanggan Perseroan meningkat dibandingkan dengan periode 31 Januari 2021.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp187.020.275.669,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 58,07% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp118.316.460.489,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan bentuk jasa yang diberikan kepada pelanggan yang sudah ada. Peningkatan pendapatan Perseroan juga didapatkan dari meningkatnya nilai kontrak-kontrak yang diperbaharui dengan pelanggan yang sudah ada pada periode 31 Desember 2022. Selain itu, kenaikan pendapatan bersih juga disebabkan karena adanya penambahan pelanggan baru yang didapatkan oleh Perseroan pada periode 31 Desember 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp118.316.460.489,- pada tahun 2021 tumbuh sebesar 60,93% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp73.519.176.313,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan bentuk-bentuk jasa yang diberikan kepada pelanggan yang sudah ada. Peningkatan pendapatan Perseroan juga didapatkan dari meningkatnya nilai kontrak-kontrak yang diperbaharui dengan pelanggan yang sudah ada pada periode 31 Desember 2023. Selain itu, kenaikan pendapatan bersih juga disebabkan oleh adanya penambahan pelanggan baru yang didapatkan oleh Perseroan pada periode 31 Desember 2021 dan pendapatan dari lini bisnis baru Perseroan yaitu jasa *Fraud Management Services*.

b. Beban Pokok Pendapatan

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Beban Pokok Pendapatan Perseroan tercatat sebesar Rp7.125.637.001,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh sebesar 142,25% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2.941.402.974,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah sumber daya manusia yang merupakan komponen utama dari Beban Pokok Penjualan sebesar 49%. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia. Selanjutnya juga terjadi peningkatan komponen Beban Pokok Pendapatan yaitu untuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak untuk proyek Perseroan yaitu sebesar 142,7%.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Beban Pokok Pendapatan Perseroan tercatat sebesar Rp2.941.402.974,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, tumbuh sebesar 226,73% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp900.251.870,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah sumber daya manusia yang merupakan komponen utama dari Beban Pokok Penjualan sebesar 67%. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pokok Pendapatan Perseroan tercatat sebesar Rp115.984.518.527,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 77,82% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp65.225.293.019,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan jumlah beban sumber daya manusia yang merupakan komponen utama dari Beban Pokok Penjualan yang berakibat kepada kenaikan Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2022. Kenaikan Beban Pokok Pendapatan yang berasal dari penambahan beban sumber daya manusia sebesar 45,3%. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia. Kemudian Perseroan juga lebih banyak melakukan pembelian perangkat keras dan perangkat lunak yang merupakan komponen dari Beban Pokok Pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Pokok Pendapatan Perseroan tercatat sebesar Rp65.225.293.019,- pada tahun 2021, tumbuh sebesar 18,37% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp55.101.769.939,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan beban sumber daya manusia yang merupakan komponen utama dari Beban Pokok Penjualan yang berakibat kepada kenaikan Beban Pokok Pendapatan pada tahun 2021. Kenaikan Beban Pokok Pendapatan yang berasal dari penambahan beban sumber daya manusia adalah sebesar 13,3%. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia. Kemudian Perseroan juga lebih banyak melakukan pembelian perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penunjang penjualan yang merupakan komponen dari Beban Pokok Pendapatan.

c. Laba Kotor

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Laba Kotor Perseroan tercatat sebesar Rp2.156.954.158,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, turun sebesar 42,28% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp3.737.043.575,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh tingkat pertumbuhan pendapatan yang diperoleh Perseroan pada periode 31 Januari 2023 terhadap periode 31 Januari 2022 lebih rendah dari tingkat kenaikan Harga Pokok Pendapatan yang terjadi pada periode yang sama. Tingkat kenaikan pendapatan Perseroan pada periode 31 Januari 2023 terhadap periode 31 Januari 2022 adalah sebesar 39%, sedangkan tingkat kenaikan Harga Pokok Pendapatan pada periode yang sama adalah sebesar 142%. Penyumbang terbesar kenaikan Harga Pokok Pendapatan adalah beban sumber daya manusia. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Laba Kotor Perseroan tercatat sebesar Rp3.737.043.575,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, turun sebesar 28,22% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp5.205.985.900,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh tingkat pertumbuhan pendapatan yang diperoleh Perseroan pada periode 31 Januari 2022 terhadap periode 31 Januari 2021 lebih rendah dari tingkat kenaikan Harga Pokok Pendapatan yang terjadi pada periode yang sama. Tingkat kenaikan pendapatan Perseroan pada periode 31 Januari 2022 terhadap periode 31 Januari 2021 adalah sebesar 9,37%, sedangkan tingkat kenaikan Harga Pokok Pendapatan pada periode yang sama adalah sebesar 226,73%. Penyumbang terbesar kenaikan Harga Pokok Pendapatan adalah beban sumber daya manusia. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Kotor Perseroan tercatat sebesar Rp71.035.757.142,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 33,80% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp53.091.167.470,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan penjualan yang terjadi selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021. Pertumbuhan ini terjadi karena adanya pelanggan baru yang didapatkan oleh Perseroan, penambahan jenis jasa yang diberikan kepada pelanggan yang sudah ada, dan juga kenaikan nilai perpanjangan kontrak pekerjaan dengan pelanggan yang sudah ada.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Kotor Perseroan tercatat sebesar Rp53.091.167.470,- pada tahun 2021, tumbuh sebesar 188,27% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp18.417.406.374,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan yang berhasil diperoleh oleh Perseroan pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

d. Beban Umum dan Administrasi

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Beban Umum dan Administrasi Perseroan tercatat sebesar Rp7.616.408.277,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh sebesar 33,73% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp5.695.359.383,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah beban sumber daya manusia di bagian penunjang operasional dan divisi *back-office* dan juga peningkatan biaya berlangganan perangkat lunak teknologi dan beban sewa untuk menunjang kualitas pelayanan. Penambahan divisi operasional dan *back-office* adalah untuk menunjang proyek-proyek Perseroan di masa mendatang.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Beban Umum dan Administrasi Perseroan tercatat sebesar Rp5.695.359.383,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, tumbuh sebesar 15,43% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp4.933.859.847,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah beban sumber daya manusia di bagian penunjang operasional dan divisi *back-office* dan juga peningkatan biaya berlangganan perangkat lunak teknologi dan beban sewa untuk menunjang kualitas pelayanan. Penambahan divisi operasional dan *back-office* adalah untuk menunjang proyek-proyek Perseroan di masa mendatang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Umum dan Administrasi Perseroan tercatat sebesar Rp75.687.667.820,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 36,97% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp55.257.751.706,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah beban sumber daya manusia di bagian penunjang operasional dan divisi *back-office* dan juga peningkatan biaya berlangganan perangkat lunak teknologi dan beban sewa untuk menunjang kualitas pelayanan. Penambahan divisi operasional dan *back-office* adalah untuk menunjang proyek-proyek Perseroan di masa mendatang.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Umum dan Administrasi Perseroan tercatat sebesar Rp55.257.751.706,- pada tahun 2021, tumbuh sebesar 49,44% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp36.975.679.196,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah beban sumber daya manusia di bagian penunjang operasional dan divisi *back-office* dan juga peningkatan biaya berlangganan perangkat lunak teknologi dan beban sewa untuk menunjang kualitas pelayanan. Penambahan divisi operasional dan *back-office* adalah untuk menunjang proyek-proyek Perseroan di masa mendatang.

e. Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Pendapatan (Beban) lain-lain bersih Perseroan tercatat sebesar Rp2.757.149.393,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang berjumlah -Rp449.264.501,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan yang berasal dari selisih mata uang asing yang diperoleh Perseroan pada periode 31 Desember 2023, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Pendapatan (Beban) lain-lain bersih Perseroan tercatat sebesar Rp449.264.501,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, tumbuh sebesar 1347,57% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang berjumlah Rp31.035.868,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan pendapatan yang berasal dari selisih mata uang asing yang diperoleh Perseroan pada periode 31 Desember 2023, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Lain-Lain Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp4.392.756.680,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 60,84% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2.731.154.181,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban kerugian selisih nilai mata uang asing yang terjadi di periode 31 Desember 2022, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Lain-Lain Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp2.731.154.181,- pada tahun 2021, tumbuh sebesar 31,91% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2.070.439.454,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban kerugian selisih nilai mata uang asing yang terjadi di periode 31 Desember 2021, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

f. Rugi Usaha

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Rugi Usaha Perseroan tercatat sebesar Rp2.702.304.726,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh sebesar 12,24% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2.407.580.309,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan nilai Harga Pokok Pendapatan dan komponen Beban Administrasi dan Umum. Kenaikan Beban Pokok Pendapatan berasal dari penambahan beban sumber daya manusia dan kenaikan komponen Beban Administrasi dan Umum yang dikeluarkan oleh Perseroan disebabkan oleh pembelian perangkat keras dan perangkat lunak. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia. Kemudian Perseroan juga lebih banyak melakukan pembelian perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penunjang penjualan yang merupakan komponen dari Beban Pokok Pendapatan.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Rugi Usaha Perseroan tercatat sebesar -Rp2.407.580.309,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, tumbuh dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp241.090.185,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan nilai Harga Pokok Pendapatan dan komponen Beban Administrasi dan Umum. Kenaikan Beban Pokok Pendapatan berasal dari penambahan beban sumber daya manusia dan kenaikan komponen Beban Administrasi dan Umum yang dikeluarkan oleh Perseroan disebabkan oleh pembelian perangkat keras dan perangkat lunak. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia. Kemudian Perseroan juga lebih banyak melakukan pembelian perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penunjang penjualan yang merupakan komponen dari Beban Pokok Pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Rugi Usaha Perseroan tercatat sebesar Rp9.044.667.358,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 84,67% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp4.897.738.417,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan nilai Harga Pokok Pendapatan dan komponen Beban Administrasi dan Umum. Kenaikan Beban Pokok Pendapatan berasal dari penambahan beban sumber daya manusia dan kenaikan komponen Beban Administrasi dan Umum yang dikeluarkan oleh Perseroan disebabkan oleh pembelian perangkat keras dan perangkat lunak. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia. Kemudian Perseroan juga lebih banyak melakukan pembelian perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penunjang penjualan yang merupakan komponen dari Beban Pokok Pendapatan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rugi Usaha Perseroan tercatat sebesar Rp4.897.738.417,- pada tahun 2021, turun sebesar 76,26% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp20.628.712.276,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh kenaikan jumlah pendapatan yang berhasil diperoleh Perseroan pada periode 31 Desember 2021, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 60,9%. Sedangkan tingkat kenaikan Harga Pokok Pendapatan dan Biaya Administrasi dan Umum lebih rendah dari kenaikan jumlah pendapatan.

g. Pendapatan Keuangan

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Pendapatan Keuangan Perseroan tercatat sebesar Rp278.324.261,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh sebesar 3014,32% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp8.936.919,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing pada periode 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Pendapatan Keuangan Perseroan tercatat sebesar Rp8.936.919,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, menurun sebesar -28,82% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp12.555.364,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan lain-lain pada periode 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Keuangan Perseroan tercatat sebesar Rp1.594.145.291,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 56,28% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp1.020.026.512,-. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan dari keuntungan selisih nilai tukar mata uang asing pada periode 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya dan juga kenaikan pendapatan yang berasal dari bantuan pemerintah pada entitas anak di Singapura yang lebih tinggi pada periode 31 Januari 2023, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Keuangan Perseroan tercatat sebesar Rp1.020.026.512,- pada tahun 2021, turun sebesar 69,40% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp3.333.465.859,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan keuntungan dari selisih nilai tukar mata uang asing, dan juga penurunan bantuan keuangan yang berasal dari pemerintah dari para entitas anak di Singapura dan Australia pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

h. Beban Keuangan

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Beban Keuangan Perseroan tercatat sebesar Rp594.596.928,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh sebesar 1782,41% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp31.587.075,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban kerugian selisih mata uang asing, dan adanya pembayaran beban bunga pinjaman pada periode 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Beban Keuangan Perseroan tercatat sebesar Rp31.587.075,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, tumbuh sebesar 339,79% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp7.182.332,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan denda tagihan pajak pada periode 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Keuangan Perseroan tercatat sebesar Rp1.429.878.176,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 209,16% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp462.506.337,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban kerugian selisih mata uang asing dan adanya pembayaran beban bunga pinjaman pada periode 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Keuangan Perseroan tercatat sebesar Rp462.506.337,- pada tahun 2021, tumbuh sebesar 22,82% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp376.570.124,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban kerugian selisih mata uang asing pada periode 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

i. Rugi Sebelum Pajak Penghasilan

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan tercatat sebesar Rp3.018.577.393,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh sebesar 24,21% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2.430.230.465,-. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan Beban Pokok Pendapatan dan juga peningkatan Beban Umum dan Administrasi Perseroan yang terjadi pada periode 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Rugi Sebelum Pajak Penghasilan Perseroan tercatat sebesar -Rp2.430.230.465,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, tumbuh dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp246.463.217,-. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh peningkatan Beban Pokok Pendapatan dan juga peningkatan Beban Umum dan Administrasi Perseroan yang terjadi pada periode 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Rugi Sebelum Pajak Perseroan tercatat sebesar Rp8.880.400.243,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 104,61% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp4.340.218.242,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan Beban Pokok Pendapatan dan juga peningkatan Beban Umum dan Administrasi Perseroan yang terjadi pada periode 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian adanya peningkatan beban keuangan Perseroan di periode 31 Desember 2022, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rugi Sebelum Pajak Perseroan tercatat sebesar Rp4.340.218.242,- pada tahun 2021, turun sebesar 75,44% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp17.671.816.541,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh pertumbuhan pendapatan yang berhasil dilakukan oleh Perseroan selama periode 31 Desember 2021, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

j. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan – Bersih

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Beban Pajak Penghasilan – Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp201.842.590,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, turun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang berjumlah -Rp516.508.051,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh sudah tidak adanya akumulasi kerugian fiskal di periode Januari 2023, dan juga adanya beban pajak penghasilan periode berjalan dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Beban Pajak Penghasilan – Bersih Perseroan tercatat sebesar -Rp516.508.051,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, turun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang berjumlah Rp,-. Penurunan tersebut disebabkan adanya akumulasi kerugian fiskal di periode Januari 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Pajak Penghasilan – Bersih Perseroan tercatat sebesar Rp1.974.085.029,- pada tahun 2022, turun sebesar 23,17% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2.569.565.703,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh sudah tidak adanya akumulasi kerugian fiskal pada periode 31 Desember 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan – Bersih Perseroan tercatat sebesar -Rp2.569.565.703,- pada tahun 2021, turun dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang berjumlah Rp2.285.384.714,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya akumulasi kerugian fiskal pada tahun-tahun sebelumnya yang dikompensasikan pada periode 31 Desember 2021.

k. Rugi Bersih Setelah Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Rugi Bersih Setelah Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp3.220.419.983,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh sebesar 68,28% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp1.913.722.414,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kerugian Perseroan yang berasal dari entitas anak pada periode 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Rugi Bersih Setelah Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar -Rp1.913.722.414,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, turun dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp246.463.217,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya kerugian Perseroan yang berasal dari kenaikan beban pokok pendapatan 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Rugi Bersih Setelah Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp10.854.485.272,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 57,09% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp6.909.783.945,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kerugian Perseroan yang lebih tinggi yang berasal dari entitas anak pada periode 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Rugi Bersih Setelah Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp6.909.783.945,- pada tahun 2021, turun sebesar 55,09% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp15.386.431.827,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya laba bersih yang dihasilkan oleh Perseroan induk pada periode 31 Desember 2021.

l. Efek Penyesuaian Proforma

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Efek Penyesuaian Proforma Perseroan tercatat sebesar Rp0,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang berjumlah -Rp65.819.036,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh Perseroan telah efektif melakukan akuisisi terhadap entitas anak pada tanggal 30 Januari 2023.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Efek Penyesuaian Proforma Perseroan tercatat sebesar -Rp65.819.036,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, tumbuh dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang berjumlah -Rp203.361.039,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan kerugian yang dialami oleh entitas anak pada periode 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Efek Penyesuaian Proforma Perseroan tercatat sebesar Rp11.561.923.344,- pada tahun 2022, tumbuh sebesar 20,35% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp9.606.646.446,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan kerugian yang dialami oleh entitas anak pada periode 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Efek Penyesuaian Proforma Perseroan tercatat sebesar Rp9.606.646.446,- pada tahun 2021, tumbuh sebesar 82,59% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp5.261.282.019,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan kerugian yang dialami oleh entitas anak pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

m. Laba (Rugi) Bersih Sebelum Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Rugi Bersih Sebelum Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp3.220.419.983,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, tumbuh sebesar 62,69% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp1.979.541.450,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kerugian yang diperoleh oleh entitas anak selama periode 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2021

Rugi Bersih Sebelum Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar -Rp1.979.541.450,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, tumbuh dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp43.102.178,-. Penambahan tersebut disebabkan oleh adanya kerugian yang diperoleh oleh entitas anak selama periode 31 Januari 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Bersih Sebelum Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp707.438.072,- pada tahun 2022, turun sebesar 73,77% dari periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar Rp2.696.862.501,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya kerugian yang dialami oleh entitas anak pada periode 31 Desember 2022 dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya, serta adanya kenaikan beban keuangan yang berasal dari fasilitas pinjaman bank yang ada di periode 31 Desember 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba (Rugi) Bersih Sebelum Efek Penyesuaian Proforma Periode/Tahun Berjalan Perseroan tercatat sebesar Rp2.696.862.501,- pada tahun 2021, tumbuh dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya yang berjumlah -Rp10.125.149.808,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan jumlah pendapatan yang berhasil didapatkan oleh Perseroan secara signifikan pada periode 31 Desember 2021 dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya.

7. Analisa Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Posisi aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan disajikan dalam tabel berikut ini:

Aset

(dalam Rupiah)

	31 Januari		31 Desember	
	2023		2022	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan bank	3.728.601.505	15.123.973.273	10.096.566.661	1.386.092.320
Piutang usaha - bersih				
Pihak ketiga	30.251.454.780	32.579.504.493	13.410.244.022	14.054.464.963
Pihak berelasi	-	-	-	-
Aset kontrak	10.732.984.691	8.259.710.289	4.415.789.596	671.757.120
Piutang lain-lain				
Pihak ketiga	546.893.275	464.581.609	318.135.928	206.421.722
Pihak berelasi	-	137.576.200	76.034.412	76.828.392
Biaya dibayar di muka	3.654.495.351	2.774.070.511	1.832.563.388	1.259.355.969
Uang muka	23.478.405.470	22.716.180.727	25.078.944.386	5.728.305.250
Biaya ditangguhkan	3.996.000.000	-	-	-
Jumlah Aset Lancar	76.388.835.072	82.055.597.102	55.228.278.393	23.383.225.736
ASET TIDAK LANCAR				
Aset pajak tangguhan	3.925.252.656	3.560.848.768	3.132.396.147	5.688.717.268
Aset tetap – bersih	5.830.661.658	4.870.608.541	2.218.981.145	1.434.869.271
Aset hak-guna – bersih	6.521.280.252	6.859.368.312	4.485.127.380	6.273.042.675
Aset takberwujud – bersih	2.113.887.908	2.306.059.537	4.612.119.073	6.918.178.609
Uang muka investasi	-	65.625.490.346	-	-
Aset lain-lain	4.566.052.576	4.748.415.226	3.485.803.369	3.031.803.330
Jumlah Aset Tidak Lancar	22.957.135.050	87.970.790.730	17.934.427.114	23.346.611.153
JUMLAH ASET	99.345.970.122	170.026.387.832	73.162.705.507	46.729.836.889

31 Januari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Aset.

Jumlah aset pada tanggal 31 Januari 2023 mencapai Rp99.345.970.122,-, atau menurun 41,57% dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp170.026.387.832,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh uang muka investasi pada periode 31 Desember 2022 yang sudah direalisasikan untuk mengakuisisi entitas anak pada 30 Januari 2023.

Aset Lancar.

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Januari 2023 mencapai Rp76.388.835.072,-, atau menurun 6,91% dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp82.055.597.102,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya biaya ditangguhkan yang muncul pada periode 31 Januari 2023, dan juga kenaikan nilai aset kontrak di periode 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Aset Tidak Lancar.

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Januari 2023 mencapai Rp22.957.135.050,-, atau menurun 73,90% dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp87.970.790.730,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh uang muka investasi pada periode 31 Desember 2022 yang sudah direalisasikan untuk mengakuisisi entitas anak pada 30 Januari 2023.

31 Januari 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Aset.

Jumlah aset pada tanggal 31 Januari 2022 mencapai Rp77.374.870.377,-, atau tumbuh 5,76% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp73.162.705.507,-. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh kenaikan perolehan aset tetap pada periode 31 Januari 2022.

Aset Lancar.

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Januari 2022 mencapai Rp49.470.722.180.-, atau menurun 10,43% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp55.228.278.393,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penurunan kas dan bank dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Aset Tidak Lancar.

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Januari 2022 mencapai Rp27,904,148,197,-, atau tumbuh 55,59% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp17,934,427,114,-. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh aset lain-lain pada periode 31 Januari 2022.

31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Aset.

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp170.026.387.832,-, atau meningkat 132,39% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp73.162.705.507,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penempatan uang muka investasi yang akan digunakan untuk melakukan akuisisi pada entitas anak di periode 31 Desember 2022.

Aset Lancar.

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp82.055.597.102,-, atau meningkat 48,58% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp55.228.278.393,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan jumlah piutang usaha pihak ketiga di periode 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kenaikan ini juga dihasilkan dari adanya kenaikan nilai aset kontrak pada periode 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Aset Tidak Lancar.

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp87.970.790.730,-, atau meningkat 390,51% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp17.934.427.114,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penempatan uang muka investasi yang akan digunakan untuk melakukan akuisisi pada entitas anak pada periode 31 Desember 2022 yang tidak terdapat di periode yang sama di tahun sebelumnya.

31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah Aset.

Jumlah aset pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp73.162.705.507,-, atau meningkat 56,57% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp46.729.836.889,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan uang muka operasional pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Aset Lancar.

Jumlah aset lancar pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp55.228.278.393,-, atau meningkat 136,19% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp23.383.225.736,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan uang muka operasional pada periode 31 Desember 2020 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Aset Tidak Lancar.

Jumlah aset tidak lancar pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp17.934.427.114,-, atau menurun 23,18% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp23.346.611.153,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya amortisasi terhadap Aset Hak Guna dan Aset tak berwujud di tahun 2021 dan juga kerugian fiskal tahun-tahun sebelumnya yang dikompensasikan di periode 31 Desember 2021.

Liabilitas

(dalam Rupiah)

	<u>31 Januari</u>		<u>31 Desember</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
LIABILITAS				
LIABILITAS JANGKA				
 PENDEK				
Utang usaha - pihak ketiga	3.133.981.285	9.326.389.057	12.853.445.571	3.845.362.926
Utang lain-lain				
Pihak ketiga	4.855.168.126	3.076.397.535	2.660.684.250	2.350.738.918
Pihak berelasi	2.828.407.365	147.089.596.956	67.692.818.448	49.230.208.483
Utang bank jangka pendek	9.321.424.963	9.952.226.431	-	-

	31 Januari		31 Desember	
	2023		2022	2021
Beban masih harus dibayar	10.141.976.139	7.008.085.210	6.710.235.109	3.382.545.630
Liabilitas kontrak	140.443.103	143.545.602	107.868.158	155.902.349
Utang pajak	9.673.893.503	8.705.831.886	8.377.266.522	6.935.570.773
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.246.927.329	3.258.168.423	2.104.936.569	2.191.637.869
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	43.342.221.813	188.560.241.100	100.507.254.627	68.091.966.948
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	3.041.646.708	3.569.708.083	2.023.537.519	3.671.742.219
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	17.498.921.633	15.638.851.242	10.512.908.135	8.542.102.057
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	20.540.568.341	19.208.559.325	12.536.445.654	12.213.844.276
JUMLAH LIABILITAS	63.882.790.154	207.768.800.425	113.043.700.281	80.305.811.224

31 Januari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Liabilitas.

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Januari 2023 mencapai Rp63.882.790.154,-, atau menurun 69,25% dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp207.768.800.425,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh dilaksanakannya konversi utang kepada pihak berelasi (pemegang saham) menjadi ekuitas di periode 31 Januari tahun 2023.

Liabilitas Jangka Pendek .

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Januari 2023 mencapai Rp43.342.221.813,-, atau menurun 77,01% dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp188.560.241.100,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh dilaksanakannya konversi utang kepada pihak berelasi (pemegang saham) menjadi ekuitas di periode 31 Januari tahun 2023.

Liabilitas Jangka Panjang.

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Januari 2022 mencapai Rp20.540.568.341,-, atau meningkat 6,93% dibandingkan 31 Desember 2022 sebesar Rp19.208.559.325,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan di periode 31 Januari 2023.

31 Januari 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas.

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Januari 2022 mencapai Rp119.660.914.910,-. atau tumbuh 5,85% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp113.043.700.281,-. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh penambahan utang kepada pihak berelasi (pemegang saham) di periode 31 Januari tahun 2022.

Liabilitas Jangka Pendek .

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Januari 2022 mencapai Rp103.971.069.763,-. atau meningkat 3,45% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp100.507.254.627,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh dilaksanakannya konversi utang kepada pihak berelasi (pemegang saham) menjadi ekuitas di periode 31 Januari tahun 2022.

Liabilitas Jangka Panjang.

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Januari 2022 mencapai Rp15.689.845.147,-. atau meningkat 25,15% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp12.536.445.654,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan di periode 31 Januari 2022.

31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Liabilitas.

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp207.768.800.425,-, atau meningkat 83,80% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp113.043.700.281,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh munculnya kenaikan utang pihak berelasi pada periode 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Liabilitas Jangka Pendek.

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp188.560.241.100,-, atau meningkat 87,61% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp100.507.254.627,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh munculnya kenaikan utang pihak berelasi pada periode 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Liabilitas Jangka Panjang.

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2022 mencapai Rp19.208.559.325,-, atau meningkat 53,22% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar Rp12.536.445.654,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh munculnya kenaikan perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah Liabilitas.

Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp113.043.700.281,-, atau meningkat 40,77% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp80.305.811.224,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang usaha pihak ketiga dan, utang lain-lain pihak berelasi, dan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Liabilitas Jangka Pendek .

Jumlah liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp100.507.254.627,-, atau meningkat 47,61% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp68.091.966.948,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang usaha pihak ketiga, utang lain-lain pihak berelasi, dan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Liabilitas Jangka Panjang.

Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai Rp12.536.445.654,-, atau meningkat 2,64% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar Rp12.213.844.276,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya kenaikan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Ekuitas (Defisiensi Modal)

(dalam Rupiah)

	<u>31 Januari</u>		<u>31 Desember</u>	
	<u>2023</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	136.020.997.550	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
Tambahan modal disetor	(70.171.144.260)	136.400.000	136.400.000	136.400.000
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	(15.319.918.317)	(16.540.283.282)	(7.585.358.405)
Defisit	(29.658.710.359)	(26.438.290.376)	(27.145.728.448)	(29.842.590.949)
Penghasilan komprehensif lain	(727.962.963)	1.379.396.100	1.168.616.956	1.215.575.019
JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	35.463.179.968	(37.742.412.593)	(39.880.994.774)	(33.575.974.335)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)	99.345.970.122	170.026.387.832	73.162.705.507	46.729.836.889

31 Januari 2023 dibandingkan dengan 31 Desember 2022

Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) pada tanggal 31 Januari 2023 mencapai Rp35.463.179.968,-, atau meningkat dibandingkan 31 Desember 2022 yang berjumlah -Rp37.742.412.593,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh dilakukannya konversi utang lain-lain pihak berelasi Perseroan menjadi ekuitas pada tanggal 30 Januari 2023.

31 Januari 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) pada tanggal 31 Januari 2022 mencapai -Rp42.286.044.533,-, atau menurun 6,03% dibandingkan 31 Desember 2021 yang berjumlah -Rp39.880.994.774,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh Perseroan membukukan rugi tahun berjalan dari kegiatan usaha Perseroan pada periode 31 Januari 2022.

31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) pada tanggal 31 Desember 2022 mencapai -Rp37.742.412.593,-, atau meningkat 5,36% dibandingkan 31 Desember 2021 sebesar -Rp39.880.994.774,-. Penurunan tersebut disebabkan oleh Perseroan berhasil membukukan laba tahun berjalan dari kegiatan usaha Perseroan pada periode 31 Desember 2022.

31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) pada tanggal 31 Desember 2021 mencapai -Rp39.880.994.774,-, atau menurun 18,78% dibandingkan 31 Desember 2020 sebesar -Rp33.575.974.335,-. Peningkatan tersebut disebabkan oleh dampak proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali yang muncul pada periode 31 Desember 2021.

8. Analisa Laporan Arus Kas

Berikut ini adalah rincian arus kas Perseroan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

(dalam Rupiah)

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	9.051.105.268	8.933.537.856	162.933.452.102	114.823.196.572	65.171.467.398
Pembayaran kas kepada pemasok	(11.152.048.858)	(5.700.286.453)	(81.392.643.792)	(51.876.609.167)	(38.670.450.974)
Pembayaran kepada karyawan dan lainnya	(9.464.183.159)	(7.569.320.068)	(88.312.380.705)	(70.171.892.848)	(44.162.967.599)
Kas yang digunakan dari aktivitas operasi	(11.565.126.749)	(4.336.068.665)	(6.771.572.395)	(7.225.305.443)	(17.661.951.175)
Penerimaan bunga	278.324.261	8.936.919	1.594.145.291	1.020.026.512	3.333.465.859
Pembayaran beban keuangan	(594.596.928)	(31.587.075)	(1.429.888.376)	(462.506.340)	(376.570.124)
Pembayaran bunga atas liabilitas sewa	(57.606.692)	(15.835.033)	(190.020.401)	(286.103.448)	(238.866.384)
Pembayaran pajak penghasilan	-	-	(1.999.759.859)	(98.367.698)	-
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi	(11.939.006.108)	(4.374.553.854)	(8.797.095.740)	(7.052.256.417)	(14.943.921.824)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI					
Akuisisi entitas anak	(12.118.505.956)	-	-	-	-
Perolehan aset tetap	(1.071.487.600)	(2.928.312.410)	(3.627.363.115)	(1.610.113.116)	(875.851.319)
Kenaikan uang muka investasi pada entitas anak	-	-	(65.625.490.346)	-	-
Perolehan aset takberwujud	-	-	-	-	(1.760.765.419)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(13.189.993.556)	(2.928.312.410)	(69.252.853.461)	(1.610.113.116)	(2.636.616.738)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN					
Utang lain-lain - pihak berelasi					
Penerimaan	43.821.200.152	1.493.924.921	120.009.392.643	30.698.680.700	25.792.822.999

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022*	2022	2021	2020
Pembayaran	(28.856.689.421)	(1.062.409.700)	(44.832.416.362)	(10.745.908.653)	(4.999.437.856)
Utang bank jangka pendek					
Penerimaan	9.321.424.963	-	9.952.226.431	-	-
Pembayaran	(9.952.226.431)	-	-	-	-
Pembayaran pokok liabilitas sewa	(539.302.470)	(190.634.238)	(2.162.111.347)	(2.574.698.119)	(2.890.843.453)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	13.794.406.793	240.880.983	82.967.091.365	17.378.073.928	17.902.541.690
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	(11.334.592.871)	(7.061.985.282)	4.917.142.164	8.715.704.395	322.003.128
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	15.123.973.273	10.096.566.661	10.096.566.661	1.386.092.320	1.052.003.034
DAMPAK PERUBAHAN MATA UANG ASING PADA KAS DAN BANK	(60.778.897)	(6.304.135)	110.264.448	(5.230.054)	12.086.158
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	3.728.601.505	3.028.277.244	15.123.973.273	10.096.566.661	1.386.092.320

*tidak diaudit

Periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi

Perseroan membukukan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp11.939.006.108,- pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, meningkat 172,92% dari sebelumnya sebesar Rp4.374.553.854,- pada periode yang sama tahun 2022. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan pembayaran *cash* yang dilakukan oleh Perseroan kepada pemasok di periode 31 Januari 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian Perseroan juga mengeluarkan uang kas yang lebih tinggi untuk penambahan jumlah sumber daya manusia beserta komponen perangkat keras dan perangkat lunak pada periode 31 Januari 2023 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia. Kemudian Perseroan juga lebih banyak melakukan pembelian perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penunjang penjualan yang merupakan komponen dari Beban Pokok Pendapatan.

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 sebesar Rp13.189.993.556,-, meningkat 350,43% dari sebelumnya sebesar Rp2.928.312.410,- pada periode yang sama tahun 2022. Hal ini disebabkan karena Perseroan melakukan pengeluaran uang kas yang cukup besar untuk melakukan pembayaran terakhir dalam rangka akuisisi entitas anak yaitu ITSEC Services Asia Pte. Ltd dan ITSEC Australia Pty. Ltd.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas Bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar Rp13.794.406.793,-, meningkat 5626,65% dari sebelumnya sebesar Rp240.880.983,- pada periode yang sama tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain kepada pihak berelasi yang diperoleh Perseroan pada periode 31 Januari 2023 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi

Perseroan membukukan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp8.797.095.740,- pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, meningkat 24,74% dari sebelumnya sebesar Rp7.052.256.417,- pada periode yang sama tahun 2021. Hal tersebut disebabkan oleh peningkatan pembayaran *cash* yang dilakukan oleh Perseroan kepada pemasok di periode 31 Desember 2022 lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian Perseroan juga mengeluarkan uang kas yang lebih tinggi untuk penambahan jumlah sumber daya manusia beserta komponen perangkat keras dan perangkat lunak pada periode 31 Desember 2022 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun

sebelumnya. Penambahan jumlah sumber daya manusia adalah komponen utama untuk menunjang ekspansi Perseroan dalam rangka meningkatkan pendapatan dan pangsa pasar di Indonesia. Kemudian Perseroan juga lebih banyak melakukan pembelian perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penunjang penjualan yang merupakan komponen dari Beban Pokok Pendapatan.

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp69.252.853.461,-, meningkat 4201,12% dari sebelumnya sebesar Rp1.610.113.116,- pada periode yang sama tahun 2021. Hal ini disebabkan karena Perseroan melakukan pengeluaran uang kas yang cukup besar untuk melakukan pembayaran dalam rangka akuisisi entitas anak yaitu ITSEC Services Asia Pte. Ltd dan ITSEC Australia Pty. Ltd.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp82.967.091.365,-, meningkat 377,42% dari sebelumnya sebesar Rp17.378.073.928,- pada periode yang sama tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain kepada pihak berelasi yang diperoleh Perseroan pada periode 31 Desember 2022 dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kemudian Perseroan juga memperoleh fasilitas kredit dari bank pada periode 31 Desember 2022.

Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020

Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Operasi

Perseroan membukukan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp7.052.256.417,- pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, menurun 52,81% dari sebelumnya sebesar Rp14.943.921.824,- pada periode yang sama tahun 2020. Perseroan memperoleh peningkatan yang material dalam aliran kas yang berasal dari pelanggan pada periode 31 Desember 2021 seiring dengan peningkatan nilai pendapatan yang berhasil dibukukan Perseroan pada periode 31 Desember 2021, dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan kas dari pelanggan ini menghasilkan peningkatan arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasional yang lebih tinggi pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Arus Kas bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar -Rp1.610.113.116,-, menurun 38,93% dari sebelumnya sebesar Rp2.636.616.738,- pada periode yang sama tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh pada periode 31 Desember 2020, Perseroan melakukan pengeluaran kas yang lebih besar dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021, dimana pengeluaran kas tersebut adalah untuk pembelian aset tidak berwujud berupa perangkat lunak untuk menunjang proyek-proyek Perseroan.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp17.378.073.928,-, menurun 2,93% dari sebelumnya sebesar Rp17.902.541.690,- pada periode yang sama tahun 2020. Perseroan melakukan pembayaran utang atau kewajiban kepada pihak berelasi dengan nilai yang lebih tinggi pada periode 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pola Arus Kas yang Dikaitkan dengan Karakteristik dan Permintaan Musiman Bisnis Perseroan

Arus kas dan pendapatan Perseroan memiliki pola siklus mengikuti permintaan musiman pada industri keamanan siber. Secara umum, 37% - 40% pendapatan Perseroan diperoleh pada kuartal empat tahun berjalan dan pada kuartal 1, 2, dan 3, pendapatan Perseroan hanya 15% - 23%. Hal ini terutama disebabkan karena perusahaan-perusahaan melakukan pembaruan atau pengecekan keamanan siber pada akhir tahun berjalan sehingga pendapatan Perseroan akan selalu lebih tinggi pada periode tersebut. Siklus bisnis ini berlaku untuk kegiatan usaha Perseroan di Indonesia, Singapura, dan Australia.

9. Likuiditas dan Sumber Modal

Sumber utama likuiditas Perseroan adalah penerimaan kas dari kegiatan operasi, pembiayaan dari pemegang saham yaitu StoneTree International Limited dan pinjaman bank.

Kebutuhan modal utama Perseroan adalah untuk membiayai kegiatan operasi dan modal kerja untuk proyek baru. Perseroan meyakini bahwa Perseroan akan memiliki sumber daya pembiayaan yang memadai dari kegiatan operasinya dan dana hasil Penawaran ini untuk memenuhi kebutuhan modal Perseroan selama 12 bulan ke depan.

10. Rasio-rasio Keuangan Penting

Rasio Solvabilitas

Keterangan	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Rasio Solvabilitas					
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset (x)	0,64	1,55	1,22	1,55	1,72
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas (x)	1,80	-2,83	-5,50	-2,83	-2,39
Rasio Cakupan Utang atau <i>Debt Service Coverage Ratio</i> (DSCR) ^G (x)	-9,01	-34,01	-0,85	0,64	-6,55
Rasio Cakupan Bunga atau <i>Interest Coverage Ratio</i> (ICR) ^H (x)	-4,08	-75,94	-5,21	-8,38	-45,93

G: Rasio Cakupan Utang merupakan EBITDA yang disetahunkan dibagi total liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun dan beban pendanaan sewa yang disetahunkan dan beban pendanaan yang disetahunkan.

H: Rasio Cakupan Bunga merupakan laba sebelum beban pendanaan dan pajak dibagi total beban pendanaan sewa dan beban pendanaan.

Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Januari 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 0,64x, 1,55x, 1,22x, 1,55x, dan 1,72x. Penurunan Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Aset Perseroan terutama disebabkan oleh pada 30 Januari 2023, telah dilakukan konversi atas utang lain-lain pihak berelasi menjadi ekuitas Perseroan, sehingga rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset Perseroan semakin membaik. Untuk periode 31 Desember 2022, 2021, 2020, rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset Perseroan juga semakin membaik setiap tahunnya, yang menggambarkan kondisi total aset perusahaan yang semakin meningkat setiap tahunnya.

Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Januari 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 1,80x, -2,83x, -5,50x, -2,83x dan -2,39x. Peningkatan Rasio Jumlah Liabilitas Terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan terutama disebabkan oleh pada tanggal 30 Januari 2023, telah dilakukan konversi atas utang lain-lain pihak berelasi Perseroan menjadi ekuitas Perseroan. Tindakan ini menjadikan nilai ekuitas Perseroan meningkat dengan material, sehingga rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan juga jauh menjadi lebih baik. Untuk periode 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, nilai liabilitas Perseroan mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan selama periode tersebut Perseroan masih mengalami defisiensi modal, sehingga rasio liabilitas terhadap ekuitas Perseroan kurang ideal.

Rasio Cakupan Utang Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Januari 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar -9,01x, -34,01, -0,85x, 0,64x, dan -6,55x. Rasio Cakupan Utang Perseroan Perseroan dapat dipertahankan secara stabil terutama disebabkan oleh kemampuan Perseroan dalam meningkatkan pendapatan setiap tahunnya selama periode tersebut, sehingga laba sebelum beban bunga, pajak penghasilan, penyusutan aset tetap, dan amortisasi ikut tetap terjaga.

Rasio Cakupan Bunga Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Januari 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar -4,08x, -75,94, -5,21x, -8,38x, dan -45,93x. Rasio Cakupan Bunga Perseroan terus meningkat karena pada periode 31 Januari 2023 dan periode 31 Desember 2022, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit dari bank, yaitu PT Bank Raya Indonesia Tbk. Atas diterima fasilitas kredit tersebut, Perseroan harus menanggung beban bunga pinjaman yang mana pada periode sebelumnya tidak ada..

Rasio Profitabilitas

Keterangan	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Rasio Profitabilitas					
Marjin Laba Kotor ^A	23,24%	55,96%	37,98%	44,87%	25,05%
Marjin Laba Bersih ^B	-34,69%	-29,64%	0,38%	2,28%	-13,77%
Laba Bersih ^C /Jumlah Ekuitas	-108,97%	N/A	N/A	N/A	N/A
Laba Bersih ^C /Jumlah Aset	-38,90%	-30,70%	0,42%	3,69%	-21,67%

A: Marjin laba kotor dihitung dari laba (rugi) bruto dibagi pendapatan

B: Marjin laba bersih dihitung dari laba (rugi) tahun berjalan dibagi pendapatan

C: Laba bersih merupakan laba (rugi) tahun berjalan/ laba (rugi) periode berjalan yang disetahunkan

Rasio Marjin Laba Kotor Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Januari 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 23,24%, 55,96%, 37,98%, 44,87%, dan 25,05%. Rasio Marjin Laba Kotor Perseroan meningkat secara signifikan pada tahun 2021 dan 2022. Terdapat penurunan pada periode Januari 2023 karena sifat musiman dari bisnis industri keamanan siber yang mana pendapatan pada kuartal satu lebih kecil dari kuartal-kuartal selanjutnya.

Rasio Marjin Laba Bersih Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Januari 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar -34,69%, -29,64%, 0,38%, 2,28%, dan -13,77%. Perseroan membukukan laba bersih pada tahun 2021 dan 2022. Rasio Marjin Laba Bersih pada periode Januari 2023 mengalami penurunan karena sifat musiman dari bisnis industri keamanan siber yang mana pendapatan pada kuartal satu lebih kecil dari kuartal-kuartal selanjutnya.

Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023 adalah sebesar -108,97%, pada periode tersebut Perseroan mengalami kerugian operasional yang disebabkan karena Laba Bersih Perseroan mengikuti sifat musiman dari bisnis industri keamanan siber yang mana pendapatan pada kuartal satu lebih kecil dari kuartal-kuartal selanjutnya. Tidak ada Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31 Januari 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 karena pada periode ini Perseroan masih membukukan defisiensi ekuitas.

Rasio Laba Bersih terhadap Jumlah Aset Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Januari 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar -38,90%, -30,70%, 0,42%, 3,69% dan -21,67%. Untuk periode 31 Januari 2023 dan periode 31 Desember 2020, Perseroan membukukan kerugian bersih. Sedangkan untuk periode 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 Perseroan berhasil membukukan laba bersih. Laba bersih Perseroan periode 31 Desember 2022 lebih kecil dibandingkan dengan periode 31 Desember 2021, sedangkan jumlah aset periode 31 Desember 2022 meningkat secara material dibandingkan dengan jumlah aset pada periode 31 Desember 2021.

Rasio Likuiditas

Keterangan	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Rasio Likuiditas					
Rasio Kas ^D (x)	0,09	0,03	0,08	0,10	0,02
Rasio Lancar ^E (x)	1,76	0,48	0,44	0,55	0,34

D: Rasio Kas merupakan kas dan setara kas dibagi total liabilitas jangka pendek

E: Rasio Lancar total aset lancar dibagi total liabilitas jangka pendek

Rasio Kas Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Januari 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 0,09x, 0,03x, 0,08x, 0,10x dan 0,02x. Rasio Kas Perseroan menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Namun, jumlah kas yang dimiliki oleh Perseroan pada periode tersebut tidak sejalan dengan kenaikan jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan di periode yang sama, terutama atas kenaikan utang lain-lain pihak berelasi di periode tersebut yang ditujukan untuk ekspansi bisnis Perseroan.

Rasio Lancar Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Januari 2022, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 1,76x, 0,48x, 0,44x, 0,55x dan 0,34x. Peningkatan Rasio Lancar Perseroan dari tahun ke tahun terutama disebabkan oleh adanya konversi atas utang lain-lain pihak berelasi yang dilakukan Perseroan pada tanggal 30 Januari 2023. Untuk periode 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020, setiap tahunnya aset lancar perusahaan mengalami peningkatan dengan tingkat peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode yang sama.

11. Belanja Modal

Belanja modal Perseroan untuk satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebesar Rp13.189.993.556,-, Rp69.252.853.461,-, Rp1.610.113.116,-, dan Rp2.500.216.738,-.

12. Risiko Kredit, Likuiditas, Nilai Tukar Mata Uang Asing, Sensitivitas, dan Tingkat Suku Bunga dan Pengaruhnya terhadap Hasil Usaha Perseroan

Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari operasional usaha. Keberhasilan Perseroan dalam menjalankan aktivitas operasi, investasi dan pendanaan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu risiko dikelola dengan baik. Berikut adalah penjelasan mengenai pengaruh risiko kredit, likuiditas, fluktuasi kurs mata uang asing, sensitivitas, dan tingkat suku bunga terhadap hasil usaha Perseroan:

a. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko Perseroan dan Entitas Anak terjadinya kerugian Keuangan yang disebabkan oleh ketidakmampuan *counterparty* untuk memenuhi liabilitas kontraktualnya.

b. Risiko Likuiditas

Perseroan dan Entitas Anak menetapkan risiko likuiditas atas kolektibilitas dari piutang usaha seperti yang dijelaskan di atas, yang dapat menimbulkan kesulitan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi kewajiban yang terkait dengan liabilitas Keuangan

c. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perseroan dan Entitas Anak terekspos risiko mata uang asing karena sebagian pendapatan, pengeluaran dan liabilitas dalam mata uang Asing seperti SGD, AUD dan USD.

d. Risiko Sensitivitas

Pergerakan yang mungkin terjadi terhadap nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing pada tanggal akhir tahun dapat meningkatkan (mengurangi) nilai ekuitas atau laba rugi sebesar nilai yang disajikan.

e. Risiko Tingkat Suku Bunga

Risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar

13. Kejadian atau Transaksi yang Tidak Normal atau Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, yang dilaporkan dalam laporan keuangan tanggal 31 Januari 2023 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit Kantor Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus.

14. Komitmen Investasi Barang Modal

Perseroan tidak memiliki komitmen yang tidak biasa atau kewajiban kontraktual dalam bentuk apa pun yang tidak dalam kegiatan usaha biasa dan yang mungkin berdampak buruk terhadap Perseroan (misalnya, kontrak atau perjanjian pembelian di atas harga pasar; pembelian kembali atau perjanjian lain yang tidak biasa kegiatan usaha; ikatan material untuk pembelian properti, pabrik dan peralatan; komitmen valuta asing yang signifikan; saldo terbuka pada *letter of credit*; komitmen pembelian untuk jumlah persediaan yang melebihi kebutuhan normal atau pada harga yang melebihi harga pasar yang berlaku; kerugian dari pemenuhan, atau ketidakmampuan untuk memenuhi, komitmen penjualan, dll.). Tidak ada investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

15. Pembatasan Terhadap Kemampuan Perusahaan Anak untuk Mengalihkan Dana kepada Perseroan

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

16. Kebijakan Pemerintah dan Institusi Lainnya dalam Bidang Fiskal, Moneter, Ekonomi Publik, dan Politik yang Berdampak pada Kegiatan Usaha dan Investasi Perseroan

Perekonomian di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia telah mengalami perkembangan ekonomi yang substansial secara keseluruhan selama beberapa dekade terakhir. Namun, perkembangan ekonomi ini terlihat tidak merata secara geografis dan pada berbagai sektor ekonomi yang ada. Perubahan ini menghasilkan kerugian yang dihasilkan oleh perubahan kebijakan pemerintah, undang-undang atau peraturan terkait pada masing-masing pasar. Perubahan secara berkala ini dapat mengakibatkan dampak material terhadap pertumbuhan ekonomi di seluruh Asia Tenggara. Dengan adanya perkembangan ini,

operasional dan kegiatan Perusahaan dapat terdampak secara negatif dikarenakan perkembangan ini akan membuat Perusahaan kalah dalam persaingan dengan kompetitornya yang dihasilkan karena penurunan permintaan atas layanan Perusahaan. Dengan ini, pemerintah di Asia Tenggara mencoba beberapa hal untuk membantu lajunya perekonomian dan mencoba mengalokasikan sumber daya negaranya.

Disamping itu, perekonomian Indonesia masih mengalami pemulihan akibat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Mengingat implikasi penyebaran COVID19 yang berubah dengan cepat, sulit untuk melakukan penilaian menyeluruh atas sifat dan luasnya dampak wabah tersebut pada perekonomian Indonesia menyebabkan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perbaikan yang terjadi pada kondisi perekonomian Indonesia baru-baru ini akan tetap berlanjut. Secara khusus, perubahan pada lingkungan perekonomian regional atau global yang menyebabkan hilangnya kepercayaan investor pada sistem keuangan pasar berkembang dan pasar lainnya, atau faktor-faktor lain, dapat meningkatkan volatilitas pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia atau memicu krisis ekonomi yang berkepanjangan atau resesi di Indonesia.

Disisi lain, terdapat kebijakan pemerintah yang dapat mendukung perkembangan bisnis Perseroan secara langsung maupun tidak langsung seperti:

1. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) tahun 2022
2. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Tahun 2016
3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
4. Peraturan Menteri Pertahanan (Pemenhan) No.82/2014 tentang Pedoman Pertahanan Siber
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2022 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 /POJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank.

17. Jumlah Pinjaman yang masih Terutang pada Tanggal Laporan Keuangan Terakhir

Pada tanggal 31 Januari 2023, Perseroan mempunyai utang seluruhnya berjumlah Rp12.149.832.328,-. Rincian dari utang Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	<i>(dalam Rupiah)</i>	
	Jatuh tempo dalam 1 tahun	Jatuh tempo lebih dari 1 tahun
	31 Januari 2023	31 Januari 2022
PIHAK BERELASI		
INV Management Pte. Ltd.	2.828.407.365	55.977.682.924
Dannacher Holdings LLC	-	75.036.870.000
StoneTree Cyber Security Ventures Pte. Ltd.	-	15.980.044.032
Marek Bialoglowy	-	50.000.000
PT StoneTree Intellectual Property	-	45.000.000
SUB-TOTAL	2.828.407.365	147.089.596.956
PIHAK KETIGA		
PT Bank Raya Indonesia Tbk	9.321.424.963	9.952.226.431
SUB-TOTAL	9.321.424.963	9.952.226.431

Adapun rincian masing-masing adalah sebagai berikut:

PT Bank Raya Indonesia Tbk

<i>(dalam Rupiah)</i>						
Jenis Fasilitas	Fasilitas maksimum	Tanggal perjanjian	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga per tahun	Jaminan	Saldo per 31 Januari 2023
Fasilitas Kredit	10.000.000.000	30 November 2022	30 November 2023	12,5%	-	9.321.424.963

Pembatasan-pembatasan dan kepatuhan pada syarat pinjaman

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- a. Melakukan merger, akuisisi, penjualan asset Perusahaan kepada pihak lain.
- b. Melakukan perubahan bentuk perusahaan atau merubah susunan pengurus dan komposisi permodalan.
- c. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain
- d. Melakukan penyertaan kepada perusahaan lain, kecuali yang telah ada saat ini.
- e. Mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- f. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau mengajukan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau mengajukan atau pailit diri debitur sendiri.

Pada tanggal 31 Januari 2023, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan perjanjian pinjaman tersebut.

INV Management Pte. Ltd.

(dalam Rupiah)

Jenis Fasilitas	Fasilitas maksimum	Tanggal perjanjian	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga per tahun	Jaminan	Saldo per 31 Januari 2023
Fasilitas Kredit	Rp40.000.000.000	25 April 2017	Sesuai permintaan pemberi pinjaman	0%	-	2.828.407.365

Pembatasan-pembatasan dan kepatuhan pada syarat pinjaman

Berdasarkan perjanjian tersebut, Perseroan diharuskan memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan, diantaranya mempertahankan rasio-rasio keuangan sebagai berikut:

- Disepakati bahwa pinjaman tersebut dapat dikonversi menjadi modal disetor dan saham oleh Pendana di PT ITSEC Asia sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati bersama oleh Para Pihak.
- Disepakati bahwa Pinjaman berdasarkan Perjanjian ini tidak akan dikenakan bunga yang diterapkan.

Pada tanggal 31 Januari 2023, Perseroan telah memenuhi seluruh ketentuan perjanjian pinjaman tersebut.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan

Kegiatan Usaha Perseroan sangat bergantung pada pelanggan Perseroan yang saat ini didominasi di sektor industri jasa keuangan dan telekomunikasi. Apabila terjadi penurunan kinerja pada sektor tersebut, maka perusahaan yang menjadi pelanggan utama Perseroan berpotensi mengurangi anggaran untuk jasa keamanan siber, sehingga hal-hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap pendapatan Perseroan.

Risiko ketergantungan terhadap pelanggan adalah kondisi di mana sebagian besar atau semua pendapatan Perseroan berasal dari satu atau beberapa pelanggan utama. Risiko ini dapat mempengaruhi keberlangsungan bisnis Perseroan dan menyebabkan ketidakstabilan keuangan yang signifikan. Risiko yang dapat timbul akibat ketergantungan terhadap pelanggan antara lain kehilangan pelanggan, persaingan, harga, dan pengembangan produk/layanan. Perseroan telah berusaha untuk mengurangi risiko ketergantungan terhadap pelanggan dengan cara diversifikasi produk atau layanan, mencari pelanggan baru, dan meningkatkan kualitas produk atau layanan untuk menarik pelanggan potensial.

B. RISIKO USAHA

1. Risiko Reputasi

Perseroan sangat bergantung kepada Pelanggan terhadap bagaimana pelanggan menilai hasil akhir dari jasa yang sudah dikerjakan oleh Perseroan. Penilaian yang buruk atau kegagalan dalam melindungi keamanan informasi seperti yang diharapkan oleh pelanggan dapat berdampak negatif terhadap reputasi Perseroan. Kegagalan dalam menjaga reputasi yang baik dapat mengakibatkan hilangnya pelanggan dimana hal tersebut dapat berdampak terhadap pendapatan Perseroan.

Reputasi perusahaan menjadi sangat penting dalam dunia bisnis, terutama di industri teknologi informasi (IT). Perseroan harus menjaga reputasinya agar dapat bersaing dan mempertahankan pelanggan. Namun, terdapat risiko yang dapat mengancam reputasi Perseroan, seperti pelanggaran data, kegagalan sistem, dan kejahatan siber. Oleh karena itu, Perseroan harus memahami risiko reputasi dan memiliki strategi manajemen risiko reputasi yang kuat untuk melindungi reputasi Perseroan.

Risiko reputasi dalam Perseroan dapat timbul akibat berbagai faktor, seperti kegagalan sistem, pelanggaran data, ketidakpatuhan terhadap peraturan, dan serangan siber. Risiko ini dapat mengancam keberlangsungan bisnis perusahaan, merugikan pelanggan, dan menimbulkan kerugian finansial yang signifikan. Oleh karena itu, Perseroan memperkuat sistem keamanan dan privasi data, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan pemangku kepentingan lainnya. Perseroan sudah siap menghadapi risiko reputasi dan merespons dengan cepat dan tepat ketika terjadi kejadian yang dapat mempengaruhi reputasi perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan strategi manajemen risiko yang kuat, mempersiapkan rencana tanggap darurat, dan melakukan evaluasi secara teratur untuk memperbaiki kelemahan yang ada. Dengan cara ini, Perseroan dapat mengurangi risiko reputasi dan mempertahankan reputasi dalam jangka panjang.

2. Risiko Persaingan

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan masifnya pertumbuhan kebutuhan atas digitalisasi, Perseroan meyakini bahwa akan ada perusahaan-perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri yang akan turut serta melakukan investasi di industri Teknologi Keamanan Informasi di Indonesia. Persaingan usaha di industri Teknologi Keamanan Informasi ditentukan oleh

faktor-faktor seperti standar operasi, kualitas, keamanan dan ketersediaan fasilitas Pusat Data, reputasi, rekam jejak operasi, cakupan geografis, serta harga layanan. Apabila Perseroan terlambat dalam melakukan inovasi, pembaruan standar operasi dan kualitas layanan, maka tidak menutup kemungkinan pesaing-pesaing lain dengan kualitas layanan yang lebih baik dan teknologi yang lebih canggih, dapat lebih cepat memperluas pasarnya dan menggerus pangsa pasar Perseroan.

Banyak dari pesaing besar internasional yang berinvestasi lebih banyak untuk program penelitian dan pengembangan, sementara yang lain mungkin diakuisisi oleh perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih besar untuk dialokasikan ke penelitian dan pengembangan. Apabila Perseroan tidak mempertahankan penelitian dan pengembangan yang memadai atau tidak dapat bersaing secara efektif dalam hal ini, kompetitor dapat memperoleh keuntungan atas hal tersebut dimana hal ini dapat berdampak negatif terhadap operasional dan keuangan Perusahaan.

3. Risiko Kegagalan Produk / Layanan Baru

Terdapat risiko dimana setiap produk/layanan baru yang dikembangkan oleh Perseroan tidak diperkenalkan secara tepat waktu atau hemat biaya dan juga tidak mencapai penerimaan pasar secara luas yang diperlukan untuk menghasilkan pendapatan yang signifikan. Keberhasilan produk-produk yang baru dikembangkan oleh Perseroan bergantung pada beberapa faktor yakni harga yang kompetitif, penyelesaian dan pengiriman yang tepat waktu, teknologi yang kompetitif, kualitas yang memadai, integrasi dengan teknologi yang ada, dan penerimaan pasar yang luas. Apabila Perseroan tidak berhasil mengembangkan atau menyempurnakan produk untuk memenuhi harapan pelanggan, hal tersebut dapat berdampak negatif terhadap keuangan dan operasi Perseroan.

4. Risiko Kegagalan Implementasi

Berbagai faktor dapat menyebabkan implementasi solusi oleh Perseroan tertunda atau tidak berhasil. Keberhasilan bisnis solusi keamanan Perseroan bergantung pada implementasi solusi keamanan yang efektif. Namun, beberapa faktor dapat menyebabkan implementasi menjadi tidak efisien, tertunda, atau gagal, seperti perubahan persyaratan pelanggan, penundaan proyek, atau kesalahan dari perencanaan proyek yang diterima. Apabila implementasi memakan waktu lebih lama dari yang diharapkan atau gagal memenuhi harapan pelanggan, penagihan pembayaran dapat tertunda dan berpotensi mengakibatkan pembatalan. Proyek implementasi yang tidak berhasil atau mahal dapat menimbulkan klaim dari pelanggan sehingga dapat merusak reputasi Perseroan. Hal ini memberikan peluang bagi pesaing untuk menggeser posisi Perseroan di pasar yang dapat berdampak negatif terhadap operasi dan kondisi keuangan Perseroan.

5. Risiko Perubahan Teknologi

Dalam masa pertumbuhan digital yang sangat pesat saat ini, Perseroan menghadapi risiko perubahan teknologi yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis dan kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar. Perubahan teknologi dapat terjadi dengan cepat dan dapat mempengaruhi permintaan layanan oleh pasar. Perubahan teknologi merupakan risiko penting yang dihadapi oleh Perseroan. Perubahan teknologi dapat mempengaruhi permintaan pasar, persaingan, biaya operasional, dan kebutuhan tenaga kerja.

Perseroan dapat menghadapi risiko teknologi seperti perubahan tren pasar, munculnya teknologi baru yang menggantikan produk atau layanan yang sudah ada, serta risiko keamanan data dan privasi yang terkait dengan penggunaan teknologi. Selain itu, Perseroan juga dapat menghadapi risiko ketergantungan pada teknologi tertentu, yang dapat menghambat kemampuan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar atau teknologi baru. Perseroan terus memperhatikan perkembangan teknologi dan mempersiapkan rencana bisnis yang tepat untuk menghadapi risiko perubahan teknologi dan memastikan kemampuan perusahaan untuk bersaing di pasar.

6. Risiko Kepatuhan

Perseroan harus mematuhi berbagai peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan bisnis. Kepatuhan yang buruk dapat mengakibatkan denda, tuntutan hukum, kerugian reputasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, penting bagi Perseroan untuk memahami risiko terkait kepatuhan dan mengambil tindakan yang tepat untuk memastikan bahwa bisnis mereka mematuhi semua peraturan yang berlaku.

Risiko kepatuhan adalah risiko yang dihadapi oleh Perseroan terkait dengan pemenuhan persyaratan peraturan dan undang-undang dan regulasi yang berlaku. Perseroan dapat menghadapi risiko kepatuhan seperti tidak mematuhi peraturan tentang privasi data, pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan pelanggaran regulasi sektor keuangan atau regulasi sektor lain yang berhubungan dengan aktivitas Perseroan. Perseroan juga dapat menghadapi risiko jika mereka tidak mematuhi peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan risiko keamanan informasi dan tata kelola perusahaan yang baik. Risiko kepatuhan dapat mengakibatkan denda yang besar, tuntutan hukum, kerugian reputasi, dan bahkan penutupan bisnis. Perseroan telah memastikan bahwa Perseroan telah

memahami dan memenuhi semua peraturan dan undang-undang yang berlaku dan memastikan bahwa telah memiliki proses dan kebijakan yang memadai untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang maupun regulasi yang berlaku.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko perubahan kondisi perekonomian secara lokal, regional dan global

Perseroan dapat menghadapi risiko perubahan kondisi perekonomian secara lokal, regional, dan global yang dapat mempengaruhi kinerja bisnis dan stabilitas keuangan perusahaan. Perubahan kondisi perekonomian, seperti resesi atau inflasi, dapat mempengaruhi permintaan produk atau layanan IT, biaya tenaga kerja, dan akses ke pasar global. Oleh karena itu, Perseroan harus memahami risiko terkait perubahan kondisi perekonomian dan mempersiapkan rencana bisnis yang tepat untuk menghadapi perubahan tersebut.

Perubahan kondisi perekonomian dapat mempengaruhi Perseroan secara langsung atau tidak langsung, termasuk penurunan permintaan layanan, kenaikan biaya operasional, kerugian investasi, dan pembatasan akses ke pasar global. Perseroan juga dapat menghadapi risiko mata uang, risiko inflasi, dan risiko perubahan suku bunga yang dapat mempengaruhi keuangan perusahaan. Oleh karena itu, Perseroan memperhatikan kondisi perekonomian lokal, regional, dan global dan mempersiapkan rencana bisnis dan pengelolaan risiko yang tepat untuk menghadapi perubahan kondisi perekonomian dan mengurangi dampaknya pada bisnis perusahaan.

2. Tuntutan atau gugatan hukum

Perseroan dapat menghadapi risiko tuntutan atau gugatan hukum yang dapat berdampak pada kinerja bisnis dan reputasi perusahaan. Tuntutan atau gugatan dapat berasal dari berbagai pihak, seperti pelanggan, pesaing, pekerja, atau pihak otoritas. Oleh karena itu, penting bagi Perseroan untuk memahami risiko terkait tuntutan atau gugatan hukum dan mempersiapkan rencana pengelolaan risiko yang tepat untuk mengurangi dampaknya pada bisnis perusahaan.

Perseroan harus memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan tidak melanggar hak cipta orang lain. Perseroan harus memastikan bahwa data pribadi yang mereka kumpulkan dari pengguna disimpan dan diolah secara aman dan sesuai dengan peraturan privasi yang berlaku. Perseroan harus memastikan bahwa mereka memenuhi semua kewajiban dan persyaratan yang tercantum dalam kontrak dengan pelanggan atau mitra bisnis. Perseroan harus memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka tawarkan tidak melanggar hak kekayaan intelektual orang lain, seperti paten, merek dagang, atau desain industri.

Perseroan harus memastikan bahwa telah memenuhi semua persyaratan hukum dan etika dalam bisnis yang berlaku untuk mengurangi risiko tuntutan atau gugatan hukum. Perseroan memiliki tim legal yang kompeten dan memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan memenuhi aturan yang berlaku.

3. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah dapat berdampak signifikan pada Perseroan, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu, penting bagi Perseroan untuk memahami risiko terkait dengan kebijakan pemerintah dan mempersiapkan rencana bisnis yang tepat untuk menghadapi perubahan yang mungkin terjadi. Pemerintah dapat melakukan perubahan kebijakan atau peraturan terkait industri IT yang dapat mempengaruhi bisnis Perseroan. Pemerintah dapat menerapkan regulasi yang lebih ketat terkait pengolahan dan penyimpanan data pengguna atau pelanggan. Hal ini dapat mempengaruhi cara Perseroan mengelola dan melindungi data pengguna dan dapat meningkatkan biaya dan risiko kepatuhan Perseroan. Pemerintah dapat mewajibkan Perseroan untuk memiliki lisensi atau sertifikasi tertentu untuk beroperasi di industri IT. Jika Perseroan tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat mengalami sanksi atau denda dari pemerintah.

Perseroan memantau perubahan kebijakan pemerintah dan memastikan bahwa telah mematuhi semua persyaratan dan regulasi yang berlaku. Perseroan memiliki strategi yang tepat untuk menangani risiko terkait kebijakan pemerintah, termasuk dengan memperkuat hubungan dengan regulator dan membangun jaringan dukungan bisnis. Perseroan juga mempertimbangkan pengaruh kebijakan pemerintah dalam pengambilan keputusan strategis dan bisnisnya.

4. Risiko Bencana Alam

Jakarta dan sekitarnya terletak di zona bahaya potensial gempa. UNISDR (United Nations Office for Disaster Reduction) menyatakan bahwa Indonesia adalah zona berisiko tinggi untuk rata-rata kerugian ekonomi akibat gempa bumi. Kantor utama Perseroan berada di Jakarta Selatan dan kantor SOC berada di Tangerang dimana keduanya terletak di zona seismik aktif, termasuk sesar aktif yang dianggap sebagai ancaman bagi wilayah metropolitan Jakarta.

Seperti diketahui bersama, Indonesia adalah termasuk negara yang seringkali mengalami bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tsunami dan lainnya. Ketika suatu lahan yang dikuasai oleh Perseroan dan Entitas Anak mengalami suatu bencana, tentu sedikit banyak akan mempengaruhi kegiatan Perseroan dan Entitas Anak.

Kejadian geologi di masa mendatang dapat berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Gempa bumi yang signifikan atau gangguan geologi lain di setiap kota berpenduduk besar di Indonesia dapat mengganggu ekonomi dan menurunkan kepercayaan investasi, serta dapat merusak properti ataupun merusak infrastruktur, utilitas dan akses transportasi logistik sehingga dapat mengganggu kegiatan usaha Perseroan yang pada akhirnya dapat berdampak negatif terhadap bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha.

5. Risiko Pandemi

Pandemi telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan, termasuk dunia bisnis. Perseroan tidak terkecuali, telah menghadapi beberapa risiko terkait dengan pandemi ini. Risiko-risiko tersebut dapat berdampak pada kinerja bisnis perusahaan dan kemampuan untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi Perseroan untuk mempersiapkan rencana bisnis dan pengelolaan risiko yang tepat untuk menghadapi pandemi dan mengurangi dampaknya pada bisnis perusahaan. Pandemi dapat menimbulkan beberapa risiko pada Perseroan, termasuk penurunan permintaan produk atau layanan, kerja yang dilakukan secara jarak jauh, ketidakpastian investasi, dan serangan cyber yang lebih sering dan lebih agresif. Untuk menghadapi pandemi ini, Perseroan mempersiapkan rencana bisnis dan pengelolaan risiko yang tepat, termasuk solusi teknologi yang tepat untuk mendukung kerja jarak jauh dan memastikan keamanan data dan sistem IT. Selain itu, Perseroan juga memperkuat hubungan dengan pelanggan dan investor untuk mempertahankan permintaan dan mendapatkan dukungan keuangan yang dibutuhkan.

6. Risiko perubahan kurs valuta asing (depresiasi nilai tukar rupiah)

Perseroan melakukan kegiatan usaha dari luar negeri dan berkewajiban untuk membayar biaya operasi dengan menggunakan mata uang asing yang menyebabkan Perseroan terpapar pada pergerakan nilai kurs mata uang. Pendapatan Perusahaan sebagian diperoleh dalam mata uang asing seperti USD, SGD dan AUD dan sebagian diperoleh dalam Rupiah. Dalam melakukan pengeluaran, Perseroan sebagian dilakukan dengan menggunakan mata uang asing tersebut, khususnya USD. Perubahan kurs mata uang tersebut dapat berdampak material dan dapat berdampak negatif terhadap hasil operasional Perseroan. Paparan yang signifikan pada mata uang negara-negara berkembang juga dapat membuat Perseroan rentan terhadap ketidakstabilan kurs mata uang.

7. Risiko yang timbul dari Peraturan Negara lain atau Peraturan Internasional

Untuk bertransaksi dengan pihak yang merupakan pihak dari negara lain, Perseroan membutuhkan derajat pengetahuan yang memadai dalam melakukan transaksi di negara lain, khususnya mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di negara-negara tersebut. Jika Perseroan lalai dalam mengetahui atau menginterpretasikan hukum yang berlaku pada negara-negara lain atau peraturan internasional lain yang mengikat, maka Perseroan dihadapkan pada risiko mendapatkan peringatan bahkan sanksi dari instansi yang berwenang di negara-negara tersebut.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham

Setelah Perseroan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan aktif atau likuid, karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Selain itu, dibandingkan dengan pasar modal di negara-negara lain yang lebih maju, pasar modal di Indonesia tidak likuid dan memiliki standar pelaporan yang berbeda. Selain itu, harga-harga di pasar modal Indonesia juga cenderung lebih tidak stabil dibandingkan dengan pasar modal lainnya. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksikan apakah likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana: Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;

- a. Perubahan rekomendasi para analis;
- b. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- c. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- d. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

4. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan dan Entitas Anak telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas (i) laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan entitas anaknya tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, yang disusun oleh manajemen Perseroan, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Rupiah, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini dan telah diaudit oleh KAP Morhan & Rekan, (firma anggota Allinial Global) berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA (Registrasi Akuntan Publik No. 1023) yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi, (ii) Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum disajikan kembali, diaudit oleh diaudit KAP Drs Bambang Sudaryono & Rekan, yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasi.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT ITSEC Asia sesuai dengan Akta Pendirian No. 7 tanggal 12 April 2010, yang dibuat di hadapan Iman Refizal S.H., M.Hum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Surat No. AHU-23544.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan Perseroan No. AHU-0034711.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9911 tanggal 12 April 2011 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 29 ("Akta Pendirian").

Pada saat Akta Pendirian, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Rakhmayanti Esther Makainas, SH, LLM	250	250.000	50,00
2. Ir. Ibnu Pratomo	250	250.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	500	500.000	100,00
Saham Dalam Portepel	500	500.000	-

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 97 tanggal 30 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham dan telah diterima dan dicatat dalam Sismibakum berdasarkan Surat No. AHU-0006456.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020164.AH.01.11. Tahun 2023 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 00436 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 12, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	21.763.359.608	544.083.990.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. INV Management Pte. Ltd.	3.139.336.097	78.483.402.425	57,70
2. MB Investment Management Pte. Ltd.	1.772.934.657	44.323.366.425	32,59
3. Matthew Owen Marsden	160.975.197	4.024.379.925	2,96
4. Alvin Jude Rafferty	33.593.951	839.848.775	0,62
5. Andri Utama Putra	38.000.000	950.000.000	0,70
6. Bambang Susilo	38.000.000	950.000.000	0,70
7. Radius Suharta	38.000.000	950.000.000	0,70
8. Bima Kurniawan	38.000.000	950.000.000	0,70
9. Antonius Andy Wijaya	25.000.000	625.000.000	0,46
10. Atik Plihanto	25.000.000	625.000.000	0,46
11. Eko Prasudi Widiyanto	25.000.000	625.000.000	0,46
12. Eko Prasetyo	10.100.000	252.500.000	0,19
13. Rio Aseptia	10.100.000	252.500.000	0,19
14. Muhammad Ray Ramadhan	10.100.000	252.500.000	0,19
15. Junior Lazuardi	10.100.000	252.500.000	0,19
16. Augusta Bogie Satria Nugroho	5.300.000	132.500.000	0,09
17. Victor Christian Mamuaya	6.300.000	157.500.000	0,11
18. Henky Tornado	3.800.000	95.000.000	0,06
19. Doni Mora	4.500.000	112.500.000	0,08
20. Chia Ping Boon	19.000.000	475.000.000	0,35
21. Lim Juat Chong	19.000.000	475.000.000	0,35
22. Mariusz Marcinkiewicz	8.700.000	217.500.000	0,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.440.839.902	136.020.997.550	100,00
Saham Dalam Portepel	16.322.519.706	408.062.992.650	-

Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No.IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No.33/2014; dan (iii) Peraturan OJK No.15/2020 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Nomor 77 tanggal 28 Februari 2023.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta Nomor 77 tanggal 28 Februari 2023, pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana atas saham-saham dalam Perseroan kepada masyarakat ("**Penawaran Umum**") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada BEI serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal Indonesia.
2. Menyetujui dalam rangka Penawaran Umum:
 - a. perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT ITSEC ASIA, Tbk.
 - b. Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan.
 - c. pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 1.008.734.800 (satu miliar delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 15,64% (lima belas koma enam puluh empat persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran- Umum.
 - d. menyetujui untuk melakukan penerbitan sebanyak-banyaknya 504.367.400 (lima ratus empat juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus) Waran Seri I atau setara dengan sebanyak-banyaknya 9,27% (sembilan koma dua puluh tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dimana setiap pemegang 2 (dua) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I.
 - e. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
 - f. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**POJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Jo. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
 - g. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

Aktivitas konsultasi keamanan informasi (KBLI 62021).

Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (assurance) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.

Kegiatan usaha penunjang:

Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya (KBLI 62029).

Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan uraian di atas, maka Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama di bidang Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi.

Kantor Perseroan berlokasi di Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Timur, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta .

B. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur Permodalan Dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan Sebelum Tahun 2020

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 98 tanggal 18 Januari 2018, dibuat di hadapan Rusnaldy, SH, Notaris di Kotamadya Jakarta Selatan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp10.000.000.000 terbagi atas 4.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp2.500.000; dan
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp2.500.000.000 terbagi atas 1.000 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp2.500.000.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 35 tanggal 30 Januari 2018, dibuat di hadapan Rusnaldy, SH, Notaris di Kota Madya Jakarta Selatan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per saham Rp2.500.000		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	4.000	10.000.000.000	100
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. INV Management PTE. LTD	990	2.475.000.000	99
2. Marek Bialoglowy	10	25.000.000	1
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	2.500.0000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.000	7.500.0000	-

Riwayat Permodalan Dan Susunan Para Pemegang Saham Perseroan Dalam 3 (Tiga) Tahun Terakhir

Tahun 2020-2022

Tidak ada perubahan kepemilikan saham pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022.

Tahun 2023

Pada tahun 2023, telah terjadi perubahan riwayat permodalan dan struktur pemegang saham dalam Perseroan berdasarkan Akta Jual Beli Saham PT ITSEC Asia dengan MB Investment Management PTE. LTD. No. 98, tanggal 30 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan atas pengalihan atas 10 saham senilai Rp25.000.000 milik Marek Bialoglowy yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan kepada MB Investment Management PTE. LTD.

Pengalihan atas saham di atas telah disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 97 tanggal 30 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah memperoleh persetujuan Menkumham dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminkabum berdasarkan Surat No. AHU-0006456.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020164.AH.01.11.Tahun 2023 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 00436 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 12 ("Akta 97/2023").

Berdasarkan Akta 97/2023, Perseroan juga melakukan (i) perubahan nilai nominal saham yang sebelumnya sebesar Rp2.500.000 menjadi Rp25, (ii) peningkatan modal dasar dari Rp10.000.000.000 menjadi Rp544.083.990.200, dan (iii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari sebelumnya sebesar Rp2.500.000.000 menjadi Rp136.020.997.550 yang diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham baru Perseroan dengan cara mengonversikan masing-masing piutang miliknya dalam Perseroan.

Piutang-piutang tersebut timbul berdasarkan perjanjian pinjaman sebagai berikut:

1. Perjanjian Pinjaman tanggal 25 April 2017 antara INV Management PTE. LTD. dan Perseroan sebagai kebutuhan modal kerja Perseroan dengan jumlah pokok sampai dengan Rp40.000.000.000 yang ditransfer setiap bulan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan untuk kebutuhan modal kerja dengan jangka waktu dilunasi sesuai permintaan INV Management PTE. LTD;
2. Perjanjian Pinjaman tanggal 19 November 2019 antara StoneTree Cyber Security Ventures PTE. LTD. dan Perseroan sebagai kebutuhan modal kerja Perseroan dengan jumlah pokok sampai dengan Rp30.000.000.000 yang ditransfer

setiap bulan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan untuk kebutuhan modal kerja dengan jangka waktu dilunasi sesuai permintaan StoneTree Cyber Security Ventures PTE. LTD; dan

3. Perjanjian Pinjaman tanggal 15 April 2022 antara Dannacher Holdings LLC. dan Perseroan sebagai kebutuhan modal kerja Perseroan dengan jumlah pokok sampai dengan Rp100.000.000.000 yang ditransfer setiap bulan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan untuk kebutuhan modal kerja dengan jangka waktu dilunasi sesuai permintaan Dannacher Holdings LLC.

StoneTree Cyber Security Ventures PTE. LTD. telah mengalihkan piutangnya tersebut sebesar Rp14.319.775.300 di atas kepada para pemegang saham berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 74, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Andri Utama Putra sebesar Rp950.000.000;
2. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 76, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Bambang Susilo sebesar Rp950.000.000;
3. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 71, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Radius Suharta sebesar Rp950.000.000;
4. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 70, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Bima Kurniawan sebesar Rp950.000.000;
5. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 75, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Antonius Andy Wijaya sebesar Rp625.000.000;
6. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 68, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Atik Pilihanto sebesar Rp625.000.000;
7. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 81, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Eko Prasudi Widiyanto sebesar Rp625.000.000;
8. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 73, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Eko Prasetyo sebesar Rp252.500.000;
9. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 82, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Rio Aseptia sebesar Rp252.500.000;
10. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 84, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Muhammad Ray Ramadhan sebesar Rp252.500.000;
11. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 77, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Junior Lazuardi sebesar Rp252.500.000;
12. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 83, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Augusta Bogie Satria Nugroho sebesar Rp132.500.000;
13. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 69, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Victor Christian Mamuaya sebesar Rp157.500.000;
14. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 72, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Henky Tornado sebesar Rp95.000.000;
15. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 78, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Doni Mora, SE sebesar Rp112.500.000;
16. Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 27 Januari 2023 antara StoneTree Cyber Security Ventures PTE. LTD. dan Chia Ping Boon (Xie Bingwen) sebesar Rp475.000.000;
17. Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 27 Januari 2023 antara StoneTree Cyber Security Ventures PTE. LTD. dan Lim Juat Chong sebesar Rp475.000.000;
18. Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 27 Januari 2023 antara StoneTree Cyber Security Ventures PTE. LTD. dan Mariusz Marcinkiewicz sebesar Rp217.500.000;
19. Perjanjian Pengalihan Piutang (Cessie) tanggal 27 Januari 2023 antara StoneTree Cyber Security Ventures PTE. LTD. dan Alvin Jude Rafferty sebesar Rp839.848.775;
20. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 79, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk Matthew Owen Marsden sebesar Rp4.024.379.925; dan
21. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 80, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk MB Investment Management PTE. LTD sebesar Rp1.105.546.575.

Selanjutnya, INV Management PTE. LTD. mengkonversikan piutangnya menjadi saham dalam Perseroan berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 25 April 2017 antara INV Management PTE. LTD. dan Perseroan di atas sebesar Rp26.723.703.884.

Dannacher Holdings LLC. mengalihkan piutangnya tersebut di atas sebesar Rp92.477.518.396 kepada para pemegang saham berdasarkan perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 66, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk MB Investment Management PTE. LTD sebesar Rp43.192.819.850; dan

2. Akta Perjanjian Jual Beli Piutang No. 67, tanggal 26 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan untuk INV Management PTE. LTD. sebesar Rp49.284.698.545.

Akta jual beli piutang telah disepakati oleh masing-masing Pihak dan telah memenuhi unsur-unsur jual beli dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPer"). Sesuai dengan Pasal 1465 KUHPer, Para Pihak telah menetapkan harga jual beli piutang adalah Rp0. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 1457 KUHPer penjual telah menyerahkan piutang kepada pembeli dan pembeli telah membayarkan harga pembelian sebesar Rp0.

Konversi utang baik dari StoneTree Cyber Security Ventures PTE. LTD maupun Dannacher Holdings LLC tidak termasuk bunga.

Pada saat itu StoneTree Cyber Security Ventures PTE. LTD. merupakan pemegang saham mayoritas tidak langsung di Perseroan melalui INV Management PTE. LTD. Pihak yang menerima pengalihan piutang adalah sebagian direksi, dewan komisaris, dan karyawan Perseroan. Pengalihan tersebut bertujuan agar para pihak yang menerima pengalihan dapat berkontribusi dalam mengambil keputusan strategis Perseroan, setelah haknya dikonversi menjadi saham.

Dannacher Holdings LLC adalah perusahaan yang dimiliki 100% oleh Patrick Rudolf Dannacher sebagai pengendali Perseroan. Pihak yang menerima pengalihan piutang adalah pemegang saham Perseroan yang dimiliki secara tidak langsung oleh Patrick Rudolf Dannacher dan perusahaan yang dimiliki oleh salah satu direktur Perseroan.

Sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp544.083.990.200, terbagi atas 21.763.359.608 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp25; dan
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp136.020.997.550, terbagi atas 5.440.839.902 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp25.

Berdasarkan Akta 97/2023, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp25- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	21.763.359.608	544.083.990.200	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. INV Management Pte. Ltd.	3.139.336.097	78.483.402.425	57,70
2. MB Investment Management Pte. Ltd.	1.772.934.657	44.323.366.425	32,59
3. Matthew Owen Marsden	160.975.197	4.024.379.925	2,96
4. Alvin Jude Rafferty	33.593.951	839.848.775	0,62
5. Andri Utama Putra	38.000.000	950.000.000	0,70
6. Bambang Susilo	38.000.000	950.000.000	0,70
7. Radius Suharta	38.000.000	950.000.000	0,70
8. Bima Kurniawan	38.000.000	950.000.000	0,70
9. Antonius Andy Wijaya	25.000.000	625.000.000	0,46
10. Atik Pilihanto	25.000.000	625.000.000	0,46
11. Eko Prasudi Widiyanto	25.000.000	625.000.000	0,46
12. Eko Prasetyo	10.100.000	252.500.000	0,19
13. Rio Aseptia	10.100.000	252.500.000	0,19
14. Muhammad Ray Ramadhan	10.100.000	252.500.000	0,19
15. Junior Lazuardi	10.100.000	252.500.000	0,19
16. Augusta Bogie Satria Nugroho	5.300.000	132.500.000	0,09
17. Victor Christian Mamuaya	6.300.000	157.500.000	0,11
18. Henky Tornado	3.800.000	95.000.000	0,06
19. Doni Mora	4.500.000	112.500.000	0,08
20. Chia Ping Boon	19.000.000	475.000.000	0,35
21. Lim Juat Chong	19.000.000	475.000.000	0,35
22. Mariusz Marcinkiewicz	8.700.000	217.500.000	0,15
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	5.440.839.902	136.020.997.550	100,00
Saham Dalam Portepel	16.322.519.706	408.062.992.650	-

Penyetoran atas saham yang dilakukan oleh INV Management PTE. LTD., MB Investment Management PTE. LTD., Bima Kurniawan, Doni Mora, Eko Prasudi Widiyanto, Bambang Susilo, Andri Utama Putra, Alvin Jude Rafferty, Antonius Andy Wijaya, Atik Pilihanto, Augusta Bogie Satria Nugroho, Chia Ping Boon, Eko Prasetyo, Henky Tornado, Junior Lazuardi, Lim Juat Chong, Mariusz Marcinkiewicz, Matthew Owen Marsden, Muhammad Ray Ramadhan, Radius Suharta, Rio Aseptia, dan Victor Mamuaya sebagai akibat dari kompensasi bentuk tagihan telah diumumkan dalam surat kabar Harian Ekonomi Neraca pada tanggal 11 November 2022 dan 3 Februari 2023 disyaratkan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 15 tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham.

C. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.

Tahun	Peristiwa/Kejadian Penting
2004	<i>Found</i> : Permulaan perjalanan ITSEC dimulai dengan jumlah karyawan yang masih sedikit
2010	<i>Rebranded</i> : Visi memimpin IT konsultan di Asia, ITSEC Indonesia berubah nama jadi ITSEC Asia dan fokus menjadi IT konsultan di Asia Tenggara
2017	<i>Expansion</i> : Stonetree (saham internasional yang berbasis di Dubai) bergabung menjadi investor utama di ITSEC Asia. Tahun ini, ITSEC mulai beroperasi di Australia, Singapore, dan Thailand
2018	<i>Cyber Security Operation Center (CSOC)</i> : Difasilitasi untuk memenuhi kebutuhan Operasional terkait <i>Cyber Security Operation</i> kebutuhan perusahaan di Indonesia, ITSEC Asia membuka CSOC di BSD, Tangerang.
2022	<i>New Look</i> : Kantor Pusat ITSEC Asia relokasi dari RDTX Tower ke Noble House, Jakarta, Indonesia
2023	<i>IPO & New Services</i> : ITSEC Asia berinvestasi di IPO dan mengeluarkan servis terbaru untuk merespon kebutuhan <i>cybersecurity</i> - Akuisisi 100% kepemilikan ITSEC Singapore dan ITSEC Australia

PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perizinan sebagai berikut :

No	Jenis Ijin	Keterangan									
Perizinan Umum											
1.	Nomor Induk Berusaha (“NIB”)	<p>Perseroan telah memperoleh NIB dengan No. 8120110222003 yang diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2018 dengan perubahan ke-8 pada tanggal 28 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS atas nama PT ITSEC Asia, yang beralamat di Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Timur, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta. NIB Perseroan berlaku sejak tanggal diterbitkan dan tidak memiliki tanggal kadaluwarsa.</p> <p>Berdasarkan NIB Berbasis Risiko tersebut, berikut adalah kegiatan klasifikasi risiko kegiatan usaha Perseroan:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kode KBLI</th> <th>Judul KBLI</th> <th>Klasifikasi Risiko</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>62029</td> <td>Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya</td> <td>Menengah Tinggi</td> </tr> <tr> <td>62021</td> <td>Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi</td> <td>Menengah Tinggi</td> </tr> </tbody> </table>	Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	Menengah Tinggi	62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	Menengah Tinggi
Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko									
62029	Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya	Menengah Tinggi									
62021	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	Menengah Tinggi									
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”)	Perseroan telah memperoleh NPWP dengan No. 31.191.675.3-013.000 melalui Surat Keterangan Terdaftar No. S-137KT/WPJ.04/KP.0103/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu. NPWP Perseroan berlaku pada tanggal diterbitkan dan tidak memiliki tanggal kadaluwarsa.									
3.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (“SPPKP”)	Perseroan telah memperoleh SPPKP dengan No. S-17PKP/WPJ.04/KP.0103/2018 tanggal 17 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu. SPPKP Perseroan berlaku pada tanggal diterbitkan dan tidak memiliki tanggal kadaluwarsa.									
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (“PKKPR”)	<p>Perseroan telah memperoleh PKKPR untuk Kegiatan Berusaha sebagai berikut:</p> <p>a. untuk Kode KBLI 62021 (Aktivitas Konsultasi Keamanan informasi), Perseroan telah memperoleh PKKPR dengan No. 28122210113174412 pada tanggal 28 Desember 2022 yang</p>									

No	Jenis Ijin	Keterangan
		<p>dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, untuk kantor Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Timur, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Jakarta Selatan yang berlaku selama tiga tahun untuk aktivitas konsultasi keamanan informasi.</p> <p>b. untuk Kode KBLI 62029 (Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Lainnya) Perseroan telah memperoleh PKKPR dengan No. 04012310113174135 pada tanggal 4 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, untuk kantor Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Timur, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Jakarta Selatan yang berlaku selama tiga tahun untuk aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya.</p>

Perizinan dan Persetujuan Operasional

1.	Izin Usaha Industri	<p>Perseroan telah memperoleh IUI berdasarkan keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 106/1/IU/PMA/2018 tanggal 19 Mei 2018 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 106/1/IU-PB/PMA/2018 tentang Perubahan Atas Izin Usaha Industri Penanaman Modal Asing tanggal 26 Mei 2018.</p>
2.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik ("TDPSE")	<p>Perseroan telah memperoleh TDPSE untuk Kegiatan Berusaha sebagai berikut:</p> <p>a. TDPSE untuk KBLI 62021: Perseroan telah memperoleh TDPSE untuk KBLI 62021 dengan No. 812011022200300020001 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 27 Februari 2023 dan berlaku sejak tanggal diterbitkan. Berdasarkan TDPSE, sektor usaha yang terdaftar adalah Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun Fungsi Sistem Elektronik berdasarkan TDPSE adalah sebagai Website dan/atau Platform Yang Membantu User Untuk Mengelola <i>Security System</i> Dengan Cara User Melakukan Subscription Terhadap Pilihan Layanan Yang Diberikan. Berdasarkan TDPSE, Perseroan wajib untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan c. melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan. <p>b. TDPSE untuk KBLI 62029: Perseroan telah memperoleh TDPSE untuk KBLI 62029 dengan No. 812011022200300020002 yang diterbitkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 28 Februari 2023 dan berlaku sejak tanggal diterbitkan. Berdasarkan TDPSE, sektor usaha yang terdaftar adalah Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adapun Fungsi Sistem Elektronik berdasarkan TDPSE adalah sebagai Website dan/atau Platform Yang Membantu User Untuk Mengelola <i>Security System</i> Dengan Cara User Melakukan Subscription Terhadap Pilihan Layanan Yang Diberikan. Berdasarkan TDPSE, Perseroan wajib untuk:</p>

No	Jenis Ijin	Keterangan
		a. memastikan keamanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. melakukan perlindungan data pribadi sesuai peraturan perundang-undangan; dan c. melakukan uji kelaikan sistem elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.
3.	Perizinan Lingkungan	Perseroan memiliki Surat Persetujuan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") untuk NIB No. 8120110222003 tertanggal 28 Desember 2022 yang tersimpan secara elektronik di dalam sistem OSS yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NIB Perseroan.

D. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Afiliasi

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak-pihak Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Pinjaman antara Stonetree International Limited dan Perseroan tanggal 1 Februari 2023.	1. Stonetree International Limited ("Pemberi Pinjaman") 2. Perseroan ("Penerima Pinjaman")	Jumlah pokok sampai dengan USD750.000 yang ditransfer setiap bulan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan untuk kebutuhan modal kerja dengan bunga sebesar 4% per tahun.	Tiga tahun dan akan dibayar kembali secara penuh pada 1 Februari 2026.

Perseroan selanjutnya akan memastikan bahwa setiap transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan afiliasinya akan tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020 dengan memperhatikan Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan pedoman tata kelola perusahaan yang disusun oleh Perseroan, untuk memastikan transaksi-transaksi selanjutnya dengan pihak afiliasi akan dilakukan secara wajar.

Perjanjian-perjanjian tersebut tidak memuat pembatasan-pembatasan terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan serta penggunaan dananya.

b. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, antara lain sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 31 tanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Bank Raya Indonesia Tbk sebagaimana diubah	1. PT Bank Raya Indonesia, Tbk ("Bank Raya" atau "Kreditur") 2. Perseroan ("Debitur")	Kreditur dengan ini memberikan fasilitas kredit kepada Debitur dalam bentuk Pinang Maksima-Pinjaman Tetap Reguler Revolving hingga jumlah sebesar Rp10.000.000.000 yang hanya dapat dipergunakan untuk Pembiayaan SPK/Piutang/Invoice/PO/Perjanjian Penerima Kredit/Debitur dari PT Bank	30 November 2022 - 30 November 2023.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	dengan Perjanjian Addendum Membuka Kredit No. B.015/KWJ/PK-Int/07/2023 tanggal 24 Juli 2023.		Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan BRI Group. Atas fasilitas kredit tersebut, Debitur menjaminkan aset Piutang Usaha Perseroan senilai Rp12.500.000.000 yang diikat secara fidusia berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 32, tanggal 30 November 2022, dibuat di hadapan Justriany Koni, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan.	
2.	<i>Frame Contract for Product and/or Services</i> No. CTR001901 tanggal 5 Januari 2021 antara PT Indosat Tbk dan Perseroan.	1. PT Indosat Tbk ("Pihak Pertama"); dan 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima penunjukan tersebut dan melakukan semua kewajibannya untuk mengirimkan kiriman (sesuai dengan Pernyataan Kerja dan Pesanan Pembelian/Purchase Order) kepada Pihak Pertama.	5 Januari 2021 – 5 Januari 2024
3.	Surat Perintah Kerja ("SPK") No. LOG/PO/22/10/006 tanggal 6 Oktober 2022 antara PT Bringin Inti Teknologi dan Perseroan.	1. PT Bringin Inti Teknologi ("Pihak Pertama") 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Pihak Kedua untuk melakukan Pengadaan Perpanjangan license SAS Fraud Detection System tahun kedua	6 Oktober 2022 – 6 Oktober 2023
4.	Perjanjian Pengadaan Managed Service OT Security Nomor: 219500.PKS/LOG.PGN.COM/XI/2022 tanggal 25 November 2022 antara PT PGAS Telekomunikasi Nusantara dan PT ITSEC Asia dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup.	1. PT PGAS Telekomunikasi Nusantara ("Pihak Pertama"); dan 2. Perseroan ("Pihak Kedua").	Perjanjian Pengadaan Managed Service OT Security	Jangka waktu pengadaan perangkat, pemasangan dan konfigurasi adalah sejak Perjanjian ditandatangani sampai dengan tanggal 15 Desember 2022 dan Jangka waktu penyewaan perangkat dan layanan OT security adalah selama 12 bulan kalender terhitung sejak Berita Acara Siap Operasi ("BASO") ditandatangani.
5.	Perjanjian Kerjasama Security Operation Center Monitoring Antara Indonesia Bank Pan Indonesia Tbk dengan Indonesia ITSEC Asia Indonesia. Indonesia ITSEC ASIA: 066/SPJ/LGL/ITSEC/X/2022 tanggal 24 Oktober 2022 dibuat dibawah	1. Indonesia Bank Pan Indonesia ("Pihak Pertama"); dan 2. Perseroan ("Pihak Kedua")	Perjanjian Kerjasama Pemberian Jasa Security Operation Center Monitoring	24 Oktober 2022 – 23 Oktober 2023

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	tangan dan bermaterai cukup			
6.	Akta Perjanjian Kontrak Ruko No. 06 tanggal 9 November 2017 yang dibuat di hadapan Nurlaini Sunarto, SH, Notaris di Kota Tangerang Selatan sebagaimana diperpanjang dengan Akta Perjanjian Perpanjang Kontrak Ruko No. 12 tanggal 18 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Nurlaini Sunarto, SH, MKn, Notaris di Kota Tangerang Selatan.	1. Agus Mulya Yunan (“ Pihak Pertama ”); dan 2. Perseroan (“ Pihak Kedua ”).	Perjanjian Sewa Ruko yang beralamat di The Icon Business Park Blok J No. 006, Kabupaten Tangerang, Banten.	1 Desember 2021 – 30 November 2023.
7.	Perjanjian Sewa Ruang Kantor No. 016/GLI-NH/LA/IT SEC/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022 antara PT Graha Lestari Internusa dan Perseroan	1. Graha Lestari Internusa (“ Pemberi Sewa ”); dan 2. Perseroan (“ Penyewa ”).	Perjanjian sewa unit kantor yang beralamat di Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Timur, Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, DKI Jakarta.	1 Desember 2022 – 30 November 2025

Merujuk pada Pasal 12 ayat 12.2 Perjanjian Fasilitas Kredit, Perseroan harus memperoleh persetujuan Bank Raya terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan bentuk perusahaan atau mengubah susunan pengurus dan komposisi permodalan.

Bank Raya melalui suratnya No. R.7/1002/NBU/03/2023 tertanggal 27 Februari 2023 perihal Persetujuan PT ITSEC Asia telah menyetujui rencana Penawaran Umum Perdana Saham yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Perseroan juga telah menerima konfirmasi tertulis Bank Raya melalui surat elektronik yang dikirimkan oleh Bank Raya kepada Perseroan tanggal 19 Juni 2023 bahwa Bank Raya telah menyetujui segala perubahan atau penyesuaian yang harus dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit sepanjang untuk kepentingan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka.

Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan yang menyangkut pelaksanaan penawaran umum perdana saham Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Raya, Perseroan telah mengajukan permohonan pengesampingan atau pengecualian atas pembatasan tersebut kepada Bank Raya berdasarkan Surat Perseroan No. 175/ADM/ITSECASIA/III/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal Permohonan Persetujuan. Dalam surat tersebut Perseroan mengajukan permohonan persetujuan Bank Raya atas hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan status Perseroan yang sebelumnya Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka;
2. Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan;
3. Perubahan komposisi permodalan Perseroan; dan
4. Penghapusan/pencabutan persyaratan untuk memperoleh persetujuan Bank Raya apabila terjadi perubahan komposisi permodalan termasuk komposisi pemegang saham.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Raya berdasarkan surat Bank Raya No. R.7/1002/NBU/03/2023 tanggal 27 Februari 2023 perihal Persetujuan PT ITSEC Asia (“**Surat Bank Raya**”) yang menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan modal dasar dan modal disetor serta nilai nominal;

2. Perubahan status Perseroan dari semula tertutup menjadi terbuka; dan
3. Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris.

Selanjutnya, Perseroan telah mengirimkan surat elektronik kepada Bank Raya pada tanggal 16 Juni 2023 perihal Perubahan Komposisi Pemegang Saham PT ITSEC Asia yang memohon konfirmasi secara tertulis melalui email atau surat bahwa persetujuan yang diberikan dalam Surat Bank Raya adalah pada dasarnya Bank Raya telah menyetujui segala perubahan atau penyesuaian yang harus dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Raya sepanjang untuk kepentingan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, yang mana mencakup juga persetujuan bagi Perseroan untuk tidak diwajibkan lagi memperoleh persetujuan Bank Raya atas perubahan komposisi permodalan termasuk komposisi pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dengan mempertimbangkan setelah Perseroan menjadi perusahaan terbuka, komposisi pemegang saham Perseroan dapat berubah secara terus-menerus sehingga kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Raya tidak mungkin untuk dilaksanakan. Perseroan telah menerima konfirmasi Bank Raya melalui surat elektronik pada tanggal 19 Juni 2023 yang menyatakan bahwa dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan menjadi perusahaan terbuka maka Bank Raya menyetujui untuk tindakan-tindakan sebagai perusahaan terbuka yang tidak mungkin dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Raya termasuk perubahan komposisi pemegang saham dan pengurus selanjutnya tidak lagi memerlukan persetujuan dari Bank Raya.

Perseroan bersama Bank Raya telah menandatangani addendum atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Raya sehubungan dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui Bank Raya di atas berdasarkan Perjanjian Addendum Membuka Kredit No. B.015/KWJ/PK-Int/07/2023 tanggal 24 Juli 2023, dibuat di bawah tangan.

E. ASURANSI

Perseroan memiliki asuransi kesehatan kumpulan (*Medicare*) berdasarkan nomor polis 1113102300005 yang ditanggung oleh PT Lippo General Insurance Tbk untuk Perseroan dengan obyek asuransi adalah untuk seluruh karyawan Perseroan beserta anak dengan periode pertanggungan yaitu 1 Januari 2023 – 31 Desember 2023. Nilai pertanggungan asuransi tersebut sebagai berikut:

No	Jenis Pertanggungan	Batas Manfaat per Periode Polis
1.	Rawat Inap	Tidak Terbatas
2.	Rawat Jalan	Rp10.000.000
3.	Rawat Bersalin	
	a. Melahirkan normal	Rp13.000.000
	b. Melahirkan dengan Operasi (Caesar)	Rp30.000.000
	c. Keguguran	Rp6.000.000
	d. Perawatan Sebelum dan Sesudah Persalinan	Rp6.000.000
4.	Rawat Gigi	Rp5.500.000

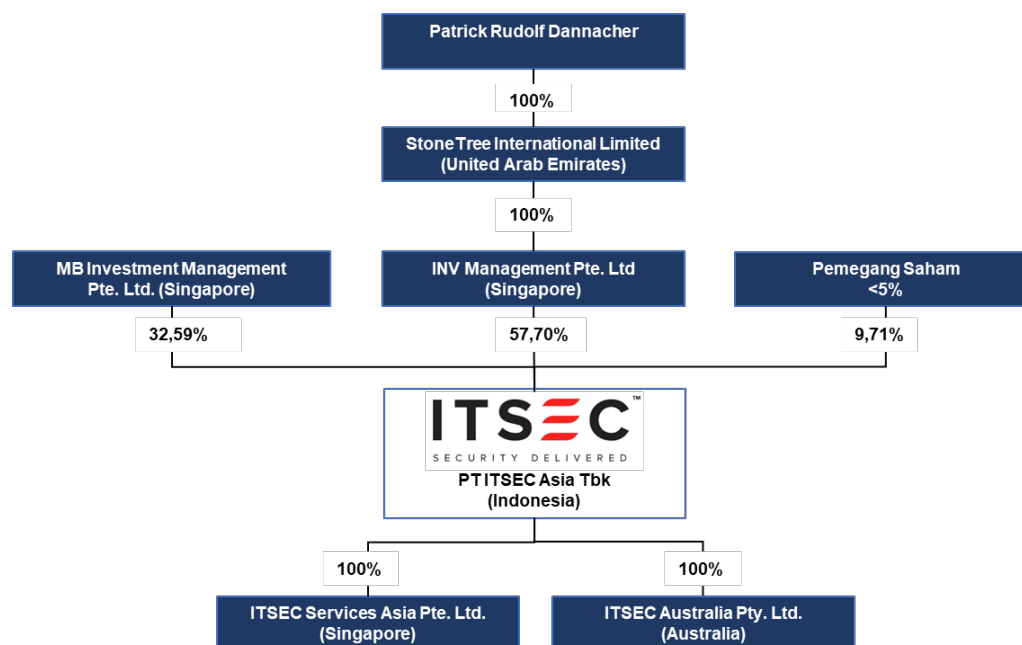
F. ASET TETAP PERSEROAN

Perseroan tidak memiliki aset tetap.

G. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Perseroan telah memperoleh sertifikat merek berupa logo perusahaan dengan bertuliskan ITSEC, yang telah didaftarkan berdasarkan sertifikat No. IDM000904763 yang terdaftar atas nama Perseroan, untuk kelas 42 yang berlaku selama sepuluh tahun sampai dengan 14 Agustus 2029.

H. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN



Pengendali Perseroan adalah Patrick Rudolf Dannacher.

Perseroan telah melaporkan bahwa pemilik manfaat Perseroan adalah Patrick Rudolf Dannacher melalui Notaris Dr. Sugih Haryati, SH, MKn pada tanggal 10 Maret 2023 sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme ("Perpres 13/2018") dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 tentang tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi. Dalam hal ini Patrick Rudolf Dannacher memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres 13/2018.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 112, tanggal, 28 Maret 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan sebagai pemenuhan Pasal 85 Peraturan OJK No. 3/2021, RUPS Perseroan telah menyatakan bahwa Patrick Rudolf Dannacher merupakan Pengendali dari Perseroan.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	INV	ITSEC SIN*	ITSEC AU*
Andri Utama Putra	DU			
Marek Bialoglowy	D			
Doni Mora	D			
Eko Prasudi Widiyanto	D			
Bima Kurniawan	D			
Bambang Susilo	D			
Patrick Rudolf Dannacher	KU	D	D	D
Rico Rizal Budidarmo	K			
Yulius C Rusli	K			
Joseph Edi Hut Lumban Gaol	K			
Richardus Eko Indrajit	KI			
Agustinus Nicholas L.	KI			
Vanessa Ng Swee Tiang		D		

Nama	Perseroan	INV	ITSEC SIN*	ITSEC AU*
Omar Rami Nazzal			D	
Alvin Jude Rafferty				D

Catatan :

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen	D	: Direktur
K	: Komisaris		
ITSEC SIN	: ITSEC Services Asia PTE. LTD		
ITSEC AU	: ITSEC Australia PTY LTD		

I. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta No. 77 tanggal 28 Februari 2023, susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Patrick Rudolf Dannacher
Komisaris	:	Rico Rizal Budidarmo
Komisaris	:	Yulius C Rusli
Komisaris	:	Joseph Edi Hut Lumban Gaol
Komisaris Independen	:	Richardus Eko Indrajit
Komisaris Independen	:	Agustinus Nicholas L. Tobing

Direksi

Presiden Direktur	:	Andri Hutama Putra
Wakil Presiden Direktur	:	Marek Bialoglowy
Direktur	:	Eko Prasudi Widiyanto
Direktur	:	Bima Kurniawan
Direktur	:	Bambang Susilo
Direktur	:	Doni Mora

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Patrick Rudolf Dannacher – Presiden Komisaris



Warga Negara Swiss Berusia 45 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari University of Applied Science (Basel Switzerland).

Saat ini menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2022 – saat ini	:	Founder - StoneTree Group AG
2019 – saat ini	:	Founder - Dannacher Holdings L.L.C
2018 – saat ini	:	Founder - Guardrails Pte. Ltd
2018 – saat ini	:	Founder - StoneTree Cyber Security Ventures Pte. Ltd
2018 – saat ini	:	Founder - Numisec Pte. Ltd.
2015 – saat ini	:	Owner - Altius Capital Fund
2012 – saat ini	:	Founder - StoneTree Group Ltd.
2009 – 2012	:	Managing Director - Bancaire Privee
2006 – 2009	:	Executive Director - Julius Baer & Co. Ltd.
2000 – 2006	:	Vice President - Credit Suisse AG
1998 – 2000	:	Head of Accounting and IT - AVEBE Vertriebs-GmbH

1996 – 1998 : Associate - STG Coopers & Lybrand AG



Rico Rizal Budidarmo – Komisaris

Warga Negara Indonesia Berusia 59 tahun, memperoleh gelar Pasca Sarjana dari New York University pada tahun 1996

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

- 2021 – saat ini : Direktur Eksekutif – Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP)
- 2015 – 2020 : Direktur – PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- 2014 – 2015 : Direktur – PT. Bank Tabungan Negara Tbk
- 2009 – 2014 : Senior Vice President – PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk
- 2003 – 2009 : Vice President – PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk



Yulius C Rusli – Komisaris

Warga Negara Indonesia Berusia 47 tahun, memperoleh gelar Sarjana dari Curtin University pada tahun 1998

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

- 2021 – saat ini : Direktur Business Development – PT. Pilar Bahtera Energy
- 2015 – 2022 : Direktur Utama – PT. Tala Alam Baru, Wind Turbine power plant
- 2017 – 2019 : Direktur IT – Asian Paragames, Jakarta, Indonesia
- 2013 – 2018 : Direktur Business Development – PT. Juvisk Triswarna
- 1999 – 2002 : Managing Director – Tabloid DOT COM & DOT NET



Joseph Edi Hut Lumban Gaol – Komisaris

Warga Negara Indonesia Berusia 53 tahun, memperoleh gelar sarjana dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1992

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

- 2022 – saat ini : Advisor & Chief Digital Ecosystem Integrator – PT. Digiasia Bios
- 2017 – 2021 : CEO – PT. Axiata Digital Service Indonesia
- 2016 – 2017 : Chief of Digital Service Officer – PT. XL Axiata Tbk
- 2000 – 2016 : Founder & CEO – PT. Antar Mitra Prakarsa

- 1998 – 2000 : Product Marketing Manager – PT. Excelcomindo Pratama (XL)
- 1992 – 1998 : Marketing Manager GE Lighting – General Electric (GE) Indonesia



Richardus Eko Indrajit – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 54 tahun, memperoleh gelar Doktor of Business Administration di University of Information Technology & Management, Rzeszow, Poland pada tahun 1995, Doktor Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2021, Doktor Ilmu Pertahanan di Universitas Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2022.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

- 2016 – 2022 : Commissioner – PT ATD Solution
- 2014 – 2016 : Principal – PT IndoConsult Utama
- 2000 – 2014 : CEO – PT Soedarpo Informatika Group
- 1997 – 1999 : General Manager – PT Jakarta Consulting Group
- 1995 – 1997 : Senior Consultant – PT Price-Waterhouse Indonesia Consulting



Agustinus Nicholas L. Tobing – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia Berusia 44 tahun, memperoleh gelar Doktor pada Universitas Pelita Harapan pada tahun 2022.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

- 2020 – saat ini : Security Assurance Country Lead – PT Amazon Web Services
- 2023 – saat ini : Audit Committee – PT Wicaksana Overseas International Tbk (WICO)
- 2022 – saat ini : Risk Oversight Committee – Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
- 2018 – 2023 : Audit Committee – PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)
- 2016 – 2020 : VP & Head of Compliance – PT AIA Financial Indonesia
- 2014 – 2016 : VP & Group Compliance Head – PT Sun Life Financial Indonesia
- 2012 – 2014 : Chief Risk Officer & Head of Risk Compliance Legal – PT Commonwealth Life
- 2011 – 2012 : Head of Internal Audit Quality Assurance – PT Bakrie Telecom Tbk
- 2010 – 2012 : Risk Oversight Committee – PT Bank ICBC Indonesia
- 2010 – 2011 : Associate Director – PT BDO Konsultan Indonesia
- 2008 – 2010 : Senior Manager & ORM Head – Bankwide Regional Operational Risk Manager - PT Bank BII Maybank Tbk
- 2007 – 2008 : Manager & Head of Operational Risk Management - PT ICB Bank Bumiputera Tbk
- 2004 – 2007 : Managing Consultant – PT Insight Consulting

2000 – 2002 : Auditor Staff – KAP Prasetio Utomo & Co (Andersen)



Andri Hutama Putra – Presiden Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 34 tahun, memperoleh gelar Pasca Sarjana dari Curtin University pada tahun 2012.

Saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2013 – saat ini : Presiden Direktur – PT ITSEC ASIA, Tbk
2010 – 2011 : Assisten Produk Manager – Boused Maxitem Indonesia



Marek Bialoglowy – Wakil Presiden Direktur

Warga Negara Polandia Berusia 41 tahun, memperoleh sertifikat kompetensi profesi dari Zespól Szkól Zawodowych im. Powstanców Śląskich w Kędzierzynie-Koźlu tahun 2001.

Saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2010 – saat ini : CTO – PT ITSEC ASIA, Tbk
2008 – 2010 : Security Consultant – Nokia Siemens Networks



Eko Prasudi Widiyanto – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 54 tahun, memperoleh gelar sarjana dari Universitas Padjajaran pada tahun 1993.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2019 – saat ini : Direktur – PT ITSEC ASIA, Tbk
2015 – 2018 : Direktur – Aryputera Sarana Integrasi
2013 – 2015 : General Manager – Acer Indonesia



Bima Kurniawan – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 50 tahun, memperoleh gelar Diploma dari Ambarrukmo Palace Tourism Academy (AMPTA) pada tahun 1993.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2019 – saat ini : Direktur – PT ITSEC ASIA, Tbk

2014 – 2019	:	Director of Business Development – HIT Corporation
2018 – 2019	:	Sales Director – PT. Hexaon Business Mitrasindo
2012 – 2013	:	Executive Director – PT. Mitra Infosarana
2011 – 2012	:	Business Dev Director – PT. Infosys Solusi Terpadu
2009 – 2011	:	Director of Sales – PT. Asia Technology Services
2004 – 2009	:	Asistant Direktur – PT Anabatic Teknologi
2002 – 2004	:	Account Manager – Abimata Persada



Bambang Susilo – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 46 tahun, memperoleh gelar Pasca Sarjana dari Universitas Indonesia pada tahun 2018.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2011 – saat ini	:	Direktur – PT ITSEC ASIA, Tbk
2008 – 2009	:	Manager – BDO
2004 – 2007	:	Managing Consultant – Insight Consulting



Doni Mora – Direktur

Warga Negara Indonesia Berusia 48 tahun, memperoleh gelar sarjana dari Universitas Andalas pada tahun 1998.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 7 Maret 2023 dan memiliki masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun sesuai dengan anggaran dasar.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

Riwayat Pekerjaan

2021 – saat ini	:	Direktur – PT ITSEC ASIA, Tbk
2021 – 2021	:	Client Accounting Service – PT. Teisaku Management Consultant
2020 – 2020	:	Accounting & Tax Manager – Yayasan Scientia International Indonesia
2002 – 2020	:	Accounting Manager – President University Foundation
2000 – 2002	:	Accounting Staff – PT Gerbang Pariwisata Banten

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Dalam hal pengurusan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.

J. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi *stakeholder*.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit dan Unit Audit Internal.

1. Dewan Komisaris

Perseroan memiliki seorang Presiden Komisaris, 3 (tiga) orang Komisaris, dan 2 (dua) orang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2022:

	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Patrick Dannacher	Presiden Komisaris	-	-	-
Richardus Eko Indrajit	Komisaris Independen	-	-	-
Agustinus Nicholas L. Tobing	Komisaris Independen	-	-	-
Yulius C Rusli	Komisaris	-	-	-
Rico Rizal Budidarmo	Komisaris	-	-	-
Joseph Edi Hut Lumban Gaol	Komisaris	-	-	-

Catatan: Pengangkatan seluruh Komisaris baru Perseroan adalah per tanggal 7 Maret 2023, sehingga belum ada Rapat Anggota Dewan Komisaris pada tahun 2022

Pelaksanaan tugas dalam 1 (satu) tahun terakhir dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;

2. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris adalah sebesar Rp785.565.000 tahun 2022, Rp683.100.000 tahun 2021, dan Rp683.100.000 tahun 2020.

2. Direksi

Perseroan memiliki Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur dan Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

1. Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
2. Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada tahun 2022:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Andri Utama Putra	Presiden Direktur	12	12	100%
Marek Bialoglowy	Wakil Presiden Direktur	12	12	100%
Bima Kurniawan	Direktur	12	12	100%
Eko Prasudi Widiyanto	Direktur	12	12	100%
Bambang Susilo	Direktur	12	12	100%
Doni Mora	Direktur	12	12	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan oleh Perseroan untuk Dewan Direksi adalah sebesar Rp3.222.500.000 tahun 2022, Rp2.541.963.000 tahun 2021, dan Rp2.025.000.000 tahun 2020.

3. Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 198/ADM/ITSECASIA/III/2023 tanggal 09 Maret 2023, Perseroan telah menunjuk Viko Setiyawan sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan–ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma *corporate governance* secara umum;
2. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
3. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
4. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
5. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;

6. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
7. Mempersiapkan praktik *Good Corporate Governance* (GCG) di lingkungan Perseroan;
8. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Nama : Viko Setiyawan
 Alamat Sekretaris Perseroan : Kp. Sumur
 Komp Sandang Blok P/12. RT/RW:
 011/017. Kel: Klender, Kec: Duren Sawit
 Telepon : 081314375828
 Email : viko@itsecasia.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalalan kerja dari Sekretaris Perseroan:

Pendidikan : Jurusan Administrasi Niaga, Universitas Indonesia
Pengalaman Kerja
 2021 – 2023 : Corporate Secretary - PT Arsy Buana Travelindo Tbk
 2019 – 2021 : Corporate Secretary - PT Umara Nikmat Boga (UMARA GROUP)
 2018 – 2019 : Corporate Secretary - PT Paramita Bangun Sarana Tbk
 2009 – 2018 : Corporate Secretary & Legal Support - First Media Group (PT First Media Tbk & PT Link Net Tbk)

4. Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 197/ADM/ITSECASIA/III/2023 tanggal 09 Maret 2023.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

Wewenang Komite Audit:

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua

Nama : Agustinus Nicholas L. Tobing
Pendidikan : Doktor pada Universitas Pelita Harapan
Pengalaman Kerja
2023 – saat ini : Audit Committee - PT Wicaksana Overseas International Tbk (WICO)
2022 – saat ini : Risk Oversight Committee - Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
2020 – saat Ini : Security Assurance Country Lead - PT Amazon Web Services
2016 - 2020 : VP & Head of Compliance - PT AIA Financial Indonesia

Anggota 1

Nama : Arini Imamawati
Pendidikan : Magister Management in Business Management
Pengalaman Kerja
2022 – saat ini : Audit Committee Member - PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk.
2021 – saat ini : Audit Committee Member - PT Bank ICBC Indonesia
2021 : Financial Controller - PT Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL Finance)
2018 – 2021 : Head of Finance - PT Danareksa (Persero)

Anggota 2

Nama : Tjeppey Kustiwa
Pendidikan : Magister Manajemen Perbankan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
Pengalaman Kerja
2022 - 2023 : Team Member Audit Laporan Keuangan Tahun 2022 (General Audit) - PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.
2021 - 2022 : Team Member Audit Laporan Keuangan Tahun 2021 (General Audit) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial - Kesehatan (BPJS Kesehatan)
2021 : Team Leader Audit AUP Rekonsiliasi Utang Piutang - PT Asuransi Jiwa Syariah Al Amin dan PT Reasuransi Syariah Indonesia.
2020 : Team Leader Review Implementasi Fungsi Internal Audit - PT Bank BRISyariah, Tbk

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 7 Maret 2023, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

5. Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk komite nominasi dan remunerasi yang telah dijalankan oleh dewan komisaris sesuai dengan POJK No. 34/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan Atau Perusahaan Publik, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua

Nama : Richardus Eko Indrajit
Pendidikan : Sarjana pada Universitas ITS
Pengalaman Kerja
2016 – 2022 : Commissioner - PT ATD Solution
2014 – 2016 : Manager Principal - PT IndoConsult Utama
2000 – 2014 : CEO - PT Soedarpo Informatika Group
1997 – 1999 : General Manager - PT Jakarta Consulting Group
1995 – 1997 : Senior Consulting - PT Price-Waterhouse Indonesia Consulting

Anggota 1

Nama : Rico Rizal Budidarmo
Pendidikan : MBA pada New York University
Pengalaman Kerja
2021 – 2023 : Direktur Eksekutif - LSPP
2015 – 2020 : Direktur – BNI
2014 – 2015 : Direktur - BTN
2009 – 2014 : SVP - BRI
2003 – 2009 : VP - BRI

Anggota 2

Nama : Widiyanto Pratama
Pendidikan : Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Gunadarma
Pengalaman Kerja
2022 – Saat ini : HR Operation PT. ITSEC Asia
2021 – 2022 : Spv HRD – PT. Essense Teknologi Indonesia
2013 – 2021 : Spv HRD – PT. Integrasi Neka Optik
2008 – 2013 : Jurnalis – PT. Konten Media Pratama

Tugas, tanggung jawab dan wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain meliputi:

Wewenang

1. Memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Remunerasi dan Nominasi dari berbagai pihak baik internal maupun eksternal Perseroan.
2. Mendapatkan masukan atau saran yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan fungsi Remunerasi dan Nominasi baik pihak internal dan eksternal Perseroan.

Tugas, Tanggung Jawab dan Prosedur/Tata Kerja

Terkait dengan fungsi Nominasi, memiliki tugas, tanggung jawab dan prosedur sekurang-kurangnya:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - b. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
4. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Terkait dengan fungsi Remunerasi, memiliki tugas, tanggung jawab dan prosedur sekurang-kurangnya:

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Struktur Remunerasi
 - b. Kebijakan atas remunerasi
 - c. Besaran atas remunerasi
2. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi

Dalam melaksanakan tugasnya untuk meningkatkan kualitas penerapan Tata Kelola, Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan memiliki pedoman Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi yang disahkan pada tanggal 21 Maret 2023. Piagam tersebut merupakan pedoman tertulis yang dijadikan sebagai acuan dari setiap kegiatan operasional Komite Nominasi dan Remunerasi yang memuat Visi & Misi, Organisasi, Wewenang serta tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi.

6. Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.199/ADM/ITSECASIA/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- b. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- c. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- d. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- e. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- f. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- g. Bekerja sama dengan Komite Audit;
- h. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- i. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Wewenang Unit Audit Internal:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	: Donny Utama
Pendidikan	: Sarjana Ekonomi Akuntansi di Universitas Pasundan
<u>Pengalaman Kerja</u> 2006 – 2023	: Area Internal Audit Team Leader - PT Oto Multiartha

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal Perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

7. Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap

dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

8. Manajemen Risiko

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

Mitigasi Risiko Utama dan Risiko Usaha :

a. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Mitigasi Risiko Ketergantungan Terhadap Pelanggan

Risiko ketergantungan terhadap pelanggan merupakan risiko utama bagi Perseroan. Saat ini pelanggan utama Perseroan didominasi di sektor industri jasa keuangan dan telekomunikasi. Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan fokus dalam memperluas basis pelanggan dan mengurangi ketergantungan pada pelanggan utama. Untuk mencapai hal tersebut, Perseroan melakukan pemasaran untuk menarik pelanggan baru, meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ditawarkan, atau mengeksplorasi pasar baru untuk mendiversifikasi bisnis. Perseroan juga memiliki strategi untuk mempertahankan pelanggan yang ada, seperti memberikan pelayanan yang baik dan meningkatkan kualitas produk atau layanan.

b. RISIKO USAHA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

1) Mitigasi Risiko Implementasi

Untuk mengurangi risiko implementasi, manajemen menerapkan beberapa langkah yang harus dijalankan. Pertama, rencana yang matang harus dikembangkan, termasuk strategi pengelolaan risiko. Semua pemangku kepentingan, seperti karyawan, pelanggan, vendor, dan mitra, harus terlibat dalam proses perencanaan untuk memastikan semua orang memiliki pemahaman yang sama. Studi kelayakan harus dilakukan untuk menentukan apakah proyek tersebut layak, dan sistem harus diuji serta divalidasi secara menyeluruh. Komunikasi yang teratur harus dipertahankan dengan semua pemangku kepentingan sepanjang proses implementasi, dan karyawan harus dilatih untuk menggunakan sistem baru secara efektif. Perubahan organisasi harus dikelola, dan kinerja sistem harus dimonitor dan dievaluasi untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Perseroan dapat mengurangi risiko kegagalan implementasi dan memastikan keberhasilan implementasi sistem atau proyek baru. Perencanaan yang memadai, keterlibatan pemangku kepentingan, pengujian, pelatihan, komunikasi, pengelolaan perubahan, dan pemantauan dan evaluasi adalah komponen kunci dalam mengurangi risiko implementasi.

2) Mitigasi Risiko Reputasi

Untuk memitigasi risiko reputasi, Perseroan mengambil beberapa tindakan pencegahan. Pertama, Perseroan memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk menghindari pelanggaran atau tindakan yang merugikan reputasi Perseroan. Selain itu, Perseroan juga memprioritaskan privasi data dengan hati-hati dan menjaga standar etika yang tinggi dalam semua aspek bisnisnya.

Selain itu, Perseroan juga memiliki kemampuan untuk mengantisipasi dan mengatasi masalah dengan cepat. Perseroan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan pengguna, mendengarkan umpan balik mereka, dan mengambil tindakan untuk memperbaiki kekurangan dan masalah yang muncul. Sebagai bagian dari membangun hubungan yang kuat, Perseroan juga transparan dan jujur dalam semua komunikasi dengan pelanggan, pengguna, dan publik secara umum.

3) Mitigasi Risiko Persaingan

Untuk memitigasi risiko persaingan, Perseroan melakukan beberapa tindakan strategis. Pertama, Perseroan memastikan bahwa produk atau layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Dalam hal ini, Perseroan sudah melakukan riset pasar dan analisis pesaing secara teratur untuk memahami

tren pasar dan mengetahui bagaimana produk atau layanan yang ditawarkan dapat menjadi lebih unggul dibandingkan pesaing.

Selain itu, Perseroan juga terus menerus berinovasi dan meningkatkan produk atau layanan yang dimiliki dengan cara terus mengembangkan teknologi baru dan meningkatkan kualitas produk atau layanan yang ada. Perseroan juga berupaya membangun citra merek yang kuat dan meningkatkan promosi produk atau layanan agar lebih dikenal oleh pasar.

4) Mitigasi Kegagalan Produk Baru

Untuk memitigasi risiko kegagalan produk baru, Perseroan terus menerus melakukan riset dan analisis pasar yang mendalam untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Selain itu, Perseroan juga selalu memastikan bahwa produk tersebut memiliki kualitas yang baik dan dapat bersaing dengan produk serupa yang ada di pasar.

Selain itu, Perseroan juga melakukan uji coba produk sebelum diluncurkan ke pasar. Uji coba dapat dilakukan dengan melibatkan pelanggan beta yang mampu memberikan umpan balik mengenai kelebihan dan kekurangan produk. Perseroan juga memiliki strategi pemasaran yang tepat untuk memperkenalkan produk baru ke pasar. Dalam hal ini, Perseroan sudah membuat rencana pemasaran yang jelas dan efektif untuk memastikan bahwa produk baru tersebut dikenal oleh masyarakat dan dapat bersaing dengan produk serupa di pasar.

5) Mitigasi Risiko Perubahan Teknologi

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan selalu memantau perkembangan teknologi dan mengevaluasi teknologi yang digunakan secara berkala. Perseroan juga berinvestasi dalam teknologi baru dan inovatif yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas bisnis.

Selain itu, Perseroan juga memiliki strategi yang tepat untuk mengelola perubahan teknologi, termasuk pelatihan karyawan dan pengelolaan perubahan secara bertahap. Perseroan juga selalu memastikan bahwa sistem *backup* dan pemulihan yang efektif telah disiapkan untuk mengatasi kemungkinan gangguan atau masalah teknis yang terjadi selama proses perubahan.

6) Mitigasi Risiko Kepatuhan

Untuk memitigasi risiko kepatuhan, Perseroan selalu memastikan bahwa semua karyawan memahami persyaratan dan regulasi yang berlaku di bidang teknologi informasi dan keamanan siber, termasuk persyaratan keamanan data dan privasi pelanggan. Perseroan memiliki kebijakan yang jelas dan dipatuhi oleh semua karyawan, serta melaksanakan pelatihan dan penilaian berkala untuk memastikan kepatuhan terus dipertahankan. Selain itu, Perseroan juga memiliki sistem pelaporan dan pengawasan yang efektif untuk memastikan kepatuhan dengan regulasi dan standar yang berlaku.

9. Tanggung Jawab Sosial (Corporate Social Responsibility)

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:

1. Seminar & Webinar *Cybersecurity Awareness* di kampus-kampus
2. Seminar & Webinar *Cybersecurity Awareness* di radio
3. Seminar & Webinar *Cybersecurity Awareness* di acara-acara televisi



Seminar & Webinar *Cybersecurity Awareness* di kampus-kampus

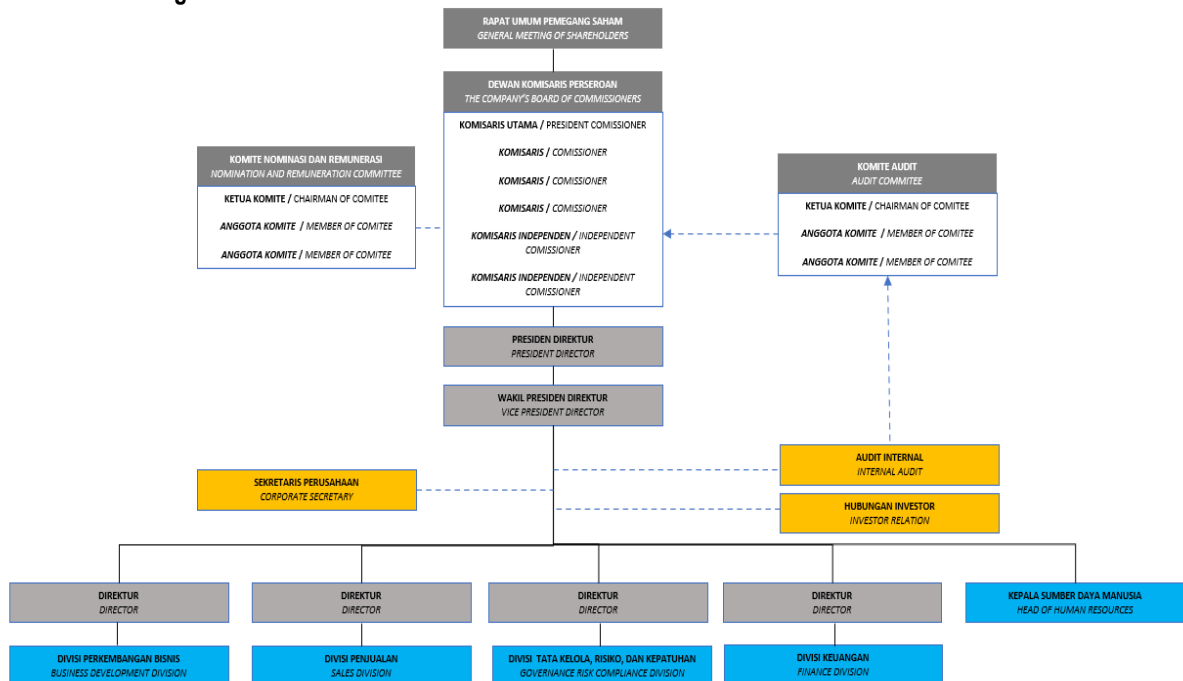


Seminar & Webinar *Cybersecurity Awareness* di radio



Seminar & Webinar *Cybersecurity Awareness* di acara-acara televisi

10. Struktur Organisasi Perseroan



K. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia yang dimilikinya, dengan secara teratur melakukan pelatihan baik secara internal maupun eksternal dalam rangka mewujudkan strategi usaha serta pengembangan usaha Perseroan di masa mendatang.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, adalah sebagai berikut:

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember		
	2022	2021	2020
Tetap	179	156	106
Tidak Tetap	25	2	0
Jumlah	204	158	106

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan (hanya karyawan tetap)

Jabatan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Komisaris & Direktur	9	9	7
Manager	17	16	10
Staff	178	133	89
Jumlah	204	158	106

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember		
	2022	2021	2020
>55 Tahun	3	2	0
46 - 55 Tahun	20	26	12
31 - 45 Tahun	77	63	39
s/d 30 Tahun	99	65	55
< 21 Tahun	7	2	0
Jumlah	204	158	106

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2022	2021	2020
S1	163	114	92
Diploma	23	33	7
SMA atau Sederajat	18	11	7
< SMA	0	0	0
Jumlah	204	158	106

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember		
	2022	2021	2020
Keuangan	7	6	4
Operasional	182	142	95
Marketing	15	10	7
Jumlah	204	158	106

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2022	2021	2020
Kantor Pusat	204	158	106

Lokasi	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah	204	158	106

Sumber: Perseroan

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Kewarganegaraan

Lokasi	31 Desember		
	2022	2021	2020
Warga Negara Indonesia	203	157	105
Warga Negara Asing	1	1	1
Jumlah	204	158	106

Sumber: Perseroan

Di Indonesia, hanya terdapat 1 karyawan dengan status kewarganegaraan asing yaitu Marek Bialoglowy yang menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur.

Tenaga Kerja dengan Keahlian Khusus

No.	Nama	Umur (tahun)	Jabatan	Sertifikat	Nomor Sertifikasi	Masa Berlaku
1	Eko Prasetyo	37	Head of Penetration Testing	Offensive Security Certified Expert	Nomor OS-CTP-02905	17 Juli 2015 – saat ini
				Offensive Security Certified Professional	Nomor OS-101-04064	8 Januari 2015 – saat ini
2	Rio Aseptia	37	Head of Penetration Testing	Certified Ethical Hacker	Nomor ECC92654645596	28 Maret 2014 – 31 maret 2020
				EC-Council Certified Security Analyst	Nomor ECC4538913242	08 November 2015 – 07 November 2018
				Offensive Security Certified Professional	Nomor OS-101-06596	4 Januari 2017 – saat ini
3	Eko Fiat Prihandi	40	Head of Professional Service	GIAC Certified Incident Handler – GCIH	Nomor 23804	12 Juni 2014 – 30 Juni 2018
				GIAC Security Essentials – GSEC	Nomor 36735	9 April 2015 – 30 April 2019
				NSE 5 Network Security Analyst	Nomor KISvPMXkS	19 Desember 2019 – 19 Desember 2021
				Certified Network Security Engineer	Nomor 6-918413	28 Juli 2015 – saat ini
4	Augusta Bogie Satria Nugroho	33	Principal Consultant	CCNA Exploration : Network Fundamentals	Nomor -	27 Oktober 2009 – saat ini
				CCNA Exploration : LAN Switching and Wireless	Nomor -	6 Juli 2010 – saat ini
				CCNA Exploration : Routing Protocols And Concepts	Nomor -	27 April 2010 –
5	Muhammad Ray Ramadhan	34	Head of DevSecOps	Certified Ethical Hacker	Nomor ECC06730995437	03 Agustus 2017 – 02

No.	Nama	Umur (tahun)	Jabatan	Sertifikat	Nomor Sertifikasi	Masa Berlaku
						Agustus 2020
6	Junior Lazuardi	38	Principal Forensic	Certified Information Systems Auditor	Nomor 1083556	25 Mei 2010 – 31 Januari 2023
				CSX Cybersecurity Practitioner	Nomor 1900239	17 September 2019 – 31 Januari 2023
7	Irvan Hendrik	39	Sr. Consultant	CREST Registered Penetration Tester	Nomor 58684188	16 Desember 2020 – saat ini
				Certified Information Systems Security Professional	Nomor 413769	1 Juni 2022 – 31 Mei 2025
				Systems Security Certified Practitioner	Nomor 413769	1 Mei 2021 – 30 April 2024
				Certified Azure Red Team Professional	Nomor -	6 Februari 2023 –
				Certified Information Security Manager	Nomor 221843657	17 Juni 2022 – 31 Januari 2026
				CREST Practitioner Security Analyst	Nomor 58684188	16 Desember 2020 – saat ini
8	Vinsensus	46	Head of Audit and Data Privacy	EU General Data Protection Regulation Foundation	Nomor 986552	24 Januari 2018 –
				EU General Data Protection Regulation Practitioner	Nomor 982879	02 Februari 2002 – saat ini
9	Atik Pilihanto	37	Security Solution Director	TOGAF 9 Certified Level	Nomor 60549	24 Juli 2012 – saat ini
				GIAC Certified Incident Handler – GCIH	Nomor 18603	11 Januari 2011 – 31 Januari 2015
				GIAC Security Essentials – GSEC	Nomor 31795	23 Juni 2011 – 30 Juni 2015
				Juniper Networks Certified Professional	Nomor -	16 Juli 2012 – saat ini
10	Bambang Susilo	46	GRC Director	Certified Information Systems Auditor	Nomor 0646675	5 April 2006 – 31 January 2022
				Certified Information Security Manager	Nomor 1013418	15 Maret 2010 – 31 Januari 2020

No.	Nama	Umur (tahun)	Jabatan	Sertifikat	Nomor Sertifikasi	Masa Berlaku
				PECB Certified ISO/IEC 27001 Lead Auditor	Nomor ISLA 1000329-2016-06	10 Juni 2016 – 10 Juni 2019
				Information Technology System Lead Auditor Course ISO/IEC 20000:2011	Nomor ITS 040213/2225	10 Juni 2013 – 14 Juni 2013
11	Antonius Andy Wijaya	45	MSS Director	Certified Information Systems Auditor	Nomor 0542914	3 Oktober 2005 – 31 Januari 2021

Tidak terdapat perjanjian yang melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

L. KETERANGAN TENTANG PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, DIREKSI DAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak serta Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak, saat ini tidak tersangkut perkara perdata, pidana, dan/atau tuntutan, gugatan ataupun perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan perpajakan dan perburuhan dan juga perkara kepailitan maupun mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, serta tidak terdapat potensi perkara atau somasi atau klaim yang sedang dihadapi Perseroan dan Perusahaan Anak, Direksi Perseroan dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak, yang berpengaruh secara material dan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan terhadap rencana Penawaran Umum Perdana Saham.

M. INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

1. INV Management Pte. Ltd

INV Management Pte. Ltd ("INV") adalah pemilik/pemegang 3.139.336.097 saham dalam Perseroan atau mewakili 57,70% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

INV telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Singapura berdasarkan *Certificate Confirming Incorporation of Company* tertanggal 3 Oktober 2017 yang diterbitkan oleh ACRA (UEN: 201728219R).

INV beralamat di 531A Upper Cross Street #04-95, Hong Lim Complex, Singapura.

b. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha INV bergerak dalam bidang perusahaan holding.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Stonetree International Limited merupakan pemegang 100.000 lembar saham biasa yang mewakili 100% saham yang dikeluarkan oleh INV dengan nilai nominal seluruhnya USD100.000.

d. Pengurusan dan pengawasan

Susunan terakhir Pengurus INV adalah sebagai berikut:

1. Direktur : Patrick Rudolf Dannacher
2. Direktur : Vanessa Ng Swee Tiang

2. MB Investment Management Pte. Ltd.

MB Investment Management Pte. Ltd (“**MB Investment**”) adalah pemilik/pemegang 1.772.934.657 saham dalam Perseroan atau mewakili 27,49% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

MB Investment telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Singapura berdasarkan *Certificate Confirming Incorporation of Company* tertanggal 26 Januari 2023 yang diterbitkan oleh ACRA (UEN: 202302858Z).

b. Kegiatan usaha

Kegiatan usaha MB Investment bergerak dalam bidang perusahaan holding.

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Marek Bialoglowy merupakan pemegang 1000 lembar saham biasa yang mewakili 100% saham yang dikeluarkan oleh MB Investment dengan nilai nominal seluruhnya SGD1000.

d. Pengurusan dan pengawasan

Susunan terakhir Pengurus MB Investment adalah sebagai berikut:

1. Direktur : Omar Rami Nazzal
2. Direktur : Marek Bialoglowy

N. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

1. Umum

PT ITSEC ASIA, Tbk (“Perseroan” atau “ITSEC”) didirikan pada tahun 2010 di Indonesia dengan kantor regional di Singapura dan Australia yang menawarkan layanan keamanan siber untuk pelanggan di 13 negara di seluruh Asia Pasifik. ITSEC adalah salah satu perusahaan keamanan siber terbesar di APAC, dengan lebih dari 200 karyawan di tiga negara. ITSEC memberdayakan klien dengan melindungi bisnis mereka dari kejahatan dunia maya dan membantu mereka memenuhi kewajiban kepatuhan keamanan dunia maya.

VISI

Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya di industri keamanan siber.

MISI

Untuk menyediakan keamanan informasi terkini untuk bidang teknologi informasi (TI) dan teknologi operasional (TO), pencegahan penipuan, serta solusi keamanan siber untuk sektor-sektor penting seperti perbankan, keuangan, telekomunikasi, energi, transportasi, manufaktur, dan industri lainnya.

Perseroan telah membangun kompetensi keahlian selama lebih dari satu dekade dengan memberikan ribuan layanan dan solusi keamanan informasi berkualitas tinggi. Perseroan memiliki kerjasama dengan mitra teknologi kelas dunia. Perseroan menyediakan solusi keamanan informasi di seluruh sektor keuangan, telekomunikasi, energi, transportasi, manufaktur, dan industri penting lainnya. Kami juga memiliki pengalaman luas membantu pelanggan kami dengan pencegahan penipuan, teknologi operasional (TO), dan keamanan Industrial IoT (IIoT).

ITSEC melayani lebih dari 60 klien blue-chip yang mencakup perbankan, asuransi, jasa keuangan, telekomunikasi dan IT, pemerintah, energi, e-commerce, layanan kesehatan, dan lain sebagainya. Sebagian besar pelanggan ini tersebar di kawasan Asia Pasifik. ITSEC tidak hanya memenuhi kebutuhan perusahaan besar dan unicorn, tetapi juga segmen usaha kecil dan menengah. Perseroan memahami bahwa kebutuhan usaha kecil dan menengah cukup berbeda dari perusahaan besar sehingga layanan yang ditawarkan telah diseleksi agar sesuai dengan anggaran dan kebutuhan mereka.

Sebagai bagian dari visi Perseroan, ITSEC senantiasa meyakini penyampaian nilai melalui kualitas. Perseroan berkomitmen untuk menyediakan standar terbaik bagi karyawannya. Selama bertahun-tahun, melalui kerja sama dengan berbagai organisasi ternama di dunia, ITSEC berhasil meraih sejumlah akreditasi dan keanggotaan spesialis dari lembaga profesional independen terkemuka. Sejumlah sertifikasi terdepan termasuk sertifikasi ISO-27001, akreditasi CREST, dan sertifikasi ISO-9001. Sebagai bagian dari akreditasi CREST, ITSEC merupakan penguji penetrasi yang bersertifikasi dan penyelenggara penilaian kerentanan bersertifikasi. Selain itu, di Singapura, ITSEC telah memperoleh akreditasi dari BizSafe3, AISP, dan EPPU.

2. Jaringan Distribusi

Perseroan memiliki tiga entitas global – PT ITSEC ASIA, Tbk (di Indonesia), ITSEC Services Asia Pte. Ltd. (di Singapura), dan ITSEC Australia Pty. Ltd. (di Australia) dengan total 204 karyawan. PT ITSEC ASIA, Tbk merupakan unit tertua dari Perseroan sebelum Perseroan mengembangkan operasinya ke Singapura dan Australia, masing-masing pada tahun 2017 dan 2018.

- **PT ITSEC ASIA, Tbk (Indonesia):** ITSEC Asia merupakan perusahaan keamanan siber dengan akreditasi ISO 9001 dan ISO 27001 di Indonesia. Selain menyediakan layanan keamanan tradisional, Perseroan telah mengembangkan penawaran inteligensi ancaman dan penawaran MSS tingkat lanjutnya hingga mencakup Forensik, Respon insiden, Kepatuhan Risiko Global, DevSecOps, dan Manajemen SOC.
- **ITSEC Services Asia Pte. Ltd. (Singapura):** ITSEC Singapura menawarkan layanan keamanan siber kepada pelanggan di India, Sri Lanka, Malaysia, Kamboja, Laos, Thailand, Taiwan, Tiongkok, Hong Kong, Filipina, dan Jepang. Unit ini memiliki akreditasi yang diakui seperti ISO dan CREST serta terdaftar di SESAMI e-Sourcing Platform, AISP, dan EPPU, sehingga perusahaan dapat berpartisipasi dalam transaksi dengan pemerintah.
- **ITSEC Australia Pty. Ltd. (Australia):** ITSEC di Australia menawarkan layanan MSS dan Pengujian Penetrasi bagi pelanggan di Australia. ITSEC Australia memiliki konsultan bersertifikasi CREST di Singapura, oleh karenanya, ITSEC Australia mampu menawarkan layanan jarak jauh kepada pelanggan Australia dan dengan demikian lebih unggul dari segi harga. Tahun lalu, untuk lebih lanjut memperkuat posisinya, perusahaan membentuk satu tim kecil yang terdiri dari pengujian penetrasi di Australia.

3. Prospek Usaha

Sejalan dengan program pemerintah Indonesia yang saat ini sedang mendorong perkembangan industri digital, Perseroan memandang pertumbuhan industri teknologi keamanan siber di Indonesia juga akan meningkat dengan pesat. Tingkat digitalisasi yang tinggi juga meningkatkan risiko serangan siber. Menurut data dari Frost & Sullivan, sebanyak 49% organisasi di Indonesia pernah mengalami serangan siber, merugikan Indonesia sebesar US \$ 43,2 miliar, atau 3,7% dari total PDB Indonesia. Untuk Indonesia, diperlukan strategi dan taktik keamanan siber yang efektif, karena Indonesia merupakan negara ketiga yang paling rentan terhadap serangan malware. Keamanan siber harus menjadi bagian dari rencana transformasi digital pada setiap organisasi di Indonesia, dimana disinilah peran dan sekaligus menjadi peluang pertumbuhan bisnis perusahaan.

Prospek pertumbuhan industri teknologi keamanan siber di Indonesia masih sangat luas. Faktor-faktor yang mendukung hal tersebut antara lain:

Prospek Usaha *Managed Security Services (MSS)*

Transformasi digital telah meningkatkan penggunaan teknologi seperti *cloud*, *IoT*, dan aplikasi berbasis web dan *mobile applications* pada perusahaan-perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi di setiap area operasi bisnis. Namun, tingkat adopsi teknologi yang cepat menyebabkan infrastruktur TI pada perusahaan menjadi lebih kompleks dan ancaman siber bertumbuh lebih luas dan canggih, sehingga keamanan semakin sulit untuk dikelola. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan menjadi semakin rentan terhadap serangan siber.

Kombinasi dari adopsi penggunaan teknologi yang sangat cepat, potensi serangan siber yang semakin canggih, dan kurangnya tenaga profesional keamanan siber yang berkualitas di industri saat ini, telah memaksa Perusahaan untuk menunjuk penyedia layanan keamanan siber untuk membantu mengatasi tantangan ini. Dengan mengalihdayakan operasi keamanan mereka, organisasi mendapatkan akses ke berbagai *Managed Security Services (MSS)* dan *Professional Security Services (PSS)* seperti pemantauan keamanan 24x7x365, *threat management*, respon insiden dan manajemen kepatuhan, serta wawasan dari ahli-ahli keamanan siber yang berpengalaman.

Banyak perusahaan memutuskan untuk bermitra dengan *Managed Security Services Providers (MSSP)* terutama disebabkan oleh kurangnya jumlah karyawan dan keahlian internal. MSSP memberikan skala ekonomi yang memungkinkan organisasi yang mereka layani dapat lebih efisien dengan mengizinkan MSSP untuk mengelola, memelihara, merekrut, melatih, dan mempertahankan tenaga profesional keamanan siber yang berpengalaman.

Pasar MSS telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dan tren ini diperkirakan akan berlanjut di tahun-tahun mendatang. Kebutuhan akan MSS didorong oleh beberapa faktor:

- a. **Sedikitnya Tenaga Profesional Keamanan Siber yang Berkualitas:** Hal ini mendorong perusahaan untuk mengalihdayakan perlindungan keamanan siber mereka karena semakin sulit untuk merekrut dan mempertahankan

tenaga profesional keamanan siber. Kondisi ini menjadi peluang besar bagi MSSP karena dapat menawarkan berbagai solusi dan layanan keamanan dengan *scope* layanan yang luas. Perusahaan-perusahaan dapat memanfaatkan pengalaman dan keahlian yang disediakan oleh MSSP sehingga dapat berkonsentrasi pada aktivitas bisnis inti dan menghemat biaya yang cukup besar yang kemungkinan akan dikeluarkan untuk mengembangkan dan memelihara *Security Operations Center* (SOC) internal.

- b. **Meningkatnya Kompleksitas Produk dan Solusi Keamanan Siber:** Rentanya kejahatan-kejahatan siber menyebabkan pengembangan solusi keamanan siber menjadi semakin kompleks. Untuk melindungi perusahaan dari kejahatan siber tersebut memerlukan pengalaman, pengetahuan, dan spesialisasi khusus yang menyebabkan perusahaan akan terus mencari solusi keamanan siber.
- c. **Kelanjutan Penerapan *Remote Working*:** Pandemi telah mempercepat transformasi digital dan mengubah cara organisasi menjalankan bisnisnya. Banyak perusahaan telah beralih ke sistem *Remote Working* yang sudah menjadi hal yang normal. Perusahaan perlu menerapkan strategi keamanan siber yang mencakup *Managed Detection and Response* (MDR), simulasi pembobolan dan serangan siber, *zero trust frameworks*, dan banyak solusi dan layanan lain untuk mendukung *Remote Working* tersebut. Cara terbaik untuk memastikan perencanaan dan implementasi yang benar dari strategi tersebut adalah dengan cara bermitra dengan MSSP. MSSP dapat menyediakan layanan ini beserta rangkaian keahlian keamanan siber lainnya dengan biaya lebih rendah dibandingkan SOC internal.
- d. **Kepatuhan terhadap Peraturan:** Perusahaan-perusahaan melibatkan MSSP untuk aktivitas seperti audit, layanan kepatuhan, respon insiden, dan pengujian penetrasi untuk memastikan bahwa mereka tetap mematuhi undang-undang perlindungan data dan peraturan yang berlaku pada industri. Perusahaan-perusahaan akan mengandalkan MSSP untuk memperoleh akses terhadap para ahli pengendalian dan pemantauan keamanan siber untuk membantu mereka dalam mengembangkan strategi keamanan yang sesuai dengan persyaratan kepatuhan.
- e. **Masalah Geopolitik Mendorong Serangan yang Disponsori Negara:** Perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung meningkatkan kebutuhan akan keamanan siber perusahaan dan pemerintahan. Peningkatan serangan yang disponsori negara menyoroti pentingnya langkah-langkah keamanan siber yang proaktif. Metode keamanan siber tradisional mungkin sudah tidak memadai untuk memberikan perlindungan terhadap serangan yang sangat canggih dan terarah. Jumlah serangan yang disponsori negara dapat meningkat, hal ini dapat mendorong kebutuhan perusahaan atau pemerintahan untuk bermitra dengan MSSP yang dapat berintegrasi dengan lingkungan OT/IoT.

Prospek Usaha *Professional Security Services* (PSS)

Professional Security Services (PSS) telah menjadi komponen penting dari strategi keamanan siber bagi bisnis di seluruh industri. PSS mencakup serangkaian layanan, termasuk penilaian risiko, *vulnerability testing*, pengujian penetrasi, audit keamanan, dan respon insiden.

Layanan yang tersedia mencakup keterlibatan strategis dalam respon insiden siber, penilaian postur keamanan siber, dan perencanaan strategis untuk meningkatkan ketahanan siber. Layanan ini merupakan proyek dengan cakupan yang ditentukan. Penyedia pada umumnya menyediakan *vulnerability management* dan layanan respon insiden berdasarkan perjanjian layanan berjangka (*retainer*). Mengingat ancaman siber terus berkembang dan menjadi lebih canggih, PSS menjadi semakin dibutuhkan.

Adopsi PSS telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir karena perusahaan-perusahaan semakin sadar akan risiko yang ditimbulkan oleh ancaman siber. Seiring dengan banyaknya bisnis yang menyimpan data sensitif dan menjalankan operasinya secara daring, kebutuhan akan langkah-langkah keamanan siber yang kokoh menjadi sangat penting. PSS menyediakan berbagai layanan yang dirancang untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem dan mencegah serangan siber. Melalui kemitraan dengan penyedia PSS, perusahaan-perusahaan dapat memperoleh manfaat dari teknologi dan keahlian keamanan canggih tanpa harus membangun dan mengelola tim keamanan siber secara internal.

Kedepannya, persyaratan kepatuhan akan tetap menjadi pendorong utama pasar PSS. Pemberlakuan undang-undang privasi data atau peraturan keamanan siber yang diperbarui di banyak negara secara global mendorong perusahaan untuk memanfaatkan PSS mengingat PSS menyediakan akses terhadap ahli eksternal untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terbaru. Pengujian penetrasi dan tata kelola serta kepatuhan risiko dapat membantu perusahaan dalam menghindari sanksi yang dikarenakan terjadinya pembobolan data. Penilaian keamanan yang menyeluruh, termasuk pengujian penetrasi menggunakan mesin dan secara manual, serta penawaran CISO-as-a-service, muncul sebagai generasi baru layanan keamanan profesional.

4. Kegiatan Usaha Perseroan

Perseroan menawarkan jasa keamanan siber dalam tiga tahap, yaitu (1) Penilaian, (2) Implementasi, dan (3) Analisis, untuk memastikan perlindungan atas infrastruktur Teknologi Informasi ("TI") perusahaan-perusahaan terhadap serangan siber dengan tetap mematuhi peraturan kepatuhan dari pemerintah.

Perseroan menawarkan serangkaian portfolio jasa keamanan siber, dan telah menjalin kemitraan dengan perusahaan dan badan pemerintah untuk menciptakan infrastruktur keamanan siber yang dapat diandalkan.

Secara umum, portfolio penawaran Perseroan dapat dikategorikan ke dalam enam kategori di bawah ini:

Portofolio ITSEC

<i>Managed Security Services (MSS)</i>	<i>Professional Security Services (PSS)</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan Jaringan Perusahaan Terkelola • Pemantauan Keamanan/Pemantauan Keamanan Cloud • Proteksi dan Deteksi <i>Malware</i> Tingkat Lanjut • Perangkat Keamanan Terkelola • Pemantauan dan Pengelolaan <i>Firewall</i> • SIEM Terkelola • IDS/IPS • Manajemen Log • Pengumpulan Log • Penyimpanan, Rotasi, dan Retensi Log • Pemantauan, Analisis, dan Pelaporan Log • <i>Vulnerability Management/Vulnerability Scanning</i> • Pemindaian Aplikasi Web Terkelola • Pengelolaan Keamanan <i>Endpoint</i> • Pencegahan Ancaman <i>Endpoint</i> Tingkat Lanjut • Deteksi Ancaman <i>Endpoint</i> Tingkat Lanjut • Deteksi dan Respons <i>Endpoint</i> Tingkat Lanjut • <i>Managed Detection and Response (MDR)</i> 	Pengujian Penetrasi & <i>Red Teaming</i>	Audit, Tata Kelola, Risiko & Kepatuhan Keamanan TI
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengujian Penetrasi Aplikasi Web • Pengujian Penetrasi Aplikasi Seluler • Pelatihan Keamanan Siber • Pemburuan Ancaman 	<ul style="list-style-type: none"> • Audit Keamanan Informasi • Layanan Kepatuhan • Implementasi ISO 27001 • Kepatuhan terhadap POJK • Kepatuhan terhadap PCI DSS
	Keamanan Aplikasi	Pengembangan Arsitektur & Proses
	<ul style="list-style-type: none"> • Peninjauan Kode Sumber • DevSecOps • Penilaian Keamanan Basis Data • Penguatan Keamanan Basis Data 	<ul style="list-style-type: none"> • Desain Arsitektur Keamanan • Penguatan Keamanan dan Pembentukan <i>Baseline</i> • Pengembangan Rencana IR • Analisis Rencana BC/DR
	Forensik Digital & Respons Insiden	
<ul style="list-style-type: none"> • Layanan Respons Insiden • Layanan Respons Cepat • Investigasi Forensik Digital 		

Managed Security Services (MSS) ITSEC: ITSEC memiliki portfolio penawaran MSS yang mendalam. Perusahaan tidak hanya berkonsentrasi pada MSS tradisional, tetapi juga pada layanan *threat intelligence* serta MSS Tingkat Lanjut/Berkembang. MSS tradisional mencakup layanan *managed firewall*, *managed IDS/IPS*, *managed SIEM*, manajemen log, pengumpulan log, serta *vulnerability management/scanning*. Sebagai bagian dari layanan *threat intelligence*, ITSEC telah mengembangkan lini bisnis *Managed Detection and Response (MDR)*. Mengidentifikasi peluang pendapatan dengan pertumbuhan tinggi di dalam MSS tingkat lanjut/berkembang, penyelenggara layanan keamanan siber ini mulai menjajaki jasa keamanan *endpoint/EDR* dan keamanan cloud.

ITSEC dengan cepat memahami pentingnya keberadaan Pusat Operasi Keamanan (SOC). Perseroan memiliki SOC yang berlokasi di Jakarta (Indonesia) dan telah beroperasi sejak pertengahan tahun 2018. SOC memiliki pengaturan untuk memantau, menganalisis, mendeteksi, dan mengurangi ancaman yang menargetkan infrastruktur TI perusahaan termasuk jaringan, peladen, pusat data, aplikasi, dan basis data. SOC ITSEC memiliki Manajer Proses Keamanan Informasi atau *Information Security Process Manager (ISPM)* milik perusahaan yang mengotomasi proses operasional sehingga meningkatkan produktivitas, efisiensi biaya, dan akurasi. Sejumlah pelaku usaha di kawasan Asia Pasifik telah memperoleh manfaat ekstensif dari SOC ITSEC.

Professional Security Services (PSS): Perusahaan layanan keamanan siber yang paling terkenal dan berhasil tidak hanya menawarkan MSS, tetapi juga PSS agar menjadi penyedia solusi 'satu pintu' untuk semua kebutuhan keamanan siber perusahaan. PSS membantu menyediakan layanan penasihat, mendukung ketaatan terhadap persyaratan kepatuhan, layanan perencanaan dan pengujian arsitektur keamanan yang merupakan prasyarat untuk menawarkan MSS berorientasi hasil. MSS yang dipadukan dengan PSS membantu penyedia layanan keamanan membangun portfolio penawaran yang komprehensif yang merupakan permintaan yang terlihat dari sisi pelaku usaha.

Seperti halnya portfolio MSS, ITSEC memiliki fokus PSS yang terdiversifikasi. Perseroan memiliki tim tenaga profesional khusus yang memiliki keahlian dalam pengujian penetrasi. Tim tersebut memanfaatkan metode pengujian penetrasi yang telah disetujui CREST yang menggabungkan pendekatan kotak hitam atau *black box* (tanpa pengetahuan tentang sistem target) dan kotak putih atau *white box* (dengan pengetahuan parsial atas sistem). Pengujian penetrasi tersebut, yang juga dikenal sebagai *pen-testing*, merupakan metode penting dalam mengevaluasi keamanan sistem informasi atau jaringan melalui simulasi serangan terhadap sistem oleh peretas jahat.

Dengan bertambahnya peraturan siber yang disahkan di Indonesia, kepatuhan terhadap mandate merupakan hal yang penting. Kegagalan mematuhi peraturan dapat menyebabkan penalti yang berat bagi perusahaan. Tim ITSEC memiliki kompetensi dalam beberapa kebutuhan kepatuhan terhadap peraturan seperti implementasi ISO 27001, kepatuhan terhadap POJK dan PCI DSS. Tim dapat menjalankan ulasan kode sumber, DevSecOps, dan Penguatan Keamanan Basis Data atau *Database Security Hardening* sebagai bagian dari penawaran Keamanan Aplikasi. Peta ancaman siber yang senantiasa berubah menuntut pengembangan proses dan arsitektur, dan tim ITSEC sering kali diminta untuk melakukan desain arsitektur keamanan, *penguatan* keamanan, pengembangan rencana IR, dan analisis rencana BC/DR. Permintaan terhadap forensik digital & respon insiden semakin meningkat, dan Peseroan dengan sigap menangkap peluang tersebut dan mengubahnya menjadi aliran pendapatan.

Inisiatif Bisnis

ITSEC telah menjalankan beberapa inisiatif bisnis untuk meningkatkan fokus lebih lanjut pada keamanan siber. Inisiatif tersebut meliputi:

- **Pengembangan IP Perangkat Lunak Keamanan Siber** Pengembangan Produk Keamanan ITSEC menciptakan budaya kolaborasi antara dua tim: (1) Pengembangan produk, dan (2) Pakar bidang khusus (SME) keamanan siber. Pengembangan produk meliputi teknisi sistem, manajer produk, pengembang perangkat lunak, dan desainer perangkat lunak, sedangkan tim SME terdiri atas konsultan DevSecOps, analis keamanan, konsultan keamanan, dan tim respon insiden. Tim pengembangan produk bertanggung jawab atas *yellow teaming*, *orange teaming*, dan *green teaming*, dengan tanggung jawab utama seputar pembuatan perangkat lunak dan aplikasi, menyesuaikan kode berdasarkan pengetahuan dari tim penyerang, dan menyesuaikan kode berdasarkan pengetahuan dari tim pertahanan. Sebaliknya, SME, tetap menjadi garda terdepan dalam skenario serangan dan bertindak sebagai penyerang dan pelindung.
- **Secure SDWAN untuk Klien ISP:** Seiring dengan peningkatan permintaan terhadap SDWAN, arti penting keamanan siber pun mengalami peningkatan signifikan. ITSEC menawarkan Secure SDWAN dengan menambahkan lapisan keamanan pada sistem SDWAN standar. Fitur keamanan yang umum mencakup DNS pelindung, pemfilteran konten, deteksi ancaman, pencegahan intrusi, inspeksi TLS/SSL, solusi DPI, *network sandboxing*, serta pemantauan & analisis keamanan.
- **MSS untuk UKM:** Menyasar usaha kecil dan menengah (UKM), ITSEC berupaya mengembangkan MSS berbasis *cloud* untuk UKM yang dikenal sebagai SecServe. SecServe adalah pendekatan keamanan siber UKM berbasis langganan yang menawarkan serangkaian layanan, termasuk GRC (tata kelola, risiko, dan kepatuhan), keamanan *endpoint*, pemantauan keamanan, *vulnerability testing*, respon insiden, dan pelatihan keamanan siber untuk karyawan. Produk tersebut menyediakan dasbor keamanan siber yang terhubung langsung dengan SIEM ITSEC kepada pelanggan untuk kebutuhan pelaporan.
- **Alat Manajemen Proses Keamanan Siber:** Manajemen Proses Keamanan Informasi (ISPM) ITSEC merupakan alat manajemen proses inovatif untuk mengelola proses keamanan siber. Alat ini menyediakan visibilitas lengkap melalui alur kerja secara *live* serta menyediakan informasi terbaru sesuai dengan kemajuan setiap tahap. Dengan menggunakan alat ISPM ITSEC, pengguna dapat mengatur dan memprioritaskan alur kerja mereka serta menginformasikan tugas yang dikerjakan pada saat ini kepada setiap orang, dan dengan demikian mendukung kolaborasi erat antar anggota tim.

5. Keunggulan Kompetitif

- **Rekam Jejak yang Kuat dalam Melayani Klien Tingkat Atas.**
ITSEC telah membangun basis klien yang kuat selama 13 tahun beroperasi, melayani lebih dari 60 pelanggan *blue-chip* di berbagai industri seperti telekomunikasi, media, transportasi, energi, pemerintahan, *e-commerce*, perbankan, dan layanan keuangan.
- **Beragam Layanan dan Penawaran Solusi.**
Penawaran jasa Perseroan yang beragam, mulai dari *Managed Security Services* (MSS) hingga Risiko dan Kepatuhan, Keamanan Aplikasi, dan *Digital Forensic & Incident Response*, memastikan kemampuan ITSEC untuk memenuhi kebutuhan klien yang berbeda ketika menawarkan berbagai peluang keamanan siber.
- **Peningkatan Berkesinambungan dalam Kemampuan Layanan Klien.**
Investasi ITSEC yang stabil dalam kapabilitas layanan keamanan siber terbaru, termasuk *Fraud Management* dan *Critical Infrastructure Security*, memastikan bahwa Perseroan dapat memenuhi kebutuhan klien yang terus berkembang dan secara konsisten meningkatkan pendapatan di atas tren pasar.
- **Menjalin Kemitraan dengan Penyedia Perangkat Lunak Keamanan Siber Terbaik.**
Perusahaan telah menjalin kemitraan jangka panjang dengan vendor perangkat lunak internasional. Hal ini akan menciptakan efisiensi biaya dan kualitas dari pelayanan Perseroan untuk dapat bersaing pada tingkat pasar internasional.

- **Inovasi Teknologi Keamanan Siber.**
Grup terlibat dalam beberapa inisiatif pengembangan teknologi keamanan siber. Manajemen memiliki peluang untuk mengembangkan dan memonetisasi teknologi keamanan siber untuk perusahaan secara eksklusif sehingga dapat menciptakan aliran pendapatan jangka panjang yang baru.
- **Investasi dalam Sumber Daya Manusia untuk Meningkatkan Kualitas Layanan.**
ITSEC berinvestasi untuk sertifikasi dan akreditasi Perusahaan dan sumber daya manusia untuk meningkatkan keterampilan dan kualifikasi karyawan yang akan menghasilkan layanan terbaik di Industri keamanan siber untuk klien dan *churn* staf yang rendah.
- **Branding dan Pemasaran yang Unik.**
Grup telah melakukan investasi yang signifikan dalam pemasaran untuk membangun kesadaran melalui *branding* yang khas, melalui aktif dalam kegiatan di forum keamanan siber dan aktif sebagai *guest speaker* untuk acara klien. Selain itu, Perseroan mengadakan aktivitas pendidikan melalui bekerja sama dengan universitas-universitas di Indonesia dan institut pendidikan tinggi di Indonesia dan aktif dalam menjalankan program magang bagi mahasiswa Indonesia.
- **Tim Kepemimpinan yang Berpengalaman.**
Tim manajemen ITSEC yang berpengalaman di Indonesia, Singapura dan Australia, berkomitmen membangun Grup ITSEC untuk menjadi Perusahaan keamanan siber internasional.

6. Persaingan Usaha

Ekosistem Bersaing dalam MSS dan PSS

Pasar jasa keamanan siber diperkirakan akan mengungguli pasar produk dan solusi baik dalam jangka pendek (2025) maupun jangka panjang (2030). Berdasarkan definisi, jasa keamanan siber meliputi *Managed Security Services* (MSS) dan *Professional Security Services* (PSS).

Pasar MSS dan PSS di Indonesia menghadapi persaingan yang ketat dengan hadirnya beberapa jenis pemain. Setiap pemain ini memiliki diferensiasi yang unik dan berupaya mengungguli pesaing lainnya melalui penawaran nilainya masing-masing. Jenis penyedia layanan keamanan yang menawarkan MSS dan PSS di Indonesia disajikan di bawah ini.

Jenis penyedia MSS dan PSS di Indonesia

Jenis Penyedia	Fokus pada MSS	Fokus pada PSS	Diferensiasi Unik
Penyedia Layanan Telekomunikasi	Tinggi	Menengah	Visibilitas dan kontrol mendalam atas jaringan, sumber ancaman besar
Perusahaan Integrator Sistem dan Layanan TI	Tinggi	Menengah	Keahlian dalam implementasi dan integrasi produk keamanan
MSSP <i>pure-play</i>	Tinggi	Tinggi	Spesialis dalam layanan keamanan siber
Perusahaan Konsultasi	Menengah	Tinggi	Mulai mendekati pelanggan melalui PSS lalu menerjemahkan kesepakatan menjadi MSS

Pemain besar yang menawarkan MSS dan PSS di Indonesia

Penyedia Layanan Telekomunikasi	Perusahaan Integrator Sistem dan Layanan IT	MSSP <i>pure-play</i>	Perusahaan Konsultasi
Digiserve Telkomsel	Tech Mahindra NTT LTD MII Lintasarta Accenture IBM/Kyndryl	ITSEC Defenxor Horangi Cybersecurity Xynexis Iproteksi NOOSC	KPMG Deloitte EY PwC

Sumber: Frost & Sullivan

7. Strategi Usaha

ITSEC telah membangun jaringan mitra yang kuat untuk menyampaikan layanan keamanan siber kepada pelanggan di seluruh dunia, terutama di Asia Pasifik. Jaringan tersebut mencakup pemasok teknologi paling canggih yang memiliki produk

dan solusi keamanan yang telah teruji dalam keamanan jaringan, keamanan *endpoint*, *threat intelligence*, keamanan surel, *gateway*, perlindungan beban kerja *cloud*, keamanan aplikasi, pengelolaan kata sandi, *vulnerability management*, dan lain-lain. Untuk meningkatkan jangkauan pasar dan memberdayakan bisnis melalui produk-produk keamanan tersebut, ITSEC membangun jaringan mitra aliansi yang luas di berbagai negara. Mitra aliansi memperluas jangkauan geografis gabungan ITSEC, mengembangkan pasar, mendukung proses penjualan, dan meningkatkan penawaran keamanan siber. Melalui mitra yang kuat dan jaringan penjualan kanal tersebut, ITSEC mampu melayani merek-merek terdepan dalam industri perbankan, perusahaan asuransi, dan operator telekomunikasi terkemuka.

8. Pemasaran

PT ITSEC Asia mendistribusikan solusi dan layanan keamanan sibernya langsung ke klien. Semua penjualan dilakukan melalui Tim Penjualan dan Pengembangan Bisnis internal Perseroan.

Per 31 Januari 2023, perusahaan memiliki 23 karyawan penuh waktu di divisi Penjualan dan Pengembangan Bisnis, termasuk Direktur dan Manajer, yang menjual langsung ke klien:

PT ITSEC Asia	: 18
ITSEC Services Asia Pte. Ltd.	: 3
ITSEC Australia Pty. Ltd.	: 2
ITSEC Group Total	: 23

Selain itu, Grup ITSEC memiliki branding komprehensif yang mencakup logo perusahaan, profil media sosial yang khas, *merchandise* korporat yang disesuaikan, serta presentasi bermerek dan templat dokumen. Hal ini memastikan kehadiran merek yang melekat dan dapat dikenali secara konsisten dengan klien di seluruh platform media.

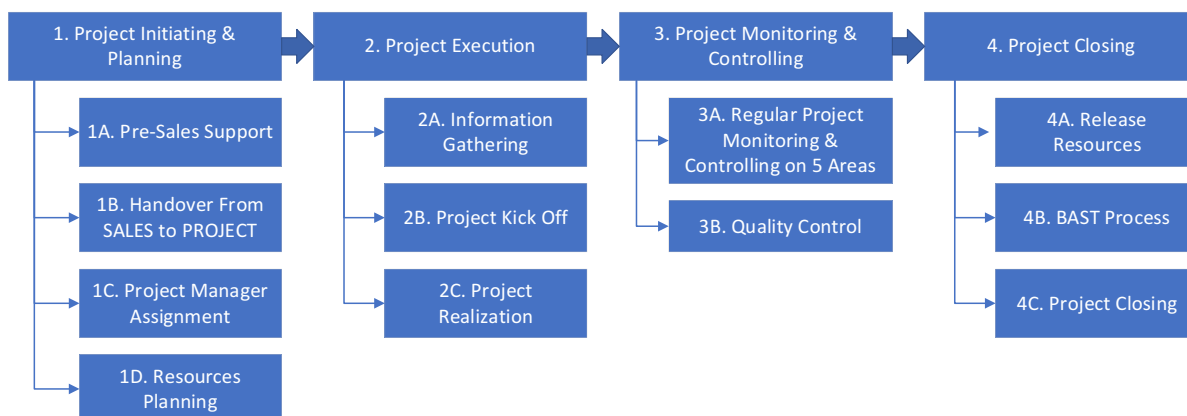
Pengeluaran pemasaran grup (konsolidasi yang diaudit) adalah sebagai berikut:

Tahun 2020	: Rp168.944.990
Tahun 2021	: Rp527.694.371
Tahun 2022	: Rp798.512.240

Perusahaan mempertahankan kehadiran media yang baik untuk mempromosikan merek dan layanan ITSEC melalui media dan wawancara. Pada tahun 2022, Perseroan tampil di lebih dari 300 total program media, artikel pers dan artikel media online termasuk TV, radio, artikel pers dan surat kabar, Instagram, YouTube, LinkedIn, dan situs web perusahaan.

Selain itu, Perseroan menyelenggarakan pertemuan keamanan siber dan acara klien bernilai tambah, termasuk *Cyber Security Indonesia Summit 2023*, yang diadakan pada Januari 2023 di JW Marriott, Jakarta dengan lebih dari 300 peserta. Selanjutnya, Perseroan mengadakan simposium pendidikan yang bekerja sama dengan universitas dan institut pendidikan tinggi di Indonesia dan menjalankan program magang bagi mahasiswa Indonesia.

9. Proses Usaha



No.	Fase	Penjelasan Singkat
1	Project Initiating & Planning	
1A	<i>Pre-Sales Support</i>	PMO dan/atau PM akan memberikan dukungan, dengan keahlian terbaik mereka kepada tim penjualan selama fase Pra-Penjualan untuk perencanaan awal dan identifikasi risiko.
1B	<i>Handover from Sales to Project</i>	Setelah kesempatan diberikan, tim penjualan akan mengumpulkan dan membagikan semua dokumen komersial terkait (RFP / RFQ / Proposal / Quotation / PO / SPK / Kontrak) ke PMO.
1C	<i>Project Manager Assignment</i>	Berdasarkan informasi proyek yang dikumpulkan selama Serah Terima, PM yang sesuai akan dinominasikan dan ditugaskan.
1D	<i>Resources Planning</i>	Sumber daya yang sesuai dan tersedia akan direncanakan dan ditugaskan ke proyek terkait.
2	Project Based Execution	
2A	<i>Information Gathering</i>	Jika masih diperlukan, dilakukan pengumpulan semua informasi yang diperlukan dan/atau rincian lebih lanjut untuk memulai dan menjalankan proyek.
2B	<i>Project Kick Off</i>	<i>Project Milestone</i> untuk memulai proyek sesuai kesepakatan dengan pelanggan.
2C	<i>Project Realization</i>	Eksekusi dan/atau implementasi proyek berdasarkan ruang lingkup pekerjaan & jadwal yang disepakati.
3	Project Monitoring & Controlling	
3A	<i>Regular Project Monitoring & Controlling</i>	Setiap proyek harus dipantau untuk Ruang Lingkup, <i>Timeline</i> , Pendapatan, Sumber Daya dan Kepuasan Pelanggan secara teratur.
3B	<i>Quality Control</i>	Pengecekan kualitas dari hasil proyek.
4	Project Closing	
4A	<i>Release Resources</i>	Setelah penyelesaian pengiriman proyek, sumber daya pengiriman proyek dirilis agar tersedia untuk mendukung penugasan proyek lainnya.
4B	<i>BAST Process</i>	BAST adalah dokumen penerimaan yang harus diterima dan/atau ditandatangani oleh klien. Setelah itu, tim keuangan akan melanjutkan dengan faktur.
4C	<i>Project Closing</i>	Setelah proyek diterima dan proses <i>Final Invoicing</i> berjalan, proyek dianggap selesai.

10. Riset dan Pengembangan Bisnis

Sampai tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kegiatan Riset dan Pengembangan Bisnis.

11. Kecenderungan Usaha Perseroan

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan yang dapat memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan dalam hal produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan. Selain itu, Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Hingga saat ini, tidak terdapat risiko khusus terkait dengan modal kerja yang terbatas yang akan membuat Perseroan tidak dapat secara maksimal menjalankan kegiatan usahanya yang dapat menyebabkan timbulnya risiko integritas di hadapan para pelanggan, serta dengan terbatasnya modal kerja Perseroan sehingga menjadi tidak leluasa untuk melakukan ekspansi Perseroan ke depannya.

12. Keterangan Tentang Entitas Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Perusahaan Anak dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Berdiri	Tahun Penyertaan	Status Beroperasi	Kontribusi Terhadap Pendapatan (%)
<i>Perusahaan Anak</i>							
1.	ITSEC Services Asia Pte. Ltd	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	100% (Kepemilikan langsung)	2018	2022	Beroperasi secara komersial	20,20
2.	ITSEC Australia Pty Ltd	Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi	100% (Kepemilikan langsung)	2018	2022	Beroperasi secara komersial	6,74

Berikut adalah keterangan ringkas tentang Perusahaan Anak:

1. ITSEC Services Asia Pte. Ltd (“ITSEC Singapore”)

- Pendirian dan anggaran dasar terakhir
ITSEC Singapore telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Singapura berdasarkan *Certificate Confirming Incorporation of Company* tertanggal 29 Januari 2018 yang diterbitkan oleh ACRA (UEN: 201803643M).
- Kegiatan usaha
Kegiatan usaha ITSEC Singapore bergerak dalam bidang perusahaan teknologi informasi dan pengembangan perangkat lunak.
- Struktur permodalan dan kepemilikan saham
Perseroan merupakan pemegang 2.494.724 lembar saham biasa yang mewakili 100% saham yang dikeluarkan oleh ITSEC Singapore dengan nilai nominal seluruhnya SGD2.526.614.
- Pengurusan dan pengawasan
Susunan terakhir Pengurus ITSEC Singapore adalah sebagai berikut:
 - Direktur : Omar Rami Nazzal
 - Direktur : Patrick Rudolf Dannacher
- Data Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	31 Januari		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Jumlah Aset	14.318.808.996	20.440.112.378	25.780.656.993	16.239.251.811
Jumlah Liabilitas	9.294.915.242	13.093.158.551	26.582.958.035	14.476.211.583
Jumlah Ekuitas	5.023.893.754	7.346.953.827	(802.301.042)	1.763.040.228

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Pendapatan usaha	3.113.204.620	3.163.890.195	37.783.426.304	30.955.316.952	18.040.606.023
Labanya bruto	68.308.009	3.010.658.851	15.296.122.656	14.470.406.673	7.516.763.254
Labanya usaha	(2.171.005.719)	537.032.547	(6.326.400.770)	(3.227.720.510)	(3.462.203.349)
Beban keuangan	(15.461.182)	4.899.815	(213.145.760)	(287.503.164)	(252.541.190)

Laba sebelum pajak	(2.185.890.851)	174.887.984	(5.163.098.338)	(2.575.895.339)	(2.502.060.561)
Jumlah manfaat (beban) pajak	-	-	-	-	-
Laba bersih tahun berjalan	(2.185.890.851)	174.887.984	(5.163.098.338)	(2.575.895.399)	(2.502.060.561)
Laba komprehensif tahun berjalan	(744.206.393)	(114.781.908)	(607.037.171)	(109.502.166)	(120.056.296)

2. ITSEC Australia Pty Ltd (“ITSEC Australia”)

- Pendirian dan anggaran dasar terakhir
ITSEC Australia telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Australia berdasarkan *Certificate of the Registration of a Company* tertanggal 30 Januari 2023 yang diterbitkan oleh ASIC (ACN:623 449 267).
- Kegiatan usaha
Kegiatan usaha ITSEC Australia bergerak dalam bidang perusahaan teknologi informasi dan pengembangan perangkat lunak.
- Struktur permodalan dan kepemilikan saham
Perseroan merupakan pemegang 2.065.542 lembar saham biasa yang mewakili 100% saham yang dikeluarkan oleh ITSEC Australia dengan nilai nominal seluruhnya AUD1.702.626,27.
- Pengurusan dan pengawasan
Susunan terakhir Pengurus ITSEC Australia adalah sebagai berikut:

Direktur : Patrick Rudolf Dannacher

Direktur : Alvin Jude Rafferty
- Data Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

	31 Januari		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Jumlah Aset	3.860.245.264	26.812.476.201	3.826.026.204	5.125.337.158
Jumlah Liabilitas	5.779.287.924	28.318.406.445	19.564.008.442	14.473.735.791
Jumlah Ekuitas	(1.919.042.660)	(1.505.930.244)	(15.737.982.238)	(9.348.398.633)

Laporan Laba Rugi

(dalam Rupiah)

	31 Januari		31 Desember		
	2023	2022	2022	2021	2020
Pendapatan usaha	582.389.064	355.340.983	12.610.652.580	8.556.170.898	6.715.280.250
Laba bruto	(371.547.090)	178.126.981	3.237.588.180	1.832.775.912	967.523.788
Laba usaha	(1.085.803.830)	(83.109.268)	(6.281.416.886)	(7.030.751.045)	(4.455.342.458)
Beban keuangan	(17.207.046)	19.925.364	(117.408.120)	-	-
Laba sebelum pajak	(1.103.010.876)	(109.068.948)	(6.398.825.006)	(7.030.751.045)	(2.759.221.458)
Jumlah manfaat (beban) pajak	-	-	-	-	-
Laba bersih tahun berjalan	(1.103.010.876)	(109.068.948)	(6.398.825.006)	(7.030.751.045)	(2.759.221.458)
Laba komprehensif tahun berjalan	(298.492.828)	19.925.364	(293.515.004)	236.539.588	(404.627.851)

13. Tinjauan Industri

1. Transformasi Digital Pada Bisnis dan Pemerintahan

Terdapat lonjakan pertumbuhan transformasi digital di Indonesia baik di sektor swasta maupun publik. Pemberlakuan pembatasan sosial (*social distancing*) dan karantina wilayah (*lockdown*) telah memaksa banyak bisnis dan instansi pemerintah

mengalihkan transaksi mereka menjadi transaksi daring guna memastikan kelangsungan operasional selama pandemi. Popularitas *e-commerce* dan pembayaran digital meroket karena masyarakat menghindari kontak fisik dan lebih memilih transaksi tanpa kontak fisik. Hal ini membuka peluang bagi perusahaan untuk memasuki pasar baru dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Kontributor signifikan lain dalam pertumbuhan transformasi digital di Indonesia adalah peralihan ke kerja jarak jauh. Peralihan ini telah meningkatkan permintaan atas alat dan platform digital yang memungkinkan kolaborasi dan komunikasi jarak jauh. Pada era pascapandemi, pengaturan pekerjaan jarak jauh dan hibrid diperkirakan akan tetap populer di Indonesia. Perusahaan menyadari bahwa pengaturan ini dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Selain itu, banyak karyawan menginginkan untuk terus bekerja dari jarak jauh bahkan setelah pandemi berakhir. Perusahaan juga mengakui potensi bekerja jarak jauh guna meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja serta mengurangi kemacetan lalu lintas di perkotaan. Pada tahun 2022, pemerintah mengumumkan bahwa mereka sedang Menyusun kerangka kerja untuk menerapkan kebijakan kerja dari mana saja (*Work-from-Anywhere/WFA*) bagi karyawannya. Kerangka kerja ini sedang dikembangkan di lingkungan kementerian dan instansi pemerintah.

Pada skala global, dunia mengalami gelombang kemajuan teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan transformasi digital menjadi katalis utama untuk ekonomi saat ini. Perusahaan, organisasi, dan pemerintah mengadopsi teknologi digital guna menyederhanakan operasi mereka, meningkatkan pengalaman pelanggan, dan mendorong inovasi. Saat ini, terdapat beberapa megatren yang memengaruhi dan mendorong transformasi digital:

Industri 4.0 dan Automasi: Juga dikenal sebagai Revolusi Industri Keempat, hal ini merupakan tren automasi dan pertukaran data pada saat ini, baik di industri manufaktur maupun industri lainnya. Dengan semakin meningkatnya jumlah perusahaan yang mengadopsi teknologi automasi, mereka harus memastikan bahwa sistem mereka aman dari ancaman siber. Industri 4.0 juga mendorong tren lain dalam konvergensi TI-TO. Dari lingkungan yang sebelumnya tak terhubung (*air-gapped*), peningkatan perangkat yang terhubung akan meningkatkan risiko keamanan siber bagi bisnis dan meningkatkan permintaan akan keamanan siber TO.

Keamanan TI-TO: Seiring dengan peningkatan jumlah organisasi yang mengadopsi transformasi digital dan mengandalkan sistem TI dan TO yang saling terhubung untuk mengelola dan mengontrol operasi mereka, keamanan TI-TO menjadi semakin penting. Konvergensi kedua sistem ini menciptakan risiko dan tantangan baru dari segi keamanan siber, karena pembobolan (*breach*) pada satu sistem berpotensi memengaruhi sistem lainnya.

Multi-Cloud: Adopsi *multi-cloud* meningkat pesat, didorong oleh kebutuhan organisasi untuk memanfaatkan keuntungan dari berbagai solusi *cloud* dari berbagai pemasok guna memenuhi kebutuhan dan persyaratan khusus mereka. Seiring dengan semakin banyaknya organisasi yang mengadopsi strategi *multi-cloud*, besar kemungkinan alat dan solusi baru akan muncul guna mendukung pengelolaan dan integrasi berbagai lingkungan *cloud*.

Teknologi 5G: Dengan kemampuan untuk mendukung transmisi data real-time dan *Internet of Things* (IoT), 5G berpotensi untuk merevolusi berbagai industri, termasuk kesehatan, transportasi, dan manufaktur. Saat ini, teknologi 5G masih dalam tahap awal, dengan jangkauan terbatas serta biaya yang tinggi. Namun, beberapa negara berinvestasi dalam 5G untuk meraih keunggulan kompetitif dalam ekonomi global. Adopsi 5G yang lebih luas juga nantinya akan dapat menghadirkan tantangan. Hal ini dikarenakan peningkatan konektivitas dan kecepatan transfer data akan menciptakan kerentanan baru *attack surface*.

IoT Komersial dan Konsumen: Adopsi IoT berkembang pesat di kedua segmen, baik bisnis maupun konsumen sama-sama mengakui potensi manfaat dari perangkat yang terhubung. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data dari perangkat yang terhubung, organisasi dapat memperoleh wawasan tentang operasi mereka, meningkatkan efisiensi, dan mengembangkan produk dan layanan baru. Integrasi IoT dengan teknologi lain seperti AI dan *blockchain* juga membuka kemungkinan baru. Namun, pesatnya pertumbuhan IoT juga menghadirkan tantangan dalam segi keamanan, privasi, dan standarisasi.

Kecerdasan Buatan (AI): Pasar AI global diperkirakan akan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang, didorong oleh peningkatan investasi dan permintaan akan solusi yang didukung AI. AI sudah digunakan di berbagai industri, mulai dari kesehatan dan keuangan hingga manufaktur dan transportasi. Adopsi AI diharapkan dapat dipercepat seiring dengan upaya berbagai organisasi untuk mengotomasi tugas-tugas, mendapatkan wawasan dari data, dan meningkatkan pengambilan keputusan. Akan tetapi, terdapat pula tantangan dalam adopsi tersebut, seperti masalah etika dan privasi, akurasi dan keandalan model AI, serta perlindungan terhadap ancaman keamanan siber.

Kota Pintar: Kota pintar di seluruh dunia dilengkapi dengan berbagai teknologi dan solusi canggih yang diterapkan di berbagai sektor. Tren ini akan terus tumbuh karena pemerintah berusaha memanfaatkan keuntungan penggunaan teknologi canggih guna meningkatkan kehidupan masyarakatnya, mendorong keberlanjutan, dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Tren menuju kota pintar juga cenderung mengarah pada inovasi lebih lanjut dalam transformasi digital dan keamanan siber, karena kota mengembangkan alat dan solusi baru guna mengatasi tantangan unik yang ditimbulkan oleh lingkungan perkotaan.

Web3.0: Saat ini, pengadopsian Web3.0 masih dalam tahap awal, dengan teknologi *blockchain* sebagai penggerak utama. Akan tetapi, telah terdapat beberapa aplikasi dan platform yang dibangun menggunakan web3, seperti keuangan

terdesentralisasi (DeFi) dan *non-fungibel token* (NFT). Ke depannya, web3 diharapkan dapat menjadi lebih *mainstream* seiring dengan peningkatan kesadaran pengguna akan manfaat web3, termasuk privasi, keamanan, dan kendali yang lebih baik atas data mereka. Seiring dengan berlanjutnya perkembangan transformasi digital, web3 kemungkinan akan memainkan peran signifikan dalam membentuk masa depan internet. Keamanan siber juga akan menjadi pertimbangan penting dalam pengadopsian web3, mengingat teknologi memerlukan autentikasi yang aman serta perlindungan terhadap kerentanan potensial.

2. Meningkatnya Dorongan Akan Keamanan Siber

2.1 Tantangan Dalam Transformasi Digital Dan Keamanan

Di era digital saat ini, keamanan siber menjadi jauh lebih penting dibandingkan sebelumnya. Seiring dengan berlangsungnya transformasi digital, dunia menjadi semakin bergantung pada teknologi, dan kehidupan pribadi dan profesional kita sangat terintegrasi dengan dunia digital. Walaupun revolusi teknologi menghadirkan berbagai manfaat dan kenyamanan, hal ini juga menciptakan tantangan dan risiko baru yang menuntut strategi keamanan siber yang tangguh dan efektif.

Melalui transformasi digital, kita dapat terhubung dan berkolaborasi dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Akan tetapi, transformasi digital juga telah menciptakan jaringan perangkat dan sistem luas yang saling terhubung yang rentan terhadap serangan siber. Ancaman keamanan siber seperti pembobolan data, serangan *ransomware*, dan penipuan *phishing* menjadi lebih canggih, sering, dan parah, sehingga menyebabkan kerugian yang signifikan bagi individu dan organisasi.

Serangan siber dapat memiliki konsekuensi yang luas. Serangan siber dapat menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan reputasi, kehilangan kekayaan intelektual, dan sanksi hukum. Selain itu, serangan siber dapat mengakibatkan gangguan operasi, menyebabkan periode nonaktif, dan berdampak pada kepercayaan dan keyakinan para pelanggan dan pemangku kepentingan.

Perlindungan Data Sensitif: Di era digital ini, data merupakan mata uang baru. Organisasi dan individu menghasilkan dan mengumpulkan data dalam jumlah sangat besar, termasuk informasi pribadi, data keuangan, dan kekayaan intelektual. Data ini berharga, dan pelaku kejahatan siber terus mencari cara untuk mencuri atau mengeksploitasinya. Oleh karena itu, perlindungan data sensitif sangat penting guna mencegah akses tidak sah, pembobolan data, dan pencurian identitas.

Kepatuhan terhadap Peraturan: Pemerintah dan badan pengatur menerapkan lebih banyak peraturan terkait keamanan siber guna memastikan organisasi dan individu melindungi data sensitif dan memitigasi ancaman siber. Kepatuhan terhadap peraturan ini bukan hanya sangat penting untuk menghindari sanksi hukum, tetapi juga penting untuk menjaga kepercayaan dan keyakinan para pelanggan dan pemangku kepentingan.

Kelangsungan Bisnis: Jika terjadi pembobolan keamanan siber, kelangsungan bisnis sangatlah penting. Serangan siber dapat mengganggu operasi, menyebabkan periode nonaktif, dan berdampak pada pendapatan bersih. Strategi keamanan siber yang tangguh dapat membantu organisasi mencegah, mendeteksi, dan menanggapi insiden siber, guna memastikan operasi bisnis terus berjalan dengan lancar.

Mitigasi Ancaman Siber: Ancaman siber terus berkembang, dan penyerang menggunakan taktik yang semakin canggih. Strategi keamanan siber yang kuat dapat membantu organisasi dan individu mengurangi ancaman ini dengan mengidentifikasi kerentanan, menerapkan tindakan pencegahan, dan menanggapi insiden siber dengan cepat. Hal ini termasuk mengimplementasikan autentikasi multi-faktor, menggunakan enkripsi, dan memastikan pembaruan perangkat lunak secara teratur.

Kesimpulannya, keamanan siber sangat penting di era transformasi digital. Sangat penting untuk melindungi data sensitif, memitigasi ancaman siber, mematuhi peraturan, dan memastikan kelangsungan bisnis. Organisasi dan individu harus mengambil tindakan proaktif guna memastikan bahwa mereka memiliki strategi keamanan siber yang kuat. Dengan demikian, mereka dapat melindungi aset mereka, menjaga kepercayaan para pelanggan dan pemangku kepentingan mereka, dan tetap selangkah lebih maju dibandingkan ancaman siber dalam lanskap digital yang selalu berkembang.

2.2 Meluasnya Peta Ancaman Keamanan

Seiring dengan teknologi yang semakin maju dan menjadi lebih terhubung, peta ancaman juga semakin berkembang. Pelaku kejahatan siber terus menemukan cara baru untuk memanfaatkan kerentanan dalam jaringan, sistem, dan perangkat untuk mendapatkan akses yang tidak diizinkan, mencuri data sensitif, atau menyebabkan gangguan pada operasi.

Aspek pertama dari peta potensi ancaman keamanan yang meningkat adalah peningkatan jumlah ancaman. Aspek kedua adalah semakin canggihnya ancaman. Pelaku kejahatan siber memiliki teknik yang semakin canggih, menggunakan malware, manipulasi psikologis, dan taktik lainnya yang canggih untuk menghindari pendeteksian dan memperoleh akses kepada sistem. Peningkatan tingkat kecanggihannya ini berarti langkah-langkah keamanan tradisional seperti *firewall* dan perangkat lunak antivirus mungkin tidak cukup untuk mencegah serangan. Aspek ketiga adalah meningkatnya kompleksitas ancaman. Ancaman keamanan siber menjadi semakin kompleks, dan para penyerang menggunakan berbagai vektor dan teknik

serangan untuk menyasiasi prosedur keamanan. Kompleksitas ini mempersulit organisasi dalam mendeteksi dan mencegah serangan, karena mereka harus dapat mengidentifikasi dan menanggapi berbagai serangan secara bersamaan.

Ransomware: Ransomware telah menjadi perhatian keamanan utama, sehingga menjadikannya prioritas bagi banyak organisasi. Pelaku kejahatan siber memanfaatkan pandemi dan ketidakstabilan geopolitik, dengan spionase siber ekonomi dan industri menjadi ancaman yang signifikan, terutama yang berfokus pada keuntungan mata uang kripto. Frost & Sullivan menyoroti bahwa serangan siber ransomware yang pernah dianggap sebagai sesuatu yang baru telah berkembang menjadi badan usaha kriminal dengan implikasi ekonomi dan keuangan yang signifikan. Tren yang sedang berkembang saat ini adalah model bisnis Ransomware-as-a-Service (RaaS), di mana pelaku kejahatan siber membentuk organisasi yang menyediakan alat dan dukungan peretasan bagi para calon peretas dengan harga yang relatif terjangkau dan dengan demikian menurunkan standar masuk teknis dan biaya bagi calon peretas untuk melakukan peretasan.

Serangan Phishing: Dengan algoritme AI/ML yang canggih, peretas telah meluncurkan *targeted phishing campaigns* baru dalam skala besar, meniru aset digital eksternal organisasi, seperti situs web, aplikasi seluler, dan akun media sosial. Upaya phishing telah meninggalkan surel. Penipu kini lebih kreatif dalam menggunakan aplikasi lain yang umum digunakan seperti WhatsApp dan Microsoft 365. Seiring dengan lebih banyak interaksi bisnis dan pribadi yang dilakukan secara virtual, risiko pelanggan dan karyawan yang terkena serangan *phishing* yang menyamar sebagai merek atau eksekutif perusahaan telah meningkat secara signifikan.

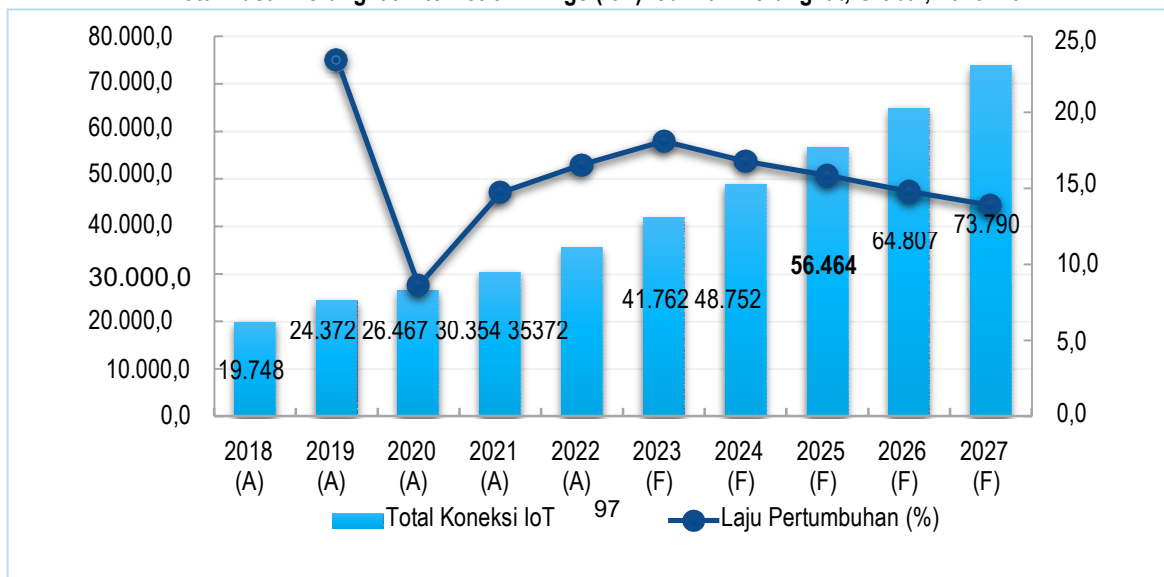
Malware: Salah satu alasan yang menyebabkan *malware* tetap menjadi ancaman yang signifikan adalah karena pelaku kejahatan siber telah mengembangkan taktik mereka dan membangun *malware* jenis baru. Ini termasuk menggunakan teknik canggih seperti *malware* tanpa file, yang beroperasi di memori dan dapat lebih sulit untuk dideteksi dan dihapus. Pelaku kejahatan siber juga menggunakan taktik manipulasi psikologis untuk mengelabui pengguna agar memasang *malware*, seperti surel *phishing* atau tautan berbahaya di platform media sosial. Alasan lain yang menyebabkan malware tetap menjadi ancaman yang signifikan adalah karena malware sering kali didistribusikan melalui kerentanan dalam sistem perangkat lunak dan perangkat keras.

Serangan DDoS: Serangan ini relatif mudah dilakukan dan dapat dijalankan dengan alat dan layanan berbiaya rendah. Artinya, siapa pun yang memiliki akses ke internet dapat meluncurkan serangan DDoS, menjadikannya metode serangan yang populer dan dapat diakses oleh para peretas, pelaku kejahatan siber, dan aktor negara-bangsa (*nation-state actor*). Selain tindakan yang dilakukan demi keuntungan finansial, ketegangan geopolitik yang kian bergejolak telah mendorong serangan DDoS yang disponsori negara terhadap perusahaan, badan pemerintah, dan infrastruktur penting. Oleh karena itu, pemerintah dan perusahaan yang penting secara nasional mengambil langkah untuk melindungi diri mereka dengan mengadopsi solusi DDoS yang canggih. Dalam beberapa kasus, serangan DDoS juga digunakan sebagai taktik pengalih perhatian dengan mengalihkan perhatian dari serangan siber lain yang terjadi secara bersamaan.

Serangan Rantai Pasokan: Serangan rantai pasokan dilakukan dengan menyerang pemasok atau penyedia pihak ketiga yang memiliki akses ke sistem atau data target. Seiring meningkatnya jumlah serangan rantai pasokan, organisasi telah memperluas strategi keamanan siber mereka agar mencakup pemeriksaan postur keamanan mitra pihak ketiga mereka. Risiko serangan rantai pasokan diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang seiring dengan meningkatnya ketergantungan terhadap perangkat lunak dan layanan pihak ketiga.

Teknologi Baru: Teknologi baru seperti IoT dan AI menciptakan kerentanan dan risiko baru bagi bisnis dan individu. Frost & Sullivan memperkirakan akan terdapat 56,4 miliar perangkat yang terhubung pada tahun 2026. Peningkatan jumlah perangkat yang terhubung memperluas permukaan serangan untuk tindakan jahat. Perangkat IoT seperti perangkat rumah pintar dan *wearable* dapat rentan terhadap peretasan dan dapat menjadi gerbang untuk memasuki kehadiran digital individu yang lebih luas. Demikian pula, serangan yang didukung AI dapat sulit dideteksi karena dapat meniru perilaku pengguna yang sah.

Total Pasar Perangkat Internet of Things (IoT): Jumlah Perangkat, Global, 2018–2027



2.3 Peran Layanan Keamanan Siber

Di era digital, keamanan siber telah menjadi perhatian utama bagi perusahaan. Pelaku kejahatan siber menjadi lebih canggih dan terorganisir, memanfaatkan teknik dan alat canggih untuk membobol jaringan dan mencuri informasi sensitif. Penting bagi organisasi untuk mencermati solusi keamanan siber yang menyeluruh guna melindungi data dan sistem mereka.

Solusi keamanan jaringan termasuk *firewall*, sistem deteksi dan pencegahan intrusi atau *intrusion detection and prevention system* (IDS/IPS), jaringan pribadi virtual atau *virtual private network* (VPN), dan alat pemfilteran web. Ancaman dunia maya yang semakin berkembang menjadikan solusi keamanan jaringan baru seperti *next-generation firewall* (NGFW), *unified threat management* (UTM), dan *secure sockets layer virtual private network* (SSL VPN) semakin populer. Segmen ini terus tumbuh pesat dengan evolusi berkelanjutan dan penggabungan teknologi terbaru, seperti peluncuran jaringan 5G dan ketersediaan *edge computing*.

Solusi keamanan endpoint dirancang untuk melindungi *endpoint* seperti laptop, desktop, dan perangkat seluler dari *malware*, serangan *phishing*, dan ancaman keamanan lainnya. Ketika para pekerja menjadi lebih *mobile*, solusi keamanan *endpoint* seperti pengelolaan perangkat seluler atau *mobile device management* (MDM) dan pengelolaan aplikasi seluler atau *mobile application management* (MAM) menjadi semakin populer. Solusi MDM memberikan kontrol terperinci atas perangkat seluler, sedangkan solusi MAM mengelola dan mengamankan aplikasi seluler. Perangkat seluler digunakan sebagai gerbang masuk untuk mencuri identitas pengguna. Kebutuhan akan pengamanan perangkat ini semakin meningkat dengan adanya kebijakan *bring your own device* (BYOD) - yaitu karyawan membawa perangkatnya sendiri untuk bekerja di kantor - yang menggantikan pengelolaan perangkat perusahaan.

Solusi keamanan aplikasi akan semakin populer. Keamanan aplikasi menjadi komponen penting dari keamanan siber seiring dengan meningkatnya penggunaan aplikasi berbasis web, aplikasi seluler, dan API.

Solusi kontrol akses dirancang untuk mengatur dan mengelola akses pengguna ke jaringan, sistem, dan data. Penting bagi organisasi untuk mengelola identitas pengguna dan memastikan bahwa hanya pengguna resmi yang memiliki akses ke sumber daya penting. Solusi ini mencakup otentikasi multifaktor atau *multi-factor authentication* (MFA), sistem manajemen identitas dan akses atau *identity and access management* (IAM), dan manajemen akses khusus atau *privileged access management* (PAM).

Solusi perlindungan data dirancang untuk melindungi data dari akses, modifikasi, atau penghapusan yang tidak diinginkan. Bisnis menyadari pentingnya mengamankan data sensitif mereka terhadap pelaku kejahatan. Adopsi solusi perlindungan data yang canggih seperti enkripsi, DLP, dan klasifikasi data akan memainkan peranan penting dalam memastikan bisnis tetap terlindungi.

Solusi keamanan cloud seperti Keamanan Surel, *Secure Web Gateway*, CASB, dan *Cloud Workload Protection* menjadi semakin populer. Menurut Frost & Sullivan Global Cloud User Survey, hibrid dan multi-cloud menjadi hal lumrah di tahun 2020. Hal ini terjadi karena dunia bisnis terus beralih dari platform yang bersifat *vendor lock-in* ke platform yang fleksibel dan terbaik di kelasnya bagi beban kerja dan aplikasi mereka. Seiring dengan pemindahan data yang lebih sensitif dan aplikasi penting ke *cloud*, terdapat kekhawatiran yang semakin meningkat terkait keamanan infrastruktur, jaringan, dan layanan *cloud*.

MSS dan PSS didesain untuk membantu bisnis mengelola kebutuhan keamanan siber mereka. Secara global, kurangnya pakar keamanan, kecanggihan ancaman, dan kompleksitas solusi keamanan menyulitkan organisasi untuk melindungi lingkungan tersebut secara memadai. *Managed Security Service Provider* (MSSP) merupakan jawaban atas kebutuhan perusahaan, memanfaatkan keahlian dan pengetahuan tim keamanan veteran, infrastruktur, dan portofolio layanan yang komprehensif dalam memitigasi risiko dunia maya dengan biaya yang jauh lebih kecil dibandingkan biaya Pusat Operasi Keamanan atau *Security Operations Center* (SOC) internal.

3. Pasar Keamanan Siber Global

3.1 Gambaran Umum tentang Pasar Keamanan Siber Global Secara Keseluruhan

Pasar keamanan siber global terkait erat dengan ekonomi global, mengingat peningkatan ancaman kejahatan siber dan peningkatan ketergantungan terhadap teknologi digital memiliki implikasi yang signifikan bagi bisnis, pemerintah, dan individu di seluruh dunia.

Dalam beberapa tahun terakhir, serangan siber telah mengalami perubahan signifikan, dengan para penjahat memanfaatkan teknologi canggih seperti persenjataan berbasis AI, pembajakan kripto, dan serangan *ransomware* untuk menasar lembaga pemerintah, infrastruktur penting, dan perusahaan besar. Sebelumnya, serangan siber sebagian besar dikenal dan berbasis *signature*, dan sistem keamanan dapat mengidentifikasi dan menghentikan serangan *malware*, *worm*, spam, dan virus Trojan horse.

Namun, ancaman siber saat ini sebagian besar tidak diketahui, dan sistem keamanan kesulitan mendeteksi dan mengidentifikasinya. Pencurian keuangan tidak lagi menjadi satu-satunya motif serangan siber, dan kerusakan katastrofik jangka panjang, seperti perusakan reputasi, *existence questionability*, dan kepercayaan bisnis, kini menjadi tujuan utama. Seiring dengan pengembangan kasus penggunaan praktis dari teknologi canggih seperti jaringan 5G, perangkat IoT, sistem AI, dan proses terautomasi, pelaku kejahatan siber kemungkinan besar akan menargetkan teknologi ini untuk menyebabkan kerusakan yang sangat besar, yang beberapa di antaranya dapat disponsori oleh negara.

Serangan Siber Tingkat Tinggi di Masa Lalu, Global

Parlemen Australia, 2019	Serangan siber di Parlemen Australia pada tahun 2019 menargetkan jaringan komputer beberapa partai politik Australia yang mengakibatkan pencurian informasi sensitif. Serangan ini diduga dilakukan oleh kelompok yang disponsori negara, dan menimbulkan kekhawatiran tentang potensi campur tangan kekuatan asing dalam proses demokrasi.
SolarWinds, 2020	Serangan SolarWinds melibatkan peretas yang mendapatkan akses ke jaringan beberapa lembaga pemerintah dan perusahaan swasta, termasuk Departemen Keamanan Dalam Negeri AS dan Microsoft. Penyerang mengeksploitasi kerentanan dalam perangkat lunak Orion milik SolarWinds, yang memungkinkan mereka memantau dan mengakses informasi sensitif di jaringan ini. Ini mengakibatkan pembobolan data yang signifikan dan kerusakan reputasi bagi mereka yang terkena dampak.
Colonial Pipeline, 2021	Jaringan pipa yang memasok sekitar 45% bahan bakar Pantai Timur tersebut ditutup selama beberapa hari setelah serangan itu. Hal ini menyebabkan pembelian dalam jumlah banyak (<i>panic buying</i>) dan kekurangan bahan bakar di beberapa negara bagian. Para penyerang menuntut uang tebusan sebesar AS\$4,4 juta, yang akhirnya dibayar oleh Colonial Pipeline. Serangan tersebut menyoroti kerentanan infrastruktur penting dan potensi dampak serangan siber pada layanan penting.
Facebook, 2021	Pembobolan ini mengungkap informasi pribadi lebih dari 500 juta pengguna Facebook, termasuk nomor telepon dan alamat email mereka. Data tersebut diperoleh melalui kerentanan dalam sistem Facebook yang memungkinkan peretas mengorek informasi pribadi dari profil pengguna. Pembobolan tersebut menyoroti pentingnya privasi dan perlindungan data serta kebutuhan perusahaan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang tangguh untuk mencegah insiden semacam itu.

Sumber: Frost & Sullivan Cybersecurity Market Landscape in Indonesia Report

Lonjakan serangan siber tingkat tinggi yang baru-baru ini terjadi serta pembobolan siber telah menyoroti pentingnya meningkatkan keamanan siber. Tren ini disadari oleh negara-negara secara global. Berdasarkan *Global Cybersecurity Index (GCI)* ITU (International Telecommunication Union), skor rata-rata GCI keseluruhan global tumbuh sebesar 9,5% dari laporan tahun 2018 sebelumnya ke laporan tahun 2020 yang terbaru. Survei tersebut mengukur komitmen negara terhadap keamanan siber di lima pilar, yaitu hukum, teknis, langkah organisasi, pengembangan kapasitas, dan kerja sama.

Pertumbuhan skor rata-rata keseluruhan sebesar 9,5% menunjukkan peningkatan postur dan komitmen keamanan siber secara keseluruhan dari semua negara. Akan tetapi, masih ada kesenjangan yang signifikan antara negara dengan skor teratas dan terbawah, dengan 10 negara teratas meraih skor lebih dari dua kali lipat skor rata-rata 10 negara peringkat

terbawah. Wawasan kunci yang diperoleh dari pandemi COVID-19 adalah bahwa masalah aksi kolektif seperti kesehatan atau keamanan siber, perlu ditangani dengan pendekatan interdisipliner dan holistik.

Peningkatan nilai GCI di kelima pilar akan membutuhkan pembinaan hubungan antara orang-orang dan membangun kepercayaan, tidak hanya di dalam negara tetapi juga di antara negara-negara yang kurang siap untuk menghadapi masalah keamanan siber. Negara-negara harus memanfaatkan kekuatan dan keunggulan kompetitif mereka guna mendorong kapasitas dan kesehatan siber secara umum, selagi terus mendukung negara lain yang perlu bantuan, sehingga semua negara menjadi lebih siap dalam mengatasi tantangan dunia yang semakin terhubung. Proyeksi pasar keamanan siber global secara keseluruhan positif mengingat indikasi kuat bahwa keamanan siber akan terus menjadi masalah penting bagi pemerintah, bisnis, dan individu.

3.2 Peraturan dan Kepatuhan Industri Global

Menanggapi ancaman yang kian berkembang dan pasar keamanan siber yang terus tumbuh, pemerintah di seluruh dunia mengambil langkah-langkah untuk mengatur pasar keamanan siber, dengan tujuan melindungi warganya dan memastikan stabilitas infrastruktur penting. Peraturan ini mencakup berbagai bidang, mulai dari privasi data, keamanan jaringan, perencanaan respon insiden, dan manajemen risiko.

Akan tetapi, peta regulasi keamanan siber masih jauh dari konsisten, mengingat masing-masing negara dan wilayah memiliki kebutuhan dan tingkat kematangan yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan peta peraturan keamanan siber yang kian kompleks dan terus berkembang, dengan setiap negara dan wilayah mengembangkan perangkat hukum dan peraturan mereka tersendiri. Terlepas dari perbedaan ini, para pembuat kebijakan di seluruh dunia semakin mengakui pentingnya peraturan keamanan siber.

Di Amerika Utara, pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk meningkatkan postur keamanan siber mereka. Sebagai contoh, Amerika Serikat telah menyusun beberapa inisiatif dan membentuk lembaga keamanan siber, seperti Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur atau *Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)*, *National Cybersecurity Center of Excellence (NCCoE)*, dan *National Institute of Standards and Technology (NIST)*. Lembaga-lembaga tersebut menyediakan panduan dan sumber daya kepada badan pemerintah, bisnis, dan individu untuk membantu meningkatkan pertahanan keamanan siber. Selain itu, Kanada juga telah meluncurkan inisiatif seperti *Cybersecurity Cooperation Program* dan *Canadian Centre for Cybersecurity* untuk meningkatkan kemampuan keamanan sibernya.

Di Eropa, pemerintah telah mengambil pendekatan kolaboratif untuk mengatasi ancaman keamanan siber melalui Badan Keamanan Siber Uni Eropa atau *European Union Agency for Cybersecurity (ENISA)*. ENISA menyediakan panduan dan sumber daya kepada negara-negara anggotanya untuk meningkatkan pertahanan keamanan siber dan berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mengatasi ancaman siber lintas batas. Selain itu, negara-negara seperti Jerman dan Prancis telah meluncurkan strategi keamanan siber nasional yang berfokus pada pengamanan infrastruktur penting, peningkatan kerja sama internasional, dan peningkatan kesadaran keamanan siber di antara warga negara mereka.

Di Asia Pasifik, pemerintah juga telah mengambil langkah signifikan dalam meningkatkan postur keamanan siber mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, Australia telah memperkuat cakupan peraturan keamanan sibernya dengan beberapa inisiatif baru, termasuk pembentukan Pusat Keamanan Siber Australia atau *Australian Cyber Security Centre (ACSC)* sebagai otoritas pusat untuk keamanan siber, pemberlakuan Undang-Undang Keamanan Infrastruktur Penting atau *Security of Critical Infrastructure Act*, dan perluasan skema *Notifiable Data Breaches*. Pemerintah juga meningkatkan investasi dalam penelitian dan pengembangan keamanan siber dan berkolaborasi dengan mitra internasional terkait masalah keamanan siber. Tiongkok telah membentuk Administrasi Keamanan Siber Nasional atau *National Cybersecurity Administration* dan memberlakukan berbagai undang-undang dan peraturan, seperti Undang-Undang Keamanan Siber dan Undang-Undang Keamanan Data, guna mengatasi ancaman keamanan siber. Jepang telah meluncurkan Strategi Keamanan Siber 2018 untuk meningkatkan kemampuan keamanan sibernya dan mendorong kerja sama internasional dalam memerangi ancaman siber. Korea Selatan juga telah menerapkan berbagai inisiatif keamanan siber, seperti *Cyber Command* dan Undang-Undang Pengelolaan Keamanan Siber, guna memperkuat pertahanan keamanan sibernya.

Selanjutnya di Asia Pasifik, peta peraturan keamanan siber di ASEAN ditandai dengan meningkatnya penekanan pada peraturan perundang-undangan keamanan siber di seluruh negara anggota. Negara-negara seperti Singapura, Indonesia, dan Malaysia telah menerapkan undang-undang perlindungan data yang komprehensif, mendirikan badan keamanan siber nasional, dan memberlakukan peraturan guna memerangi kebohongan daring dan kejahatan siber. Meskipun kerangka peraturan bervariasi di seluruh kawasan, negara anggota ASEAN telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kemampuan keamanan siber mereka dan berkolaborasi dalam inisiatif keamanan siber regional.

Di Timur Tengah, negara-negara seperti Uni Emirat Arab dan Arab Saudi telah memberlakukan peraturan perundang-undangan untuk melindungi infrastruktur penting mereka dari ancaman siber. Undang-undang ini mewajibkan operator infrastruktur penting untuk mematuhi standar keamanan siber dan membuat rencana respon insiden. Israel juga telah menerapkan berbagai inisiatif keamanan siber, seperti *National Cyber Directorate* dan pusat inovasi CyberSpark, untuk meningkatkan kemampuan keamanan siber dan mendorong inovasi di bidang tersebut.

Perlindungan data merupakan salah satu bidang perhatian khusus dalam keamanan siber. Perlindungan data telah menjadi topik yang semakin memprihatinkan dan penting secara global selama beberapa tahun terakhir. Peningkatan konektivitas telah menaikkan volume data pribadi yang dikumpulkan dan dibagikan. Seiring dengan pertumbuhan data pribadi secara eksponensial, peraturan perlindungan data diberlakukan guna memastikan bahwa informasi pribadi individu dikumpulkan, diproses, dan disimpan dengan cara yang menghormati hak privasi mereka dan melindungi penyalahgunaan. Saat ini, peta peraturan perlindungan data sangat kompleks dan bervariasi, dan berbagai negara dan wilayah memiliki seperangkat aturan dan persyaratan uniknya tersendiri.

Gambaran Umum Peraturan Perlindungan Data, Global, menurut Wilayah

<p>Asia Pasifik</p>	<p>Undang-undang perlindungan data di Asia Pasifik berbeda-beda dan terus berkembang. Beberapa negara sudah memiliki peraturan perlindungan data yang kuat, sedangkan negara lainnya masih baru mulai menetapkannya. Secara umum, peraturan perlindungan data di wilayah ini cenderung tidak seketat di Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir, ada beberapa perkembangan signifikan dalam peraturan perlindungan data di kawasan ini.</p> <p>Di ASEAN, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Singapura tahun 2012 mewajibkan organisasi yang mengumpulkan data pribadi memiliki langkah-langkah keamanan guna mencegah (a) akses, pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, penyalinan, modifikasi, pembuangan yang tidak sah; dan (b) kehilangan penyimpanan atau perangkat apa pun tempat data pribadi disimpan. Undang-undang ini diperbarui pada tahun 2020 dengan amendemen tentang pemberitahuan pembobolan data dan portabilitas data. Sebagian besar amendemen mulai diberlakukan pada Februari 2021, tetapi ketentuan terkait portabilitas data belum berlaku. Di Indonesia, RUU Perlindungan Data Pribadi disahkan menjadi undang-undang pada Oktober 2022, ini menjadikannya</p>
	<p>Undang-undang perlindungan data pribadi komprehensif pertama di Indonesia. Sebelumnya, ketentuan tentang perlindungan data pribadi tersebar di lebih dari 30 peraturan perundang-undangan yang berbeda.</p> <p>Negara-negara yang telah menerapkan undang-undang privasi dan perlindungan data beberapa waktu lalu, saat ini telah memperbarui dan memperkuat undang-undang tersebut. Misalnya, di Australia, RUU Amendemen Undang-Undang Privasi (Penegakan dan Tindakan Lainnya) tahun 2022 akan meningkatkan denda maksimal yang dapat diterapkan berdasarkan Undang-Undang Privasi 1988 (<i>Privacy Act 1988</i>) atas pelanggaran privasi serius atau berulang dari denda yang berlaku saat ini, yaitu sebesar AAS\$2,22 juta (AS\$1,4 juta) menjadi yang mana yang lebih besar antara AAS\$50 juta (AS\$32 juta), 3x nilai manfaat yang diperoleh melalui penyalahgunaan informasi, atau 30% dari omzet perusahaan yang disesuaikan dalam periode yang bersangkutan.</p> <p>Perkembangan terkini mencakup pembaruan peraturan perlindungan data Jepang agar sesuai dengan GDPR. Tiongkok juga memperbarui peraturan perlindungan datanya dengan Undang-Undang Perlindungan Informasi Pribadi, yang berlaku pada 1 November 2021. Undang-undang tersebut menetapkan persyaratan terperinci untuk pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan informasi pribadi dan mengenakan penalti yang signifikan atas ketidakpatuhan. Adapun perkembangan lainnya, beberapa negara sedang menjajaki kemungkinan memperkenalkan persyaratan pelokalan data, yang mengharuskan perusahaan untuk menyimpan data pribadi dalam perbatasan negara. Minat akan mekanisme transfer data lintas batas pun semakin meningkat karena banyak perusahaan di wilayah ini beroperasi di beberapa negara.</p>

<p>Eropa</p>	<p>Eropa memiliki salah satu peta peraturan perlindungan data yang paling kuat dan komprehensif di dunia. Peraturan Perlindungan Data Umum atau <i>General Data Protection Regulation</i> (GDPR) berlaku efektif sejak 2018 dan berlaku untuk semua perusahaan yang memproses data pribadi warga negara UE. Peraturan ini mengenakan persyaratan ketat pada perusahaan, termasuk kewajiban untuk mendapatkan persetujuan eksplisit terkait pemrosesan data dan penerapan kebijakan dan prosedur perlindungan data yang kuat.</p> <p>Peraturan perlindungan data Eropa pun berkembang, termasuk potensi perluasan GDPR agar mencakup teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things. Selain itu, fokus untuk memastikan bahwa GDPR ditegakkan secara konsisten di semua negara anggota UE juga semakin berkembang.</p>
<p>Amerika</p>	<p>Amerika Utara memiliki kekhawatiran atas privasi data, tetapi tidak memiliki serangkaian persyaratan yang komprehensif di tingkat negara (federal). Hal ini menyulitkan organisasi dalam menangani privasi data dalam yurisdiksi yang berbeda. Undang-undang perlindungan data di AS diatur oleh gabungan undang-undang federal dan negara bagian. Undang-undang federal utama yang mengatur perlindungan data di AS adalah Undang-Undang Privasi tahun 1974, yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi oleh lembaga federal.</p> <p>Di tingkat negara bagian, 50 negara bagian telah memberlakukan undang-undang pemberitahuan pembobolan data, yang mewajibkan bisnis dan organisasi untuk memberi tahu individu jika terjadi pembobolan data. Selain itu, beberapa negara bagian telah memberlakukan undang-undang yang menyediakan peraturan perlindungan data yang lebih komprehensif, seperti Undang-Undang Privasi Konsumen California (<i>California Consumer Privacy Act/CCPA</i>) dan Undang-Undang Hentikan Peretasan dan Tingkatkan Keamanan Data Elektronik (<i>New York Stop Hacks and Improve Electronic Data Security/SHIELD</i>) New York. Sejumlah negara bagian tengah menjajaki kemungkinan untuk memperkenalkan peraturan perlindungan data yang mirip dengan CCPA, dan minat terkait mekanisme transfer data lintas batas di seluruh wilayah semakin meningkat.</p> <p>Di Meksiko, Undang-Undang Federal tentang Perlindungan Data Pribadi yang Dipegang oleh Pihak Swasta (<i>Federal Law on Protection of Personal Data Held by Private Parties/LFPDPPP</i>) mewajibkan bisnis untuk memperoleh persetujuan individu sebelum mengumpulkan atau menggunakan data pribadi mereka dan menerapkan tindakan keamanan yang sesuai guna melindungi data tersebut dari akses tidak sah. Dalam beberapa tahun terakhir, terdapat beberapa perkembangan signifikan dalam peraturan perlindungan data. Misalnya, pada tahun 2018, Brasil memperkenalkan Undang-Undang Perlindungan Data Umum (<i>General Data Protection Law/LGPD</i>), yang menetapkan peraturan perlindungan data yang komprehensif untuk negara tersebut.</p>

<p>Timur Tengah</p>	<p>Pada tahun 2016, Dewan Kerja Sama Teluk (<i>Gulf Cooperation Council/GCC</i>) memperkenalkan Kerangka Kerja Privasi GCC, yang memberikan pedoman untuk perlindungan data pribadi dan menguraikan prinsip-prinsip bagi para pengontrol dan pemroses data. Akan tetapi, kerangka kerja tersebut tidak mengikat secara hukum, dan penerapannya bervariasi antar anggota.</p> <p>Uni Emirat Arab (UEA) memberlakukan Undang-Undang Perlindungan Data (<i>Data Protection Law/DPL</i>), yang mengatur pemrosesan data pribadi di negara tersebut dan mengenakan denda atas ketidakpatuhan. Qatar, Bahrain, dan Kuwait memiliki undang-undang serupa, dengan berbagai tingkat penegakan dan denda atas ketidakpatuhan. Negara-negara lain di kawasan ini, seperti Iran dan Suriah, tidak memiliki undang-undang perlindungan data khusus.</p> <p>Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (<i>Personal Data Protection Law/PDPL</i>) Arab Saudi awalnya akan mulai berlaku pada 23 Maret 2022, tetapi penegakan penuhnya ditunda hingga 17 Maret 2023. PDPL berlaku untuk entitas publik dan swasta, termasuk entitas asing yang memproses data pribadi penduduk Arab Saudi. Undang-undang ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan praktik terbaik internasional. Demikian pula, UEA saat ini sedang berupaya memperbarui undang-undang perlindungan datanya agar sejalan dengan standar global.</p>
<p>Afrika</p>	<p>Pada tahun 2019, Uni Afrika (UA) memperkenalkan perjanjian Area Perdagangan Bebas Benua Afrika (<i>African Continental Free Trade Area/AfCFTA</i>), yang mencakup ketentuan tentang perlindungan data dan privasi. Perjanjian tersebut berusaha untuk mendorong arus data secara bebas di seluruh benua sementara tetap melindungi informasi pribadi individu.</p> <p>Beberapa negara Afrika baru-baru ini juga memperkenalkan undang-undang perlindungan data, termasuk Afrika Selatan, Nigeria, dan Kenya. Undang-undang tersebut menetapkan ketentuan pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan informasi pribadi dan memberikan kendali yang lebih besar bagi individu atas data mereka.</p>

Sumber: Frost & Sullivan *Cybersecurity Market Landscape in Indonesia Report*

Selain perlindungan data pribadi, pengakuan akan pentingnya perlindungan infrastruktur penting dari ancaman siber semakin meningkat. Serangan ini dapat menimbulkan masalah ekonomi, sosial, dan keamanan nasional yang signifikan. Banyak negara telah memperkenalkan peraturan dan standar yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan siber infrastruktur penting, seperti Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (*Cybersecurity and Infrastructure Security Agency/CISA*) Amerika Serikat, Pedoman Jaringan dan Sistem Informasi Uni Eropa (*Network and Information Systems Directive/Pedoman NIS*) Uni Eropa, dan Pusat Perlindungan Infrastruktur Nasional (*Centre for the Protection of National Infrastructure/CPNI*) Inggris. Akan tetapi, peta peraturan tetap terfragmentasi, dengan berbagai negara mengambil pendekatan yang berbeda terhadap keamanan siber infrastruktur penting.

Gambaran Umum Peraturan Keamanan Siber Infrastruktur Penting, Global, menurut Wilayah

<p>Asia Pasifik</p>	<p>Undang-Undang Keamanan Siber Singapura, yang diberlakukan pada tahun 2018, mencakup ketentuan tentang perlindungan infrastruktur informasi penting (<i>critical information infrastructure</i> atau CII). Pada tahun 2021, ASEAN-Japan <i>Cybersecurity Capacity Building Center</i> diluncurkan untuk meningkatkan kemampuan keamanan siber di negara-negara anggota ASEAN. Pusat ini akan memberikan pelatihan dan dukungan bagi para profesional keamanan siber dan memfasilitasi pembagian informasi dan kerja sama antara ASEAN dan Jepang. Kerja sama regional juga akan terus memainkan peran kunci dalam meningkatkan keamanan siber infrastruktur penting di ASEAN. ASEAN CERT Incident Drill akan diadakan setiap tahun untuk membantu negara-negara anggota menanggapi insiden keamanan siber, dan Strategi Kerja Sama Keamanan Siber ASEAN akan ditinjau dan diperbarui secara berkala guna memastikannya tetap efektif dalam mengatasi ancaman yang muncul.</p> <p>Di Australia, perkembangan terkini meliputi Amendemen Undang-Undang Tahun 2022 tentang Peraturan Keamanan (Perlindungan Infrastruktur Penting). Amendemen tersebut memperluas cakupan persyaratan pemberitahuan tentang pembobolan keamanan dari Undang-Undang Keamanan Infrastruktur Penting 2018 sehingga mencakup sektor listrik, gas, air, dan pelabuhan, dan juga mencakup sektor pertahanan, ruang angkasa, transportasi, makanan dan kebutuhan sehari-hari, pendidikan tinggi dan penelitian, layanan kesehatan dan medis, energi, layanan dan pasar keuangan, penyimpanan atau pemrosesan data, air dan saluran pembuangan, dan komunikasi.</p>
<p>Eropa</p>	<p>Pedoman Jaringan dan Sistem Informasi Uni Eropa (<i>Network and Information Systems Directive</i>/Pedoman NIS) UE, yang diberlakukan pada tahun 2018, menetapkan kerangka kerja untuk keamanan jaringan dan sistem informasi di seluruh sektor infrastruktur penting. Diberlakukan mulai Januari 2023, Pedoman ini diperbarui oleh NIS 2 yang memperluas cakupannya.</p> <p>UE saat ini sedang mempertimbangkan pengajuan untuk strategi keamanan siber baru, yang bertujuan untuk lebih memperkuat ketahanan infrastruktur penting dan meningkatkan kerja sama antar negara anggota. Kemungkinan besar juga akan ada peningkatan penekanan pada peran sektor swasta dalam mengamankan infrastruktur penting, di mana perusahaan didorong untuk mengambil pendekatan yang lebih proaktif terhadap keamanan siber.</p>
<p>Amerika</p>	<p>Di AS, Badan Keamanan Siber dan Infrastruktur (<i>Cybersecurity and Infrastructure Security Agency</i>/CISA) didirikan untuk melindungi infrastruktur penting negara dari ancaman siber. Pada bulan Maret 2022, Undang-Undang Pelaporan Insiden Siber untuk Infrastruktur Penting (<i>Cyber Incident Reporting for Critical Infrastructure Act</i>/CIRCIA) tahun 2022 ditandatangani menjadi undang-undang. Ini akan membuka jalan bagi lebih banyak pengembangan peraturan untuk keamanan TI dan TO, yang berdampak pada beberapa industri. Di Amerika Latin, negara-negara seperti Brasil dan Meksiko telah menerapkan peraturan perundang-undangan perlindungan data untuk melindungi infrastruktur penting.</p> <p>Perkembangan terkini termasuk Perintah Eksekutif AS tentang Peningkatan Keamanan Siber Negara, yang bertujuan untuk memperkuat pertahanan keamanan siber negara dan mendorong kolaborasi publik-swasta.</p>

<p>Timur Tengah</p>	<p>Timur Tengah telah mencapai kemajuan signifikan dalam menerapkan peraturan perundang-undangan untuk menangani keamanan siber infrastruktur penting. Beberapa negara di kawasan ini, termasuk Uni Emirat Arab (UEA), Arab Saudi, dan Qatar, telah memberlakukan undang-undang untuk melindungi infrastruktur penting mereka dari ancaman siber. Undang-undang tersebut mewajibkan operator infrastruktur penting untuk mengadopsi prosedur keamanan siber dan membuat rencana respon insiden.</p> <p>Sebagai contoh, Undang-Undang Keamanan Siber UEA mewajibkan penyelenggara infrastruktur penting untuk mematuhi serangkaian standar keamanan siber dan melaporkan setiap insiden keamanan siber. Demikian pula, Undang-Undang Keamanan Siber Arab Saudi mewajibkan penyelenggara infrastruktur penting untuk Menyusun rencana manajemen risiko dan menerapkan pengendalian keamanan siber yang tepat. Secara keseluruhan, undang-undang ini menunjukkan komitmen Timur Tengah dalam melindungi infrastruktur pentingnya dari ancaman siber dan memastikan kelangsungan layanan esensial.</p>
<p>Afrika</p>	<p>Sejumlah negara Afrika telah memberlakukan peraturan perundang-undangan keamanan siber khusus untuk infrastruktur penting. Misalnya, di Nigeria, Undang-Undang Keamanan Siber tahun 2015 mewajibkan penyelenggara infrastruktur penting untuk menetapkan dan memelihara langkah-langkah keamanan siber untuk melindungi dari ancaman siber. Demikian pula, di Afrika Selatan, RUU Kejahatan Dunia Maya dan Keamanan Dunia Maya, yang saat ini sedang ditinjau oleh parlemen, memasukkan ketentuan untuk melindungi infrastruktur penting dari ancaman siber.</p> <p>Negara-negara Afrika diperkirakan akan terus berinvestasi dalam infrastruktur penting. Ini akan mendorong fokus peraturan dan standardisasi dalam industri. African Development Bank (AfDB) telah meluncurkan Dana Investasi Infrastruktur Afrika (<i>Africa Infrastructure Investment Fund/AIIF3</i>) yang diharapkan dapat memobilisasi investasi hingga AS\$1,5 miliar dan ditujukan untuk mendukung pembangunan infrastruktur penting.</p>

Sumber: Frost & Sullivan Cybersecurity Market Landscape in Indonesia Report

Kesimpulannya, peningkatan frekuensi dan kecanggihan ancaman siber telah mendorong pemerintah di seluruh dunia untuk membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatasi ancaman keamanan siber. Meskipun berbeda di setiap wilayah, undang-undang tersebut memiliki tujuan yang sama dalam melindungi infrastruktur penting, kekayaan intelektual, dan data pribadi dari ancaman siber. Namun, sifat ancaman siber yang terus berkembang berarti pemerintah harus tetap waspada dan senantiasa menyesuaikan strategi dan kebijakan keamanan siber mereka.

3.3 Pendorong dan Penghambat Pasar Keamanan Siber Global

Keamanan siber adalah pasar yang berkembang yang mencakup berbagai produk dan layanan yang dirancang untuk melindungi organisasi dari ancaman siber. Permintaan akan solusi keamanan siber didorong oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya ancaman siber dan peraturan kepatuhan, adopsi teknologi cloud, digitalisasi proses bisnis, meningkatnya kesadaran akan risiko keamanan siber, dan munculnya teknologi baru. Pendorong ini berkontribusi pada pertumbuhan pasar keamanan siber, sehingga menjadikannya aspek penting dari operasi organisasi di era digital saat ini.

Peningkatan Volume dan Kecanggihan Ancaman Siber: Meningkatnya jumlah serangan siber yang sangat canggih yang menargetkan infrastruktur penting, seperti sumber daya sensitif dan rantai pasokan organisasi, serta lembaga pemerintah di wilayah tersebut, telah mendorong organisasi untuk berinvestasi dalam solusi keamanan jaringan guna memperkuat pertahanan jaringan dan melindungi aset berharga mereka.

Kepatuhan dan Peraturan: Organisasi diharuskan untuk mematuhi berbagai peraturan pemerintah dan standar industri seperti GDPR dan PCI DSS, yang menjadikan keamanan siber sebagai aspek wajib dalam operasi mereka. Perusahaan harus mematuhi peraturan ini agar terhindar dari denda yang besar dan sanksi hukum, menjadikan keamanan siber sebagai prioritas bagi banyak organisasi.

Adopsi Teknologi Cloud: Dalam survei pengguna akhir The State of Cloud 2021 terbaru dari Frost & Sullivan, adopsi layanan cloud meningkat secara signifikan selama 2 tahun terakhir. Lebih dari 54% organisasi sekarang menggunakan layanan SaaS, dan 36% dari organisasi ini mengindikasikan bahwa mereka berencana untuk menggunakan layanan SaaS dalam 2 tahun ke depan. Lonjakan migrasi cloud antar perusahaan menuntut adanya transformasi arsitektur jaringan dan keamanan lama agar

memiliki kinerja tinggi dan akses aman ke data dan aplikasi yang melampaui batas jaringan perusahaan tradisional. Adopsi teknologi *cloud* semakin berkembang. Bisnis mengandalkan layanan berbasis *cloud* untuk kegiatan operasional sehari-hari mereka. Namun, penyedia *cloud* hanya bertanggung jawab untuk mengamankan infrastruktur mereka, sedangkan bisnis bertanggung jawab mengamankan data dan aplikasi mereka.

Keamanan Siber Sebagai Bagian Integral Strategi Perusahaan: Meningkatnya kesadaran akan ancaman keamanan siber dan potensi risiko yang terkait dengan serangan siber telah menyebabkan peningkatan permintaan akan solusi keamanan siber. Organisasi menanankan investasi yang lebih besar dalam keamanan siber guna memastikan mereka dapat memitigasi risiko ini dan melindungi aset penting mereka. Karena insiden siber pada akhirnya memengaruhi pendapatan dan reputasi perusahaan; keamanan siber semakin disorot di kalangan eksekutif dan telah menjadi bagian dari strategi perusahaan.

Transformasi Digital: Transformasi digital bisnis yang sedang berlangsung di semua industri telah menciptakan tantangan keamanan baru. Ini dikarenakan organisasi perlu melindungi aset dan data digital mereka dalam lingkungan yang semakin kompleks dan saling terhubung. Kondisi ini menciptakan permintaan yang signifikan akan solusi keamanan siber yang mampu memberikan perlindungan bagi berbagai perangkat dan jaringan, termasuk perangkat seluler, perangkat IoT, dan sistem pengendalian industri.

Teknologi baru: Teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI) dan *internet of things* (IoT) mendorong pertumbuhan pasar keamanan siber. AI digunakan untuk meningkatkan deteksi dan respons terhadap ancaman, sedangkan IoT memperkenalkan permukaan serangan baru yang menuntut tindakan keamanan tambahan.

Akan tetapi, selalu ada tantangan dalam pertumbuhan pasar keamanan siber. Terlepas dari meningkatnya permintaan akan solusi keamanan siber, terdapat beberapa batasan yang dapat menghambat pertumbuhan pasar.

Kelangkaan Tenaga Profesional Keamanan Siber Terampil: Kajian Tenaga Kerja Keamanan Siber atau Cybersecurity Workforce Study terbaru dari (ISC)² memperkirakan tenaga kerja keamanan siber global pada tahun 2022 mencapai 4,7 juta, meningkat 11,1% dari tahun lalu. Tenaga kerja keamanan siber mengalami peningkatan di semua wilayah, dengan Asia-Pasifik mencatat pertumbuhan terbesar sebesar 15,6%, sedangkan Amerika Utara mencatat pertumbuhan paling sedikit yaitu sebesar 6,2%. Meskipun tenaga kerja keamanan siber berkembang dengan sangat cepat, permintaan akan tenaga profesional keamanan siber tumbuh lebih pesat. Meskipun terdapat peningkatan lebih dari 464.000 pekerja pada tahun sebelumnya, kesenjangan tenaga kerja keamanan siber telah tumbuh lebih dari dua kali lipat jumlah tenaga kerja itu sendiri.

Batasan Anggaran: Banyak bisnis tidak ingin atau tidak mampu berinvestasi dalam solusi keamanan siber yang mahal, meskipun biaya terkait pembobolan data dapat jauh lebih tinggi. Banyak perusahaan masih belum bersedia mengalokasikan anggaran yang cukup untuk keamanan siber. Hal ini terutama terjadi pada usaha kecil dan menengah, yang kerap memiliki sumber daya terbatas. Pembaruan proyeksi ekonomi Januari 2023 IMF juga memperkirakan bahwa ekonomi global akan melambat tahun ini sebelum nantinya pulih pada tahun 2024. Kondisi tersebut dapat mendorong organisasi untuk mengadopsi pendekatan yang lebih konservatif atas pengeluaran untuk keamanan siber.

Kompleksitas dan Fragmentasi: Solusi keamanan siber menjadi semakin kompleks, dengan pertahanan berlapis, *threat intelligence*, dan persyaratan kepatuhan. Selain itu, proliferasi berbagai jenis serangan dunia maya dan berbagai perangkat serta jaringan yang perlu dilindungi telah menjadikan pasar keamanan dunia maya sangat terbagi-bagi. Kompleksitas dan fragmentasi tersebut dapat mempersulit organisasi dalam memilih dan mengimplementasikan solusi keamanan siber yang efektif.

Kurangnya Standardisasi: Pasar keamanan siber tidak memiliki standarisasi, sehingga menyulitkan organisasi dalam membandingkan berbagai solusi dan memilih solusi terbaik untuk kebutuhan mereka. Selain itu, kurangnya standarisasi dapat menghambat solusi keamanan siber untuk beroperasi secara efektif, sehingga dapat membatasi keefektifannya. Menurut laporan yang dibuat Frost & Sullivan, kurangnya standarisasi dalam keamanan siber merupakan salah satu faktor utama yang menghambat pertumbuhan pasar keamanan siber.

Terlepas dari hambatan pertumbuhan pasar ini, ukuran pasar keamanan siber global siap untuk meraih pertumbuhan yang berkelanjutan, seiring dengan kesadaran organisasi akan arti penting investasi dalam solusi keamanan siber yang kuat demi melindungi aset mereka dari ancaman siber.

3.4 Ukuran dan Perkiraan Pasar Keamanan Siber Global

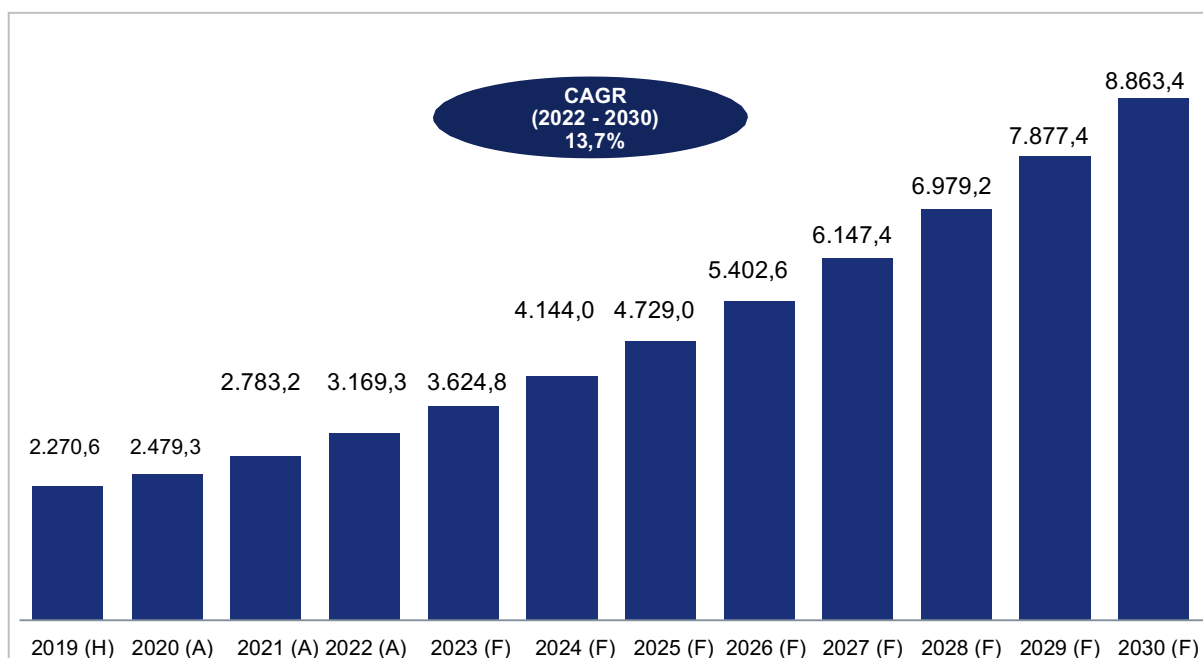
Keamanan siber menjadi fokus penting bagi organisasi di seluruh dunia karena mereka menghadapi ancaman siber yang semakin canggih. Seiring meningkatnya jumlah pembobolan data tingkat tinggi, serangan siber, dan insiden keamanan lainnya, organisasi berinvestasi lebih besar dalam solusi keamanan siber untuk melindungi data dan jaringan sensitif mereka.

Frost & Sullivan memperkirakan bahwa pasar keamanan siber global telah mengalami pertumbuhan yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, dengan pasar diperkirakan bernilai AS\$208,5 Miliar pada tahun 2022. Pertumbuhan pasar diperkirakan akan berlanjut dengan laju yang kuat, dengan estimasi pertumbuhan YoY sebesar 13,9% dari tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya frekuensi dan kecanggihan ancaman siber, ditambah dengan tumbuhnya kesadaran akan pentingnya keamanan siber di berbagai ukuran organisasi.

Tahun 2023 diharapkan menjadi tahun yang lebih kuat untuk pasar keamanan siber global, dengan pertumbuhan YoY diperkirakan sebesar 14,4%. Pada tahun 2025, pasar diperkirakan bernilai lebih dari AS\$311,1 Miliar, menggambarkan laju pertumbuhan tahunan majemuk (CAGR) yang kuat sebesar 14,3%. Dalam jangka panjang, pertumbuhan akan tetap stabil dan kuat pada CAGR 13,7% selama periode perkiraan dari 2022 hingga 2030 hingga mencapai AS\$583,1 Miliar pada tahun 2030.

Pasar Keamanan Siber Global, CY 2019 – CY 2030 (Rp Tn.)



Catatan: Mengecualikan HSM, PKI, Tanda Tangan Digital, Sertifikat SSL, USB yang Aman, Keamanan IoT Konsumen, Enkripsi Mandiri, Pengontrol Pengiriman Aplikasi, dsb.

Angka dibulatkan ke 1 angka di belakang koma

Tahun Dasar 2022, AS\$1 = Rp15.222 (per 15 Feb 2023)

Sumber: Frost & Sullivan

3.5 Pembagian Pasar Layanan Keamanan Siber Global Menurut Produk & Layanan

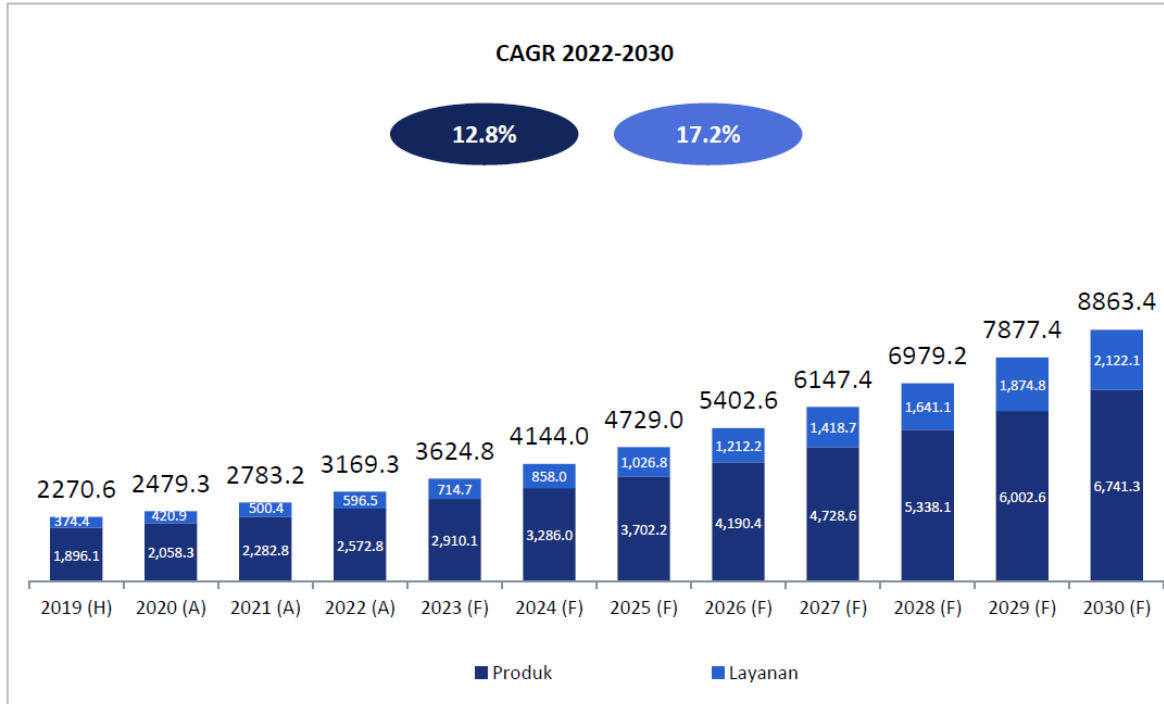
Pasar keamanan siber global adalah industri yang berkembang pesat yang menjadi semakin penting dalam lanskap digital saat ini. Pasar terutama dibagi menjadi dua segmen: produk dan jasa.

Pasar keamanan siber global sebagian besar didorong oleh segmen produk, yang menyumbang 81,2% (Rp2.572,7 Tn.) dari total pasar keamanan siber pada tahun 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh tingginya permintaan akan produk keamanan siber dalam melindungi dari jumlah ancaman siber yang semakin meningkat. Namun, pangsa segmen produk diperkirakan akan menurun secara bertahap menjadi 76,1% pada tahun 2030, seiring dengan peningkatan penerimaan atas segmen jasa.

Pangsa pasar segmen jasa diperkirakan akan meningkat dari 18,8% pada tahun 2022 menjadi 23,9% pada tahun 2030. Pertumbuhan ini terutama akan didorong oleh meningkatnya kompleksitas ancaman siber ditambah dengan kurangnya tenaga profesional keamanan siber yang terampil dalam memenuhi kebutuhan keamanan siber. Bisnis akan memanfaatkan penyedia layanan pihak ketiga dalam memenuhi kebutuhan TI dan keamanan yang semakin meningkat selagi berfokus pada bisnis inti mereka.

Dalam hal laju pertumbuhan, segmen produk diproyeksikan tumbuh pada CAGR 12,8% selama periode perkiraan 2022-2030. Di sisi lain, segmen jasa diperkirakan akan tumbuh lebih cepat, dengan CAGR 17,2% selama periode yang sama.

Total Pasar Keamanan Siber Global, menurut Produk dan Layanan, CY 2019 – CY 2030 (Rp Tn.)



Angka dibulatkan ke 1 angka di belakang koma
Tahun Dasar 2022, AS\$1 = Rp15.222 (per 15 Feb 2023)

Sumber: Frost & Sullivan

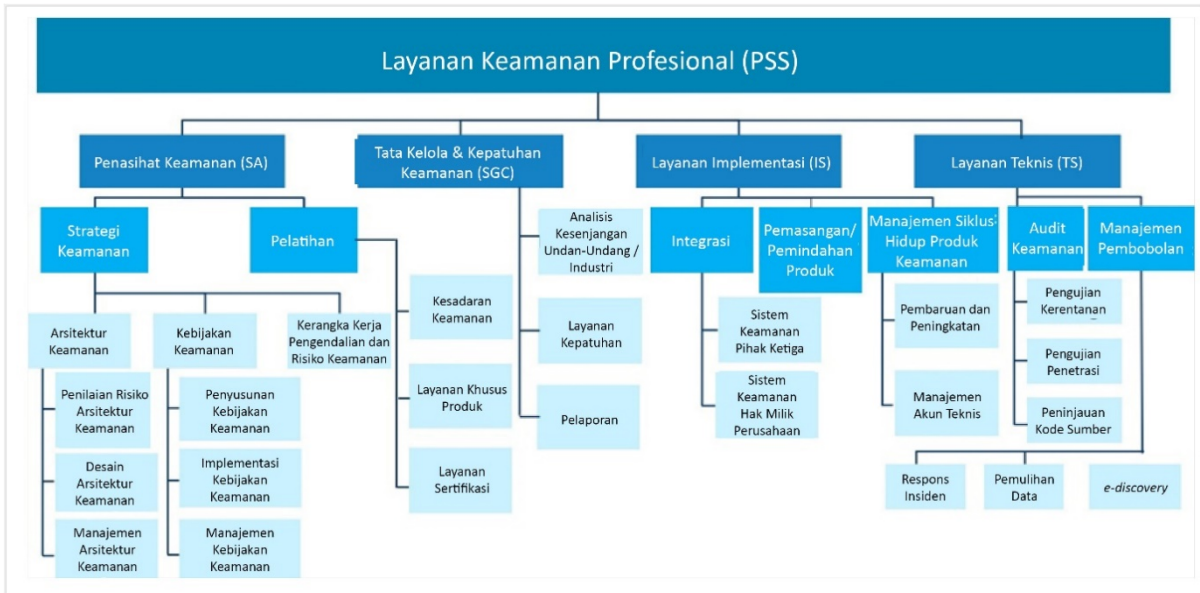
3.6 Pembagian Pasar Jasa Keamanan Siber Global menurut MSS vs PSS

Segmen jasa keamanan siber dapat dibagi lagi menjadi *Managed Security Services (MSS)* dan *Professional Security Services (PSS)*. MSS mencakup Pemantauan dan Manajemen Aset Keamanan (*Security Asset Monitoring and Management/SAMM*), Penelitian Ancaman, *Intelligence*, Deteksi, dan Remediasi (*Threat Research, Intelligence, Detection and Remediation/TRIDR*) serta MSS Tingkat Lanjut dan Berkembang (*Advanced and Emerging MSS/AEM*), sedangkan PSS terdiri atas empat komponen utama— Penasihat Keamanan (*Security Advisory/SA*), Tata Kelola dan Kepatuhan Keamanan (*Security Governance and Compliance/SGC*), Layanan Implementasi (*Implementation Service/IS*), dan Layanan Teknis (*Technical Services/TS*). Kedua segmen memainkan peran penting dalam membantu organisasi melindungi dari ancaman siber, dan pasar untuk jasa keamanan siber diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan di tahun-tahun mendatang karena peta ancaman yang terus berkembang.

Gambaran Umum Segmen Pasar MSS



Gambaran Umum Segmen Pasar PSS

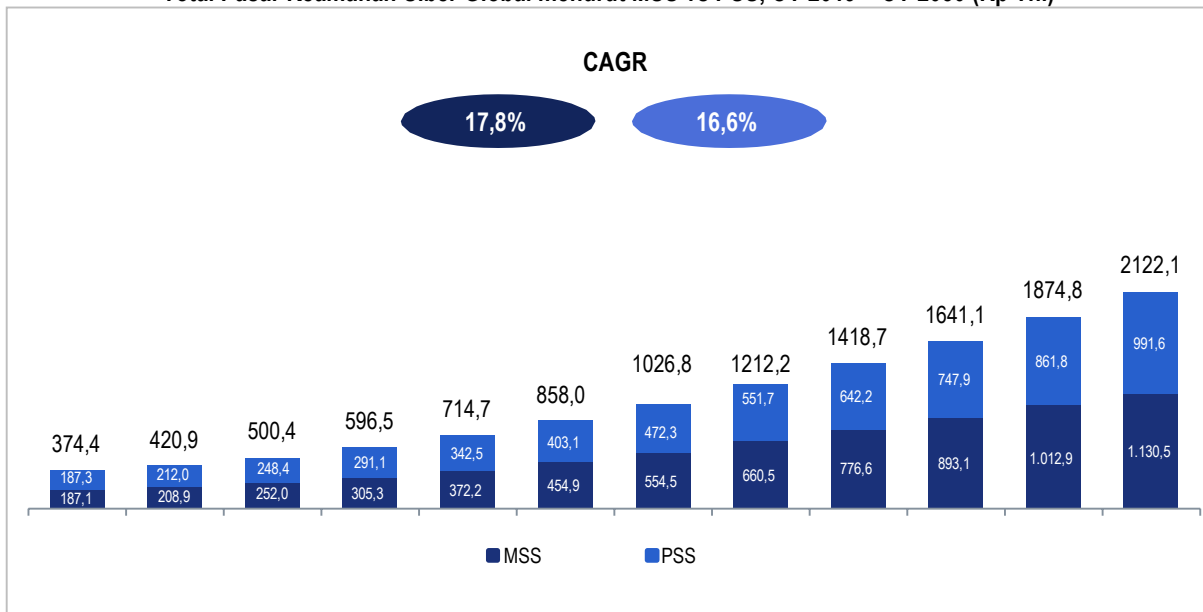


Sumber: Frost & Sullivan

Organisasi semakin mengadopsi lingkungan hybrid dan multi-cloud untuk meningkatkan keunggulan mereka dan menghadapi perubahan sosial ekonomi dari pandemi COVID-19 dan percepatan transformasi digital yang ditimbulkannya. Kesenjangan pakar keamanan secara global, kecanggihan ancaman, dan kompleksitas solusi keamanan menjadikan organisasi sulit untuk melindungi lingkungan ini secara memadai.

Pengalihdayaan ke penyedia layanan pihak ketiga menawarkan jawaban bagi kebutuhan perusahaan, memanfaatkan keahlian dan pengetahuan tim keamanan veteran, infrastruktur, dan portofolio layanan yang komprehensif dalam memitigasi risiko dunia maya dengan biaya yang jauh lebih kecil dibandingkan biaya Pusat Operasi Keamanan atau *Security Operations Center* (SOC) internal. Pasar secara keseluruhan diharapkan dapat tumbuh pada tahun-tahun mendatang.

Total Pasar Keamanan Siber Global menurut MSS vs PSS, CY 2019 – CY 2030 (Rp Tn.)



Angka dibulatkan ke 1 angka di belakang koma
Tahun Dasar 2022, AS\$1 = Rp15.222 (per 15 Feb 2023)

Sumber: Frost & Sullivan

Pada tahun 2022, pasar MSS global berukuran Rp305,3 triliun dan diperkirakan akan bertumbuh menjadi Rp1.130,5 triliun pada tahun 2030. Di sisi lain, pasar PSS global berukuran Rp291,1 triliun pada tahun 2022 dan diharapkan untuk tumbuh menjadi Rp991,6 triliun pada tahun 2030. MSS diperkirakan akan melihat pertumbuhan yang signifikan di tahun-tahun

mendatang tumbuh dengan CAGR 17,8% selama periode perkiraan 2022 hingga 2030. Pertumbuhan ini didorong oleh faktor-faktor seperti meningkatnya kompleksitas ancaman siber dan kebutuhan akan kemampuan pemantauan dan respons 24/7, PSS diperkirakan dapat melihat pertumbuhan yang sedikit lebih lambat pada CAGR 16,6%, didorong oleh kebutuhan akan solusi keamanan yang disesuaikan.

3.7 Kebutuhan atas *Managed Security Services (MSS)*

Transformasi digital menyebabkan lonjakan adopsi teknologi baru seperti *cloud*, IoT, dan aplikasi berbasis web di antara perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi di setiap area operasi bisnis. Namun, seiring dengan percepatan tingkat adopsi teknologi menyebabkan infrastruktur TI organisasi menjadi semakin kompleks dan peta ancaman semakin luas dan canggih, sehingga keamanan semakin sulit untuk dikelola. Hal ini membuat organisasi semakin rentan terhadap serangan siber. Dengan demikian, tim keamanan internal organisasi tidak lagi memiliki keahlian yang diperlukan untuk mengamankan infrastruktur TI mereka yang semakin kompleks secara memadai sementara tetap bekerja untuk memantau dan mengelola operasi keamanan mereka.

Kombinasi dari peta ancaman yang lebih luas, serangan siber yang semakin canggih, dan kurangnya tenaga profesional keamanan yang berkualitas memaksa organisasi untuk menunjuk penyedia layanan keamanan siber dalam membantu mengatasi tantangan ini. Dengan mengalihdayakan operasi keamanan mereka, organisasi mendapatkan akses ke berbagai MSS dan PSS seperti pemantauan keamanan 24x7x365, *threat management*, respon insiden dan manajemen kepatuhan, serta wawasan dari kumpulan pakar keamanan siber yang kuat.

Keputusan organisasi untuk bekerja sama dengan *Managed Security Services Provider (MSSP)* terutama disebabkan oleh kurangnya jumlah karyawan dan keahlian internal. MSSP memberikan skala keekonomian yang memungkinkan organisasi yang mereka layani mencapai penghematan yang signifikan dengan mengizinkan MSSP mengelola, memelihara, merekrut, melatih, dan mempertahankan tenaga profesional keamanan siber yang berpengalaman. Pasar MSS telah mengalami pertumbuhan signifikan selama beberapa tahun terakhir, dan tren ini diperkirakan akan berlanjut di tahun-tahun mendatang. Kebutuhan akan MSS akan didorong oleh beberapa faktor:

Kelangkaan Tenaga Profesional Keamanan Siber Terampil: Kondisi ini mendorong organisasi untuk mengalihdayakan perlindungan keamanan siber mereka mengingat merekrut dan mempertahankan tenaga profesional keamanan siber menjadi semakin sulit. Kondisi ini merupakan peluang besar bagi MSSPS, karena penyedia dapat menawarkan berbagai solusi dan layanan keamanan agar mencakup hampir setiap kemungkinan kasus penggunaan. Organisasi dapat memanfaatkan pengalaman dan keahlian yang disediakan penyedia terkelola dan berkonsentrasi pada aktivitas bisnis inti mereka, menghemat biaya yang cukup besar yang seyogyanya akan dikeluarkan untuk mengembangkan dan memelihara SOC internal.

Peningkatan Kompleksitas Produk dan Solusi Keamanan Siber: Perlombaan senjata antara pelaku kejahatan siber dan pemasok keamanan menyebabkan pengembangan solusi keamanan yang semakin kompleks. Solusi tersebut memerlukan pengalaman, pengetahuan, dan spesialisasi agar dapat digunakan secara maksimal. Kondisi tersebut, ditambah dengan kurangnya personel keamanan, menimbulkan tantangan serius bagi kemampuan organisasi dalam semua industri dan ukuran untuk membangun batas keamanan yang efektif. Seiring dengan dominasi solusi yang lebih inovatif dalam pasar keamanan siber, nilai yang ditawarkan MSSP dengan menyediakan dan mengelola seluruh rangkaian keamanan organisasi akan meningkat secara signifikan.

Kelanjutan Penerapan Pengaturan Kerja Jarak Jauh dan Hibrid: Pandemi telah mempercepat transformasi digital dan mengubah cara organisasi menjalankan bisnis secara mendasar. Banyak perusahaan telah beralih ke tenaga kerja jarak jauh, di mana lingkungan hibrid dan multi-cloud baru menjadi standar. Organisasi perlu menerapkan strategi keamanan modern yang mencakup *vulnerability management*, *Managed Detection and Response (MDR)*, simulasi pembobolan dan serangan, kerangka kerja *zero trust*, dan banyak solusi dan layanan lain guna melindungi lingkungan tersebut. Cara terbaik untuk memastikan perencanaan dan implementasi yang benar dari strategi tersebut adalah bermitra dengan MSSP. MSSP dapat memberikan kemampuan ini serta rangkaian keahlian keamanan, dengan biaya lebih rendah dibandingkan SOC internal.

Kepatuhan Terhadap Peraturan: Pentingnya mematuhi persyaratan peraturan telah menjadi penggerak bagi perusahaan untuk memastikan program keamanan siber mereka sesuai dengan kebutuhan bisnis mereka.

Perusahaan melibatkan MSSP untuk aktivitas seperti audit, layanan kepatuhan, respon insiden, dan pengujian penetrasi guna memastikan mereka tetap mematuhi undang-undang perlindungan data dan peraturan yang berlaku spesifik atas industrinya. Perusahaan akan mengandalkan MSSP untuk memperoleh akses terhadap para pakar dalam pengendalian dan pemantauan keamanan untuk membantu mereka mengembangkan strategi keamanan sesuai dengan persyaratan kepatuhan otoritas pengatur.

Masalah Geopolitik Mendorong Serangan yang Disponsori Negara: Perang Rusia-Ukraina yang sedang berlangsung semakin meningkatkan kebutuhan akan keamanan siber organisasi dan pemerintah global. Peningkatan serangan yang disponsori negara menyoroti pentingnya Langkah keamanan siber yang bersifat proaktif. Metode keamanan siber tradisional

mungkin tidak memadai untuk memberikan perlindungan terhadap serangan yang sangat canggih dan terarah tersebut. Jumlah serangan yang disponsori negara dapat meningkat, yang akan mendorong kemitraan dengan MSSP yang dapat berintegrasi dengan lingkungan OT/IoT.

3.8 Pentingnya Pusat Operasi Keamanan (SOC) bagi Perusahaan

Seiring dengan meningkatnya frekuensi dan kecanggihan serangan siber, bisnis perlu mengambil pendekatan proaktif terhadap keamanan siber agar tetap mengungguli potensi ancaman. Di sinilah Pusat Operasi Keamanan (SOC) berperan. SOC menyediakan pemantauan 24/7 dan pengelolaan infrastruktur keamanan organisasi, termasuk *firewall*, sistem deteksi intrusi, dan teknologi keamanan lainnya. SOC berfungsi sebagai lini pertahanan pertama terhadap serangan siber, memastikan setiap potensi insiden keamanan dapat terdeteksi dan ditangani secara tepat waktu.

Dengan berinvestasi pada SOC, bisnis dapat beralih dari pendekatan reaktif ke pendekatan proaktif terhadap keamanan siber. SOC memberikan kemampuan pemantauan dan respons berkesinambungan, sehingga bisnis dapat mendeteksi dan merespons ancaman dengan cepat, serta meminimalkan potensi kerusakan yang disebabkan oleh pembobolan. Pendekatan ini lebih efektif dibandingkan harus menunggu pembobolan terjadi kemudian menanggungnya, karena pendekatan tersebut memungkinkan bisnis mencegah terjadinya serangan sebelum menimbulkan kerugian.

Selain itu, SOC memberikan pandangan holistik terkait postur keamanan organisasi. SOC mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber yang memungkinkannya mengidentifikasi pola dan anomali yang mungkin merupakan indikasi ancaman potensial. SOC dapat digunakan untuk meningkatkan strategi keamanan siber. Informasi yang dikumpulkan dapat dimanfaatkan untuk memperoleh wawasan agar dapat lebih meningkatkan postur keamanan organisasi secara keseluruhan, mengidentifikasi area yang mungkin memerlukan perhatian dan sumber daya tambahan.

SOC dapat menyediakan alat dan sumber daya yang diperlukan bisnis untuk melakukannya, sehingga memungkinkan mereka untuk mendeteksi dan merespons ancaman secara *real-time*, mencegah pelanggaran sebelum terjadi, serta memperbaiki postur keamanan mereka secara keseluruhan. Akan tetapi, membangun dan memelihara SOC dapat menjadi proses yang menantang, tidak efisien, dan mahal. Di sinilah Penyedia *Managed Security Services Provider* (MSSP) berperan. MSSP dapat menyediakan SOC *as a service* kepada bisnis, sehingga bisnis dapat meraih manfaat dari teknologi dan keahlian keamanan canggih tanpa biaya dan kompleksitas yang timbul dalam membangun dan mengelola SOC internal.

Melalui kemitraan dengan MSSP, bisnis dapat memperoleh akses ke tim pakar keamanan yang terlatih dalam mendeteksi dan merespons ancaman siber. MSSP dapat menyediakan pemantauan dan pengelolaan berkesinambungan atas infrastruktur keamanan bisnis, mendeteksi dan mengatasi potensi ancaman secara *real-time*. Selain itu, MSSP dapat menyediakan pembaruan dan *patch* rutin untuk infrastruktur keamanan bisnis, memastikan bisnis tetap lebih maju dibandingkan ancaman potensial. MSSP juga dapat memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan, membantu mereka mengidentifikasi dan mengurangi potensi ancaman.

Secara keseluruhan, terdapat keharusan strategis bagi bisnis untuk beralih dari pendekatan reaktif ke pendekatan proaktif atas keamanan siber. Seiring dengan perkembangan ancaman siber, bisnis harus berinvestasi dalam SOC guna memastikan bahwa mereka memiliki perlindungan yang memadai terhadap serangan potensial.

1.9 Penggunaan *Professional Security Services* (PSS)

Professional Security Services (PSS) telah menjadi komponen penting dari strategi keamanan siber bagi bisnis di seluruh industri. PSS mencakup serangkaian layanan, termasuk penilaian risiko, *vulnerability testing*, pengujian penetrasi, audit keamanan, dan respon insiden.

Layanan mencakup keterlibatan strategis dalam respon insiden siber, penilaian postur keamanan siber, dan perencanaan strategis untuk meningkatkan ketahanan siber. Layanan ini merupakan proyek dengan cakupan yang ditentukan. Penyedia pada umumnya menyediakan *vulnerability management* dan layanan respon insiden berdasarkan perjanjian layanan berjangka (*retainer*). Mengingat ancaman siber terus berkembang dan menjadi lebih canggih, PSS menjadi semakin penting.

Adopsi PSS telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir karena bisnis semakin sadar akan risiko yang ditimbulkan oleh ancaman siber. Seiring dengan banyaknya bisnis yang menyimpan data sensitif dan menjalankan operasinya secara daring, kebutuhan akan langkah-langkah keamanan siber yang kuat menjadi sangat penting. PSS menyediakan berbagai layanan yang dirancang untuk mengidentifikasi kerentanan dalam sistem dan mencegah serangan siber kepada bisnis. Melalui kemitraan dengan penyedia PSS, bisnis dapat memperoleh manfaat dari teknologi dan keahlian keamanan canggih tanpa biaya dan kompleksitas yang timbul dalam membangun dan mengelola tim keamanan siber secara internal.

Dari sisi gambaran ke depan, persyaratan kepatuhan akan tetap menjadi pendorong utama pasar PSS. Pemberlakuan undang-undang privasi data atau peraturan keamanan siber yang diperbarui di banyak negara secara global mendorong perusahaan untuk memanfaatkan PSS mengingat PSS menyediakan akses terhadap pakar eksternal untuk menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terbaru. Pengujian penetrasi dan tata kelola serta kepatuhan risiko dapat membantu perusahaan menghindari sanksi peraturan dalam hal terjadi pembobolan data. Penilaian keamanan yang

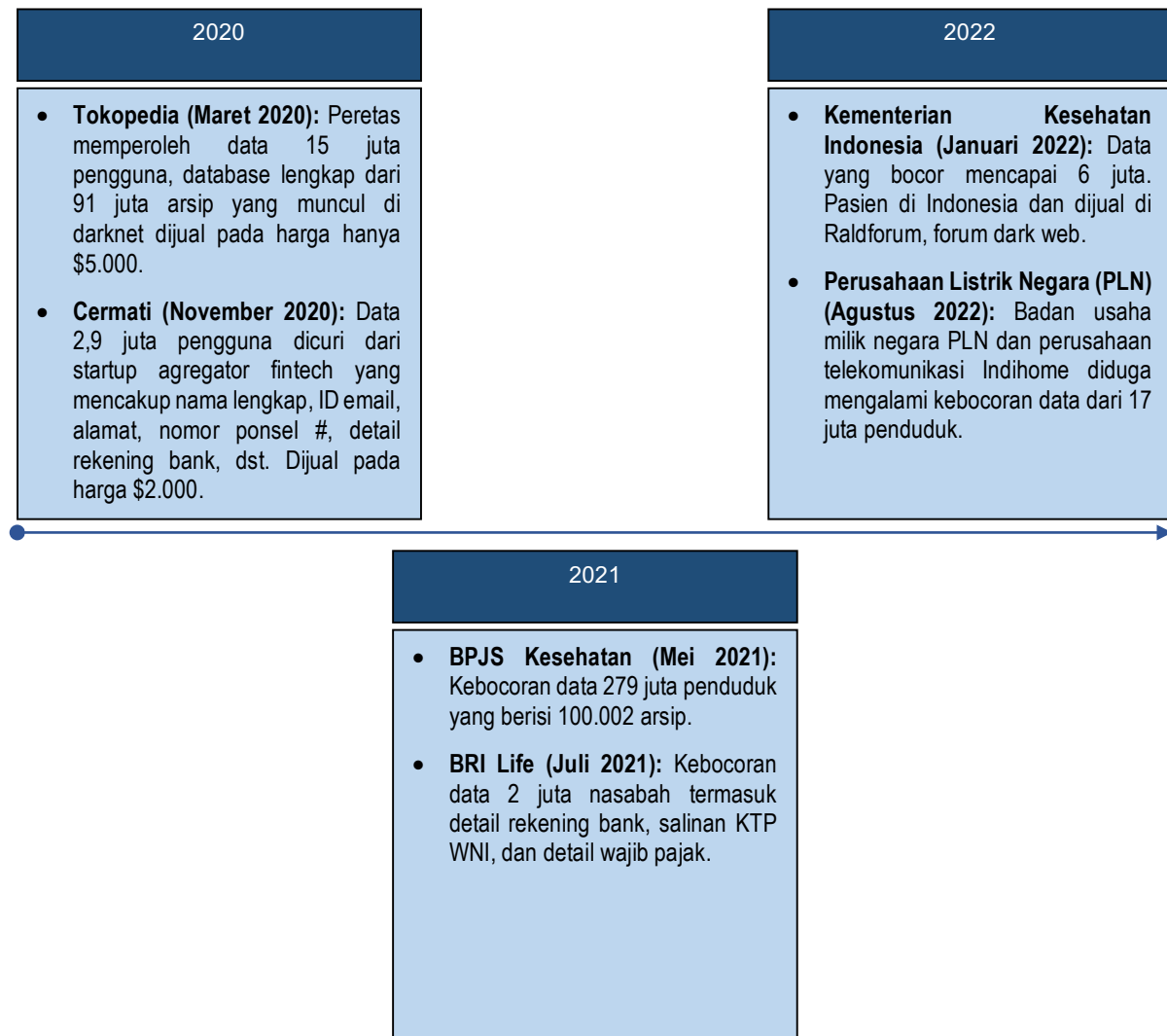
menyeluruh, termasuk pengujian penetrasi menggunakan mesin dan secara manual, serta penawaran *CISO-as-a-service*, muncul sebagai generasi baru PSS.

4. Pasar Keamanan Siber Indonesia

4.1 Gambaran Umum tentang Pasar Keamanan Siber Indonesia Secara Keseluruhan

Dana Moneter Internasional (IMF) mengklasifikasikan Indonesia sebagai bagian dari negara-negara ASEAN-5. Menurut "World Economic Outlook Update" (tertanggal Januari 2023) terbaru yang tersedia, kawasan ASEAN-5 diperkirakan akan tumbuh masing-masing sebesar 4,3% dan 4,7% pada tahun 2023 dan 2024. Angka ini lebih tinggi daripada pertumbuhan global yang diproyeksikan yakni 2,9% dan 3,1% pada rentang waktu yang sama. Pada tahun 2022, IMF memperkirakan pertumbuhan ASEAN-5 sebesar 5,2% atau naik dari sebelumnya 3,8% pada tahun 2021. Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ini lebih besar daripada proyeksi untuk tingkat global, banyak hal akan tergantung pada pembelanjaan perusahaan untuk transformasi digital dan pembelanjaan digital oleh pemerintah. Meski demikian, keamanan siber tetap sangat penting bagi transformasi perusahaan, tidak terkecuali untuk negara seperti Indonesia.

Serangan Siber Besar di Indonesia di Masa Lalu



Selama beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami beberapa serangan siber yang membuat banyak perusahaan merugi hingga ribuan dolar. Mulai dari kasus pembobolan data pengguna pada tahun 2020 di salah satu platform e-commerce terbesar dan *unicom* teknologi di Indonesia (Tokopedia) hingga kasus kebocoran data tahun lalu dari aplikasi pelacak Covid-19 PeduliLindungi, Indonesia tetap menjadi target pelaku serangan siber profesional. Pencurian dan penyalahgunaan data terutama menimbulkan permasalahan karena peretas mencuri daftar data pelanggan dari platform teknologi dan aplikasi yang tidak aman lalu menjualnya di *dark web* dengan imbalan uang. Sebagian besar kejahatan ini dilakukan oleh peretas pseudonim dan pelaku kejahatan terlatih seperti Bjorka, Meki, dan Lolyta yang telah mengklaim bertanggung jawab terhadap insiden yang tidak diinginkan ini. Sebenarnya, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 1,6 miliar "*traffic anomalies*" pada tahun 2021. Menurut laporan tahunan BSSN, lebih dari 62% anomali tersebut berasal dari *malware*, diikuti

oleh aktivitas trojan, dan upaya *phishing*. Jumlah serangan siber tidak resmi pada tahun 2022 jauh lebih tinggi karena beberapa laporan menunjukkan terjadinya 11 juta serangan siber pada kuartal pertama tahun 2022, naik 22% dari tahun 2021. Belakangan ini, *phishing* juga telah menjadi ancaman besar di banyak perusahaan sehingga membuat resah para kepala keamanan siber. Serangan DDoS juga telah meningkat, salah satunya adalah serangan pada outlet media independen Konde.co. Salah satu tren yang kini terjadi adalah pelaku kejahatan mulai mengarahkan banyak serangan *ransomware* mereka ke komputasi *cloud*. Peretas mulai menuntut tebusan dalam bentuk mata uang kripto dan melalui mode pembayaran elektronik lainnya.

Jenis Ancaman Utama dan Dampak Terbesar Serangan Siber pada Perusahaan di Indonesia

Peringkat	Jenis Ancaman Utama di Indonesia	Dampak Terbesar Serangan Siber pada Perusahaan
1	Malware termasuk <i>ransomware</i> , <i>spyware</i> , dan virus	Gangguan bisnis
2	Serangan ke kata sandi	Kehilangan data
3	<i>Phishing</i>	Kerusakan reputasi
4	Serangan DDoS	Pencurian kekayaan intelektual
5	Ancaman orang dalam	Pembayaran tebusan
6	Serangan Man-in-the-Middle (MitM)	Denda yang dijatuhkan akibat sanksi peraturan
7	Pembuatan skrip lintas situs	Kehilangan uang

Di tengah peningkatan ancaman pembobolan dan pencurian data, Indonesia telah memperbaiki postur keamanan sibernya. Indonesia telah meningkatkan posisinya dalam melawan kejahatan siber secara signifikan, dengan meraih peringkat #24 pada tahun 2020 dari sebelumnya peringkat #41 dalam "Indeks Keamanan Siber Global 2018". Dalam laporan terbaru "Indeks Keamanan Siber Global (GCI) 2020", Indonesia berada pada peringkat #6 setelah Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Jepang, India, dan Australia di antara kelompok negara APAC. Indeks keamanan siber ini berdasarkan 5 parameter penting, yaitu langkah hukum, langkah teknis, langkah organisasi, pengembangan kapasitas, dan langkah kooperatif. Indonesia memperoleh skor yang lebih baik dalam sebagian besar aspek tersebut.

Perbaikan peringkat terutama terjadi karena peningkatan kewaspadaan terhadap pentingnya keamanan siber, pembelanjaan keamanan siber yang lebih tinggi, perumusan beragam mandat peraturan dan kepatuhan industri, serta kecenderungan untuk mengadopsi produk dan layanan keamanan siber generasi berikutnya. Faktanya, keamanan siber telah menjadi salah satu prioritas utama bagi perusahaan pada tahun 2022. *Chief Information Officer* (CIO), *Chief Information Security Officer* (CISO), dan pengambil keputusan TI lainnya telah menyadari bahwa transformasi digital tidak akan terwujud tanpa menempatkan prioritas yang lebih tinggi pada privasi, keamanan, dan manajemen risiko data. Akhir-akhir ini, pemerintah Indonesia juga telah bertindak proaktif dalam memahami kebutuhan mendesak akan undang-undang keamanan siber, salah satu contohnya adalah Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan pada bulan Oktober 2022.

4.2 Indonesia: Peraturan dan Kepatuhan Industri

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Pada bulan September 2022, DPR mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi yang lalu diberlakukan sebagai UU PDP pada bulan Oktober. Undang-undang baru ini dianggap sebagai transformasi bagi Indonesia karena sebelumnya tidak terdapat undang-undang perlindungan data pribadi yang komprehensif. Sebelumnya, ketentuan tentang perlindungan data pribadi tersebar dalam lebih dari 30 peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda. UU PDP menetapkan tanggung jawab untuk pemrosesan data pribadi dan hak bagi individu dengan cara yang serupa dengan undang-undang perlindungan data lainnya yang sudah berlaku di lingkup internasional (mis. GDPR Uni Eropa). Selain memiliki kesamaan dengan undang-undang lain di seluruh dunia dari segi dasar hukum yang sama, kewajiban pemrosesan, kebijakan pertanggungjawaban, dan

hubungan pengontrol-pemroses, UU PDP Indonesia juga mencakup beberapa aspek unik yang terkait dengan konteks negara seperti penyertaan lingkup ekstrateritorial yang lebih luas yang berlaku untuk organisasi yang kegiatan pemrosesan datanya memiliki konsekuensi hukum di Indonesia atau menjangkau warga negara Indonesia di luar Indonesia. Selain itu, UU PDP juga mengecualikan sektor jasa keuangan yang menerapkan persyaratan yang lebih ketat pada pengendali, seperti kewajiban penyimpanan data yang luas untuk kegiatan pemrosesan serta memiliki ketentuan unik tentang penggunaan teknologi pengenalan wajah. Di dalam undang-undang ini, terdapat juga kategori "data pribadi spesifik" yang mencakup data anak-anak dan data keuangan pribadi. Bagian pelokalan data yang awalnya diperkenalkan dalam rancangan undang-undang ini telah diganti dengan kewajiban umum bagi pengendali untuk memastikan data yang dipindahkan lintas negara tetap terlindungi pada standar yang sesuai dengan UU PDP. Terakhir dan tidak kalah penting, organisasi diberikan jangka waktu transisi 2 tahun untuk mematuhi peraturan setelah UU PDP mulai berlaku.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 (UU ITE)

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Tahun 2016 merupakan versi revisi dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang mencakup beberapa tindak pidana seperti distribusi konten ilegal, pembobolan perlindungan data, akses tidak sah, pencegahan ilegal dan tidak sah, atau penyadapan. Undang-undang ini memastikan perlindungan terhadap konten dalam sistem dan transaksi elektronik. Dengan kata lain, konsep privasi data ditafsirkan sebagai bagian dari hak privasi, yang sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2016 ("UU ITE), didefinisikan sebagai:

- hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala jenis gangguan.
- hak untuk berkomunikasi dengan orang lain (tanpa dimata-matai);
- hak untuk mengawasi akses terhadap Informasi tentang kehidupan dan data pribadi (Penjelasan Pasal 26 (1) dalam UU ITE).

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

Undang Undang No. 11 Tahun 2008 yang dianggap sebagai undang-undang siber pertama di Indonesia tersebut, memiliki fokus untuk mengatur konten daring dan transaksi elektronik. Undang-undang ini berlaku untuk semua orang (individu atau badan hukum, baik WNI atau WNA) yang melakukan tindakan sah sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 di Indonesia atau di luar Indonesia sepanjang tindakan sah tersebut memiliki konsekuensi hukum di Indonesia dan/atau di luar Indonesia serta menyebabkan kerugian pada Indonesia. Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 mengatur hal-hal antara lain:

- penggunaan dokumen dan/atau informasi elektronik sebagai bukti di hadapan Pengadilan Indonesia;
- tanda tangan elektronik;
- transaksi elektronik;
- nama domain, kekayaan intelektual, dan perlindungan hak pribadi; dan
- tindakan ilegal dan hukuman pidana yang dapat dijatuhkan oleh Pemerintah Indonesia.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019

Berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016. PP No. 71/2019 mengatur penyelenggaraan sistem elektronik, agen elektronik, transaksi elektronik, sertifikasi elektronik, lembaga sertifikasi keandalan, serta pengelolaan nama domain. PP No. 71/2019 adalah pengganti PP No. 82/2012 yang diterbitkan sebelumnya. Beberapa informasi terbaru penting yang dicakup dalam PP No. 71/2019 mencakup:

- Penyelenggara Sistem Elektronik diklasifikasikan ke dalam dua kategori:
 - Lingkup privat
 - Lingkup publik
- Persyaratan tentang jaminan sertifikasi untuk suku cadang, kondisi baru, dan produk bebas cacat telah dihapus.
- Ketentuan baru tentang perlindungan data pribadi mengenai pemrosesan data sebagaimana tercantum dalam Pasal 14-18
- Lingkup privat pada penyelenggara sistem elektronik dapat mengatur pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan sistem dan data elektronik dari Indonesia di luar wilayah Indonesia.
- Agen elektronik harus mengungkapkan informasi terkait prasyarat kontrak, prosedur perjanjian dan privasi, dan/atau jaminan perlindungan data pribadi untuk melindungi hak pengguna.

Peraturan Menteri Pertahanan (Pemenhan) No.82/2014

Sebagai upaya untuk mengatasi ancaman siber yang terkait dengan keamanan nasional, Peraturan Menteri Pertahanan (Pemenhan) No. 82/12014 menyediakan panduan terhadap pertahanan siber. Keamanan siber nasional merujuk pada semua upaya yang bertujuan untuk melindungi informasi dan infrastruktur pendukung di tingkat nasional dari serangan siber. Segala bentuk perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh individu atau entitas yang mengancam keamanan nasional, kedaulatan nasional, dan keutuhan wilayah dianggap sebagai serangan siber. Berbeda dengan UU ITE, Pemenhan No. 82/2014 mencakup semua infrastruktur penting seperti sektor jasa keuangan atau sistem transportasi. Meski demikian, peraturan ini bertujuan untuk membangun kapasitas pertahanan siber militer, yang dikembangkan dan diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan untuk Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada bulan April 2008 mengatur tentang transparansi dalam informasi publik. Undang-undang ini juga disebut sebagai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP), tujuannya adalah untuk mendorong tata kelola yang baik untuk pelayanan publik dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan nasional. Undang-undang ini menetapkan akses ke informasi publik kecuali informasi rahasia. Undang-undang ini juga berperan sebagai instrumen dasar untuk mencegah korupsi, persaingan usaha tidak sehat dan praktik monopoli, dan sengketa informasi.

Peraturan Perundang-Undangan Lainnya di Indonesia.

Nama	Mencakup
Undang-Undang No. 17 Tahun 2011	Berfokus pada Intelijen Negara Terkait dengan identifikasi rahasia pemerintah
Undang-Undang No. 23 Tahun 2006	Berfokus pada Administrasi Kependudukan Berisi ketentuan terkait perlindungan data pribadi penduduk termasuk tanggal lahir, nomor induk kependudukan, dan nomor kartu keluarga
PP No. 82/2012	Terkait Sistem dan Transaksi Elektronik Dari 9 hal yang diatur oleh Peraturan Pemerintah, PP No. 82/2012 mengatur tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik, Penyelenggara Age Elektronik, Penyelenggaraan Transaksi Elektronik, Tanda Tangan Elektronik, Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Lembaga Sertifikasi Keandalan, dan Pengelolaan Nama Domain.
Undang-Undang No. 36 Tahun 1999	Ditujukan untuk penyelenggara jasa telekomunikasi Menjaga kerahasiaan tanda terima atau informasi yang dikirim oleh pelanggan mereka
Peraturan Rekam Medis Tahun 2008	Mengatur bagaimana data medis yang sensitif disimpan, dihapus, dan diakses
Peraturan OJK Tahun 2013	Menetapkan perlindungan data konsumen di sektor jasa keuangan

4.3 Indonesia: Badan Pengatur Keamanan Siber dan Lembaga Independen

Badan Siber Sandi Negara (BSSN)

BSSN adalah Badan Siber dan Sandi Negara di Indonesia. Ini merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah kewenangan dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Badan ini merupakan peleburan dari dua lembaga yang sudah ada sebelumnya yakni Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) dan Direktorat Keamanan Informasi, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

BSSN mengemban tugas untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang keamanan siber dan sandi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Badan ini bertanggung jawab untuk melakukan intelijen keamanan siber serta mengawasi urusan keamanan siber di Indonesia. Selain itu, BSSN juga menangani identifikasi, deteksi, proteksi,

pemantauan penyelenggaraan kebijakan teknis terkait keamanan siber di e-commerce, proteksi, serangan siber, dan/atau insiden siber di Indonesia. Sebagai sub-badan dari BSSN, *Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure/Coordination Center* (ID-SIRTII/CC) menjalankan kampanye kewaspadaan tentang keamanan siber, yang memantau potensi keamanan siber, mendukung penegakan hukum, serta menyediakan beragam dukungan teknis demi kepentingan publik.

ID-CERT

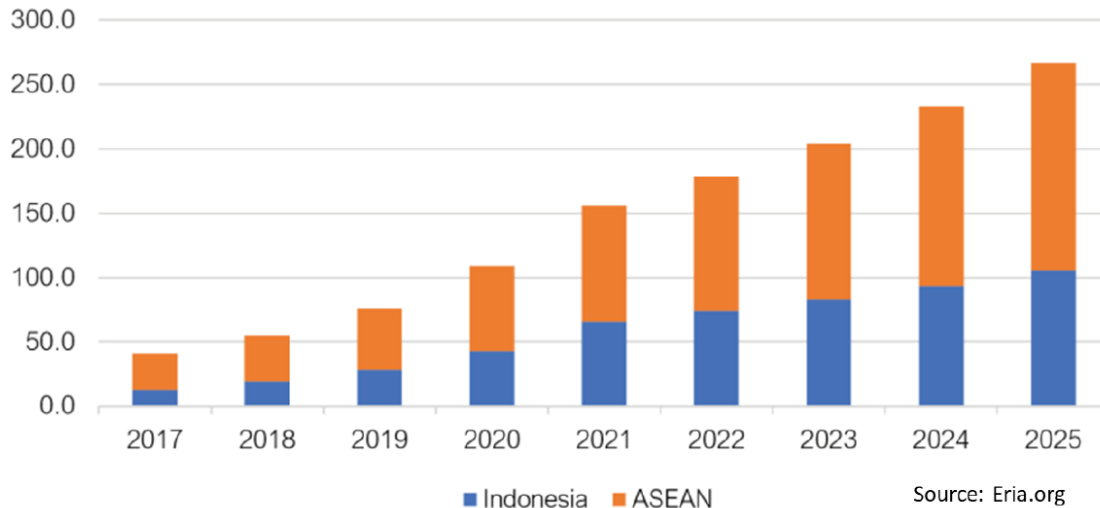
Didirikan oleh DR. Budi Rahardjo pada tahun 1998, Indonesia Computer Emergency Response Team (ID-CERT) merupakan tim independen yang berasal dari dan untuk masyarakat. ID-CERT bersama dengan JP-CERT (Jepang) dan AusCERT (Australia) merupakan salah satu pendiri forum APCERT (Asia Pacific Computer Emergency Response Team). ID-CERT ingin tetap berdiri sebagai organisasi non-pemerintah yang independen, tetapi bekerja sama erat dengan pemerintah untuk mengatasi masalah keamanan siber yang penting. Meski demikian, badan independen tidak memiliki kewenangan untuk menyelidiki kasus secara menyeluruh, tetapi lebih sebagai penghubung yang dapat dipercaya, terutama oleh mereka yang melaporkan suatu insiden.

4.4 Indonesia: Faktor Pendorong dan Penghambat Pasar Keamanan Siber

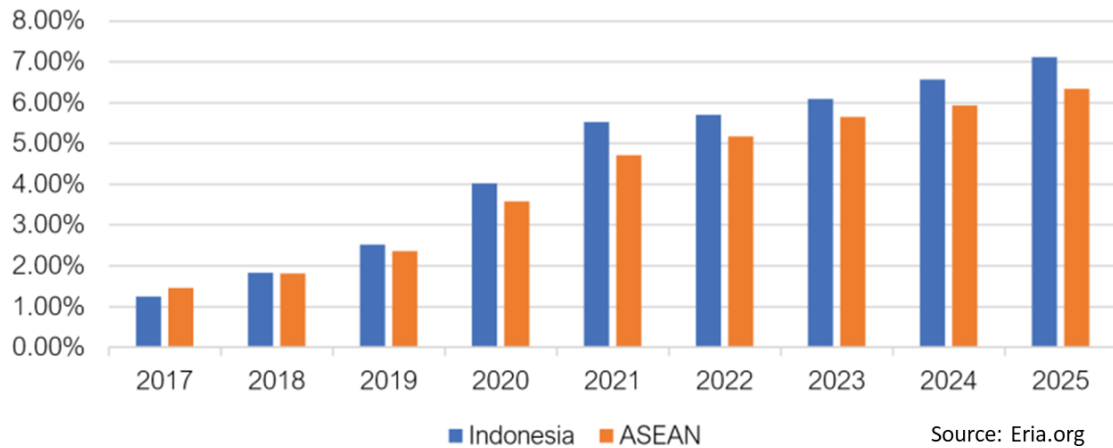
Faktor Pendorong Pasar

Ekonomi digital Indonesia yang bertumbuh: Menurut Economic Research Institute for ASEAN and East Asia (ERIA), ekonomi digital Indonesia merupakan ekonomi terbesar di antara Negara Anggota ASEAN (AMS). Pada tahun 2021, ukuran ekonomi digital Indonesia mencapai ~42% dari ekonomi digital ASEAN (silakan lihat lampiran di bawah). Sebaliknya, besaran PDB Indonesia adalah 36% dari total PDB dari semua AMS. Menarik untuk dicatat bahwa total aliran modal asing yang masuk ke sektor digital di Indonesia telah meningkat dari AS\$4,5 miliar pada tahun 2020 menjadi AS\$9,1 miliar pada tahun 2021 – peningkatan sebesar 102%. Pertumbuhan dalam ekonomi digital Indonesia tersebut berasal laju penetrasi internet yang tinggi serta populasi penduduk usia muda yang besar. Pemerintah pusat di Indonesia telah terlibat aktif dengan meluncurkan berbagai inisiatif guna mendukung ekonomi digital di dalam negeri yang kemudian diwujudkan dalam investasi pada keamanan siber.

Ukuran Ekonomi Digital di Indonesia (AS\$ Miliar)

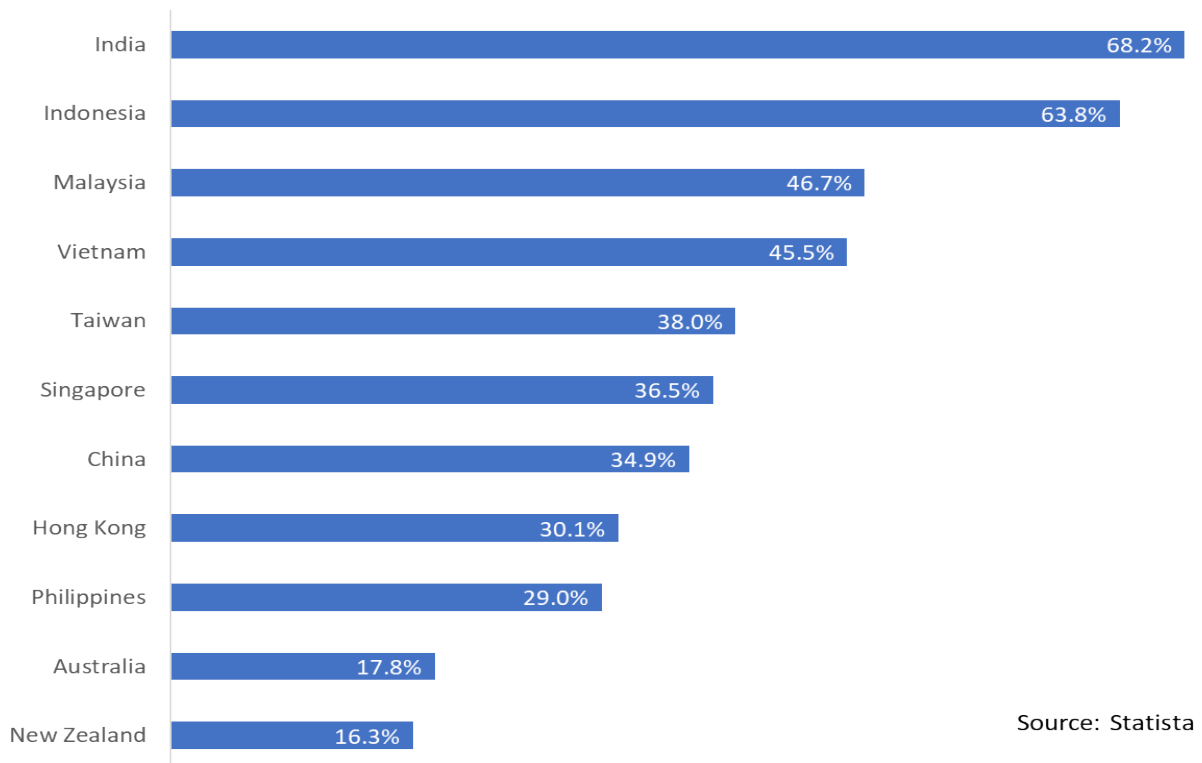


Ukuran Ekonomi Digital di Indonesia sebagai % dari total PDB



Peningkatan serangan siber pada usaha kecil di Indonesia: Sejak terjadinya pandemi COVID-19, Indonesia mengalami lonjakan serangan siber yang cepat. Serangan ini tidak hanya menargetkan perusahaan besar, badan pemerintah, dan infrastruktur penting, tetapi juga menyasar usaha kecil. Infrastruktur IT terus-menerus dihadapkan dengan ancaman generasi berikutnya beserta sistem TO (seperti SCADA, PLC, ICS, DCS, dsb.). Peningkatan kasus serangan siber ini pada usaha kecil telah membuat kepala bagian IT dan pengambil keputusan terkait keamanan terdesak sehingga menciptakan kebutuhan untuk berinvestasi pada keamanan siber.

Perkiraan Kemungkinan Serangan Siber di antara Usaha Kecil di Asia Pasifik pada 2021



Peraturan dari otoritas: Untuk mengatasi peningkatan ancaman serangan siber dan menciptakan ekosistem bisnis yang aman, Pemerintah Indonesia berupaya menciptakan peraturan keamanan siber. Meskipun Indonesia memiliki beberapa undang-undang siber yang berlainan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang baru disahkan dan komprehensif dianggap memberikan ketegasan yang diperlukan. Pada bulan September 2022, DPR mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) yang diberlakukan pada bulan Oktober pada tahun yang sama. Undang-undang ini mengatur keabsahan, kewajiban pemrosesan, kebijakan pertanggungjawaban, hubungan pengendali-pemroses, dan lainnya. Data pribadi harus ditangani secara sensitif saat disimpan atau selama dikirimkan. Ketentuan ini akan menuntut investasi dalam kebijakan keamanan yang tepat karena perusahaan tidak ingin melanggar ketentuan kepatuhan atau mandat peraturan.

Pengadopsian konsep teknologi generasi berikutnya yang tinggi dan model bisnis menghadirkan tantangan keamanan siber: Mirip seperti negara maju dan berkembang, perusahaan di Indonesia memulai teknologi generasi berikutnya seperti *cloud*, *edge computation*, kecerdasan buatan (AI), *internet of things* (IoT), dan arsitektur yang ditetapkan untuk perangkat lunak untuk melakukan perubahan pada perjalanan transformasi mereka. Mereka dengan cepat mengadopsi konsep seperti budaya kerja hibrid, ruang kerja yang terhubung, dan bawa sendiri perangkat Anda (*Bring Your Own Device*/BYOD) dalam lingkungan kantor untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Tren mega seperti Industri 4.0, layanan kesehatan yang terhubung, dan kota pintar telah diterima dengan baik oleh produsen maupun pemerintah. Meskipun adopsi teknologi bermanfaat bagi masyarakat, ia juga menghadirkan tantangan keamanan yang cukup banyak serta membongkar kesenjangan yang ada. Produk keamanan siber lama akan gagal bekerja dalam pengaturan teknologi dan bisnis tingkat lanjut sehingga akan membutuhkan produk keamanan terbaru yang sesuai untuk peta bisnis saat ini.



Faktor Penghambat Pasar

Jaringan regulasi keamanan siber yang terfragmentasi: Kerangka kerja regulasi keamanan siber di Indonesia sangat terfragmentasi, dengan sejumlah peraturan industri. Indonesia baru memiliki peraturan keamanan siber yang komprehensif (UU PDP) tahun lalu. Selain itu, terdapat sejumlah lembaga yang menangani kejahatan siber. Misalnya:

- BSSN mengontrol sistem keamanan siber keseluruhan di Indonesia.
- Kementerian pertahanan di dalam pemerintahan mengurus masalah terkait pertahanan dan tata kelola siber di dalam negeri.
- Kepolisian Indonesia menghadapi kasus kejahatan siber serta telah membentuk direktorat tindak pidana siber untuk memastikan praktik siber yang aman.
- Kementerian Luar Negeri menetapkan batasan diplomasi siber untuk solusi diplomatik terkait dengan masalah di dunia maya.
- Kementerian Komunikasi dan Informasi membentuk tim tanggap insiden siber untuk menjamin keamanan internet di Indonesia.

Alokasi anggaran keamanan siber yang rendah: Sesuai data industri 2020 dari sumber sekunder, rata-rata anggaran keamanan siber di Indonesia adalah sebesar AS\$1,4 juta jika dibandingkan dengan rata-rata global sebesar AS\$5,1 juta. Penelitian memastikan bahwa perusahaan di Indonesia hanya membelanjakan 3,2% dari anggaran IT mereka untuk keamanan siber. Kontribusi anggaran keamanan siber ini (sebagai persentase terhadap anggaran TI keseluruhan) jauh di bawah rata-rata global. Hal ini menandakan kurangnya komitmen terkait keamanan siber dari para pelaku usaha, terutama dari pelaku usaha kecil. Faktanya, terdapat investasi yang rendah untuk pengelolaan keamanan IT di antara semua negara ASEAN. Pembelanjaan mereka untuk sistem keamanan informasi cenderung kurang dari 50% dibandingkan dengan negara maju. Akan tetapi, tren ini kemungkinan besar akan berubah seiring dengan penerimaan Indonesia atas arti penting keamanan siber serta perjalanan Indonesia menuju pembangunan ekonomi digital yang aman.

Kelangkaan tenaga profesional keamanan siber terampil Peta ancaman keamanan siber yang berubah dengan cepat telah menciptakan tantangan untuk mengembangkan kumpulan tenaga profesional keamanan siber yang terlatih dan terampil. Teknologi dan konsep keamanan siber baru muncul setiap 4-5 tahun sehingga menyulitkan para tenaga profesional untuk menciptakan keahlian yang diperlukan. Selain itu, tidak ada satu produk pun yang menangani sebagian besar bagian dari keamanan siber dan setiap aspek teknologi membutuhkan pendekatan dan solusi keamanan yang berbeda yang lebih lanjut memisah-misahkan dan memperumit pasar keamanan siber. Perusahaan mengalami kesulitan untuk memilih di antara produk dan solusi keamanan karena beberapa produk tersebut terdengar memiliki fungsi yang sangat mirip. *Managed Security Services* (MSS) diyakini sebagai opsi optimal bagi perusahaan untuk mendapatkan akses ke solusi generasi berikutnya dan keahlian profesional tanpa mengeluarkan biaya yang besar untuk memperoleh produk tersebut.

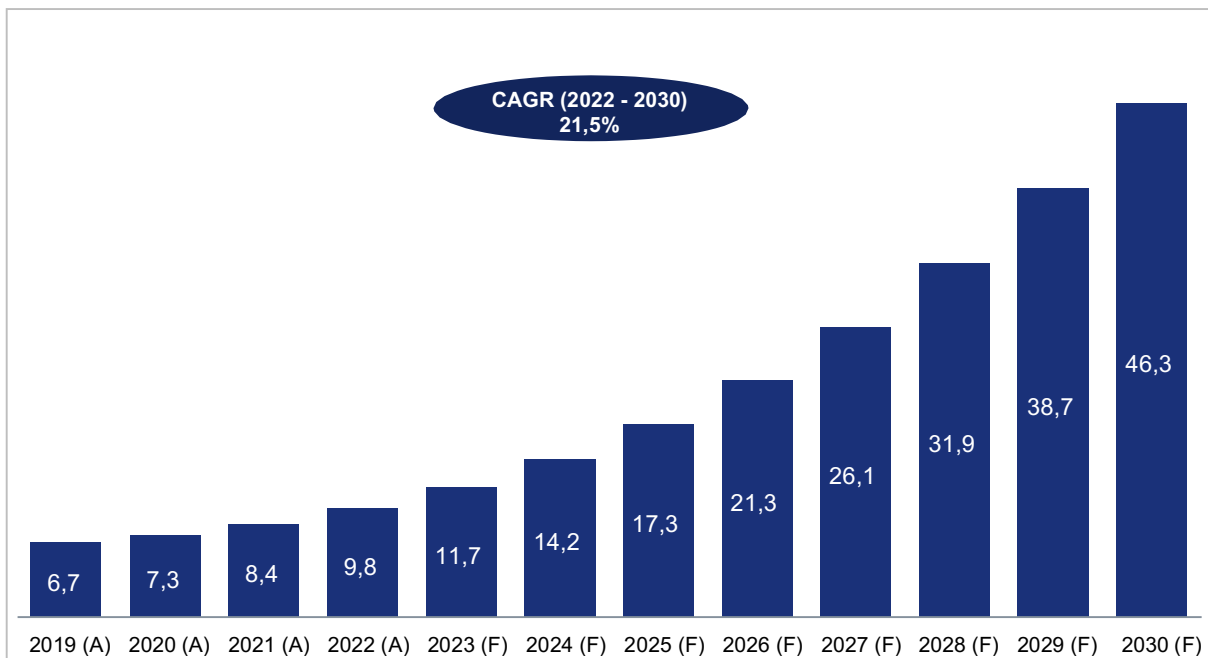
Dampak dari Faktor Penghambat Pasar Keamanan Siber	Jangka Pendek (2023-25)	Jangka Menengah (2026-28)	Jangka Panjang (2029-30)
Jaringan regulasi keamanan siber yang terfragmentasi			
Alokasi anggaran keamanan siber yang rendah			
Kelangkaan tenaga profesional keamanan siber terampil			

4.5 Indonesia: Ukuran dan Perkiraan tentang Pasar Keamanan Siber

Indonesia merupakan salah satu pasar keamanan siber dengan pertumbuhan terpesat di ASEAN dan di kawasan Asia Pasifik. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh peningkatan keseriusan CIO dan CISO yang dipadukan dengan peraturan/inisiatif industri yang baru-baru ini mulai dilakukan pemerintah Indonesia. Usaha kecil sangat menyadari bahwa serangan siber hanya menargetkan perusahaan besar dan bukan UKM (usaha kecil dan menengah) merupakan mitos belaka.

Meskipun proporsi persentase keamanan IT sebagai sub-set dari keseluruhan anggaran IT masih tergolong kecil di Indonesia dibandingkan dengan tolok ukur industri global, besar kemungkinan bahwa mengingat adanya kenaikan pada ancaman yang semakin besar, bersifat polimorfik, dan multidimensi, perusahaan (baik besar maupun kecil) akan meningkatkan pembelanjaan keamanan siber dalam beberapa tahun mendatang. Dari sudut pandang peraturan, UU PDP yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 2022 diyakini menjadi faktor yang mendorong peningkatan pendapatan bagi perusahaan keamanan siber di wilayah ini.

Total Pasar Keamanan Siber Indonesia, CY 2019 – CY 2030 (Rp Tn.)



Catatan:

Mengecualikan HSM, PKI, Tanda Tangan Digital, Sertifikat SSL, USB yang Aman, Keamanan IoT Konsumen, Enkripsi Mandiri, Pengontrol Pengiriman Aplikasi, dsb.

Angka dibulatkan ke 1 angka di belakang koma

Tahun Dasar 2022, AS\$1 = Rp15.222 (per 15 Feb 2023)

Sumber: Frost & Sullivan

Frost & Sullivan memperkirakan pasar keamanan siber Indonesia bernilai Rp641,7 triliun pada tahun 2022 dengan estimasi pertumbuhan sebesar 16,8% dalam setahun. Indonesia diyakini telah melampaui tonggak setengah miliar dolar untuk pertama kalinya pada tahun 2021. Tahun 2023 diharapkan akan semakin kuat dan menyentuh pertumbuhan YoY sebesar 20%. Pada tahun 2025, pasar keamanan siber Indonesia kemungkinan akan bernilai lebih dari AS\$1 miliar (persisnya Rp17,3 triliun),

tumbuh pada CAGR sebesar 21,2%. Dalam jangka panjang (2022-2030), pertumbuhan diperkirakan berada pada rentang 21,5%.

Pembelanja Keamanan Siber Terbesar di Indonesia

Perbankan dan Jasa Keuangan: Industri Perbankan dan Jasa Keuangan merupakan pembelanja terbesar untuk produk, solusi, dan layanan keamanan siber. Peraturan yang diterapkan oleh Bank Indonesia (bank sentral Indonesia) wajib dipatuhi oleh seluruh bank dan penyedia layanan pembayaran. Misalnya; Peraturan Bank Indonesia No. 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran mengatur standar keamanan yang wajib dipatuhi penyelenggara sistem pembayaran; antara lain; penerapan prinsip perlindungan data pribadi; penerapan standar keamanan standar; dan persyaratan untuk membentuk pusat data untuk aktivitas pemrosesan transaksi keuangan. Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dirumuskan sebelumnya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.93/2016 tentang Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 13/POJK.03/2020 berlaku untuk pemrosesan data pribadi dan keuangan oleh bank. Selain ini, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 1 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen di Jasa Keuangan menetapkan ketentuan umum tentang data konsumen oleh jasa keuangan, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 77 of 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer-to-Peer Lending) mengatur kewajiban P2P dalam aktivitas pemrosesan data pribadi. Untuk sektor asuransi, sesuai Surat Edaran OJK No. 19/SEOJK.05/2020 tentang Saluran Pemasaran Produk Asuransi; perusahaan asuransi, agensi asuransi, bank, dan entitas bisnis lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan, diizinkan untuk mempromosikan produk asuransi mereka melalui sistem elektronik, dengan ketentuan bahwa perusahaan tersebut telah terdaftar di Kominfo (Kementerian Informasi dan Teknologi Informasi) serta memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana ditetapkan oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan Kominfo.

Pemerintah dan Sektor Publik: Pemerintah Indonesia dan sektor publik merupakan salah satu pembelanja terbesar untuk keamanan siber. Pemerintah kini didesak untuk melindungi data penduduk dan mengamankan inisiatif digital dan oleh karenanya telah menanamkan investasi dalam produk dan solusi keamanan siber. Secara khusus, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Teknologi Informasi, serta Kementerian Perdagangan di Indonesia merupakan pemimpin terdepan dalam pembelanjaan keamanan siber.

Manufaktur: Sektor manufaktur di Indonesia diyakini berkontribusi terhadap lebih dari 20% PDB Indonesia. Kontribusi persentase tersebut diyakini melampaui rata-rata global. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa hanya ada lima negara dengan kontribusi manufaktur lebih dari 20% PDB nasional pada tahun 2021 termasuk Tiongkok, Korea Selatan, Jepang, Jerman, dan Indonesia. Menurut Statista, industri produk makanan dan minuman di dalam negeri merupakan yang terbesar pada tahun 2021 diikuti dengan produk kimia, farmasi, dan botani. Indonesia juga merupakan pusat produk batu bara dan minyak bumi olahan. Serangan siber telah melonjak dalam beberapa tahun di Indonesia, termasuk terhadap vertikal manufaktur, dan dengan demikian menuntut alokasi anggaran keamanan siber yang lebih tinggi.

Teknologi Informasi dan Layanan Terdukung Teknologi Informasi (IT-ITeS): Meskipun Indonesia tidak dianggap sebagai destinasi IT-ITeS besar di dunia, terdapat beberapa perusahaan IT-ITeS skala kecil dan menengah (termasuk BPO dan KPO) di dalam negeri. Para pemasok teknologi inti mendirikan kantor di dalam negeri serta telah memastikan bahwa mereka tidak ada celah yang dapat dimasuki oleh pelaku kejahatan siber. Penyedia layanan pengalihdayaan (*outsourcing*) dan teknologi besar terlihat berinvestasi bukan hanya pada solusi keamanan siber tradisional, tetapi juga pada produk generasi berikutnya seperti *secure access service edge (SASE)*, *zero-trust network access (ZTNA)*, *extended detection and response (XDR)*, dan lainnya.

Tren Pembelanjaan dalam Vertikal Industri Utama di Indonesia

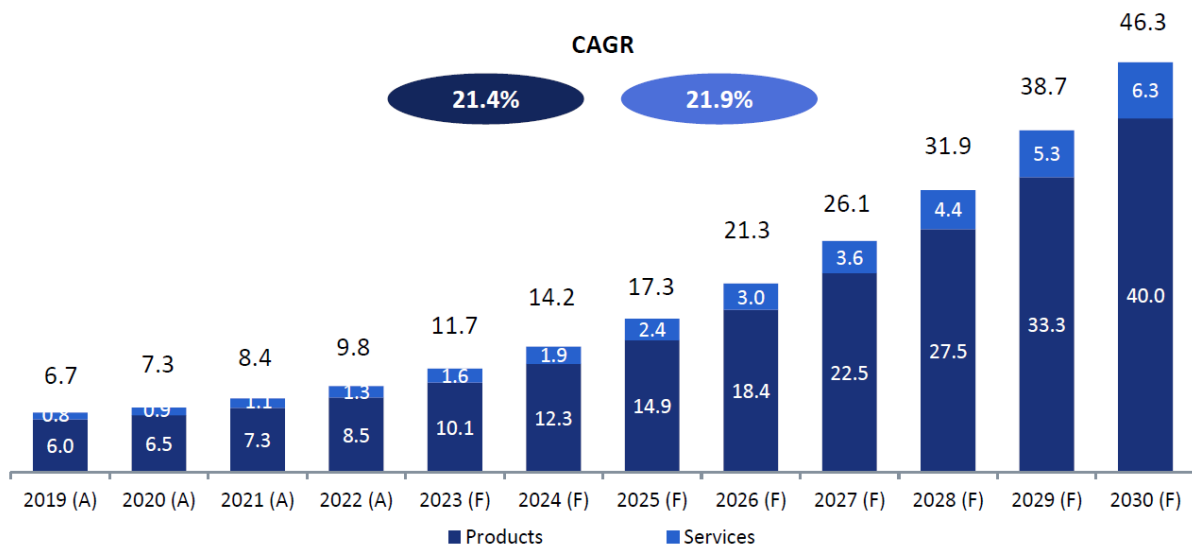
Vertikal Industri	Target Umum	Ancaman Siber Umum	Pola dan Tren Pembelanjaan (2023-30)
Perbankan dan Jasa Keuangan	Rekening nasabah, identitas Mesin ATM Perangkat PoS Rekening SWIFT Router Bank	Serangan <i>ransomware</i> Serangan <i>phishing</i> Serangan DDoS yang diaktifkan Botnet Pengambilalihan akun Serangan <i>jackpotting</i> Pencurian identitas Serangan berbasis API	Secara tradisional merupakan pembelanja tertinggi untuk keamanan siber Solusi keamanan tradisional dianggap bersifat fundamental Pencarian produk keamanan siber generasi berikutnya Lebih memilih solusi lokal daripada produk berbasis

			cloud Mematuhi peraturan industri secara ketat Akan terus menjadi audiens target terpenting untuk perusahaan keamanan siber
Pemerintah dan Sektor Publik	Basis data penduduk Situs web pemerintah Informasi pemerintah yang sensitif Data kementerian	Serangan <i>ransomware</i> Serangan <i>phishing</i> Serangan DDoS yang diaktifkan Botnet Pencurian identitas	Salah satu pembelanja terbesar untuk keamanan siber Tidak seluruhnya, tetapi sebagian departemen pemerintah cenderung lebih memilih produk keamanan siber generasi berikutnya Sensitif dengan biaya Lebih memilih solusi lokal Akan menjadi pembelanja yang bertumbuh tetapi stabil
Manufaktur	SCADA, ICS, HMI, Ruang Kontrol dan Stasiun Operator Sistem Pengendalian Terdistribusi, PLC, dan <i>Gateway</i> Sensor, Motor, Aktuator, Pemancar, Perangkat Tertanam Pusat Data, Aplikasi Office, Intranet, Layanan Surel dan Web	Serangan <i>phishing</i> Injeksi SQL DNS <i>poisoning</i> Serangan aplikasi web Eksekusi kode dari jarak jauh DoS permanen Serangan MiTM Serangan rekayasa balik	Tidak dianggap sebagai pembelanja keamanan siber terbaik. Meski demikian, belakangan ini terdapat investor besar untuk keamanan TI dan TO. Tidak memiliki anggaran keamanan yang besar Memiliki perpaduan solusi lokal dan berbasis <i>cloud</i>
IT/ITeS dan Bisnis Berbasis Cloud	Basis data klien Basis data <i>cloud</i> Aplikasi <i>cloud</i> Virtualisasi dan orkestrasi <i>cloud</i> Karyawan yang bekerja dari jarak jauh	Pembajakan akun Pembobolan data API yang Tidak Aman Orang Dalam yang Berbahaya Kerentanan Sistem Akses tidak sah	Perusahaan besar tetap menjadi yang terdepan dalam investasi keamanan serta memiliki minat pada solusi terbaik yang tersedia Usaha kecil mencari solusi keamanan yang disajikan dalam model yang hemat biaya Lebih memilih solusi berbasis <i>cloud</i> Perusahaan berbasis <i>cloud</i> akan mendorong pembelanjaan keamanan siber dalam vertikal industri

4.6 Indonesia: Pembagian Pasar Keamanan Siber Menurut Produk dan Layanan

Pasar keamanan siber Indonesia sangat berorientasi pada produk. Terhitung tahun 2022, 86,7% dari total pendapatan keamanan siber berasal dari produk dan hanya 13,3% dari jasa. Sebaliknya, dalam skenario lingkup global, produk dan solusi keamanan memberikan kontribusi sebesar 81,2%. Meski demikian, bisnis jasa (yang sebagian besar mencakup MSS dan PSS) diperkirakan akan tumbuh lebih cepat daripada pasar produk/solusi keamanan baik dalam jangka pendek (2025) serta jangka panjang (2030). Pasar produk dan solusi keamanan siber di Indonesia bernilai Rp 8,5 triliun dan kemungkinan akan tumbuh hingga Rp40,0 triliun pada akhir dekade ini.

Total Pasar Keamanan Siber Indonesia berdasarkan Produk dan Jasa, CY 2019 – CY 2030



Angka dibulatkan ke 1 angka di belakang koma
Tahun Dasar 2022, AS\$1 = Rp15.222 (per 15 Feb 2023)

Sumber: Frost & Sullivan

Jaringan keamanan adalah segmen produk keamanan siber yang paling matang dan terbesar di Indonesia. Saat ini nilainya berada di angka Rp1,7 triliun dan diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR 13,4% hingga tahun 2030. Jaringan keamanan mencakup *firewall* jaringan, IDS/IPS dan SSL VPN. Sejak pandemi COVID-19, para pelaku usaha telah meminta karyawannya untuk bekerja dari rumah (WFH) sehingga menciptakan permintaan solusi SSL VPN yang tinggi. Permintaan terhadap keamanan *endpoint* juga mengalami peningkatan sejak *lockdown* diberlakukan. Terlihat adanya kenaikan serangan siber yang menasar perangkat *endpoint* sehingga segmen tersebut tumbuh sebesar 17,3% pada tahun 2021. Pelanggan mencari solusi keamanan *endpoint* berbasis cloud dan SaaS dari para pemasok keamanan. Solusi Keamanan Cloud juga mengalami pertumbuhan eksponensial selama beberapa tahun terakhir, terutama karena segmen yang spesifik seperti *Secure Web Gateway* (SWG), Perlindungan Beban Kerja Cloud (*Cloud Workload Protection/CWP*), CASB, dan Keamanan Surel.

Menurut proyeksi Frost & Sullivan, SWG dan Keamanan Surel diperkirakan akan mencapai lebih dari Rp1 triliun pada akhir dekade ini. *Threat Intelligence* yang mencakup SIEM, Platform Inteligensi tentang Ancaman, UEBA, Analisis Keamanan, dsb. akan tumbuh pada 12,4% selama periode prakiraan. Segmen yang sensitif seperti Keamanan Pembayaran mungkin akan menyentuh Rp1 triliun pada tahun 2024. Secara singkat, pasar produk keamanan siber di Indonesia diperkirakan akan tetap sangat bersaing karena peluang pertumbuhan di sebagian besar segmen tetap menguntungkan.

4.7 Indonesia: Pembagian Pasar Jasa Keamanan Siber Berdasarkan MSS vs PSS

Pasar jasa keamanan siber diperkirakan akan mengungguli pasar produk dan solusi baik dalam jangka pendek (2025) maupun jangka panjang (2030). Berdasarkan definisi, jasa keamanan siber meliputi *Managed Security Services* (MSS) dan *Professional Security Services* (PSS). Segmen MSS lebih lanjut mencakup Aset Keamanan Pemantauan dan Pengelolaan (*Monitoring and Management/SAMM*), Penelitian Ancaman, *Intelligence*, Deteksi, dan Remediasi (*Threat Research, Intelligence, Detection and Remediation/TRIDR*) serta MSS Tingkat Lanjut dan Berkembang (*Advanced and Emerging MSS/AEM*). SAMM merujuk pada MSS tradisional seperti pengumpulan peristiwa, SIEM, korelasi dan analisis, notifikasi peringatan keamanan, *managed firewall*, *managed IDS/IPS*, *managed DDoS*, dan lainnya. TRIDR adalah komponen *intelligence* dari MSS dan terutama mencakup *Managed Detection and Response* (MDR). Komponen ketiga AEM terdiri atas *managed IAM*, *managed mobile endpoint security*, *managed DLP*, dan jasa keamanan terkelola generasi baru lainnya. SAMM tetap menjadi sumber pendapatan terbesar di Indonesia, akan tetapi pertumbuhan terkuat dialami oleh AEM dan TRIDR.

Vertikal industri seperti bank, perusahaan asuransi, dan penyedia layanan keuangan yang lebih maju dalam kurva kematangan keamanan siber terpantau meningkatkan pembelanjaan lebih besar untuk AEM dan TRIDR, mengingat bahwa perusahaan-perusahaan tersebut telah menanamkan investasi dalam SAMM. Peluang proyek baru bagi SAMM dalam sektor perbankan dan jasa keuangan bersifat terbatas, mayoritas peluang tersisa berupa penggantian. Bank lebih memilih MSS berbasis CPE, yang berarti pengelolaan dan pemantauan aset keamanan siber dari tempat usaha pelanggan dan bukan dari penyedia layanan Pusat Operasi Keamanan (*Security Operations Center/SOC*). SOC merupakan pengaturan pengelolaan dan pemantauan keamanan khusus untuk melindungi organisasi dari ancaman siber. Analisis SOW menjalankan pemantauan siang malam terhadap jaringan organisasi serta menyelidiki setiap potensi insiden keamanan. Setelah ancaman terdeteksi, analisis SOC sebagai penanggung jawab (juga disebut sebagai pemburu ancaman atau pelindung) akan mengambil tindakan yang tepat serta memulai proses remediasi.

Dalam konteks saat ini, perusahaan dan MSSP terkemuka di Indonesia kini terlihat membangun SOC generasi berikutnya dengan mempertimbangkan 7 poin penting sebagaimana tercantum di bawah ini:

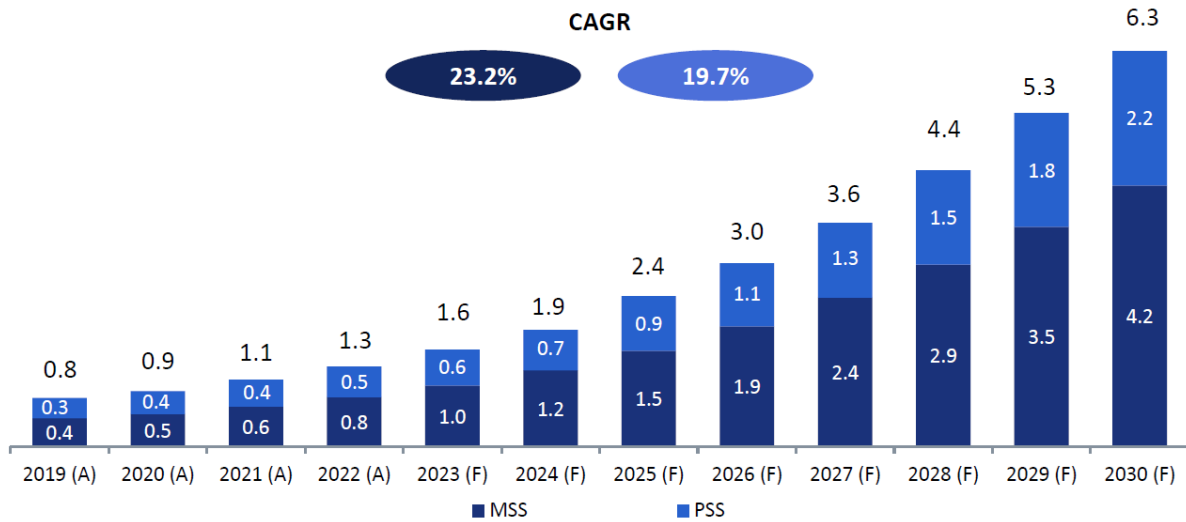
- **Misi & tujuan:** Keputusan untuk membangun SOC tergantung pada dukungan eksekutif level C sehingga target dan tujuan harus dipahami dengan jelas oleh dewan manajemen.
- **Strategi:** SOC harus dapat secara jelas menjabarkan misi, visi, dan tujuan sekaligus menangani prioritas yang penting. Hal ini semestinya sejalan dengan keseluruhan faktor risiko, mendukung target organisasi, dan memenuhi mandat kepatuhan.
- **Lingkungan:** Perencanaan keamanan perimeter atau fisik yang matang sangatlah penting. Desain SOC juga harus mempertimbangkan hal-hal terkait infrastruktur seperti pencahayaan yang tepat, elemen akustik, dsb.
- **Personel:** Tim pendukung khusus dan spesialis merupakan inti SOC generasi berikutnya. Beragam tim spesialis yang terdiri atas penyelidik, pemburu ancaman, pengendali insiden, perespons, ahli forensik, *data scientist*, arsitek SIEM dan ahli produk, yang semuanya berkoordinasi secara mahir sangatlah penting.
- **Proses:** Penting untuk memastikan bahwa tidak ada tugas yang terlewatkan. Setelah model respon insiden dasar diterapkan, yang terdiri atas persiapan, identifikasi, pembendungan, penghapusan, pemulihan, dan pelajaran yang dapat diambil; SOC generasi berikutnya harus menyiapkan proses terkait tim spesialis untuk koordinasi dengan kecepatan tinggi.
- **Teknologi:** Pengadaan teknologi keamanan terbaru untuk pemantauan jaringan, *endpoint net flow*, deteksi insiden, forensik, *threat intelligence*, dan pemeliharaan rutin pada teknologi keamanan ini merupakan pertahanan lapis pertama yang kuat. Teknologi tingkat lanjut seperti analisis keamanan, *machine learning*, orkestrasi ancaman, dan sebagainya dapat mendukung tenaga profesional keamanan dalam memerangi ancaman canggih.
- **Intelligence:** Sebagai pendorong teknologi, dengan turut memperhitungkan *threat intelligence*, kemampuan organisasi dalam mendeteksi ancaman dalam sistem atau proses sebelum terdapat indikasi karakteristik pembobolan dapat ditingkatkan. SOC harus terus menggunakan dan memanfaatkan data *threat intelligence* dari insiden sebelumnya dan dari sumber eksternal serta mengoperasikan data tersebut hingga mencapai kemampuan prediktif.

Permintaan akan SOC terus meningkat di Indonesia. Alih-alih berinvestasi dalam membeli produksi dan solusi keamanan siber yang mahal, organisasi mulai bergantung pada MSSP dengan SOC tingkat lanjut yang beroperasi dengan model biaya operasional (OPEX). Layanan *Hosted MSS/SOC* merupakan model ideal bagi para pelaku usaha kecil karena memberikan akses terhadap teknologi keamanan siber terbaik di kelasnya tanpa belanja modal (CAPEX) di muka.

Sejalan dengan penerimaan terhadap MSS, PSS juga terlihat berkembang dengan cepat. PSS terdiri atas empat komponen utama – Penasihat Keamanan (*Security Advisory/SA*), Tata Kelola dan Kepatuhan Keamanan (*Security Governance and Compliance/SGC*), Layanan Implementasi (*Implementation Service/IS*), dan Layanan Teknis (*Technical Services/TS*). Bisnis berupaya merumuskan strategi keamanan untuk memerangi ancaman keamanan siber yang meningkat. Arsitektur keamanan direka ulang, dan risiko keamanan dan kerangka pengendalian didesain ulang untuk meningkatkan postur keamanan siber. Dalam kasus tertentu, MSSP bekerja sama secara erat dengan perusahaan untuk melatih karyawan mereka dengan menggunakan beberapa alat simulasi (produk rangkaian siber) atau menawarkan *staff augmentation services*. Dengan bertambahnya peraturan keamanan siber di Indonesia, kepatuhan merupakan hal penting bagi pelaku usaha.

MSSP terus mengikuti perkembangan terbaru, bukan hanya tentang peraturan di tingkat negara, tetapi juga peraturan industri khusus vertikal seperti PCI-DSS dan GDPR sewaktu bekerja sama dengan klien Eropa. MSSP merupakan mitra tepat yang mengidentifikasi celah peraturan dan menyarankan tindakan perbaikan. Sebagai bagian dari penawaran Layanan Teknis, penyedia PSS menyediakan layanan audit keamanan seperti *vulnerability assessment*, pengujian penetrasi, dan *source code review* beserta penawaran layanan penanganan pembobolan seperti respon insiden, pemulihan data, dan *e-discovery*. Dalam kasus tertentu, pelanggan perusahaan besar mencari penawaran PSS dan MSS, di mana persyaratan pelanggan dimulai dari desain strategi keamanan, pembuatan kerangka kerja keamanan siber sesuai dengan ketentuan kepatuhan, pengintegrasian produk keamanan, dan pada akhirnya, penawaran jasa keamanan terkelola dari SOC klien atau SOC penyedia jasa.

Total Pasar Jasa Keamanan Siber Indonesia berdasarkan MSS dan PSS, CY 2019 – CY 2030 (Rp Tn.)



Angka dibulatkan ke 1 angka di belakang koma
Tahun Dasar 2022, AS\$1 = Rp15.222 (per 15 Feb 2023)

Sumber: Frost & Sullivan

Pasar MSS Indonesia saat ini bernilai Rp0.8 triliun dan diperkirakan akan tumbuh dengan CAGR 24,9% hingga 2025, dan dengan CAGR 23,2% hingga 2030. Pertumbuhan pada tahun 2022 diperkirakan akan mencapai 23,2%, atau mungkin lebih tinggi. Pasar PSS sebaliknya bernilai Rp0,5 triliun pada akhir tahun lalu dan kemungkinan akan tumbuh dengan CAGR 19,7% selama periode prakiraan. Penyedia MSS dan PSS di Indonesia menganggap pertumbuhan pasar di atas rata-rata sebagai peluang untuk dijajaki dan para penyedia MSS dan PSS tersebut memperkuat portofolio layanan keamanan mereka.

4.8 Faktor Pendorong Pertumbuhan untuk MSS dan PSS di Indonesia

Faktor Pendorong Pasar

Akses terhadap solusi keamanan siber tingkat lanjut tanpa investasi modal: Keamanan siber memiliki lingkungan yang berubah dengan cepat karena teknologi, alat, dan konsep berubah dalam hitungan hanya 4-5 tahun. Teknologi dan teknik yang lebih baru muncul dan menggantikan versi lebih lama yang kesulitan mengatasi peningkatan ancaman. Pembelanjaan untuk setiap solusi keamanan tingkat lanjut menjadi tantangan sehingga model MSS menjadi sangat bermanfaat. MSS merupakan model bisnis yang dialihdayakan. Dalam MSS, pemantauan dan pengelolaan perangkat dan sistem keamanan disediakan oleh penyedia keamanan, dan tidak dikelola secara internal. Dalam beberapa kasus, MSSP juga mengelola keamanan organisasi dari SOC penyedia jasa. Beroperasi dengan model biaya operasi (OPEX), MSS dipandang efektif dari segi biaya biaya dan optimal bagi pelaku usaha besar maupun kecil.

Pemantauan dan pengelolaan infrastruktur IT perusahaan 24/7: Mengingat model bisnis MSS bekerja dengan pemantauan berkesinambungan, model bisnis ini mengurangi risiko serangan siber hingga tingkat tertentu. Pada praktiknya, perusahaan tidak akan memiliki kapasitas untuk mengerahkan analis keamanan dan tenaga profesional secara internal untuk melakukan pemantauan berkesinambungan. Selain itu, para pelaku usaha di Indonesia sering mengalami kesulitan untuk mencari, merekrut, dan mempertahankan talenta terbaik di bidang keamanan siber dari kelompok yang sudah mengalami kelangkaan sumber daya keamanan siber terampil.

Kepatuhan terhadap persyaratan peraturan dan kepatuhan yang terus berkembang: Selama bertahun-tahun, Pemerintah Indonesia dan badan pengatur menerapkan sejumlah peraturan dan undang-undang. Para pelaku usaha di sektor perbankan, asuransi, telekomunikasi, dan layanan kesehatan harus mematuhi peraturan ini sebagai mandat sehingga menimbulkan kebutuhan akan MSS di dalam negeri.

Kebutuhan untuk mendesain ulang arsitektur keamanan untuk menghadapi ancaman keamanan di masa mendatang: Arsitektur keamanan lama tidak akan mampu menghadapi ancaman siber saat ini atau mengakomodasi produk keamanan siber generasi berikutnya. Arsitektur keamanan perlu didesain ulang dan dipastikan mampu mengidentifikasi dan mengurangi sebagian besar ancaman tingkat lanjut.

Permintaan akan audit keamanan dan manajemen fraud: Seiring dengan kesadaran yang lebih tinggi di kalangan usaha, para pelaku usaha mulai memilih audit keamanan reguler yang mencakup penilaian celah keamanan dan pengujian penetrasi. Para pelaku usaha bahkan terpantau melakukan peninjauan kode sumber. Selain itu, CIO dan CISO tetap berhubungan

dengan MSSP untuk menjalankan manajemen *fraud* dalam infrastruktur IT seperti respon insiden, keberlangsungan usaha/pemulihan bencana, dan *e-discovery*.



Faktor Penghambat Pasar

Tindakan meremehkan risiko dan efek serangan terarah menghambat pengadopsian MSS: Tindakan meremehkan risiko yang menghambat pengadopsian MSS mulai berkurang secara bertahap, karena baik pemerintah maupun organisasi swasta semakin mengutamakan pengamanan data dari serangan peretasan dan pembobolan keamanan siber. Meski demikian, banyak organisasi (seperti UKM) masih belum menyadari skala permasalahan dan mungkin tidak memandang dirinya sebagai target serangan siber.

Kekhawatiran akan kehilangan kendali atas operasi keamanan siber menyebabkan perusahaan enggan mengalihdayakan operasi keamanan ke MSSP: Sejumlah organisasi di Indonesia khawatir bahwa pengalihdayaan (*outsourcing*) operasi keamanan siber ke MSSP akan membuat mereka kehilangan kendali atas data, akses pengguna, dan hal-hal terkait privasi, serta akan, dengan cara tertentu, menimbulkan kekhawatiran keamanan yang tidak diinginkan dari penyedia jasa pihak ketiga. Akibatnya, banyak organisasi lebih mengutamakan SOC lokal atau *captive*. Hal ini menghambat pertumbuhan *Hosted MSS*.

Tingginya biaya layanan penasihat keamanan menjadi penghambat bagi pelaku usaha: Layanan penasihat dan konsultasi keamanan siber sering kali terbilang mahal, terutama layanan yang ditawarkan oleh perusahaan konsultasi besar. Hanya segelintir perusahaan besar dan badan pemerintah yang mampu membayar biaya konsultasi tinggi sehingga membuat usaha kecil dan menengah tidak dapat memanfaatkan layanan ini. Untuk menciptakan ekosistem keamanan siber yang lebih baik di Indonesia, penting bagi penyedia PSS untuk menyediakan layanan penasihat keamanan dengan biaya terjangkau.



4.9 Peluang Pertumbuhan MSS dan PSS

Menyusul pertumbuhan tinggi MSS dan PSS di Indonesia, beberapa peluang kemungkinan akan terbuka untuk dijajaki penyedia layanan keamanan siber. MSSP perlu mengidentifikasi peluang tersebut secara akurat dan menyusun rencana peluncuran (*go-to-market/GTM*) yang tepat sehingga mereka tidak melewatkan peluang untuk mengubah calon pelanggan menjadi sumber pendapatan.

Peluang pertumbuhan *Managed Security Services (MSS)*, Indonesia

Peluang Pertumbuhan dalam MSS	Kondisi Terkini (2022)	Skala Pertumbuhan yang Diharapkan (2025)
MSS tradisional (pengumpulan peristiwa, SIEM, korelasi dan analisis, notifikasi peringatan keamanan, pemeliharaan dan peningkatan aset keamanan, <i>managed firewall, managed IDS/IPS</i>)	Matang	Pertumbuhan stabil
<i>Threat Intelligence (Managed Detection and Response)</i>	Berkembang	Pertumbuhan tinggi di audiens target tertentu
Layanan SOC	Adopsi menengah	Pertumbuhan tinggi
<i>Advanced and Emerging MSS (managed IAM, managed endpoint security/EDR, managed DLP)</i>	Berkembang	Pertumbuhan tinggi
Keamanan TO	Berkembang	Pertumbuhan tinggi
<i>Zero Trust Network Access</i>	Cerukan	Pertumbuhan tinggi
Keamanan <i>Cloud</i> Publik & Hibrid	Berkembang	Pertumbuhan tinggi
Mitigasi WAF dan DDoS	Adopsi menengah	Pertumbuhan tinggi terutama dalam Mitigasi DDoS

Peluang pertumbuhan *Professional Security Services, Indonesia*

Peluang Pertumbuhan dalam PSS	Kondisi Terkini (2022)	Skala Pertumbuhan yang Diharapkan (2025)
Penilaian Kerentanan dan Pengujian Penetrasi (VA/PT)	Matang	Pertumbuhan tinggi
Respons Insiden	Berkembang	Pertumbuhan tinggi
Implementasi Kebijakan Keamanan	Adopsi menengah	Pertumbuhan tinggi
Penilaian Risiko Arsitektur Keamanan	Adopsi menengah	Pertumbuhan tinggi
Layanan Kepatuhan	Berkembang	Pertumbuhan tinggi
Pembentukan Kebijakan Keamanan	Berkembang	Pertumbuhan tinggi
Manajemen Risiko Pihak Ketiga	Cerukan	Pertumbuhan tinggi
Pelaporan GRC	Berkembang	Pertumbuhan tinggi
Desain Arsitektur Keamanan	Berkembang	Pertumbuhan tinggi
Pemulihan Data (BC/DR)	Matang	Pertumbuhan sedang
Analisis Celah Legislasi	Cerukan	Pertumbuhan sedang
Layanan Kepatuhan Proses	Berkembang	Pertumbuhan sedang
<i>Source Code Review</i>	Berkembang	Pertumbuhan Rendah hingga Sedang
Layanan <i>eDiscovery</i>	Berkembang	Pertumbuhan rendah
Pelatihan Keamanan	Berkembang	Pertumbuhan rendah

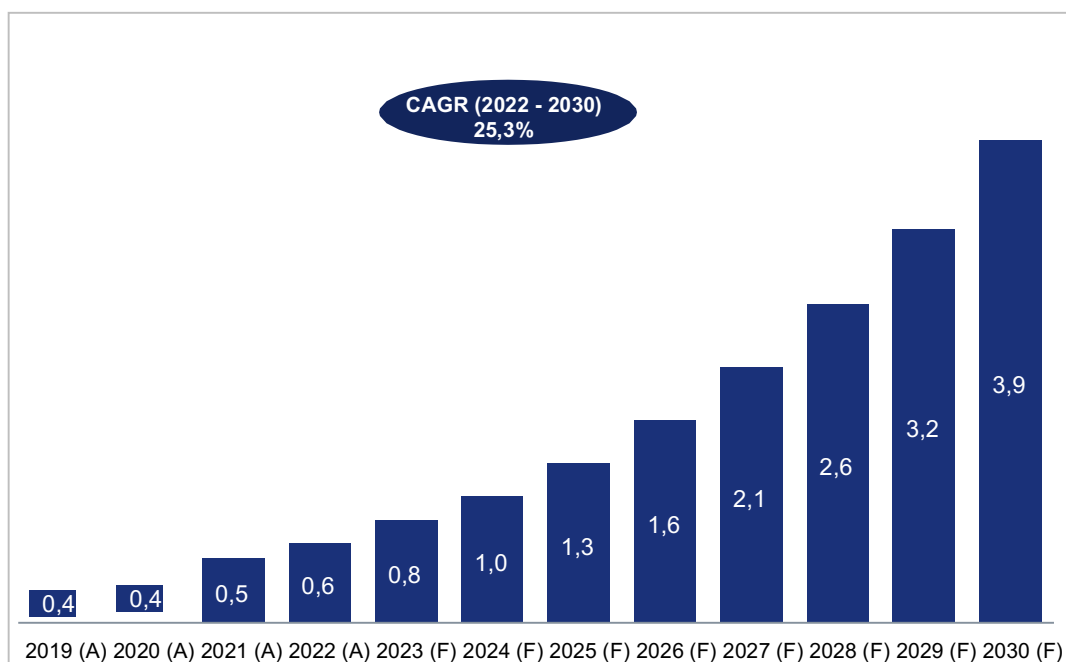
4.10 Peluang Pertumbuhan Keamanan Siber Lainnya di Indonesia (Keamanan Pembayaran, Keamanan TO)

Pasar keamanan siber di Indonesia diperkirakan akan tumbuh lebih cepat dibandingkan beberapa pasar besar di Asia Pasifik. Peluang sudah mulai berkembang, dan pemasok dan penyedia keamanan siber telah memulai rencana GTM mereka untuk menjajaki bidang usaha tersebut. Gelombang peluang berikutnya di Indonesia tidak hanya terbatas pada industri tradisional seperti perbankan inti, pemerintah, atau industri sektor publik, tetapi sejalan dengan tren yang berkembang seperti pembayaran digital. Perusahaan yang lamban di industri seperti manufaktur telah mulai meningkatkan fokus mereka terhadap

keamanan karena perusahaan tersebut menyesuaikan diri dengan konsep seperti manufaktur pintar dan Industri 4.0. Sejumlah peluang pertumbuhan tinggi yang terdapat di Indonesia disajikan di bawah ini:

Keamanan pembayaran: Pasar keamanan pembayaran meliputi enkripsi, tokenisasi, serta deteksi dan pencegahan penipuan. Pasar ini terutama mencakup produk berbasis web dan berbasis PoS. Sejak pandemi COVID-19, terjadi kenaikan pada pembayaran digital di dunia, Indonesia pun tidak berbeda. Pelanggan menggunakan kartu kredit, kartu debit, dan layanan perbankan berbasis internet (*internet banking*) untuk melakukan transaksi. Transaksi e-commerce terus meningkat dan pedagang harus memastikan platform pembayaran yang ditawarkan aman dengan mematuhi panduan PCI DSS. Saat ini, sebagian pelanggan tidak memercayai penggunaan platform digital dan pembayaran digital. Terdapat berbagai jenis penipuan pembayaran yang teramati, termasuk kartu tidak ada, pemalsuan kartu, penipuan *skimming*, kartu tidak pernah diterima, pengambilalihan rekening, penipuan identitas, dan banyak lagi. Selain itu, masih terdapat tantangan seperti pencucian uang. Pemasok keamanan siber memandang keamanan pembayaran sebagai peluang remuneratif yang dapat meningkatkan pendapatan mereka. Ritel diprediksi akan menjadi salah satu segmen penting yang kemungkinan akan mendorong pertumbuhan.

Pasar Keamanan Pembayaran Indonesia, CY 2019 – CY 2030 (Rp Tn.)



Angka dibulatkan ke 1 angka di belakang koma
Tahun Dasar 2022, AS\$1 = Rp15.222 (per 15 Feb 2023)

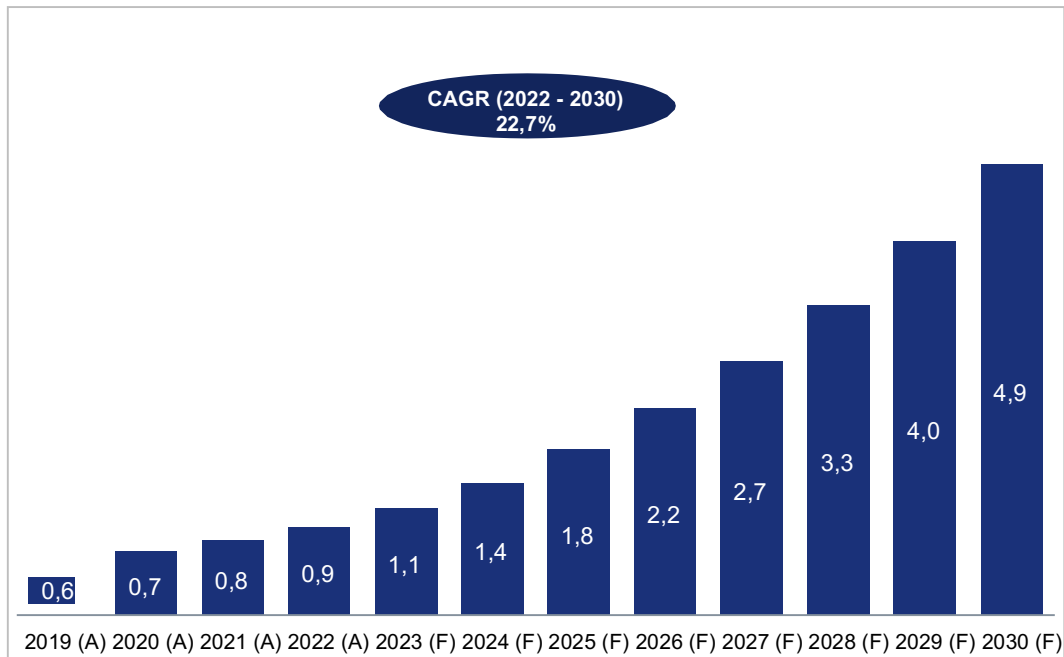
Sumber: Frost & Sullivan

Pasar keamanan siber di Indonesia saat ini bernilai Rp0.6 triliun dan kemungkinan akan tumbuh dengan CAGR 25,3% hingga 2030 hingga tetap menjadi salah satu segmen keamanan siber dengan pertumbuhan terpesat. Pada tahun 2024, pasar keamanan pembayaran diperkirakan akan menyentuh tonggak Rp1 triliun. Pasar keamanan pembayaran global didominasi oleh para pemain utama seperti Braintree, Cybersource, Elavon, Ingenico ePayments, SAS, Geobridge, dsb. Sebagian besar di antaranya sudah menjalankan usaha di pasar Indonesia. Besar kemungkinan bahwa Sebagian besar dari pemasok keamanan pembayaran utama lainnya ini akan menjalankan kegiatan usaha di Indonesia mengingat permintaan pasar dalam negeri yang tinggi.

- **Keamanan TO:**

Secara global, sektor manufaktur dan industri sedang melalui fase transformasi yang cepat. Terjadi konvergensi TI dan TO, dan pelaku usaha berupaya membangun platform tunggal untuk mengelola ancaman siber. Unit manufaktur dan pengaturan industri menjadi target kuat selama fase pertama pandemi COVID-19, yang mencakup sistem SCADA, PLC, DCS, dan perangkat IoT di lapangan. Sektor infrastruktur penting (pembangkit listrik & transmisi, sistem utilitas, dan transportasi) merupakan pihak-pihak yang menerima ancaman siber dalam skala besar. Meskipun dalam konteks Indonesia, total jumlah serangan pada infrastruktur penting, manufaktur, dan industri masih belum terukur, serangan siber berpotensi merusak tulang punggung negara. Pembelanjaan anggaran untuk keamanan siber, baik TI maupun TO, untuk membangun infrastruktur yang aman merupakan hal yang tak terhindarkan bagi perusahaan. Peluang bagi pemasok keamanan di pasar keamanan TO yang di Indonesia belum menyerap banyak investasi masih tetap tinggi.

Pasar Keamanan TO Indonesia, CY 2019 – CY 2030 (Rp Tn.)



Angka dibulatkan ke 1 angka di belakang koma
 Tahun Dasar 2022, AS\$1 = Rp15.222 (per 15 Feb 2023)

Sumber: Frost & Sullivan

Frost & Sullivan memperkirakan pasar keamanan TO di Indonesia bernilai Rp0,9 triliun pada tahun 2022 dengan estimasi pertumbuhan sebesar 18,6% pada tahun dasar. Proyeksi jangka panjang kemungkinan berada pada rentang CAGR 22,7% hingga 2030 dan bahkan lebih tinggi dalam jangka pendek (CAGR 23,6% hingga 2025). Proyeksi pertumbuhan kemungkinan besar akan lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan Asia Pasifik dalam periode yang sama. Ekosistem pemasok keamanan TO relatif terfragmentasi dengan adanya berbagai tipe pemain – penyedia platform, penyedia perangkat lunak, penyedia solusi menyeluruh, dan perusahaan keamanan siber *pure-play*. Beberapa pemain besar dalam ekosistem tersebut meliputi Nozomi Networks, Clarity, Dragos, Radiflow, Check Point, Kaspersky, Cisco, dsb. Beberapa pemasok ini menambahkan kemampuan lebih baru ke solusi keamanan TO serta menawarkannya di *cloud*. Penyedia keamanan siber di Indonesia perlu bermitra dengan pemasok keamanan TO terkemuka untuk meraih kepercayaan yang lebih tinggi di antara pelanggan dalam negeri.

IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 serta 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan yang ditandatangani oleh David Kurniawan, CPA dengan opini wajar tanpa modifikasian serta laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sebelum disajikan kembali, diaudit oleh diaudit KAP Drs Bambang Sudaryono & Rekan, yang menyatakan opini wajar tanpa modifikasian.

Keterangan	31 Januari		31 Desember	
	2023	2022	2021	2020
Modal Saham	136.020.997.550	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
Proforma Ekuitas dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	-	(15.319.918.317)	(16.540.283.282)	(7.585.358.405)
Tambahan Modal Disetor	(70.171.144.260)	136.400.000	136.400.000	136.400.000
Saldo Laba (defisit)	(29.658.710.359)	(26.438.290.376)	(27.145.728.448)	(29.842.590.949)
Penghasilan Komprehensif Lain	(727.962.963)	1.379.396.100	1.168.616.956	1.215.575.019
Jumlah Ekuitas	35.463.179.968	(37.742.412.593)	(39.880.994.774)	(33.575.974.335)

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 1.008.734.800 (satu miliar delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp25,- (dua puluh lima Rupiah) setiap saham, dengan Harga Penawaran Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Januari 2023

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Tambahan Modal Disetor	Saldo Laba (defisit)	Komponen Ekuitas Lainnya	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Januari 2023	136.020.997.550	(70.171.144.260)	(29.658.710.359)	(727.962.963)	35.463.179.968
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Januari 2023 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut Penawaran Umum sebanyak 1.008.734.800 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 25,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 100,- setiap saham	25.218.370.000	75.655.110.000	-	-	100.873.480.000
Biaya Emisi	-	9.281.341.088	-	-	9.281.341.088
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Januari 2023 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp25,- per saham	161.239.367.550	14.765.306.828	(29.658.710.359)	(727.962.963)	145.618.001.056

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Tidak ada riwayat pembayaran dividen sejak pendirian Perseroan.

Sampai tanggal Penerbitan Prospektus ini, manajemen Perseroan belum bermaksud untuk membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2024 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 10% (sepuluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

XI. PERPAJAKAN

Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

Perpajakan atas Dividen

Pajak Penghasilan atas dividen yang berasal dari kepemilikan saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”), yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak, kecuali subyek pajak yang menerima dividen memiliki saham pada Wajib Pajak yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor sebagaimana diatur di Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 huruf f.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak Penghasilan", penghasilan yang diterima dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dari penanaman modal berupa dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER-25/PJ/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

1. Form-DGT 1 atau;
2. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
3. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal Competent Authority di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun pajak berlakunya SKD; dan

- Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 1 tanggal 3 April 2023, *juncto* Salinan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 16 tanggal 8 Mei 2023, *juncto* Salinan Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi No. 28 tanggal 7 Juli 2023, *juncto* Salinan Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi No. 112 tanggal 26 Juli 2023 dan/atau segala perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahannya, Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 1.008.734.800 (satu miliar delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan Saham	Nilai (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	702.834.700	70.283.470.000	69,67
Penjamin Emisi Efek			
PT Sucor Sekuritas	167.138.000	16.713.800.000	16,57
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	138.762.100	13.876.210.000	13,76
Jumlah	1.008.734.800	100.873.480.000	100,00

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Pelaksanaannya, yang dimaksud dengan afiliasi adalah sebagai berikut:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara para pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan pihak yang secara langsung atau tidak langsung mengendalikan, dikendalikan atau di bawah satu pengendalian dari perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan para Penjamin Emisi Efek lainnya seperti dimaksud tersebut di atas, menyatakan dengan tegas tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK.

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Untuk tujuan penghitungan Harga Penawaran saham pada pasar perdana, Perseroan menggunakan proses penawaran awal (*bookbuilding*) agar dapat diketahui minat dari investor atas saham yang ditawarkan oleh Perseroan.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 18 – 26 Juli 2023, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp100,- (seratus Rupiah) sampai Rp110,- (seratus sepuluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah).

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) dan sebanyak 1.008.734.800 (satu miliar delapan juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus) saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan telah mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek setelah melakukan peninjauan kepada para investor dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1. AKUNTAN PUBLIK

Morhan & Rekan

Generali Tower 8th Floor Grand Rubina Bussiness Park at Rasuna Epicentrum Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta 12940, Indonesia

STTD	:	Nomor STTD. STTD.AP-295/PM.22/2018 tanggal 06 Februari 2018 atas nama David Kurniawan, CPA.
Keanggotaan Asosiasi	:	IAPI No. Keanggotaan asosiasi profesi: 1615
Pedoman Kerja	:	Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat Penunjukan	:	No. 157-P/MR/XXII/2022 tanggal 1 Desember 2022.

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan..

2. KONSULTAN HUKUM

Genio Atyanto & Partners

Equity Tower, Jl. Jenderal Sudirman No. Kav. 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190

STTD	:	Nomor STTD.KH-61/-PJ-1/PM.02/2023 atas nama Genio Yudha Wibowo Atyanto, SH, SE, MH
Keanggotaan Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 201209
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012, Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 01/KEPHKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 dan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017
Surat Penunjukan	:	No. 1487/ADM/ITSECASIA/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022.

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas Segi Hukum, yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

3. NOTARIS

DR Sugih Haryati, SH, M.Kn.

Jl. R.C. Veteran Bintaro Raya No.11 A, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

STTD	:	Nomor SSTD.N-135/PM.2/2018
Keanggotaan Asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia (INI) No Anggota 0429319840712
Pedoman Kerja	:	Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
Surat Penunjukan	:	No. 025/SH/ADM/XI/2022 tanggal 28 November 2022.

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4. BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5, Jl. Kirana Avenue III – Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

Keanggotaan Asosiasi	:	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI) (ABI/II/2015-012)
Pedoman Kerja	:	Surat Keputusan Ketua Bapepam No. KEP 41/D.04/2014 tanggal 19-09-2014 tentang Pemberian Izin Usaha Sebagai Biro Administrasi Efek kepada PT Adimitra Jasa Korpora
Surat Penunjukan	:	No. PW-194//IA/112022 tanggal 29 November 2022

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek (BAE) dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi Pendistribusian Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem C-BEST PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 77 tanggal 28 Februari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014658.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0048062.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023, dan telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0098452 tanggal 3 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0048062.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023, ("**Akta Nomor 77 tanggal 28 Februari 2023**").

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Pasal 3

- (1) Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa.
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan usaha utama:

Aktivitas konsultasi keamanan informasi (KBLI 62021).

Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (*assurance*) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.

Kegiatan usaha penunjang:

Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya (KBLI 62029).

Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam sub golongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam sub golongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.

M O D A L

Pasal 4

- (1) Modal Dasar Perseroan sebesar Rp. 544.083.990.200 terbagi atas 21.763.359.608 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp25,00 dua puluh lima Rupiah.
- (2) Dari Modal Dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sejumlah 5.440.839.902 saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp. 136.020.997.550,00 (seratus tiga puluh enam miliar dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh Rupiah).
- (3) Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;

- b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
- c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
- d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
- e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
- f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
- g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

- (4) Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- (5) Setiap:
 - a. penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini.
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan - 26 dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan -dicatatkan;
 - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan-perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang -diterbitkan oleh

- Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
- i. perbaikan posisi keuangan;
 - ii. selain perbaikan posisi keuangan;
 - iii. penerbitan Saham Bonus yang:
 - (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.
 yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
- h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
- (1) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (2) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (3) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (4) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- i. Penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila --ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya
- (6) Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung -hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 - (7) Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak -Asasi Manusia Republik Indonesia
 - (8) Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang
 - a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini -tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.

- (9) Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
- (10) Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

SAHAM Pasal 5

- (1) Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (3) Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- (4) Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak menggunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM Pasal 18

- (1) RUPS adalah:
 - (i) RUPS tahunan; dan
 - (ii) RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar Perseroan disebut juga RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar Perseroan berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
- (2) Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - (i) sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - (ii) sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (3) Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sepersepuluh bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau Dewan Komisaris dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
- (4) Permintaan diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
- (5) Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- (6) Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus :
 - (i) dilakukan dengan itikad baik;

- (ii) mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - (iii) merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - (iv) disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - (v) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- (7) Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, diterima Direksi.
 - (8) Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat lima hari kerja sebelum pengumuman.
 - (9) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat lima belas hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - (i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - (ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - (10) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman, atau jangka waktu 15 hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS, kepada Dewan Komisaris.
 - (11) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS, diterima Dewan Komisaris.
 - (12) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat lima hari kerja sebelum pengumuman.
 - (13) Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman, dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan :
 - (i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - (ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
 - (14) Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan , atau jangka waktu 15 hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
 - (15) Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib menyelenggarakan RUPS.
 - (16) Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit enam bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
 - (17) Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS atas usulan Dewan Komisaris, dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - (i) terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - (ii) alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
 - (18) Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
 - (19) Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal pengumuman atau jangka waktu 15 hari telah terlampaui.
 - (20) Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat lima hari kerja sebelum pengumuman.
 - (21) Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - (i) Direksi;
 - (ii) Dewan Komisaris; dan
 - (iii) pemegang saham;
 wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
 - (22) Selain memenuhi prosedur RUPS dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - (i) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - (ii) menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau

penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 21

- (1) RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - (a) tempat kedudukan Perseroan;
 - (b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - (c) ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - (d) provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
- (2) Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - (a) menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - (b) melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - (c) melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
- (3) Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat lima hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK --paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan -ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (4)
 - i. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - ii. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS
 - iii. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada 71 ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- (5)
 - (a) Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal -pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
 - (b) Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit :
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya ---pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
- (6)
 - (a) Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;

- iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini
- (b) Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
 - (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
- (7) Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
- (8) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua --persyaratan sebagai berikut:
 - (a) Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili seperduapuluh atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - (b) Usul tersebut diterima paling lambat tujuh hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - (c) Usul tersebut, harus: dilakukan dengan itikad baik; mempertimbangkan kepentingan Perseroan; merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS; menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (9) Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 - (a) Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - (b) Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (c) Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa:
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - (d) Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris -yang akan diangkat wajib tersedia:
 - i. di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - ii. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (10) Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
- (11)
 - a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
 - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;

dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:

- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Bursa Efek; dan
 - (c) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit :
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Perseroan; dan
 - (c) situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan -mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, -pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
- i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web bursa efek; dan
 - (b) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit
 - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - (b) satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan -bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat dua hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

**KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, KUORUM KEPUTUSAN DALAM RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN
RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
Pasal 23**

- (1)
 - (a) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:

- i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari setengah bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari setengah bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh -saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - iv. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- (b) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka -waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak -suara yang hadir dalam RUPS;
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum -kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- (c) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- i. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - ii. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang

mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;

- iii. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- (d) Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari satu klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham -hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi --saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - ii. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - iii. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana - dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- (e) Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
- (2) Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
- a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;

dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.

- (3)
- a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut :

- i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan satu hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan satu hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
- (4) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 - (5) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersamasama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
 - (6) Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 - (7) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - (8) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian -sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
 - (9) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki -oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen -yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen --yang hadir dalam RUPS
 - (10) Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang -pasar modal.
 - (11) Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat --- di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
 - (12) a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya --dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.

- b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
- (13) Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
- saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundangundangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (14) Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
- Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
- Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

DIREKSI

Pasal 11

- Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman, serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah lima tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir satu periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
- Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan maka dalam jangka waktu 90 hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
- Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
- Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
- Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait poin l dan j, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan

- telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
- (13) Jabatan anggota Direksi apabila:
- i. meninggal dunia;
 - ii. masa jabatannya berakhir;
 - iii. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - iv. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
 - v. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (14) Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Pasal 12

- (1) Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
- (2) Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- (3) Tugas pokok Direksi adalah:
- i. memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - ii. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - iii. menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang,
- dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.
- (4) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan :
- i. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - ii. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - iii. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - iv. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- (5) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
- (6) Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut :
- i. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - ii. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - iii. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - iv. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam Akta ini;

- v. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
- vi. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

- (7) Untuk menjalankan perbuatan hukum:
- i. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari setengah bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu satu tahun buku; atau
 - ii. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari setengah bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain,

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

- (8) Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS.
- (9) Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila :
- i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan :
 1. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 2. lampaunya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan.
- (10) Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan) adalah:
- i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- (11) Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- (12) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- (13) Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
- (14) Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
- (15) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi
- (16) Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

DEWAN KOMISARIS

Pasal 14

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya dua orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (2) Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (3) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah lima tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir satu periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
- (5) Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- (6) Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
- (7) Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini maka dalam jangka waktu 90 hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- (8) Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
- (9) Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
- (10) Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (11) Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
- (12) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - (i) meninggal dunia;
 - (ii) masa jabatannya berakhir;
 - (iii) diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - (iv) dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan pengadilan; dan
 - (v) tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris bertugas:

- i. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
- ii. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- iii. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
- iv. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
- v. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
- vi. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran; dan
- vii. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

- (2) Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - i. mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
 - ii. mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh;
 - iii. memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan;
 - iv. melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS; dan
 - v. memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
- (3) Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
- (4) Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
- (5) Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
- (6) Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, -apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
- (7) Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut
- (8) Dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang

saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.

- (9) Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
 - (10) Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan atau keputusan RUPS.
- Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

PENGGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN

Pasal 24

- (1) Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
- (2) Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (3) Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- (4) Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam -perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- (6) Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu lima tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran 90 dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGGUNAAN CADANGAN

Pasal 25

- (1) Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
- (3) Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
- (4) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan

XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

1. Penyampaian Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada website www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pemesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan email kepada Penjamin Emisi Efek dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
- 3) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).

Penjamin Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Efek Ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) Hari Kerja, pada tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 2 Agustus 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. Penjatahan Saham

PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“SEOJK No. 15/2020”).

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 4 Agustus 2023

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal terjadi:
 - a) kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, maka pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- pada Penjataan Terpusat Ritel dan Penjataan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjataan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjataan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
- dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjataan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- dalam hal perhitungan penjataan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjataan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- alokasi saham untuk Penjataan Terpusat dialokasikan untuk Penjataan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjataan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Alokasi untuk Penjataan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau senilai Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau senilai Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau senilai Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah Penawaran Umum sebesar Rp100.873.480.000,- (seratus miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh ribu Rupiah) dengan Batasan minimum alokasi untuk penjataan terpusat adalah sejumlah Rp20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar 19,83% (sembilan belas koma delapan tiga persen) atau sejumlah 200.000.000 (dua ratus juta) saham dari total saham yang ditawarkan.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjataan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjataan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjataan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X \leq 10x$	$10x \leq X \leq 25x$	$\geq 25x$
I	Min (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Min (10% atau Rp 37,5 miliar)	12,5%	15%	20%
III	Min (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Min (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjataan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel golongan I. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjataan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjataan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjataan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjataan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat akan diambil dari porsi Penjatahan Pasti.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Emisi Pelaksana dan Penjamin Emisi menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Panjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Manajer Penjatahan dapat menentukan pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti serta menentukan persentase perolehannya.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- ii. Jumlah Penjatahan Pasti sebagaimana dimaksud pada poin i termasuk pula jatah bagi pegawai Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum dengan jumlah paling banyak 2% (dua persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum; dan

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang

pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan dapat menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-ipo.co.id. BAE atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia

Treasury Tower 50th floor Unit A
District 8 SCBD Lot. 28
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 - 5088 7000
Fax. 021 - 5088 7001

PENJAMIN EMISI EFEK

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220, DKI Jakarta
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimili: (021) 2788 9288
Situs web: www.sucorsekuritas.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 -53
Jakarta Selatan 12190, DKI Jakarta
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimili: (021) 2924 9168
Situs web: www.trimegah.com

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Adimitra Jasa Korpora

Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5
Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telp. (021) +6221 29745 222
Fax. (021) +6221 292 89961

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana, yang telah disusun oleh Genio Atyanto & Partners.

Kepada Yang Terhormat,

PT ITSEC ASIA TBK

Gedung Noble House Lantai 11 Unit 2 & 3,
Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Timur,
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

U.p. Direksi

Perihal : Pendapat Dari Segi Hukum Atas PT ITSEC Asia Tbk Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Konsultan Hukum yang telah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) sesuai dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-61/-PJ-1/PM.02/2023 tanggal 14 Februari 2023 dan telah terdaftar sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan nomor 201209, keduanya atas nama Genio Yudha Wibowo Atyanto, SH, SE, MH, berkantor di firma hukum Genio Atyanto & Partners, telah ditunjuk oleh PT ITSEC Asia Tbk (“**Perseroan**”) berdasarkan surat Perseroan No. 1487/ADM/ITSECASIA/XII/2022 tanggal 1 Desember 2022, untuk melakukan uji tuntas dari segi hukum (“**Uji Tuntas**”) dan menyusun Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (“**Laporan Uji Tuntas**” atau “**LUT**”) serta memberikan Pendapat Dari Segi Hukum (“**Pendapat Hukum**”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan penawaran umum perdana saham sebanyak 1.008.734.800 saham biasa atas nama dengan nilai nominal masing-masing saham Rp25 (“**Saham Baru**”) atau sebanyak-banyaknya 15,64% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan (“**Penawaran Umum Perdana**”) kepada masyarakat dengan harga penawaran sebagaimana tercantum dalam prospektus, serta akan dicatatkan dalam PT Bursa Efek Indonesia. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp100.873.480.000.

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana ini, Perseroan juga menerbitkan sebanyak 504.367.400 Waran Seri I, yang menyertai saham baru yang dikeluarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum Perdana yang dikeluarkan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang dua Saham Baru Perseroan berhak memperoleh satu Waran Seri I dimana setiap satu Waran Seri I memberikan hak

kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama tiga tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp25 setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp400, yang dapat dilakukan setelah 12 bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 6 Agustus 2027. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp201.746.960.000.

Dalam rangka Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

- (a) menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 1 tanggal 3 April 2023 sebagaimana diubah berdasarkan (i) Akta Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 16 tanggal 8 Mei 2023; (ii) Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 28 tanggal 7 Juli 2023; dan (iii) Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham No. 112 tanggal 26 Juli 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek;
- (b) menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 2 tanggal 3 April 2023 sebagaimana diubah berdasarkan (i) Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum No. 29 tanggal 7 Juli 2023; dan (ii) Akta Addendum Kedua dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham No. 113 tanggal 26 Juli 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek;
- (c) menandatangani Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 3 tanggal 3 April 2023 sebagaimana diubah berdasarkan (i) Akta Addendum Pertama Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 17 tanggal 8 Mei 2023; (ii) Akta Addendum Kedua Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 44 tanggal 14 Juni 2023; (iii) Akta Addendum Ketiga Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 30 tanggal 7 Juli 2023; dan (iv) Akta Addendum Keempat dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penerbitan Waran Seri I No. 114 tanggal 26 Juli 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan;

- (d) menandatangani Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I Penawaran Umum Perdana Saham No. 4 tanggal 3 April 2023 sebagaimana diubah berdasarkan (i) Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 45 tanggal 14 Juni 2023; (ii) Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 31 tanggal 7 Juli 2023; dan (iii) Akta Addendum Ketiga dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 115 tanggal 26 Juli 2023 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek; dan
- (e) menyusun Prospektus.

Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari PT Bursa Efek Indonesia berdasarkan surat No. S-05307/BEI.PP2/07-2023 tentang Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT ITSEC Asia Tbk, tanggal 5 Juli 2023.

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- a) Sekitar 87% akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung perluasan tim *cybersecurity* di Indonesia, Singapura dan Australia, dan untuk membangun tim baru serta menyewa kantor di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, Perseroan akan menginvestasikan modal kerja untuk pemasaran, pembiayaan proyek, serta sertifikasi dan akreditasi untuk mendorong pertumbuhan pendapatan di masa depan. Selain itu, Perseroan bermaksud untuk menginvestasikan modal kerja dalam membangun tim *Research and Development* (R&D) untuk mengembangkan produk, alat, dan layanan *cybersecurity* baru, dengan detail sebagai berikut:
- Sekitar 23% akan digunakan sebagai modal kerja untuk mengembangkan tim *cybersecurity* yang sudah ada di Indonesia, Singapura dan Australia.
 - Sekitar 15% akan digunakan sebagai modal kerja untuk merekrut tim baru dan untuk biaya operasional, termasuk penyewaan kantor di wilayah baru di mana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar.
 - Sekitar 14% akan digunakan sebagai modal kerja untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang Perseroan, termasuk untuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak untuk pelanggan, dimana biaya-biaya yang timbul di awal akan dibayarkan menggunakan arus kas pada saat proyek berjalan.
 - Sekitar 7% akan digunakan sebagai modal kerja untuk pemasaran dalam rangka mempromosikan layanan Perseroan dan menyelenggarakan simposium edukasi *cybersecurity*.
 - Sekitar 2% akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendapatkan akreditasi untuk kantor regional baru (sebagai contoh: ISO 27001, ISO 9001, dan CREST), dan untuk meningkatkan sertifikasi profesional para staf.

- Sekitar 23% akan digunakan sebagai modal kerja untuk membangun tim R&D untuk mengembangkan *Cloud-Based Managed Security Services (MSS)* untuk pasar UMKM, *Data Protection Services*, produk *cybersecurity* untuk pasar telekomunikasi, dan untuk mendukung bisnis yang sudah ada.
 - Sekitar 12% akan digunakan sebagai modal kerja untuk membangun tim R&D untuk mengembangkan perangkat *cybersecurity* yang dibantu oleh *Artificial Intelligence (AI)* dan alur kerja otomatisasi yang didukung oleh AI.
 - Sekitar 1% sebagai modal kerja untuk merekrut tim R&D untuk mengembangkan perangkat pelatihan *cybersecurity*.
 - Sekitar 3% akan digunakan sebagai modal kerja untuk penyewaan fasilitas R&D di Noble House, lantai 11, sesuai dengan perjanjian Nomor 006/LOO/GLI-MKT/II/2023 Tanggal 23 Februari 2023 antara Perseroan dan PT Graha Lestari Internusa.
- b) Sekitar 13% akan digunakan sebagai belanja modal untuk mendukung perluasan tim *cybersecurity* di Indonesia, Singapura dan Australia, serta untuk melakukan ekspansi di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, Perseroan akan menginvestasikan belanja modal untuk renovasi kantor R&D, pengembangan laboratorium *cybersecurity* di Noble House, Lantai 11, serta pembelian peralatan dan perlengkapan laboratorium, dengan detail sebagai berikut:
- Sekitar 16% akan digunakan sebagai belanja modal untuk pembelian laptop dan peralatan kantor dalam rangka mendukung pertumbuhan Perseroan di pasar yang ada di Indonesia, Singapura dan Australia.
 - Sekitar 36% akan digunakan sebagai belanja modal untuk renovasi kantor, serta pembelian laptop dan peralatan kantor di wilayah-wilayah baru dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar.
 - Sekitar 18% akan digunakan sebagai belanja modal untuk renovasi fasilitas R&D di Noble House, lantai 11.
 - Sekitar 30% akan digunakan sebagai belanja modal untuk menambah peralatan dan perlengkapan laboratorium *cybersecurity* di Indonesia, termasuk untuk Laboratorium Keamanan OT (*Operational Technology*) dan Laboratorium Forensik Digital.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, akan digunakan untuk:

- a) Sekitar 86% akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung perluasan tim *cybersecurity* di Indonesia, Singapura dan Australia, dan untuk membangun tim baru serta menyewa kantor di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, Perseroan akan menginvestasikan modal kerja untuk pemasaran, pembiayaan proyek, serta sertifikasi dan akreditasi untuk mendorong pertumbuhan pendapatan di masa depan. Selain itu, Perseroan bermaksud untuk menginvestasikan modal

kerja dalam membangun tim *Research and Development* (R&D) untuk mengembangkan produk, alat, dan layanan *cybersecurity* baru, dengan detail sebagai berikut:

- Sekitar 14% akan digunakan sebagai modal kerja untuk merekrut tim baru dan untuk biaya operasional di wilayah-wilayah baru dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar.
- Sekitar 13% akan digunakan sebagai modal kerja untuk mengembangkan tim *cybersecurity* yang sudah ada di Indonesia, Singapura dan Australia.
- Sekitar 12% akan digunakan sebagai modal kerja untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang Perseroan, termasuk untuk pembelian perangkat keras dan perangkat lunak untuk pelanggan, dimana biaya-biaya yang timbul di awal akan dibayarkan menggunakan arus kas pada saat proyek berjalan.
- Sekitar 8% akan digunakan sebagai modal kerja untuk pemasaran dalam rangka mempromosikan layanan Perseroan dan menyelenggarakan simposium edukasi *cybersecurity*.
- Sekitar 2% akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendapatkan akreditasi untuk kantor regional baru (sebagai contoh: ISO 27001, ISO 9001, dan CREST), dan untuk meningkatkan sertifikasi profesional para staf.
- Sekitar 46% akan digunakan sebagai modal kerja untuk biaya ekspansi tim R&D dalam mendukung produk pada lini bisnis yang ada, mengembangkan perangkat *cybersecurity* yang dibantu oleh *Artificial Intelligence* (AI) dan alur kerja otomatisasi yang didukung oleh AI, serta untuk penelitian dan pengembangan lebih lanjut pada produk dan layanan *cybersecurity* dan perlindungan data berbasis cloud.
- Sekitar 2% akan digunakan sebagai modal kerja untuk biaya tim R&D dalam rangka pengembangan alat pelatihan *cybersecurity*.
- Sekitar 3% akan digunakan sebagai modal kerja untuk menyewa fasilitas R&D di Noble House, lantai 11, sesuai dengan perjanjian No. 006/LOO/GLI-MKT/II/2023 tanggal 23 Februari 2023 antara Perseroan dan PT Graha Lestari Internusa.

b) Sekitar 14% akan digunakan sebagai belanja modal untuk mendukung ekspansi lebih lanjut tim *cybersecurity* di Indonesia, Singapura dan Australia, serta untuk ekspansi di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar. Selain itu, Perseroan akan terus menginvestasikan belanja modal untuk pengembangan laboratorium *cybersecurity* dan peralatannya di Noble House, Lantai 11, dengan detail sebagai berikut:

- Sekitar 41% akan digunakan sebagai belanja modal untuk renovasi dan perluasan kantor, serta pembelian laptop dan peralatan kantor di pasar-pasar yang sudah ada dan wilayah-wilayah baru dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar.

- Sekitar 22% akan digunakan sebagai belanja modal untuk meningkatkan fasilitas *Security Operations Center (SOC)* Perseroan di Indonesia.
- Sekitar 37% akan digunakan sebagai belanja modal untuk menambah peralatan dan perlengkapan laboratorium *cybersecurity* di Indonesia, termasuk untuk Laboratorium Keamanan OT (*Operational Technology*) dan Laboratorium Forensik Digital.

Dalam hal jumlah hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan dan/atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Pendapat Hukum ini dibuat berdasarkan uji tuntas terhadap Perseroan yang hasilnya termuat dalam Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dengan 048/LUT-ITSEC/GAP/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini.

Pendapat Hukum ini menggantikan Pendapat Hukum yang kami berikan sebelumnya dalam surat kami No. 032/PSH-ITSEC/GAP/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023.

Dalam Pendapat Hukum ini, "**Anak Perusahaan Entitas Asing**" berarti perusahaan-perusahaan yang didirikan tidak berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki langsung oleh Perseroan.

ASUMSI

Pendapat Hukum ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut (tanpa dilakukan penyelidikan dan investigasi lebih lanjut), yaitu:

- (i) seluruh tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah asli, dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, serta fotokopi dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami adalah sesuai dengan aslinya;
- (ii) seluruh dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta penegasan yang diberikan kepada kami oleh Perseroan adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan tidak ada hal-hal lain yang berkaitan dengannya yang disembunyikan dengan sengaja atau tidak, serta tidak ada dokumen material lainnya yang tidak diberikan atau diberitahukan kepada kami;
- (iii) dokumen, pernyataan, data, fakta, informasi dan keterangan serta penegasan tersebut tidak mengalami perubahan dan masih berlaku sampai dengan tanggal Laporan Uji Tuntas;
- (iv) para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Perseroan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat;

- (v) pihak yang bertindak mewakili pihak ketiga (di luar Perseroan) di dalam membuat dan menandatangani dokumen perjanjian dengan Perseroan merupakan pihak yang berwenang dan berkuasa penuh untuk menandatangani dan melaksanakan dokumen perjanjian dan tidak melanggar atau bertentangan dengan ketentuan anggaran dasarnya maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (vi) pihak ketiga (di luar Perseroan), yang merupakan suatu perusahaan, yang menandatangani perjanjian dengan Perseroan, masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh persetujuan dan/atau perizinan perusahaan yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan dan/atau kepentingan pihak ketiga tersebut dan bahwa pihak ketiga itu tidak dalam keadaan pailit pada saat penandatanganan perjanjian tersebut; dan
- (vii) seluruh pernyataan dan keterangan baik secara tertulis maupun lisan yang disampaikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan, pejabat pemerintah dan pihak lainnya adalah benar, lengkap, sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya dan tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini.

PENDAPAT HUKUM

Dengan memperhatikan asumsi serta kualifikasi yang dimuat dalam Pendapat Hukum ini dan setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas, kami berpendapat bahwa:

MENGENAI PERSEROAN

1. Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pada tahun 2010 berdasarkan Akta Pendirian No. 7 tanggal 12 April 2010, dibuat di hadapan Iman Refizal, SH, MHum, Notaris di Jakarta ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Akta Pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat No. AHU-23544.AH.01.01. Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010. Akta Pendirian Perseroan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0034711.AH.01.09. Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 9911 tanggal 12 April 2011 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 29.

Perseroan telah didirikan secara sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.

2. Perubahan anggaran dasar Perseroan sejak pendirian adalah sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:
 - a. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 105, tanggal 23 Desember 2022, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta, yang menyetujui perubahan ketentuan Pasal 3 sehubungan dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Akta 105/2022 telah memperoleh persetujuan Menkumham dan telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (“**Sisminbakum**”) berdasarkan Surat No. AHU-0093648.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0259973.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 23 Desember 2022. Akta 105/2022 telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 000411 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 2.

- b. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 97 tanggal 30 Januari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta 97/2023**”), yang menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (2) sehubungan dengan perubahan nilai nominal saham, peningkatan modal dasar dan modal disetor Perseroan.

Akta 97/2023 telah memperoleh persetujuan Menkumham dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-0006456.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020164.AH.01.11.Tahun 2023.

Akta 97/2023 telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0017696 tanggal 31 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0020164-AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023. Akta 97/2023 telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 00436 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 12.

Merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat 12.1 Akta Perjanjian Membuka Kredit No. 31 tanggal 30 November 2022, yang dibuat di hadapan Justriany Koni, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, antara PT ITSEC Asia dan PT Bank Raya Indonesia Tbk (“**Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Raya**”), Perseroan wajib secara terlebih dahulu memperoleh persetujuan PT Bank Raya Indonesia Tbk (“**Bank Raya**”) sebelum merubah, antara lain, komposisi permodalan.

Perubahan komposisi permodalan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta 97/2023 telah diratifikasi oleh Bank Raya berdasarkan Surat Bank Raya No. R.7/1002/NBU/03/2023 tertanggal 27 Februari 2023 perihal Persetujuan PT ITSEC Asia.

Perseroan juga telah menerima konfirmasi tertulis Bank Raya melalui surat elektronik yang dikirimkan oleh Bank Raya kepada Perseroan tanggal 19 Juni 2023 bahwa Bank Raya telah menyetujui segala perubahan atau penyesuaian yang harus dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit sepanjang untuk kepentingan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, termasuk pencabutan atau penyampingan atas pembatasan perubahan susunan pengurus dan komposisi permodalan.

- c. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 77 tanggal 28 Februari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, Notaris di Jakarta Selatan (“**Akta 77/2023**”) telah disetujui hal-hal sebagai berikut:
- i. perubahan status Perseroan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka, dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT ITSEC Asia Tbk;
 - ii. perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan;
 - iii. pengeluaran saham dalam simpanan atau portepel Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.008.734.800 saham atau sebanyak-banyaknya 15,64% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, masing-masing saham bernilai nominal Rp25, melalui Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan akan dicatatkan;
 - iv. penerbitan sebanyak-banyaknya Rp504.367.400 Waran Seri I atau setara dengan sebanyak-banyaknya 9,27% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum, dimana setiap pemegang dua saham baru berhak memperoleh satu Waran Seri I;
 - v. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik;
 - vi. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**POJK**”) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Jo. POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan
 - vii. penyesuaian anggaran dasar Perseroan sesuai dengan POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Akta 77/2023 telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-0014658.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048062.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023. Akta 77/2023 juga telah diberitahukan kepada Menkumham dan telah dicatat dalam Sisminbakum berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0036663 tanggal 3 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048062.AH.01.11. Tahun

2023 tanggal 3 Maret 2023. Akta 77/2023 telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 008939 dari Berita Negara No. 22.

Merujuk pada ketentuan Pasal 12 ayat 12.2 Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Raya, Perseroan wajib secara terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Raya sebelum melakukan perubahan bentuk perusahaan atau mengubah susunan pengurus dan komposisi permodalan. Perubahan anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta 77/2023 tersebut telah memperoleh persetujuan Bank Raya berdasarkan Surat Bank Raya No. R.7/1002/NBU/03/2023 tertanggal 27 Februari 2023 perihal Persetujuan PT ITSEC Asia.

Sehubungan dengan pembatasan-pembatasan yang menyangkut pelaksanaan penawaran umum perdana saham Perseroan dalam Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Raya, Perseroan telah mengajukan permohonan pengesampingan atau pengecualian atas pembatasan tersebut kepada Bank Raya berdasarkan Surat Perseroan No. 175/ADM/ITSECASIA/II/2023 tanggal 21 Februari 2023 perihal Permohonan Persetujuan. Dalam surat tersebut Perseroan mengajukan permohonan persetujuan Bank Raya atas hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan status Perseroan yang sebelumnya Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka;
2. Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris Perseroan;
3. Perubahan komposisi permodalan Perseroan; dan
4. Penghapusan/pencabutan persyaratan untuk memperoleh persetujuan Bank Raya apabila terjadi perubahan komposisi permodalan termasuk komposisi pemegang saham.

Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Raya berdasarkan surat Bank Raya No. R.7/1002/NBU/03/2023 tanggal 27 Februari 2023 perihal Persetujuan PT ITSEC Asia ("**Surat Bank Raya**") yang menyetujui antara lain hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan modal dasar dan modal disetor serta nilai nominal;
2. Perubahan status Perseroan dari semula tertutup menjadi terbuka; dan
3. Perubahan susunan direksi dan dewan komisaris.

Selanjutnya, Perseroan telah mengirimkan surat elektronik kepada Bank Raya pada tanggal 16 Juni 2023 perihal Perubahan Komposisi Pemegang Saham PT ITSEC Asia yang memohon konfirmasi secara tertulis melalui email atau surat bahwa persetujuan yang diberikan dalam Surat Bank Raya adalah pada dasarnya Bank Raya telah menyetujui segala perubahan atau penyesuaian yang harus dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Raya sepanjang untuk kepentingan perubahan status Perseroan menjadi perusahaan terbuka, yang mana mencakup juga persetujuan bagi Perseroan untuk tidak diwajibkan lagi memperoleh persetujuan

Bank Raya atas perubahan komposisi permodalan termasuk komposisi pemegang saham Perseroan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum Perdana Saham dengan mempertimbangkan setelah Perseroan menjadi perusahaan terbuka, komposisi pemegang saham Perseroan dapat berubah secara terus-menerus sehingga kewajiban untuk memperoleh persetujuan dari Bank Raya tidak mungkin untuk dilaksanakan.

Perseroan telah menerima konfirmasi Bank Raya melalui surat elektronik pada tanggal 19 Juni 2023 yang menyatakan bahwa dengan mempertimbangkan kondisi Perseroan menjadi perusahaan terbuka maka Bank Raya menyetujui untuk tindakan-tindakan sebagai perusahaan terbuka yang tidak mungkin dilakukan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Raya termasuk perubahan komposisi pemegang saham dan pengurus selanjutnya tidak lagi memerlukan persetujuan dari Bank Raya.

Perseroan bersama Bank Raya telah menandatangani addendum atas Perjanjian Fasilitas Kredit Bank Raya sehubungan dengan perubahan-perubahan yang telah disetujui Bank Raya di atas berdasarkan Perjanjian Addendum Membuka Kredit No. B.015/KWJ/PK-Int/07/2023 tanggal 24 Juli 2023, dibuat di bawah tangan.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah berdasarkan Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UUPT”), perubahan anggaran dasar mengenai status tertutup menjadi Perseroan Terbuka mulai berlaku sejak tanggal dilaksanakan penawaran umum, bagi Perseroan yang mengajukan pernyataan pendaftaran kepada lembaga pengawas di bidang pasar modal untuk melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Anggaran dasar Perseroan yang berlaku pada tanggal Pendapat Hukum ini, sepanjang tidak menyangkut ketentuan sebagai perusahaan terbuka, termaktub dalam Akta 77/2023 (selanjutnya seluruhnya disebut “**Anggaran Dasar Perseroan**”).

Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan (i) Peraturan No. IX.J.1; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Jo. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan (iii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik sebagaimana dipersyaratkan bagi Perusahaan Terbuka.

Akta Pendirian Perseroan dan perubahan-perubahannya telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. Kegiatan usaha Utama:

Aktivitas konsultasi keamanan informasi (KBLI 62021)

Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (*assurance*) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.

b. Kegiatan Usaha Penunjang

Aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya (KBLI 62029)

Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam sub golongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam sub golongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.

Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah aktivitas konsultasi keamanan informasi. Kegiatan usaha tersebut termasuk dalam kegiatan usaha yang dapat dijalankan Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan. Perseroan telah menjalankan kegiatan usaha yang sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bidang usaha Perseroan juga telah sesuai dengan KBLI 2020 sebagaimana telah terdaftar dalam Nomor Induk Berusaha Perseroan No. 8120110222003 pada tanggal yang diterbitkan tanggal 20 Desember 2018 dengan perubahan ke-8 pada tanggal 28 Desember 2022.

Berdasarkan Nomor Induk Berusaha Perseroan, kegiatan usaha Perseroan adalah aktivitas konsultasi keamanan informasi (Kode KBLI: 62021) dan aktivitas konsultasi komputer dan manajemen fasilitas komputer lainnya (Kode KBLI: 62029).

Kegiatan usaha Perseroan telah diklasifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan dapat dijalankan oleh Perseroan, selama tidak melanggar ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Struktur permodalan Perseroan adalah sebagaimana diuraikan dalam Akta 97/2023 yaitu sebagai berikut:

Modal dasar : Rp544.083.990.200, terbagi atas 21.763.359.608 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp25; dan

Modal ditempatkan dan disetor : Rp136.020.997.550, terbagi atas 5.440.839.902 saham, setiap saham bernilai nominal sebesar Rp25.

Berdasarkan Akta 97/2023, susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nominal per saham Rp25		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	21.763.359.608	544.083.990.200	100
<u>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</u>			
1. INV Management PTE. LTD	3.139.336.097	78.483.402.425	57,70
2. MB Investment Management PTE. LTD.	1.772.934.657	44.323.366.425	32,59
3. Matthew Owen Marsden	160.975.197	4.024.379.925	2,96
4. Alvin Jude Rafferty	33.593.951	839.848.775	0,62
5. Andri Utama Putra	38.000.000	950.000.000	0,70
6. Bambang Susilo	38.000.000	950.000.000	0,70
7. Radius Suharta	38.000.000	950.000.000	0,70
8. Bima Kurniawan	38.000.000	950.000.000	0,70
9. Antonius Andy Wijaya	25.000.000	625.000.000	0,46
10. Atik Pilihanto	25.000.000	625.000.000	0,46
11. Eko Prasudi Widiyanto	25.000.000	625.000.000	0,46
12. Eko Prasetyo	10.100.000	252.500.000	0,19
13. Rio Aseptia	10.100.000	252.500.000	0,19
14. Muhammad Ray Ramadhan	10.100.000	252.500.000	0,19
15. Junior Lazuardi	10.100.000	252.500.000	0,19
16. Augusta Bogie Satria Nugroho	5.300.000	132.500.000	0,10
17. Victor Christian Mamuaya	6.300.000	157.500.000	0,12
18. Henky Tornado	3.800.000	95.000.000	0,07
19. Doni Mora	4.500.000	112.500.000	0,08

Keterangan	Nominal per saham Rp25		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	%
20. Chia Ping Boon	19.000.000	475.000.000	0,35
21. Lim Juat Chong	19.000.000	475.000.000	0,35
22. Mariusz Marcinkiewicz	8.700.000	217.500.000	0,16
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.440.839.902	136.020.997.500	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	16.322.519706	408.062.992.700	-

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan No. 00092/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/III/2023 tanggal 31 Maret 2023, atas Laporan Keuangan Konsolidasian tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan, struktur permodalan Perseroan telah merefleksikan jumlah total permodalan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam akta perubahan permodalan Perseroan yang terakhir.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari Perseroan dalam jangka waktu tiga tahun terakhir adalah sah dan tiap-tiap perubahan permodalan Perseroan tersebut telah dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk sehubungan dengan jual beli piutang dengan pembayaran harga Rp0 yang selanjutnya piutang tersebut dikonversi menjadi saham oleh sebagian pemegang saham telah sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Para pemegang saham Perseroan telah melakukan penysetoran modal atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan selama jangka waktu tiga tahun terakhir.

5. Sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan OJK No. 3/POJK.4/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal dan mengacu kepada Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 112, tanggal, 28 Maret 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, MKn, Notaris di Jakarta Selatan, Perseroan dikendalikan oleh Patrick Rudolf Dannacher.
6. Pemilik manfaat Perseroan adalah Patrick Rudolf Dannacher sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pemberantasan Terorisme ("Perpres 13/2018"). Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Perpres 13/2018 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Manusia Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 tentang tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi pada tanggal 10 Maret 2023.

7. Perseroan telah memiliki Daftar Pemegang Saham per tanggal 24 Februari 2023 yang telah sesuai dengan UUPT. Perseroan juga telah menyimpan Daftar Khusus untuk semua Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
8. Berdasarkan Akta 77/2023, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Andri Utama Putra
Wakil Presiden Direktur	:	Marek Bialoglowy
Direktur	:	Doni Mora
Direktur	:	Eko Prasudi Widiyanto
Direktur	:	Bima Kurniawan
Direktur	:	Bambang Susilo

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Patrick Rudolf Dannacher
Komisaris	:	Rico Rizal Budidarmo
Komisaris	:	Yulius C Rusli
Komisaris	:	Joseph Edi Hut Lumban Gaol
Komisaris Independen	:	Richardus Eko Indrajit
Komisaris Independen	:	Agustinus Nicholas L

Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan yang memiliki benturan kepentingan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana.

Perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta 77/2023 tersebut telah memperoleh persetujuan dari Bank Raya berdasarkan Surat Bank Raya No. R.7/1002/NBU/03/2023 tertanggal 27 Februari 2023 perihal Persetujuan PT ITSEC Asia.

Perseroan juga telah memenuhi ketentuan Pasal 20 POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK 33/2014**”) dengan telah mengangkat Richardus Eko Indrajit dan Agustinus Nicholas L. sebagai Komisaris Independen.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana di atas telah diangkat sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan yang berlaku.

9. Perseroan telah memenuhi (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2015 Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik; (ii) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik; (iii) Peraturan OJK Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Komite Kerja Komite Audit; dan (iv) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
10. Perseroan saat ini telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana disyaratkan dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkan Pendapat Hukum ini.
11. Perseroan telah melakukan kewajiban yang timbul berdasarkan izin-izin dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan kegiatan usahanya.
12. Perjanjian-perjanjian penting yang material bagi Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya dan perjanjian-perjanjian yang ditandatangani dalam rangka Penawaran Umum Perdana adalah sah, masih berlaku dan mengikat Perseroan serta telah sesuai dengan Anggaran Dasar dari Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat.
13. Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material yang ditandatangani oleh Perseroan yang dapat menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan, berikut penggunaan dananya serta pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik.
14. Sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban aspek ketenagakerjaan, antara lain, mengikutsertakan karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, melakukan pendirian dan pendaftaran Lembaga Kerjasama Bipartit, pemenuhan upah minimum provinsi dan upah minimum sektoral, dan pelaporan atas wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan.
15. Perseroan tidak memiliki aset berupa aset tetap dan aset barang bergerak, namun Perseroan memiliki hak atas kekayaan intelektual dan aset tersebut sedang tidak dijaminkan.
16. Perseroan memiliki penyertaan pada Anak Perusahaan Entitas Asing dan saham-saham milik Perseroan dalam Anak Perusahaan Entitas Asing tidak sedang dijaminkan dan/atau dalam sengketa sebagai berikut:

Anak Perusahaan Entitas Asing

No.	Nama Entitas	Jumlah Saham	Persentase Kepemilikan (%)
1.	ITSEC Services Asia PTE. LTD (“ITSEC Singapore”)	Perseroan memiliki penyertaan sebanyak 2.526.614 saham pada ITSEC Singapore.	100
2.	ITSEC Australia PTY LTD (“ITSEC Australia”)	Perseroan memiliki penyertaan sebanyak 2.065.542 saham pada ITSEC Australia.	100

17. Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak sedang terlibat, baik di dalam maupun di luar peradilan, yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; dan (v) perkara hukum praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang secara material dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.
18. Berdasarkan pemeriksaan dan didukung oleh surat pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris, tidak terdapat anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari masing-masing Perseroan yang sedang terlibat, baik di dalam maupun di luar peradilan, yang secara material dapat berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan, dan rencana Penawaran Umum Perdana Saham, dalam: (i) perselisihan, sengketa, somasi, panggilan menyangkut permasalahan hukum di luar pengadilan; (ii) perkara hukum, baik pada bidang perdata maupun pidana dan/atau perselisihan/tuntutan di pengadilan dan/atau badan arbitrase mana pun di Indonesia atau di negara asing; (iii) perselisihan administratif dengan badan pemerintah termasuk perselisihan yang terkait dengan kewajiban pajak atau perselisihan yang terkait dengan masalah perburuhan; (iv) perkara kepailitan dengan pihak ketiga dan tidak pernah dinyatakan pailit; dan (v) perkara hukum praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang secara material dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha Perseroan dan (b) tidak memiliki benturan kepentingan sehubungan dengan keterlibatan dalam Penawaran Umum Saham Perdana oleh Perseroan.

19. Pengungkapan dalam Bab VIII Riwayat Singkat Perseroan dari Prospektus Penawaran Umum Perdana Perseroan, sepanjang merupakan hal-hal yang termasuk dalam lingkup Uji Tuntas kami, adalah benar dan sesuai dengan Laporan Uji Tuntas kami.
20. Pelaksanaan penyetoran atas saham sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana akan dilakukan dalam bentuk uang. Jumlah saham dan waran yang ditawarkan tidak melebihi jumlah saham dan waran yang disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 77 tanggal 28 Februari 2023, dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, SH, Notaris di Jakarta Selatan.
21. Jangka waktu pelaksanaan Waran Seri I adalah 12 bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai tanggal berakhirnya Waran Seri I, yaitu sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 6 Agustus 2027 pada pukul 16:00 WIB. Jumlah Waran Seri I yang diterbitkan adalah sebesar 9,27% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran Penawaran Umum Perdana disampaikan kepada OJK..
22. Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara berkala kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan melaporkan kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum wajib paling sedikit mengungkapkan: (i) seluruh dana yang telah diperoleh; (ii) jumlah biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum; (iii) dana yang telah direalisasikan dan peruntukannya; dan (iv) dana yang masih tersisa dan alasan belum direalisasikan. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
23. Dalam hal penggunaan dana dari Penawaran Umum Perdana Saham merupakan Transaksi Afiliasi, Transaksi Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi Material maka Perseroan wajib memenuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**") dan/atau Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**").

KUALIFIKASI

Pendapat Hukum ini diberikan dengan mendasarkan pada kualifikasi-kualifikasi di bawah ini:

- (a) Pendapat Hukum dilakukan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.
- (b) Penawaran Umum Perdana baru dapat dilaksanakan apabila Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Perseroan telah menjadi efektif.

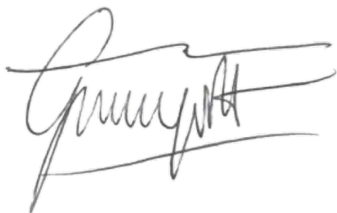
- (c) Pendapat kami sehubungan dengan “izin-izin penting” dan “perjanjian-perjanjian penting dan material” adalah sejauh izin-izin dan perjanjian-perjanjian tersebut berakibat atau berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan usaha Perseroan.
- (d) Dalam proses Uji Tuntas, kami berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang dituangkan dalam Surat Keputusan No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Keputusan Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal (“**Standar Profesi HKHPM**”) dan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk. Mengacu pada Standar Profesi HKHPM, maka Uji Tuntas kami lakukan dengan memperhatikan “Prinsip Keterbukaan” dan “Prinsip Materialitas” dengan ketentuan bahwa nilai materialitas tersebut dikonsultasikan dengan Perseroan sebagai pihak yang menjalankan usaha.
- (e) Sesuai dengan Standar Profesi HKHPM, kami tidak diwajibkan untuk memperoleh surat keterangan perkara dari badan peradilan dan arbitrase. Kami hanya melakukan pemeriksaan terbatas terhadap perkara dan berkas perkara yang disediakan oleh Perseroan kepada kami dan melakukan pemeriksaan mandiri atas keterlibatan mereka dalam perkara hukum dalam instansi peradilan di Indonesia melalui situs web dari masing-masing instansi peradilan terkait, namun kami tidak melakukan investigasi lebih lanjut atas adanya perkara-perkara perkara yang dihadapi Perseroan di lembaga peradilan atau badan arbitrase. Pemeriksaan atas perkara-perkara yang dihadapi oleh Perseroan, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sesuai dengan cara yang ditetapkan dalam Standar Profesi HKHPM.
- (f) Sehubungan dengan pemeriksaan perkara di situs web dari masing-masing instansi peradilan terkait, perlu dicatat bahwa (i) tidak ada jaminan bahwa informasi dalam *website* lembaga peradilan terkait adalah informasi terkini yang secara berkala dilakukan pemutakhiran oleh peradilan terkait; dan (ii) belum ada sistem data nasional yang tersentralisasi yang dapat diandalkan untuk memperoleh informasi secara komprehensif tentang keterlibatan suatu pihak atas sengketa hukum/perselisihan pengadilan.
- (g) Pendapat kami mengenai perjanjian-perjanjian adalah sejauh perjanjian-perjanjian tersebut diatur menurut dan tunduk kepada hukum Republik Indonesia dan dalam hal perjanjian-perjanjian tersebut diatur berdasarkan hukum Republik Indonesia pendapat hukum kami dibuat sepanjang hal tersebut menyangkut daya mengikat dari perjanjian-perjanjian tersebut terhadap Perseroan sebagai badan hukum Indonesia.
- (h) Karena sampai saat ini belum ada sistem data nasional yang tersentralisasi yang mengumpulkan semua peraturan-peraturan daerah di Indonesia, kami tidak mempunyai akses kepada peraturan-peraturan daerah yang mungkin mempunyai relevansi dengan hal-hal yang tercantum di dalam Pendapat Hukum ini dan oleh karenanya Pendapat Hukum ini harus dibaca dengan memperhatikan kualifikasi ini.

- (i) Pendapat Hukum ini dibatasi sebagai kajian dari segi hukum sesuai dengan Standar Profesi HKHPM, dan kami tidak melakukan penelaahan, mengemukakan pendapat, menganalisa ataupun memberikan penilaian atas masalah dari sudut non-hukum, baik dari segi penilaian komersial, bisnis, akuntansi, pajak maupun aspek investasi dan lain sebagainya di luar dari Standar Profesi HKHPM, sehingga dengan demikian (i) setiap informasi yang kamu ungkapkan dalam Pendapat Hukum yang di luar lingkup hukum dan Standar Profesi HKHPM, dan (ii) setiap dokumen yang kami tanda tangani atau paraf sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham yang di luar lingkup hukum dan Standar Profesi HKHPM tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup atau tanggung jawab kami; dan
- (j) Tanggung jawab kami sebagai konsultan hukum pasar modal yang independen sehubungan dengan hal-hal yang diberikan di dalam pelaksanaan Uji Tuntas, Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Hukum adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan di dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami sampaikan selaku konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

GENIO ATYANTO & PARTNERS



Genio Yudha Wibowo Atyanto, SH, SE, MH

STTD.KH-61/-PJ-1/PM.02/2023

Tembusan

- Ketua Otoritas Jasa Keuangan
- Kepala Eksekutif Pengawasan Pasar Modal, OJK
- PT Bursa Efek Indonesia u.p. Direksi

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan Perseroan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Morhan & Rekan dengan opini tanpa modifikasi.

PT ITSEC ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES

**Laporan Keuangan Konsolidasian / Consolidated Financial Statements
Pada Tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 Dan 2020 /
As Of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 And 2020
Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Januari 2023 /
And For The One-Month Period Ended January 31, 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022, 2021 Dan 2020 /
And For The Years Ended December 31, 2022, 2021 And 2020
Beserta Laporan Auditor Independen / With Independent Auditor's Report
(Mata Uang Indonesia) / (Indonesian Currency)**



**PT ITSEC ASIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK / AND SUBSIDIARIES**

Laporan Keuangan Konsolidasian Pada Tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 Dan 2020 Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Januari 2023 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2022, 2021 Dan 2020 Beserta Laporan Auditor Independen (Mata Uang Indonesia)	Consolidated Financial Statements As Of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 And 2020 And For The One-Month Period Ended January 31, 2023 And For The Years Ended December 31, 2022, 2021 And 2020 With Independent Auditor's Report (Indonesian Currency)
---	--

Daftar Isi / Table of Contents

Halaman / Pages

Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 3	<i>Consolidated Statements of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian	4 - 5	<i>Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas (Defisiensi Modal) Konsolidasian	6 - 7	<i>Consolidated Statements of Changes in Equity (Capital Deficiency)</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian	8	<i>Consolidated Statements of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian	9 - 91	<i>Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PADA TANGGAL 31 JANUARI 2023,
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
DAN UNTUK PERIODE SATU BULAN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL
31 JANUARI 2023
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
PT ITSEC ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK**

**DIRECTORS' STATEMENT LETTER
RELATING TO
THE RESPONSIBILITY ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF JANUARY 31, 2023,
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
AND FOR THE ONE-MONTH
PERIOD ENDED
JANUARY 31, 2023
AND FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
PT ITSEC ASIA Tbk AND SUBSIDIARIES**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We, the undersigned:

Nama :	Andri Utama Putra	:	Nam
Alamat kantor :	Noble House, Mega Kuningan No. 2 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2 Lantai 11 Kec. Setiabudi, Kel. Kuningan Timur Jakarta Selatan	:	Office address
Nomor telepon :	(021) 29783050	:	Telephone number
Alamat domisili sesuai KTP :	Perum Villa Cendana Blok F2 Jl. WR. Supratman RT.006, RW.008 Kec. Ciputat Timur, Kel. Cempaka Putih Tangerang Selatan, Banten	:	Domicile address as stated in ID card
Jabatan :	Direktur Utama / <i>President Director</i>	:	Positio
Nama :	Doni Mora, SE	:	Nam
Alamat kantor :	Noble House, Mega Kuningan No. 2 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2 Lantai 11 Kec. Setiabudi, Kel. Kuningan Timur Jakarta Selatan	:	Office address
Nomor telepon :	(021) 29783050	:	Telephone number
Alamat domisili sesuai KTP :	Jl. Bekasi Timur IV/33, RT.010 / RW.008 Kec. Jatinegara, Kel. Cipinang Besar Utara Jakarta Timur, DKI Jakarta	:	Domicile address as stated in ID card
Jabatan :	Direktur Keuangan / <i>Finance Director</i>	:	Positio

menyatakan bahwa:

state that:

- | | |
|---|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT ITSEC Asia Tbk dan Entitas Anak ("Grup"); | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT ITSEC Asia Tbk and Subsidiaries (the "Group");</i> |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The Group's consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information contained in the Group's consolidated financial statements has been completely and properly disclosed;</i> |
| b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The Group's consolidated financial statements do not contain misleading material information or facts, and do not omit material information or facts;</i> |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Grup. | 4. <i>We are responsible for the internal control system of the Group.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 5 Mei 2023 / May 5, 2023

Atas nama dan mewakili Dewan Direksi / *For and on behalf of the Board of Directors:*

	
Andri Utama Putra Direktur Utama / <i>President Director</i>	Doni Mora, SE Direktur Keuangan / <i>Finance Director</i>

SECURITY DELIVERED

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No. 00185/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/V/2023

Pemegang Saham, Komisaris dan Dewan Direksi

PT ITSEC Asia Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT ITSEC Asia Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas (defisiensi modal) konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Report No. 00185/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/V/2023

To the Shareholders, Commissioner and Board of Directors

PT ITSEC Asia Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT ITSEC Asia Tbk (the "Company") and its subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as of January 31, 2023 and December 31, 2022, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity (capital deficiency) and consolidated statements of cash flows for the one-month period ended January 31, 2023 and for the year ended December 31, 2022, and notes to the consolidated financial statements including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of January 31, 2023 and December 31, 2022, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the one-month period ended January 31, 2023 and for the year ended December 31, 2022, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis of Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Akuntansi Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Dengan mengacu ke Catatan 1c (Entitas Anak yang Dikonsolidasikan) dan Catatan 2e (Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Signifikan - Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali) atas laporan keuangan konsolidasian.

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 1c atas laporan keuangan konsolidasian, pada tanggal 30 Januari 2023, Perusahaan telah mengakuisisi 100% kepentingan pada ITSEC Services Asia Pte. Ltd. dan ITSEC Australia Pty. Ltd. dengan jumlah imbalan sebesar Rp 77.743.996.302, yang menghasilkan selisih nilai yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali (atau selisih jumlah imbalan yang dialihkan terhadap nilai buku aset bersih yang diakuisisi) sebesar Rp 71.002.420.544. Grup mencatat kombinasi bisnis dengan menerapkan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Berdasarkan PSAK 38, pengalihan aset, liabilitas, saham dan instrumen kepemilikan lain antara entitas sepengendali tidak akan menghasilkan suatu laba atau rugi bagi Grup atau entitas individual yang berada dalam grup yang sama. Oleh karena transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali tidak mengubah substansi ekonomi atas kepemilikan aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lain yang dipertukarkan, pengalihan aset atau liabilitas harus dicatat berdasarkan nilai buku seperti penggabungan usaha yang menggunakan metode penyatuan kepentingan (*pooling-of-interests*). Dalam pelaksanaan metode penyatuan kepentingan, komponen-komponen laporan keuangan konsolidasian selama restrukturisasi terjadi disajikan seolah-olah restrukturisasi tersebut telah terjadi sejak awal periode selama entitas sepengendali. Selisih nilai yang timbul dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali akan disajikan sebagai bagian dari ekuitas pada tambahan modal disetor.

Akuntansi kombinasi bisnis entitas sepengendali adalah hal audit utama dalam audit karena dampak substansial terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Key Audit Matter

Key audit matter is the matter that, in our professional judgment, was of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. This matter was addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on this matter.

Accounting for Business Combination of Entities Under Common Control

Refer to Note 1c (Consolidated Subsidiaries) and Note 2e (Summary of Significant Accounting Policies - Business Combination of Entities Under Common Control) to the consolidated financial statements.

As described in Note 1c to the consolidated financial statements, on January 30, 2023, the Company acquired 100% interest in ITSEC Services Asia Pte. Ltd. and ITSEC Australia Pty. Ltd. for a total consideration of Rp 77,743,996,302, resulting to a difference in value arising from restructuring transaction of entities under common control (i.e., difference between consideration transferred and book value of net assets acquired) amounted to Rp 71,002,420,544. The Group accounted for the business combination by applying PSAK 38, "Business Combination of Entities Under Common Control".

Under PSAK 38, transfer of assets, liabilities, shares and other instruments of ownership among entities under common control would not result in a gain or loss to the Group or to the individual entity within the same group. Since a restructuring transaction among entities under common control does not result in a change of the economic substance of the ownership of assets, liabilities, shares or other instruments of ownership which are exchanged, assets or liabilities transferred must be recorded at book value as business combination using the pooling-of-interests method. In applying the pooling-of-interests method, the components of the consolidated financial statements for the period during which the restructuring must be presented in such a manner as if the restructuring has occurred since the beginning of the period in which the entities were under common control. The difference in value arising from restructuring transaction of entities under common control is presented in equity as additional paid-in capital.

Accounting for business combination of entities under common control is a key audit matter in the audit due to the substantial effect to the consolidated financial statements.

Hal Audit Utama (lanjutan)

Bagaimana audit kami menangani Hal Audit Utama

- Kami meninjau dokumen terkait kombinasi bisnis entitas sepengendali untuk (a) menentukan apakah transaksi tersebut merupakan kombinasi bisnis, (b) mengidentifikasi pihak pengakuisisi, dan (c) menentukan tanggal akuisisi;
- Kami menilai kompetensi dan objektivitas manajemen dalam menentukan aset yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan setiap kepentingan non-pengendali yang diakuisisi;
- Kami memeriksa bahwa imbalan yang dialihkan diidentifikasi dan diukur dengan benar dengan membaca perjanjian penggabungan usaha dan membandingkan jumlah tersebut dengan dokumen pendukung atas imbalan aktual yang dialihkan;
- Kami memeriksa bahwa selisih jumlah imbalan yang dialihkan terhadap nilai buku aset bersih yang diakuisisi diakui dan diukur dengan benar;
- Kami mengevaluasi keselarasan kebijakan akuntansi Perusahaan, ITSEC Services Asia Pte. Ltd. dan ITSEC Australia Pty. Ltd. sehubungan dengan penggabungan usaha; dan
- Kami menilai kecukupan pengungkapan sesuai dengan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Penekanan suatu hal

Kami membawa perhatian pada Catatan 4 atas laporan keuangan konsolidasian yang menjelaskan bahwa Grup telah menyajikan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, karena penerapan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Kami telah mengaudit penyesuaian-penyesuaian yang telah diterapkan pada laporan keuangan konsolidasian di atas seperti dijelaskan pada Catatan 4. Menurut opini kami, penyesuaian tersebut wajar dan diterapkan dengan benar. Kami tidak melakukan suatu audit, revidu atau prosedur lain atas laporan keuangan konsolidasian Grup, kecuali penyesuaian yang telah disebutkan di atas; oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan keuangan konsolidasian di atas secara keseluruhan. Opini kami tidak dimodifikasi terkait hal tersebut di atas.

Key Audit Matter (continued)

How our audit addressed the Key Audit Matter

- We reviewed documents relating to business combination to (a) determine whether the transaction is a business combination, (b) identify the acquirer, and (c) determine the acquisition date;
- We assessed the competency and objectivity of the management in determining assets acquired and the liabilities assumed, and any non-controlling interest in the acquiree;
- We checked that the consideration transferred is properly identified and measured by reading the documents relating to business combination and comparing the amount to supporting documents of the actual consideration transferred;
- We checked that the difference in value arising from restructuring transaction of entities under common control is properly recognized and measured;
- We evaluated the alignment of accounting policies of the Company, ITSEC Services Asia Pte. Ltd. and ITSEC Australia Pty. Ltd. in respect to the business combination; and
- We assessed the adequacy of the related disclosures in accordance with PSAK 38, "Business Combination of Entities Under Common Control".

Emphasis of matter

We draw attention to Note 4 to the consolidated financial statements which describes that the Group restated the consolidated financial statements as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019 and for the years ended December 31, 2021 and 2020 due to the application of PSAK 38, "Business Combination of Entities Under Common Control". We have audited the adjustments that have been applied to the above consolidated financial statements as described in Note 4. In our opinion, those adjustments are fair and applied properly. We did not perform an audit, review or any other procedures on the said consolidated financial statements of the Group, except for those adjustments mentioned above; hence, we do not express an opinion or other form of assurance to the above consolidated financial statements as a whole. Our opinion is not modified in respect of the matter mentioned above.

Hal-hal lain

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan defisiensi modal konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Grup untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022 tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan defisiensi modal konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2022, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan defisiensi modal konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian tersebut.

Laporan keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut dan laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2020/31 Desember 2019, sebelum disajikan kembali, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi masing-masing pada tanggal 2 Juni 2022, 9 Agustus 2021 dan 31 Agustus 2020.

Laporan ini disusun semata-mata untuk tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT ITSEC Asia Tbk di Pasar Modal Indonesia, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00092/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/III/2023 tanggal 31 Maret 2023 atas laporan keuangan konsolidasian Grup pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT ITSEC Asia Tbk. Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 40 atas laporan keuangan konsolidasian, Grup menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan penambahan pengungkapan dan perubahan pada laporan keuangan konsolidasian.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Other matters

The consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in capital deficiency and consolidated statement of cash flows of the Group for the one-month period ended January 31, 2022 were neither audited nor reviewed. We have not audited or reviewed the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in capital deficiency and consolidated statement of cash flows for the one-month period ended January 31, 2022, and therefore, we do not express an opinion or any other form of assurance on such consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in capital deficiency and consolidated statement of cash flows.

The consolidated financial statements of the Group as of December 31, 2021 and 2020 and for the years then ended and the consolidated statement of financial position as of January 1, 2020/December 31, 2019, prior to the restatement, were audited by other independent auditors who expressed an unmodified opinion on June 2, 2022, August 9, 2021 and August 31, 2020, respectively.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Initial Public Offering of Shares of PT ITSEC Asia Tbk in the Indonesia Capital Market, and is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

We have previously issued an independent auditor's report No. 00092/2.0961/AU.1/05/1023-1/1/III/2023 dated March 31, 2023 on the consolidated financial statements of the Group as of January 31, 2023 and December 31, 2022 and for the one-month period ended January 31, 2023 and for the year ended December 31, 2022 in connection with the plan for Initial Public Offering of Shares of PT ITSEC Asia Tbk. As explained in Note 40 to the consolidated financial statements, the Group reissued the consolidated financial statements as of January 31, 2023 and December 31, 2022 and for the one-month period ended January 31, 2023 and for the year ended December 31, 2022 with additional disclosures and changes on the consolidated financial statements.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements (continued)

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.
- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

**KANTOR AKUNTAN PUBLIK / REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS
MORHAN DAN REKAN**



David Kurniawan, CPA

Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1023 / Public Accountant Registration No. AP. 1023

5 Mei 2023 / May 5, 2023



PT ITSEC ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ITSEC ASIA Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	Disajikan Kembali (lihat Catatan 4) As Restated (see Note 4)			
				31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 / January 1, 2020/ December 31, 2019	
ASET							ASSETS
ASET LANCAR							CURRENT ASSETS
Kas dan bank	2g,2i,5,33,34	3.728.601.505	15.123.973.273	10.096.566.661	1.386.092.320	1.052.003.034	Cash on hand and in banks
Piutang usaha - bersih	2g,6,33,34						Trade receivables - net
Pihak ketiga		30.251.454.780	32.579.504.493	13.410.244.022	14.054.464.963	5.985.524.357	Third parties
Pihak berelasi	2f,32	-	-	-	-	-	Related party
Aset kontrak	2g,2q,8,33,34	10.732.984.691	8.259.710.289	4.415.789.596	671.757.120	563.340.822	Contract assets
Piutang lain-lain	2g,7,33,34						Other receivables
Pihak ketiga		546.893.275	464.581.609	318.135.928	206.421.722	196.351.294	Third parties
Pihak berelasi	2f,32	-	137.576.200	76.034.412	76.828.392	-	Related party
Biaya dibayar di muka	2j,9	3.654.495.351	2.774.070.511	1.832.563.388	1.259.355.969	1.665.242.669	Prepaid expenses
Uang muka	2k,10	23.478.405.470	22.716.180.727	25.078.944.386	5.728.305.250	565.271.010	Advances
Biaya ditangguhkan	11	3.996.000.000	-	-	-	-	Deferred charges
Jumlah Aset Lancar		76.388.835.072	82.055.597.102	55.228.278.393	23.383.225.736	10.027.733.186	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR							NON-CURRENT ASSETS
Aset pajak tangguhan	2r,22c	3.925.252.656	3.560.848.768	3.132.396.147	5.688.717.268	3.458.486.270	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	2i,12	5.830.661.658	4.870.608.541	2.218.981.145	1.434.869.271	1.213.920.231	Fixed assets - net
Aset hak-guna - bersih	2n,13,38	6.521.280.252	6.859.368.312	4.485.127.380	6.273.042.675	-	Right-of-use assets - net
Aset takberwujud - bersih	2m,14	2.113.887.908	2.306.059.537	4.612.119.073	6.918.178.609	5.157.413.190	Intangible assets - net
Uang muka investasi	15	-	65.625.490.346	-	-	-	Advance for investments
Aset lain-lain	2g,16,33,34	4.566.052.576	4.748.415.226	3.485.803.369	3.031.803.330	1.804.341.569	Other assets
Jumlah Aset Tidak Lancar		22.957.135.050	87.970.790.730	17.934.427.114	23.346.611.153	11.634.161.260	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		99.345.970.122	170.026.387.832	73.162.705.507	46.729.836.889	21.661.894.446	TOTAL ASSETS

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT ITSEC ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ITSEC ASIA Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	Disajikan Kembali (lihat Catatan 4) As Restated (see Note 4)					
		31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	1 Januari 2020 / 31 Desember 2019 / January 1, 2020 / December 31, 2019	
LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)							LIABILITIES AND EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
LIABILITAS							LIABILITIES
LIABILITAS JANGKA PENDEK							CURRENT LIABILITIES
Utang usaha - pihak ketiga	2g,17,33,34	3.133.981.285	9.326.389.057	12.853.445.571	3.845.362.926	2.135.033.493	Trade payables - third parties
Utang lain-lain Pihak ketiga	2g,18,33,34	4.855.168.126	3.076.397.535	2.660.684.250	2.350.738.918	926.411.351	Other payables Third parties
Pihak berelasi	2f,32	2.828.407.365	147.089.596.956	67.692.818.448	49.230.208.483	37.670.440.017	Related parties
Utang bank jangka pendek	2g,19,33,34	9.321.424.963	9.952.226.431	-	-	-	Short-term bank loan
Beban masih harus dibayar	2g,21,33,34	10.141.976.139	7.008.085.210	6.710.235.109	3.382.545.630	1.181.145.391	Accrued expenses
Liabilitas kontrak	2q	140.443.103	143.545.602	107.868.158	155.902.349	94.921.926	Contract liabilities
Utang pajak	22a	9.673.893.503	8.705.831.886	8.377.266.522	6.935.570.773	4.623.642.339	Taxes payable
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2n,20,33,34,38	3.246.927.329	3.258.168.423	2.104.936.569	2.191.637.869	-	Current maturities of lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		43.342.221.813	188.560.241.100	100.507.254.627	68.091.966.948	46.631.594.517	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG							NON-CURRENT LIABILITIES
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	2n,20,33,34,38	3.041.646.708	3.569.708.083	2.023.537.519	3.671.742.219	-	Lease liabilities, net of current maturities
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2p,23	17.498.921.633	15.638.851.242	10.512.908.135	8.542.102.057	5.206.642.181	Estimated liabilities for employee benefits
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		20.540.568.341	19.208.559.325	12.536.445.654	12.213.844.276	5.206.642.181	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		63.882.790.154	207.768.800.425	113.043.700.281	80.305.811.224	51.838.236.698	TOTAL LIABILITIES

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT ITSEC ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(lanjutan)
31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ITSEC ASIA Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
(continued)
January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	Disajikan Kembali (lihat Catatan 4) As Restated (see Note 4)					EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
		31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	1 Januari 2020 / 31 Desember 2019/ January 1, 2020 / December 31, 2019	
EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)							EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
Modal saham - nilai nominal Rp 25 per saham pada tanggal 31 Januari 2023 dan Rp 2.500.000 per saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019							Share capital - Rp 25 par value per share as of January 31, 2023 and Rp 2,500,000 par value per share as of December 31, 2022, 2021, 2020 and 2019
Modal dasar - 21.763.359.608 saham pada tanggal 31 Januari 2023 dan 4.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019							Authorized - 21,763,359,608 shares as of January 31, 2023 and 4,000 shares as of December 31, 2022, 2021, 2020 and 2019
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.440.839.902 saham pada tanggal 31 Januari 2023 dan 1.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019	24	136.020.997.550	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	Issued and fully paid - 5,440,839,902 shares as of January 31, 2023 and 1,000 shares as of December 31, 2022, 2021, 2020 and 2019
Tambahan modal disetor	1c,2e,25	(70.171.144.260)	136.400.000	136.400.000	136.400.000	136.400.000	Additional paid-in capital
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali		-	(15.319.918.317)	(16.540.283.282)	(7.585.358.405)	(14.115.331.137)	Proforma equity from restructuring transaction of entities under common control
Defisit	26	(29.658.710.359)	(26.438.290.376)	(27.145.728.448)	(29.842.590.949)	(19.717.441.141)	Deficits
Penghasilan komprehensif lain		(727.962.963)	1.379.396.100	1.168.616.956	1.215.575.019	1.020.030.026	Other comprehensive income
JUMLAH EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)		35.463.179.968	(37.742.412.593)	(39.880.994.774)	(33.575.974.335)	(30.176.342.252)	TOTAL EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL)		99.345.970.122	170.026.387.832	73.162.705.507	46.729.836.889	21.661.894.446	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT ITSEC ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN

Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Januari 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ITSEC ASIA Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
For The One-Month Period Ended January 31, 2023
And For The Years Ended
December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2023		2022		2021		Disajikan Kembali (lihat Catatan 4) / As Restated (see Note 4)
		(Satu Bulan / One Month)	(Satu Bulan / One Month)	(Satu Tahun / One Year)	(Satu Tahun / One Year)	(Satu Tahun / One Year)	(Satu Tahun / One Year)	
PENDAPATAN BERSIH	2q,27	9.282.591.159	6.678.446.549	187.020.275.669	118.316.460.489	73.519.176.313		NET REVENUES
BEBAN POKOK PENDAPATAN	2q,28	(7.125.637.001)	(2.941.402.974)	(115.984.518.327)	(65.225.293.019)	(55.101.769.939)		COST OF REVENUES
LABA KOTOR		2.156.954.158	3.737.043.575	71.035.757.142	53.091.167.470	18.417.406.374		GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	2q,29	(7.616.408.277)	(5.695.359.383)	(75.687.667.820)	(55.257.751.706)	(36.975.679.196)		General and administrative expenses
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	2q,30	2.757.149.393	(449.264.501)	(4.392.756.680)	(2.731.154.181)	(2.070.439.454)		Other income (expenses) - net
RUGI USAHA		(2.702.304.726)	(2.407.580.309)	(9.044.667.358)	(4.897.738.417)	(20.628.712.276)		LOSSES FROM OPERATIONS
Pendapatan keuangan	2q	278.324.261	8.936.919	1.594.145.291	1.020.026.512	3.333.465.859		Finance income
Beban keuangan	2q	(594.596.928)	(31.587.075)	(1.429.878.176)	(462.506.337)	(376.570.124)		Finance costs
RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		(3.018.577.393)	(2.430.230.465)	(8.880.400.243)	(4.340.218.242)	(17.671.816.541)		LOSSES BEFORE INCOME TAX
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN								INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	2r,22b	(265.957.806)	-	(2.461.988.178)	-	-		Current
Tangguhan	2r,22c	64.115.216	516.508.051	487.903.149	(2.569.565.703)	2.285.384.714		Deferred
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN - BERSIH		(201.842.590)	516.508.051	(1.974.085.029)	(2.569.565.703)	2.285.384.714		INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE) - NET
RUGI BERSIH SETELAH EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/TAHUN BERJALAN		(3.220.419.983)	(1.913.722.414)	(10.854.485.272)	(6.909.783.945)	(15.386.431.827)		NET LOSSES AFTER EFFECT OF PROFORMA ADJUSTMENT FOR THE PERIOD/YEAR

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT ITSEC ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Januari 2023

Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

31 Desember 2022, 2021 Dan 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT ITSEC ASIA Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME (continued)**
For The One-Month Period Ended January 31, 2023
And For The Years Ended
December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	2022		2021		Effect of proforma adjustment
	Catatan / Notes	2023 (Satu Bulan / One Month)	2022 (Satu Bulan / One Month) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)
Efek Penyesuaian Proforma		-	(65.819.036)	9.606.646.446	5.261.282.019
LABA (RUGI) BERSIH SEBELUM EFEK PENYESUAIAN PROFORMA PERIODE/ TAHUN BERJALAN		(3.220.419.983)	(1.979.541.450)	2.696.862.501	(10.125.149.808)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				707.438.072	
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	2p,23	(1.364.948.516)	(1.147.079.016)	(60.202.645)	250.698.709
Pajak penghasilan terkait	2r,22c	300.288.674	252.357.384	13.244.582	(55.153.716)
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Efek translasi mata uang asing		(1.042.699.221)	-	-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain		(2.107.359.063)	(894.721.632)	(46.958.063)	195.544.993
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN		(5.327.779.046)	(2.874.263.082)	2.649.904.438	(9.929.604.815)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR	2t,31	(0,59)	(19,80)	26,97	(101,25)
			7,07		

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT ITSEC ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) KONSOLIDASIAN
Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Januari 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ITSEC ASIA Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
For The One-Month Period Ended January 31, 2023
And For The Years Ended
December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan / Notes	Modal Saham / Share Capital	Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-In Capital	Proforma Ekuitas dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali / Proforma Equity from Restructuring Transaction of Entities Under Common Control	Defisit / Deficits	Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) / Total Equity (Capital Deficiency)	Balance as of January 1, 2020 (As Restated)
Saldo pada tanggal 1 Januari 2020 (Disajikan Kembali)	2.500.000.000	136.400.000	(14.115.331.137)	(19.717.441.141)	1.020.030.026	(30.176.342.252)	
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Rugi bersih tahun berjalan Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	-	-	6.529.972.732	-	-	6.529.972.732 (10.125.149.808)	Proforma equity from restructuring transaction of entities common control Net loss for the year Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Saldo pada tanggal 31 Desember 2020 (Disajikan Kembali)	2.500.000.000	136.400.000	(7.585.358.405)	(29.842.590.949)	1.215.575.019	(33.575.974.335)	Balance as of December 31, 2020 (As Restated)
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Laba bersih tahun berjalan Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	-	-	(8.954.924.877)	-	-	(8.954.924.877) 2.696.862.501	Proforma equity from restructuring transaction of entities common control Net income for the year Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan Kembali)	2.500.000.000	136.400.000	(16.540.283.282)	(27.145.728.448)	1.168.616.956	(39.880.994.774)	Balance as of December 31, 2021 (As Restated)
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Laba bersih tahun berjalan Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	-	-	1.220.364.965	-	-	1.220.364.965 707.438.072	Proforma equity from restructuring transaction of entities common control Net income for the year Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Saldo pada tanggal 31 Desember 2022	2.500.000.000	136.400.000	(15.319.918.317)	(26.438.290.376)	1.379.396.100	(37.742.412.593)	Balance as of December 31, 2022
Kenaikan modal saham	133.520.997.550	-	-	-	-	133.520.997.550	Increase in share capital
Rugi bersih periode berjalan	-	-	-	(3.220.419.983)	-	(3.220.419.983)	Net loss for the period
Efektif transaksi mata uang asing	-	-	-	-	(1.042.699.221)	(1.042.699.221)	Effect of foreign currency translation
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	-	-	-	-	(1.064.659.842)	(1.064.659.842)	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	15.319.918.317	-	-	15.319.918.317	Proforma equity from restructuring transaction of entities under common control
Dampak atas peningkatan modal saham pada entitas anak	-	694.876.284	-	-	-	694.876.284	Effect of the increase in share capital of the subsidiary
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	(71.002.420.544)	-	-	-	(71.002.420.544)	Difference in value arising from restructuring transactions of entities under common control
Saldo pada tanggal 31 Januari 2023	136.020.997.550	(70.171.144.260)	-	(29.658.710.359)	(727.962.963)	35.463.179.968	Balance as of January 31, 2023

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

PT ITSEC ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (DEFISIENSI MODAL) KONSOLIDASIAN
 (lanjutan)
 Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Januari 2023
 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
 31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ITSEC ASIA Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (CAPITAL DEFICIENCY)
 (continued)
 For The One-Month Period Ended January 31, 2023
 And For The Years Ended
 December 31, 2022, 2021 And 2020
 (Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	Modal Saham / Share Capital	Tambahan Modal Disetor / Additional Paid-in Capital	Proforma Ekuitas dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali / Proforma Equity from Restructuring Transaction of Entities Under Common Control	Defisit / Deficits	Penghasilan Komprehensif Lain / Other Comprehensive Income	Jumlah Ekuitas (Defisiensi Modal) / Total Equity (Capital Deficiency)
Saldo pada tanggal 31 Desember 2021 (Disajikan Kembali)		2.500.000.000	136.400.000	(16.540.283.282)	(27.145.728.448)	1.166.616.956	(39.880.994.774)
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali Rugi bersih periode berjalan Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan		-	-	469.213.325	(1.979.541.450)	-	469.213.325 (1.979.541.450)
Saldo pada tanggal 31 Januari 2022 (Tidak Diaudit)		2.500.000.000	136.400.000	(16.071.069.957)	(29.125.269.898)	273.895.324	(42.286.044.531)

Balance as of December 31, 2021
(As restated)

Proforma equity from restructuring
transactions of entity common control
Net loss for the period
Remeasurement of estimated liabilities for
employee benefits

Balance as of January 31, 2022
(Unaudited)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral
part of the consolidated financial statements.

PT ITSEC ASIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Laporan Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Januari 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ITSEC ASIA Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
For The One-Month Period Ended January 31, 2023
And For The Years Ended
December 31, 2022, 2021 And 2020
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan / Notes	2023 (Satu Bulan / One Month)	2022 (Satu Bulan / One Month / Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan kas dari pelanggan		9.051.105.268	8.933.537.856	114.823.196.572	114.823.196.572	65.171.467.398
Pembayaran kas kepada pemasok		(11.152.048.858)	(5.700.286.453)	(81.392.643.792)	(51.876.609.167)	(38.670.450.974)
Pembayaran kepada karyawan dan lainnya		(9.464.183.158)	(7.569.320.068)	(88.312.380.705)	(70.171.892.848)	(44.162.967.599)
Kas yang digunakan dari aktivitas operasi		(11.565.126.748)	(4.336.068.665)	(6.771.572.395)	(7.225.305.443)	(17.661.951.175)
Penerimaan bunga		278.324.261	8.936.919	1.594.145.291	1.020.026.512	3.333.465.859
Pembayaran beban keuangan		(594.596.928)	(31.587.075)	(1.429.888.376)	(462.506.340)	(376.570.124)
Pembayaran bunga atas liabilitas sewa		(57.606.692)	(15.835.033)	(190.020.401)	(286.103.448)	(238.866.384)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi		(11.939.006.108)	(4.374.553.854)	(8.797.095.740)	(7.052.256.417)	(14.943.921.824)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI						
Akuisisi entitas anak		(12.118.505.956)	-	-	-	-
Perolehan aset tetap	12	(1.071.487.600)	(2.928.312.410)	(3.627.363.115)	(1.610.113.116)	(875.851.319)
Kenaikan uang muka investasi pada entitas anak	15	-	-	(65.625.490.346)	-	-
Perolehan aset takberwujud	14	-	-	-	-	(1.760.765.419)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(13.189.993.556)	(2.928.312.410)	(69.252.853.461)	(1.610.113.116)	(2.636.616.738)
ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN						
Utang lain-lain - pihak berelasi		43.821.200.152	1.493.924.921	120.009.392.643	30.698.680.700	25.792.822.999
Penerimaan	18, 32	(28.656.669.421)	(1.062.409.700)	(44.832.416.362)	(10.745.908.653)	(4.999.437.856)
Utang bank jangka pendek		9.321.424.963	-	9.952.226.431	-	-
Penerimaan	19	(9.952.226.431)	-	-	-	-
Pembayaran pokok liabilitas sewa	20	(539.302.470)	(190.634.238)	(2.162.111.347)	(2.574.698.119)	(2.890.843.453)
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		13.794.406.793	240.880.983	82.967.091.365	17.378.073.928	17.902.541.690
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK		(11.334.592.871)	(7.061.985.282)	4.917.142.164	8.715.704.395	322.003.128
KAS DAN BANK AWAL PERIODE/TAHUN	5	15.123.973.273	10.096.566.661	10.096.566.661	1.386.092.320	1.052.003.034
DAMPAK PERUBAHAN MATA UANG ASING PADA KAS DAN BANK KAS DAN BANK AKHIR PERIODE/TAHUN	5	(60.778.897)	(6.304.135)	110.264.448	(5.230.054)	12.086.158
		3.728.601.505	3.028.277.244	15.123.973.273	10.096.566.661	1.386.092.320
NET INCREASE (DECREASE) IN CASH ON HAND AND IN BANKS						
CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE PERIOD/YEAR						
EFFECT OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATE IN CASH ON HAND AND IN BANKS						
CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE PERIOD/YEAR						

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

See accompanying Notes to the Consolidated Financial Statements which are an integral part of the consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT ITSEC Asia Tbk (“Perusahaan”) didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 7 tanggal 12 April 2010 oleh Refizal, S.H., M.Hum., notaris di Jakarta. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-23544.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 97 tanggal 30 Januari 2023 oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., tentang peralihan saham, kenaikan modal dasar, ditempatkan dan disetor dan penurunan pada nilai par per lembar saham Perusahaan. Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0006456.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 31 Januari 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah bergerak di bidang perdagangan, perbengkelan, pembangunan, perindustrian, pengangkutan darat, pertambangan, pertanian, percetakan dan jasa.

Saat ini, kegiatan usaha utama Perusahaan adalah perdagangan dan *Information Technology (IT) Services*.

Perusahaan terletak di Noble House, Mega Kuningan No. 2 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2 Lantai 11, Kec. Setiabudi, Kel. Kuningan Timur, Jakarta Selatan.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2010.

Pada tanggal 31 Januari 2023, Entitas induk langsung dan terakhir Perusahaan masing-masing adalah INV Management Pte Ltd and StoneTree Cyber Security Ventures Pte Ltd.

Patrick Dannacher adalah pemilik manfaat akhir dari Perusahaan pihak pengendali Perusahaan.

1. GENERAL

a. The Company’s Establishment and General Information

PT ITSEC Asia Tbk (the “Company”) was established based on Notarial Deed No. 7 dated April 12, 2010 of Refizal, S.H., M.Hum., notary in Jakarta. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Decision Letter No. AHU-23544.AH.01.01.Tahun 2010 dated May 7, 2010. The Company’s Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed No. 97 dated January 30, 2023 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., regarding the transfer of shares, increase in authorized, issued and paid-up capital and decrease in the par value per share of the Company. The amendment was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Decision Letter No. AHU-0006456.AH.01.02.Tahun 2023 dated January 31, 2023.

In accordance with Article 3 of the Company’s Articles of Association, the purpose and objective of the Company is to engage in trade, workshop, development, industry, land transportation, mining, agriculture, printing and services.

Currently, the Company’s main business activities are trade and Information Technology (IT) Services.

The Company is located at Noble House, Mega Kuningan No. 2 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 4.2 11th Floor Kec. Setiabudi, Kel. Kuningan Timur, South Jakarta.

The Company started its commercial operations in 2010.

As of January 31, 2023, the Company’s immediate and ultimate parent entity are INV Management Pte Ltd and StoneTree Cyber Security Ventures Pte Ltd, respectively.

Patrick Dannacher is the ultimate beneficial owner and controlling party of the Company.

1. UMUM (lanjutan)

b. Komisaris dan Dewan Direksi, dan Karyawan

Susunan Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 / January 31, 2023 and December 31, 2022</u>	<u>31 Desember 2021 / December 31, 2021</u>	<u>31 Desember 2020 / December 31, 2020</u>	
Komisaris :	Bambang Susilo	Bambang Susilo	Bambang Susilo	Commissioner
Dewan Direksi				Board of Directors
Direktur Utama :	Andri Utama Putra	Andri Utama Putra	Andri Utama Putra	President Director
Direktur Keuangan :	Doni Mora, SE	-	Dedy Novian	Finance Director
Direktur Teknologi :	Marek Bialoglowy	Marek Bialoglowy	Marek Bialoglowy	Technology Director
Direktur Solusi :	Eko Prasudi Widiyanto	Eko Prasudi Widiyanto	Eko Prasudi Widiyanto	Solutions Director
Direktur Pengembangan Bisnis :	Bima Kurniawan	Bima Kurniawan	Bima Kurniawan	Business Development Director

Pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perusahaan dan entitas anaknya memiliki masing-masing 194, 196, 148 dan 82 karyawan tetap (tidak diaudit).

As of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company and its subsidiaries had 194, 196, 148 and 82 permanent employees, respectively (unaudited).

Jumlah gaji dan kompensasi yang diterima Komisaris dan Dewan Direksi Perusahaan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Total salaries and benefits paid to the Commissioner and Board of Directors by the Company for the one-month periods ended January 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	<u>2023 (Satu Bulan / One Month)</u>	<u>2022 (Satu Bulan / One Month) (Tidak Diaudit / Unaudited)</u>	<u>2022 (Satu Tahun / One Year)</u>	<u>2021 (Satu Tahun / One Year)</u>	<u>2020 (Satu Tahun / One Year)</u>	
Gaji dan tunjangan	<u>370.547.500</u>	<u>213.500.000</u>	<u>3.222.500.000</u>	<u>2.541.963.000</u>	<u>2.025.000.000</u>	Salaries and allowances

Personel manajemen kunci Perusahaan adalah orang-orang yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Komisaris dan seluruh anggota Dewan Direksi dianggap sebagai manajemen kunci Perusahaan.

Key management personnel of the Company are those people who have the authority and responsibility for planning, directing and controlling the activities of the Company. The Commissioner and all members of the Board of Directors are considered as key management personnel of the Company.

1. UMUM (lanjutan)

c. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, entitas anak yang dikonsolidasikan dan masing-masing persentase kepemilikan Perusahaan adalah sebagai berikut:

Entitas Anak / Subsidiary	Bidang Usaha / Business Activity	Tempat Kedudukan / Domicile	Mulai Beroperasi Komersial / Start of Commercial Operation	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership				Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi) (dalam Rupiah) / Total Assets (Before Elimination) (in Rupiah)			
				31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020
<i>Kepemilikan Langsung / Direct Ownership</i>											
ITSEC Services Asia Pte. Ltd.	IT Services	Singapore	2018	100%	-	-	-	14.318.808.996	-	-	-
ITSEC Australia Pty. Ltd.	IT Services	Australia	2018	100%	-	-	-	3.860.245.264	-	-	-

Akuisisi Entitas Anak dari Entitas Sepengendali

Sesuai dengan Pernyataan Pemegang Saham (Resolusi Sirkuler) tanggal 30 Januari 2023, Perusahaan mengakuisisi ITSEC Services Asia Pte. Ltd. sebanyak 2.494.724 lembar saham dengan nominal \$AS 3.833.760 (setara dengan Rp 59.575.874.908) dan ITSEC Australia Pty. Ltd. sebanyak 2.065.542 lembar saham dengan nominal AS\$ 1.160.886 (setara dengan Rp 18.168.121.394) dari INV Management Pte. Ltd.

Perhitungan selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah sebagai berikut:

	ITSEC Services Asia Pte. Ltd.	ITSEC Australia Pty. Ltd.	Jumlah / Total	
Nilai buku aset bersih yang diakuisisi	8.451.526.003	(1.709.950.245)	6.741.575.758	Book value of net assets acquired
Persentase kepemilikan	100%	100%	100%	Percentage of ownership
Imbalan yang dialihkan	(59.575.874.908)	(18.168.121.394)	(77.743.996.302)	Consideration transferred
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(51.124.348.905)	(19.878.071.639)	(71.002.420.544)	Difference in value arising from restructuring transaction of entities under common control

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali ini disajikan sebagai tambahan modal disetor pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

d. Penerbitan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian ini telah diotorisasi untuk diterbitkan oleh Dewan Direksi Perusahaan, selaku pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyelesaian laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 5 Mei 2023.

1. GENERAL (continued)

c. Consolidated Subsidiaries

As of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the consolidated subsidiaries and the respective percentages of ownership by the Company are as follows:

Acquisition of Subsidiaries from Entity Under Common Control

In accordance with the Statement of Shareholders (Circular Resolution) dated January 30, 2023, the Company acquired ITSEC Services Asia Pte. Ltd. shares of 2,494,724 for the amount of US\$ 3,833,760 (equivalent to Rp 59,575,874,908) and ITSEC Australia Pty. Ltd. shares of 2,065,542 for the amount of US\$ 1,160,886 (equivalent to Rp 18,168,121,394) from INV Management Pte. Ltd.

The calculation of the difference in value arising from restructuring transaction of entities under common control is as follows:

The difference in value arising from restructuring transaction of entities under common control is presented as additional paid-in capital in the consolidated statements of financial position.

d. Issuance of the Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements have been authorized for issuance by the Board of Directors of the Company, as the party who is responsible for the preparation and completion of the consolidated financial statements on May 5, 2023.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN

a. Kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK)

Laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut "Grup") telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) dan Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI, serta Peraturan Regulator Pasar Modal yang berlaku, antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian konsisten dengan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian periode sebelumnya, kecuali untuk penerapan beberapa amendemen dan penyesuaian PSAK yang berlaku efektif 1 Januari 2023 dan 2022 telah diungkapkan dalam Catatan ini.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah. Mata uang fungsional entitas dalam Grup adalah sebagai berikut:

PT ITSEC Asia :
 ITSEC Services Asia Pte. Ltd. :
 ITSEC Australia Pty. Ltd. :

Untuk tujuan penyajian laporan keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas entitas anak pada tanggal pelaporan, dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah pada kurs penutupan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, sementara laba dan rugi telah dikonversi menggunakan kurs rata-rata nilai tukar masing-masing tahun. Hasil penyesuaian selisih translasi atas mata uang asing ditampilkan sebagai bagian ekuitas yang diakui pada penghasilan komprehensif lain.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Compliance with Financial Accounting Standards (SAK)

The consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries (hereafter referred to as the "Group") have been prepared and presented in accordance with Indonesian SAK, which comprise the Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretations of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK IAI) and Sharia Accounting Standards Board (DSAS) of IAI and applicable Capital Market regulations, among others Regulation No. VIII.G.7 concerning Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuer or Public Companies.

b. Basis of Preparation and Measurement of the Consolidated Financial Statements

The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, are prepared on accrual basis of accounting.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements in respect of the previous period, except for the adoption of several amendments and improvements to PSAK effective January 1, 2023 and 2022 as disclosed in this Note.

The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah. The functional currencies of the entities in the Group are as follows:

Rupiah Indonesia (IDR) / Indonesian Rupiah (IDR)
 Dolar Singapura (SGD) / Singapore Dollar (SGD)
 Dolar Australia (AUD) / Australian Dollar (AUD)

For presentation purposes of the consolidated financial statements, assets and liabilities of the subsidiaries at reporting date are translated into Rupiah at the closing rate at the date of the consolidated statement of financial position, while the income and expenses are translated at the average exchange rate for the respective years. The resulting difference from translation of foreign currency is shown as part of equity recognized in other comprehensive income.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan
Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Perlu dicatat bahwa estimasi dan asumsi akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, meskipun perkiraan ini didasarkan pada pengetahuan terbaik manajemen dan penilaian dari peristiwa dan tindakan saat ini, peristiwa yang sebenarnya mungkin akhirnya berbeda dengan estimasi. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area di mana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

c. Penerapan Amendemen dan Penyesuaian
PSAK

Grup menerapkan amendemen dan penyesuaian PSAK yang wajib diberlakukan mulai 1 Januari 2023 dan 2022. Penerapan amendemen dan penyesuaian PSAK ini tidak mengakibatkan perubahan substansial pada kebijakan akuntansi Grup dan tidak berpengaruh material terhadap jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya:

1 Januari 2023

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang";
- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi";
- Amendemen PSAK 16, "Aset Tetap - Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan";
- Amendemen PSAK 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Kesalahan tentang Definisi Estimasi Akuntansi";
- Amendemen PSAK 46, "Pajak Penghasilan atas Pajak Tanggahan terkait Aset dan Liabilitas yang timbul dari Transaksi Tunggal".

1 Januari 2022

- Amendemen PSAK 22, "Kombinasi Bisnis tentang Referensi ke Kerangka Konseptual";
- Amendemen PSAK 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak yang Merugi - Biaya Memenuhi Kontrak";
- PSAK 71 (Penyesuaian Tahunan 2020), "Instrumen Keuangan";
- PSAK 73 (Penyesuaian Tahunan 2020), "Sewa".

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

b. Basis of Preparation and Measurement of the
Consolidated Financial Statements (continued)

It should be noted that accounting estimates and assumptions used in the preparation of the consolidated financial statements, although these estimates are based on management's best knowledge and judgment of the current events and actions, actual events may ultimately differ from those estimates. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.

c. Adoption of Amendments and Improvements to
PSAK

The Group applied amendments and improvements to PSAK that are mandatory for application from January 1, 2023 and 2022. The application of these amendments and improvements to PSAK did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial periods:

January 1, 2023

- *Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Classification of Liabilities as Current or Non-Current";*
- *Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Disclosure of Accounting Policies";*
- *Amendments to PSAK 16, "Fixed Assets - Proceeds before Intended Use";*
- *Amendments to PSAK 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors on Definition of Accounting Estimates";*
- *Amendments to PSAK 46, "Income Tax on Deferred Tax related to Assets and Liabilities arising from a Single Transaction".*

January 1, 2022

- *Amendments to PSAK 22, "Business Combinations on Reference to the Conceptual Framework";*
- *Amendments to PSAK 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets on Onerous Contracts - Cost of Fulfilling the Contracts";*
- *PSAK 71 (Annual Improvements 2020), "Financial Instruments";*
- *PSAK 73 (Annual Improvements 2020), "Leases".*

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

d. Prinsip Konsolidasian

Seluruh transaksi antar Grup, saldo akun dan laba atau rugi yang belum direalisasi dari transaksi antar entitas telah dieliminasi.

Entitas Anak adalah seluruh entitas di mana Perusahaan memiliki pengendalian. Perusahaan mengendalikan *investee* ketika Perusahaan memiliki kekuasaan atas *investee*, eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan memiliki kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai sejak tanggal memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir ketika kehilangan pengendalian atas entitas anak. Penghasilan dan beban entitas anak dimasukkan atau dilepaskan selama tahun berjalan dalam laba rugi dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Rugi entitas anak yang tidak dimiliki secara penuh diatribusikan pada Kepentingan Non-pengendali (KNP) bahkan jika hal ini mengakibatkan KNP mempunyai saldo defisit.

Jika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak maka Perusahaan pada tanggal hilangnya pengendalian tersebut:

- Menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak pada nilai tercatatnya.
- Menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap KNP;
- Mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima dan distribusi saham (jika ada);
- Mengakui setiap sisa investasi pada entitas anak pada nilai wajarnya;
- Mereklasifikasi bagian Perusahaan atas komponen yang sebelumnya diakui sebagai penghasilan komprehensif lain ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, atau mengalihkan secara langsung ke saldo laba; dan
- Mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kepemilikan non-pengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset bersih dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan secara langsung maupun tidak langsung pada Grup, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Principles of Consolidation

Inter-company transactions, balances and unrealized gains or loss on transactions between companies in the group are eliminated.

Subsidiaries are all entities over which the Company has control. The Company controls the investee when the Company has power over the investee, is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee, and has the ability to use its power over the investee to affect its returns.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in profit or loss from the date the Company gains control until the date the Company ceases to control the subsidiary.

Losses of a non-wholly owned subsidiary are attributed to the Non-controlling Interests (NCI) even if such losses result in a deficit balance for the NCI.

If the Company loses control of a subsidiary, the Company on the date of loss of control:

- *Derecognizes the assets (include goodwill) and liabilities of the subsidiary at its carrying amount;*
- *Derecognizes the carrying amount of any NCI;*
- *Recognizes the fair value of the consideration received (if any);*
- *Recognizes the fair value of any investment retained;*
- *Reclassifies the Company's share of components previously recognized in other comprehensive income to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income or retained earnings, as appropriate; and*
- *Recognizes any surplus or deficit as gain or loss in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.*

Non-controlling interest represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiaries attributable to equity interests that are not owned directly or indirectly by the Group, which are presented in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statements of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to owners of the parent entity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

d. Prinsip Konsolidasian (lanjutan)

Transaksi dengan kepentingan non-pengendali yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas. Selisih antara nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan bagian relatif atas nilai tercatat aset bersih entitas anak yang diakuisisi dicatat di ekuitas. Laba atau rugi dari pelepasan kepada kepentingan non-pengendali juga dicatat di ekuitas.

e. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Sesuai dengan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", hanya transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali akan diperhitungkan oleh PSAK 38. Pelaporan entitas harus menentukan apakah substansi transaksi benar-benar kombinasi bisnis entitas sepengendali.

Aset dan liabilitas yang diakuisisi tidak disajikan kembali berdasarkan nilai wajar, melainkan Perusahaan yang mengakuisisi terus menganggap jumlah tercatat diakuisisi aset dan liabilitas ini menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Sesuai PSAK 38, metode penyatuan kepemilikan harus diterapkan mulai dari awal periode pelaporan atas kedua entitas (akuisisi dan pengakuisisi) adalah entitas sepengendali.

Selisih antara imbalan yang dialihkan dan nilai buku aset bersih yang diakuisisi akan disajikan sebagai bagian dari pengakuisisi Tambahan Modal Disetor dalam ekuitas.

Karena transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi pemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan. Aset atau liabilitas yang dialihkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan (*pooling-of interest*).

Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, komponen laporan keuangan konsolidasian untuk periode di mana terjadi restrukturisasi dan untuk periode lain yang disajikan untuk tujuan perbandingan, disajikan sedemikian rupa seolah-olah restrukturisasi telah terjadi sejak awal periode laporan keuangan yang disajikan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

d. Principles of Consolidation (continued)

Transactions with non-controlling interests that do not result in loss of control are accounted for as equity transactions. The difference between the fair value of any consideration paid and the relevant share acquired of the carrying value of net assets of the subsidiaries is recorded in equity. Gains or losses on disposals to non-controlling interests are also recorded in equity.

e. Business Combination of Entities Under
Common Control

In accordance with PSAK 38, "Business Combination of Entities Under Common Control", only business combination transaction of entities under common control will be accounted for using PSAK 38. The reporting entity must determine whether the substance of the transaction is indeed business combination of entities under common control.

Assets and liabilities of the acquiree are not restated to fair value instead the acquirer continues to assume the acquiree's carrying amount of those assets and liabilities using pooling-of-interest method. Under PSAK 38, the pooling-of-interest method must be applied starting from the beginning of the period the two entities (acquirer and acquiree) first came under common control.

The difference between the consideration transferred and book value of net assets acquired will be presented as part of the acquirer's Additional Paid-in Capital account in equity.

Since the restructuring transaction of entities under common control does not result in a change of the economic substance of the ownership of assets, liabilities, shares or other instrument of ownership which are exchanged, assets or liabilities transferred are recorded at book values as a business combination using the pooling-of-interest method.

In applying the pooling-of-interest method, the components of the consolidated financial statements for the period during which the restructuring occurred and for other periods presented in such a manner as if the restructuring has already happened since the beginning of the earlier period presented.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Berdasarkan PSAK 7, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi", pihak berelasi dianggap terkait jika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan (dengan cara kepemilikan langsung maupun tidak langsung) atau mempunyai pengaruh signifikan (dengan cara partisipasi dalam kebijakan keuangan dan operasional) selama pihak lain dalam membuat keputusan keuangan dan operasional.

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangan konsolidasiannya (entitas pelapor).

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Transaction with Related Parties

Based on PSAK 7, "Related Party Disclosures", related parties deemed related if one party has the ability to control (by way of ownership, directly or indirectly) or exercise significant influence (by way of participation in the financial and operating policies) over the other party in making financial and operating decisions.

Related party is a person or an entity related to the entity who prepares the consolidated financial statements (the reporting entity).

- a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent entity of the reporting entity.
- b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent entity, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
 - vii. A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi
(lanjutan)

viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 32 atas laporan keuangan konsolidasian.

g. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain.

Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI) dan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL). Klasifikasi aset keuangan pada pengakuan awal tergantung pada karakteristik arus kas kontraktual aset keuangan dan model bisnis Grup untuk mengelolanya. Grup pada awalnya mengukur aset keuangan pada nilai wajar ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan bukan pada FVTPL.

Untuk aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, aset keuangan harus menimbulkan arus kas yang 'semata dari pembayaran pokok dan bunga' (SPPI) dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana Grup mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh regulasi atau konvensi di pasar (perdagangan reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

f. Transaction with Related Parties (continued)

viii. The entity, a member of a group which the entity is part of the group, providing personnel services of the key management to the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.

All significant transactions and balances with related parties were disclosed in Note 32 to the consolidated financial statements.

g. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Financial Assets

Recognition and Measurement

Financial assets are classified at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income (FVOCI), and fair value through profit or loss (FVTPL). The classification of financial assets at initial recognition depends on the financial asset's contractual cash flow characteristics and the Group's business model for managing them. The Group initially measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at FVTPL.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest' (SPPI) on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the marketplace (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the asset.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

Pengakuan dan Pengukuran (lanjutan)

Grup hanya memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan dengan biaya perolehan diamortisasi. Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mengumpulkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dan mengalami penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi termasuk kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, aset kontrak dan aset lain-lain.

Penghentian Pengakuan

Pengakuan aset keuangan dihentikan jika dan hanya jika, (a) hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut berakhir; (b) Grup tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun telah menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga di bawah kesepakatan 'pass-through'; dan (c) Grup telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau Grup tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat aset, namun telah mentransfer pengendalian atas aset tersebut.

Di mana Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau pengendalian ditransfer dari aset, aset tersebut diakui apabila besar kemungkinannya Grup melanjutkan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat asli aset dan jumlah maksimum pembayaran Grup.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Assets (continued)

Recognition and Measurement (continued)

The Group only had financial assets classified at amortized cost. The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest rate (EIR) method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

The Group's financial assets at amortized cost include cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables, contract assets and other assets.

Derecognition

Financial assets are derecognized when and only when (a) the contractual rights to receive cash flows from the financial assets have expired; (b) the Group retains the right to receive cash flows from the asset, but have assumed an obligation to pay the received cash flow in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and (c) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset or the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but have transferred control of the asset.

Where the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor the transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran

Grup mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain.

Pada saat pengakuan awal, dalam hal liabilitas keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Setelah pengakuan awal, Grup mengukur seluruh akun liabilitas keuangan, pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Liabilitas keuangan Grup meliputi utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain, utang bank jangka pendek dan beban masih harus dibayar. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL.

Penghentian Pengakuan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas kontraktual telah dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika suatu liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru dan selisih antara jumlah tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset dan liabilitas keuangan dapat saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, jika dan hanya jika, 1) Grup saat ini memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum dengan entitas lain untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan 2) berniat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Financial Liabilities

Recognition and Measurement

Financial liabilities are recognized when the Group has contractual obligation to transfer cash or other financial assets to other entities.

Financial liabilities, which are not measured at fair value through profit or loss (FVTPL), are initially recognized at fair value plus transaction costs that are directly attributable to the liabilities.

Subsequently, the Group measures all of its financial liabilities, at amortized cost using effective interest method. The Group's financial liabilities include trade payables - third parties, other payables, short-term bank loan and accrued expenses. The Group has no financial liabilities measured at FVTPL.

Derecognition

Financial liabilities are derecognized when, and only when, the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

Where an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and the recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and liabilities can be offset and the net amount is presented in the consolidated statements of financial position, if and only if, 1) the Group currently has rights that can be enforced by law with other entities to offset the recognized amounts and 2) intends to settle on a net basis or to realize the asset and settle liability simultaneously.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

g. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Estimasi Nilai Wajar

Nilai wajar didefinisikan sebagai harga yang akan diterima untuk menjual aset atau dibayar untuk mengalihkan liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, dalam ketiadaan, paling tidak pasar menguntungkan dimana Grup memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Grup mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga yang dikutip di pasar aktif untuk instrumen tersebut. Jika tidak ada harga dikutip di pasar aktif, maka Grup menggunakan teknik penilaian yang memaksimalkan penggunaan input yang dapat diamati dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diamati.

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss/ECL*) atas aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. ECL adalah perkiraan kerugian kredit tertimbang probabilitas. Kerugian kredit diukur sebagai nilai sekarang dari semua kekurangan kas (yaitu, perbedaan antara arus kas yang jatuh tempo kepada Grup sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima Grup), didiskontokan dengan suku bunga efektif dari aset keuangan, dan mencerminkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya tentang peristiwa masa lalu, kondisi saat ini dan prakiraan kondisi ekonomi masa depan.

Grup mengakui penyisihan penurunan nilai berdasarkan ECL 12 bulan atau seumur hidup, tergantung pada apakah terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal.

Saat menentukan apakah risiko kredit aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal dan saat mengestimasi ECL, Grup mempertimbangkan informasi yang wajar dan dapat didukung yang relevan dan tersedia tanpa biaya atau upaya yang tidak semestinya. Ini mencakup informasi dan analisis kuantitatif dan kualitatif, berdasarkan pengalaman historis Grup dan penilaian kredit yang diinformasikan dan termasuk informasi yang bersifat perkiraan masa depan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

g. Financial Instruments (continued)

Estimation of Fair Value

Fair value is defined as the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Group has accessed at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.

When available, the Group measures the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument. If there is no quoted price in an active market, then the Group uses valuation techniques that maximize the use of relevant observable inputs and minimize the use of unobservable inputs.

h. Impairment of Financial Assets

The Group recognizes an allowance for expected credit losses (ECL) on financial assets measured at amortized cost. ECL is a probability weighted estimate of credit losses. Credit losses are measured as the present value of all cash shortages (i.e., the difference between the cash flows that are due to the Group in accordance with the contract and the cash flows that the Group is expected to receive), discounted at the effective interest rate of the financial asset, and reflect fair and reliable information available without undue cost or effort regarding past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.

The Group recognizes an allowance for impairment based on either 12-month or lifetime ECLs, depending on whether there has been a significant increase in credit risk since initial recognition.

When determining whether the credit risk of a financial asset has increased significantly since initial recognition and when estimating ECLs, the Group considers reasonable and supportable information that is relevant and available without undue cost or effort. This includes both quantitative and qualitative information and analysis, based on the Group's historical experience and informed credit assessment and including forward-looking information.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Grup mengakui ECL seumur hidup untuk piutang yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan. Grup menggunakan matriks provisi yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historis Grup, disesuaikan dengan faktor-faktor yang bersifat perkiraan masa depan yang spesifik untuk peminjam dan lingkungan ekonomi. Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah aset keuangan tersebut pada biaya perolehan diamortisasi mengalami penurunan nilai kredit. Aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit ketika satu atau lebih peristiwa yang berdampak merugikan pada estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi. Bukti aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit mencakup data yang dapat diobservasi tentang peristiwa berikut:

- a. kesulitan keuangan yang signifikan dari penerbit atau peminjam;
- b. pelanggaran kontrak, seperti wanprestasi atau peristiwa lewat jatuh tempo;
- c. pemberi pinjaman dari peminjam, karena alasan ekonomi atau kontrak yang berkaitan dengan kesulitan keuangan peminjam, setelah memberikan kepada peminjam sebuah konsesi yang tidak akan dipertimbangkan oleh pemberi pinjaman;
- d. terdapat kemungkinan bahwa peminjam akan dinyatakan pailit atau reorganisasi keuangan lainnya;
- e. hilangnya pasar aktif dari aset keuangan karena kesulitan keuangan; atau
- f. pembelian atau asal mula aset keuangan dengan diskon besar yang mencerminkan kerugian kredit yang terjadi.

Grup menganggap aset keuangan mengalami gagal bayar ketika pihak lawan gagal membayar kewajiban kontraktualnya, atau terdapat pelanggaran persyaratan kontraktual lainnya, seperti jaminan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

h. Impairment of Financial Assets (continued)

The Group recognizes lifetime ECLs for receivables that do not contain significant financing component. The Group uses provision matrix that is based on the Group's historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the borrowers and the economic environment. At each reporting date, the Group assesses whether these financial assets at amortized cost are credit-impaired. A financial asset is credit-impaired when one or more events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset have occurred. Evidence that a financial asset is credit-impaired includes observable data about the following events:

- a. significant financial difficulty of the issuer or the borrower;*
- b. a breach of contract, such as a default or past due event;*
- c. the lender(s) of the borrower, for economic or contractual reasons relating to the borrower's financial difficulty, having granted to the borrower a concession(s) that the lender(s) would not otherwise consider;*
- d. it is becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;*
- e. the disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties;*
or
- f. the purchase or origination of a financial asset at a deep discount that reflects the incurred credit losses.*

The Group considers a financial asset to be in default when a counterparty fails to pay its contractual obligations, or there is a breach of other contractual terms, such as covenants.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

h. Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Grup secara langsung mengurangi jumlah tercatat bruto dari aset keuangan ketika tidak ada ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual atas aset keuangan, baik sebagian atau seluruhnya. Hal ini umumnya terjadi ketika Grup menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber pendapatan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar kembali jumlah yang dikenakan penghapusan tersebut. Namun, aset keuangan yang dihapusbukkan masih dapat dikenakan aktivitas penegakan hukum untuk mematuhi prosedur Grup untuk pemulihan jumlah yang jatuh tempo. ECL atas aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi diakui sebagai cadangan kerugian penurunan nilai terhadap nilai tercatat bruto aset keuangan, dengan kerugian penurunan nilai (atau pembalikan) yang dihasilkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

i. Kas dan Bank

Kas terdiri dari kas dan kas di bank yang tidak digunakan sebagai jaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

j. Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Uang Muka

Uang muka pada awalnya dicatat sebesar biaya transaksi, dan selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

l. Aset Tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan, tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke kondisi dan lokasi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

h. Impairment of Financial Assets (continued)

The Group directly reduces the gross carrying amount of a financial asset when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows on a financial asset, either partially or in full. This is generally the case when the Group determines that the borrower does not have assets or sources of income that could generate sufficient cash flows to repay the amounts subject to the write-off. However, financial assets that are written off could still be subject to enforcement activities in order to comply with the Group's procedures for recovery of amounts due. The ECLs on financial assets at amortized cost are recognized as allowance for impairment losses against the gross carrying amount of the financial asset, with the resulting impairment losses (or reversals) recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

i. Cash on Hand and in Banks

Cash consists of cash on hand and cash in banks which are not used as collateral and are not restricted.

j. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial or contract periods using the straight-line method.

k. Advances

Advances are initially recorded at transaction cost, and subsequently recorded at cost less impairment loss, if any.

l. Fixed Assets

Fixed assets are carried at cost, excluding day to day maintenance, less accumulated depreciation and any impairment in value, if any.

The initial cost of fixed assets consists of its purchase price, including import duties and taxes that cannot be credited and any directly attributable costs in bringing the asset to its working condition and location for its intended use.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

I. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya. Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan dihitung berdasarkan metode garis lurus selama masa manfaat aset tetap, sebagai berikut:

	<u>Tahun / Years</u>
Peralatan kantor	3 - 4
Peralatan komputer	3 - 4

Aset dalam pembangunan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap. Aset dalam pembangunan akan direklasifikasi ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. Penyusutan mulai dibebankan pada tanggal aset tersebut siap digunakan.

Jumlah tercatat aset tetap ditelaah kembali untuk dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan jumlah tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Dalam setiap inspeksi yang signifikan, biaya yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap sebagai suatu penggantian apabila memenuhi kriteria pengakuan. Biaya inspeksi signifikan yang dikapitalisasi tersebut diamortisasi selama periode sampai dengan saat inspeksi signifikan berikutnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap (ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut), dan diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan dampak dari setiap perubahan estimasi akuntansi yang dicatat secara prospektif.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

I. Fixed Assets (continued)

Expenditures incurred after the fixed assets used in the operations, such as repairs and maintenance costs are charged to profit or loss as incurred. If these expenditures result in increase future economic benefits expected from the use of such fixed assets that can exceed the normal performance, then the expenditures are capitalized as additional costs of fixed assets.

Depreciation is computed on a straight-line basis over the useful lives, as follows:

	<u>Tarif / Rate</u>	
	33% - 25%	Office equipment
	33% - 25%	Computer equipment

Asset under construction is stated at cost and presented as part of fixed assets. Asset under construction will be transferred to the appropriate fixed assets account when construction is completed and the asset is ready for its intended use. Depreciation is charged when the asset is ready to use.

The carrying amounts of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying amounts may not be recoverable.

When each major inspection is performed, its cost is recognized in the carrying amount of the item of fixed asset as a replacement if the recognition criteria are satisfied. Such major inspection is capitalized and amortized over the period until the next major inspection activity.

An item of fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated depreciation and any impairment loss are eliminated from the accounts. Any gain or loss arising from derecognition of fixed asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying value of the item) is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

The assets' residual values, if any, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if required, at each financial year end with the effect of any changes in accounting estimate accounted for on a prospective basis.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

m. Aset Takberwujud

Aset takberwujud terdiri dari aset takberwujud yang berasal dari perangkat lunak. Aset takberwujud diakui jika Grup kemungkinan besar akan memperoleh manfaat ekonomis masa depan dari aset takberwujud tersebut dan biaya aset tersebut dapat diukur secara andal.

Aset takberwujud dicatat berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan penurunan nilai. Aset takberwujud diamortisasi berdasarkan estimasi masa manfaat. Grup harus mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali.

Aset takberwujud disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud 3 tahun. Periode amortisasi dan metode amortisasi aset takberwujud ditelaah setiap akhir periode. Jika perkiraan umur masa manfaat aset berbeda secara signifikan dengan estimasi sebelumnya, maka periode amortisasi disesuaikan.

Jumlah tercatat aset takberwujud dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset takberwujud yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset takberwujud berikut akumulasi amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset takberwujud tersebut. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset takberwujud ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset takberwujud tersebut, dan diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

n. Sewa

Grup menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu kontrak merupakan, atau mengandung, sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

m. Intangible Assets

Intangible assets consist of software. Intangible assets are recognized when the Group is most likely to have economic benefit in the future from these intangible assets and the cost incurred can be reliably measured.

Intangible assets are stated at cost less accumulated amortization and any impairment. Intangible assets are amortized over its estimated useful life. The Group must estimate recoverable amount of intangible assets. If the carrying amount of intangible assets exceeds the estimated recoverable amount, the carrying amount is written down immediately to its recoverable amount.

Intangible assets are amortized using straight-line method based on estimated useful life of 3 years. The period and method of amortization are reviewed at the end of each reporting period. If the estimated useful life is significantly different from the prior estimates, the period of amortization will be adjusted.

An item of intangible asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost and related accumulated amortization and any impairment loss are eliminated from the accounts. Any gains or loss arising from derecognition of intangible assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying value of the item) is included in profit or loss in the year the item is derecognized.

n. Leases

The Group determines at contract inception whether a contract is, or contains, a lease by assessing whether the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Sewa (lanjutan)

Aset Hak-Guna

Grup sebagai penyewa

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset yang mendasari tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa.

Biaya perolehan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang timbul, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima.

Kecuali jika Grup cukup yakin untuk memperoleh kepemilikan aset sewaan pada akhir masa sewa, aset hak-guna yang diakui disusutkan dengan metode garis lurus selama lebih pendek dari taksiran masa manfaat dan masa sewa, sebagai berikut:

Aset hak-guna - Bangunan

Aset hak-guna dapat mengalami penurunan nilai.

Liabilitas Sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar di bawah jaminan nilai sisa. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika jangka waktu sewa mencerminkan Grup melaksanakan opsi untuk mengakhiri.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Leases (continued)

Right-of-Use Assets

The Group as Lessee

The Group recognizes right-of-use (ROU) assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). ROU assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities.

The cost of ROU assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received.

Unless the Group is reasonably certain to obtain ownership of the leased asset at the end of the lease term, the recognized ROU assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of its estimated useful lives and the lease term, as follows:

Tahun / Years

2-3

ROU asset - Buildings

ROU assets are subject to impairment.

Lease Liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating a lease, if the lease term reflects the Group exercising the option to terminate.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

n. Sewa (lanjutan)

Liabilitas Sewa (lanjutan)

Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran tersebut. Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental penyewa pada tanggal dimulainya sewa jika tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan bertambahnya bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika terdapat modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa tetap secara substansi, atau perubahan penilaian untuk pembelian aset yang mendasarinya.

Sewa Jangka Pendek

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal mulai dan tidak mengandung opsi pembelian). Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek diakui sebagai beban dengan menggunakan metode garis lurus selama masa sewa.

o. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Aset yang dikenakan amortisasi dinilai untuk penurunan nilai apabila peristiwa atau perubahan keadaan terjadi yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai diakui untuk jumlah di mana jumlah tercatat aset melebihi jumlah terpulihkan. Jumlah terpulihkan adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Untuk tujuan menguji penurunan nilai, aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah diidentifikasi (unit penghasil kas). Aset non-keuangan mengalami penurunan yang ditelaah untuk kemungkinan pembalikan dari penurunan nilai tersebut pada setiap tanggal pelaporan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

n. Leases (continued)

Lease Liabilities (continued)

The variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expense in the period on which the event or condition that triggers the payment occurs. In calculating the present value of lease payments, the Group uses the incremental borrowing rate at the lease commencement date if the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liability is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liability is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the in-substance fixed lease payments or a change in the assessment to purchase the underlying asset.

Short-Term Leases

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). Lease payments on short-term leases are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

o. Impairment of Non-Financial Assets

Assets that are subject to amortization are assessed for impairment when events or changes in circumstances occur which indicate that the carrying amount may not be recoverable. Decline in value is recognized for the amount by which the asset's carrying amount exceeds the recoverable amount. Recoverable amount is the higher amount between the asset's fair value less cost to sell or value in use. For the purpose of assessing impairment, assets are grouped at the lowest levels for which there are separately identifiable cash flows (cash-generating units). Non-financial assets that suffered an impairment are reviewed for possible reversal of the impairment at each reporting date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

p. Imbalan Kerja

Pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022 dan 2021 Grup mengakui liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan sesuai dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 atau Undang-undang Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Pemutusan Hubungan Kerja. Pada tanggal 31 Desember 2020, Grup menyediakan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan kepada karyawannya sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak ada pendanaan yang dibuat untuk program imbalan pasti ini.

Liabilitas neto Grup atas program imbalan pasti dihitung dari nilai kini liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program, jika ada. Perhitungan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dilakukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dimana perhitungan aktuarial dilakukan setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan, meliputi a) keuntungan dan kerugian aktuarial, b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk bunga, dan c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk bunga, diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada saat terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Ketika program imbalan berubah atau terdapat kurtailmen atas program, bagian imbalan yang berubah terkait biaya jasa lalu, atau keuntungan atau kerugian kurtailmen, diakui di laba rugi pada saat terdapat perubahan atau kurtailmen atas program.

Grup menentukan (penghasilan) beban bunga neto atas (aset) liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan neto dengan menerapkan tingkat bunga diskonto pada awal periode pelaporan tahunan untuk mengukur liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan selama periode berjalan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

p. Employee Benefits

As of January 31, 2023, December 31, 2022 and 2021 the Group recognizes estimated liabilities for employee benefits in accordance with Company Regulation, Law No. 11 of 2020 or Job Creation Law and based on its implementing regulation, Government Regulation No. 35 of 2021 on Fixed Term Employment, Outsourcing, Working Hours and Rest Times and Termination. As of December 31, 2020, the Group provides estimated liabilities for employee benefits to their employees in accordance with Indonesian Labour Law No. 13/2003. No funding has been made to this defined benefit plan.

The Group's net obligation in respect of the defined benefit plan is calculated as the present value of the estimated liabilities for employee benefits at the end of the reporting period less the fair value of plan assets, if any. The estimated liabilities for employee benefits is determined using the Projected Unit Credit method with actuarial valuations being carried out at the end of each reporting period.

Remeasurements of estimated liabilities for employee benefits, comprise of a) actuarial gains and losses, b) the return of plan assets, excluding interest, and c) the effect of asset ceiling, excluding interest, are recognized immediately in the other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements are not reclassified to profit or loss in the subsequent periods.

When the benefits of a plan are changed, or when a plan is curtailed, the portion of the changed benefit related to past service of employees, or gain or loss on curtailment, is recognized immediately in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs.

The Group determines the net interest expense (income) on the net (asset) estimated liabilities for employee benefits for the period by applying the discount rate used to measure the liabilities for estimated liabilities for employee benefits at the beginning of the annual period.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

p. Imbalan Kerja (lanjutan)

Grup mengakui keuntungan dan kerugian atas penyelesaian liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada saat penyelesaian terjadi. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian merupakan selisih antara nilai kini liabilitas imbalan kerja karyawan yang ditetapkan pada tanggal penyelesaian dengan harga penyelesaian, termasuk setiap aset program yang dialihkan dan setiap pembayaran yang dilakukan secara langsung oleh Grup sehubungan dengan penyelesaian tersebut.

Grup mengakui (1) biaya jasa, yang terdiri dari biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, dan (2) beban atau pendapatan bunga bersih dalam laba rugi pada saat terjadinya.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Grup mengakui pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ketika atau selama Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan (yaitu aset) kepada pelanggan. Aset dialihkan ketika atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset tersebut.

Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi, Grup menentukan pada insepri kontrak apakah entitas memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu atau memenuhi kewajiban pelaksanaan pada suatu waktu tertentu. Jika entitas tidak memenuhi kewajiban pelaksanaan sepanjang waktu, maka kewajiban pelaksanaan dipenuhi pada suatu waktu tertentu.

Grup memenuhi kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatan sepanjang waktu, jika satu dari kriteria berikut terpenuhi:

- Pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan dari pelaksanaan Grup selama Grup melaksanakan kewajiban pelaksanaannya;
- Pelaksanaan Grup menimbulkan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan selama aset tersebut ditimbulkan atau ditingkatkan; atau
- Pelaksanaan Grup tidak menimbulkan suatu aset dengan penggunaan alternatif bagi Grup dan Grup memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas pelaksanaan yang telah diselesaikan sampai saat ini.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

p. Employee Benefits (continued)

The Group recognizes gains and losses on the settlement of estimated liabilities for employee benefits when the settlement occurs. The gain or loss on settlement is the difference between the present value of estimated liabilities for employee benefits being settled as determined on the date of settlement and the settlement price, including any plan assets transferred and any payment made directly by the Group in connection with the settlement.

The Group recognizes the (1) service costs, comprising of current service cost, past service cost, and any gain or loss on settlement, and (2) net interest expense or income immediately in profit or loss.

q. Revenue and Expense Recognition

Revenue from Contracts with Customers

The Group recognizes revenue from contracts with customers when or while the Group fulfills its performance obligations by transferring the promised goods or services (i.e., assets) to the customers. Assets are transferred when or while the customer gains control of the asset.

For each identified performance obligation, the Group determines at contract inception whether the entity fulfills a performance obligation over time or fulfills a performance obligation at a point in time. If the entity does not fulfill performance obligations over time, the performance obligations are fulfilled at a point in time.

The Group fulfills its performance obligations and recognizes revenue over time, if one of the following criteria is met:

- Customers simultaneously receive and consume the benefits provided by the Group as long as the Group carries out its implementation obligations;
- The Group's operations create or increase assets controlled by customers as long as those assets are generated or enhanced; or
- The Group does not give rise to an asset with alternative uses for the Group and the Group has the right to enforceable payments for the performance that has been completed to date.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
 (lanjutan)

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
 (lanjutan)

Grup telah menerapkan PSAK 72, "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan", yang mensyaratkan pengakuan pendapatan untuk memenuhi 5 (lima) langkah penilaian sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan;
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban kinerja adalah janji dalam kontrak untuk mentransfer barang atau jasa yang berbeda kepada pelanggan;
3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, dan Pajak Pertambahan Nilai, yang diharapkan menjadi hak entitas sebagai imbalan untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan;
4. Mengalokasikan harga transaksi untuk setiap kewajiban pelaksanaan atas dasar harga jual yang berdiri sendiri relatif dari setiap barang atau jasa yang berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika hal ini tidak dapat diobservasi secara langsung, harga jual yang berdiri sendiri relatif diestimasi berdasarkan biaya yang diharapkan ditambah margin; dan
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja dipenuhi dengan mentransfer barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan (yaitu ketika pelanggan memperoleh kendali atas barang atau jasa tersebut).

Grup menentukan apakah Grup merupakan prinsipal atau agen untuk masing-masing barang atau jasa tertentu yang dijanjikan kepada pelanggan. Grup secara umum menyimpulkan bahwa Grup adalah prinsipal dalam kontrak pendapatannya.

Pendapatan Jasa

Pendapatan dari jasa dan jasa lainnya diakui pada saat jasa atau barang yang diserahkan kepada pelanggan.

Saldo Kontrak

Piutang

Piutang merupakan hak Grup atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo).

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
 POLICIES (continued)

q. Revenue and Expense Recognition (continued)

Revenue from Contracts with Customers
 (continued)

The Group has adopted PSAK 72, "Revenue from Contracts with Customers", which requires revenue recognition to fulfill 5 (five) steps of assessment as follows:

1. Identify contract(s) with a customer;
2. Identify the performance obligations in the contract. Performance obligations are promises in a contract to transfer to a customer goods or services that are distinct;
3. Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and Value-Added Tax, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring the promised goods or services to a customer;
4. Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the relative stand-alone selling prices of each distinct goods or services promised in the contract. When these are not directly observable, the relative stand-alone selling price are estimated based on expected cost plus margin; and
5. Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring a promised goods or services to a customer (which is when the customer obtains control of those goods or services).

The Group determines whether the Group is the principal or agent for certain goods or services promised to customers. The Group has generally concluded that the Group is the principal in its revenue contracts.

Revenues from Services

Revenues from services and other services are recognized when the services or goods are delivered to customers.

Contract Balance

Receivables

A receivable represents the Group's right to an amount of consideration that is unconditional (i.e., only the passage of time is required before payment of the consideration is due).

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

**Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan
(lanjutan)**

Aset Kontrak

Aset kontrak adalah hal imbalan dalam pertukaran barang atau jasa yang dialihkan kepada pelanggan. Jika Grup melaksanakan dengan mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan sebelum pelanggan membayar imbalan atau sebelum pembayaran jatuh tempo, aset kontrak diakui untuk imbalan yang diperoleh yang bersyarat.

Liabilitas Kontrak

Liabilitas kontrak adalah kewajiban untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dimana Grup telah menerima imbalan (atau sejumlah imbalan yang jatuh tempo) dari pelanggan. Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Grup mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, liabilitas kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih dulu). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Grup melaksanakan kontrak.

Liabilitas kontrak juga mencakup pembayaran yang diterima Grup dari pelanggan yang pengakuan pendapatannya belum dimulai.

Pendapatan dari Sumber Lain di Luar Cakupan PSAK 72

Pendapatan bunga diakui sebagai pendapatan bunga dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan disajikan setelah dikurangi pajak final yang berlaku.

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

r. Pajak Penghasilan

Beban pajak penghasilan terdiri dari jumlah beban pajak kini dan pajak tangguhan.

Pajak diakui sebagai pendapatan atau beban dan termasuk dalam laba rugi untuk periode berjalan, kecuali pajak yang timbul dari transaksi atau kejadian yang diakui di luar laba rugi. Pajak terkait dengan pos yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan pajak terkait dengan pos yang diakui langsung di ekuitas, diakui langsung di ekuitas.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

q. Revenue and Expense Recognition (continued)

**Revenue from Contracts with Customers
(continued)**

Contract Assets

A contract asset is the right to consideration in exchange for goods or services transferred to the customer. If the Group performs by transferring goods or services to a customer before the customer pays consideration or before payment is due, a contract asset is recognized for the earned consideration that is conditional.

Contract Liabilities

A contract liability is the obligation to transfer goods or services to a customer for which the Group has received consideration (or an amount of consideration is due) from the customer. If a customer pays consideration before the Group transfers goods or services to the customer, a contract liability is recognized when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). Contract liabilities are recognized as revenue when the Group performs under the contract.

Contract liabilities also include payments received by the Group from the customers for which revenue recognition has not yet commenced.

Revenue from Other Source Outside the Scope of PSAK 72

Interest income is recognized as the interest accrues using effective interest method and presented net of applicable final tax.

Expense Recognition

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

r. Income Tax

Income tax expense represents the sum of the current tax and deferred tax.

Tax is recognized as income or an expense and included in profit or loss for the period, except to the extent that the tax arises from a transaction or event which is recognized outside profit or loss. Tax that relates to items recognized in other comprehensive income is recognized in other comprehensive income and tax that relates to items recognized directly in equity is recognized in equity.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

r. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini

Pajak terutang kini didasarkan pada laba kena pajak tahun berjalan. Liabilitas pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial berlaku pada akhir periode pelaporan.

Manajemen secara berkala mengevaluasi jumlah yang dilaporkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan terkait dengan keadaan di mana peraturan pajak yang berlaku memerlukan interpretasi dan jika diperlukan, manajemen akan menghitung provisi atas jumlah yang mungkin timbul.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer antara dasar pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal dan kredit pajak yang tidak terpakai sejauh realisasi atas manfaat pajak tersebut dimungkinkan. Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap akhir periode pelaporan dan diturunkan apabila itu tidak lagi kemungkinan jumlah laba fiskal memadai akan tersedia untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laba rugi, kecuali pajak tangguhan yang dibebankan atau dikreditkan langsung ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dapat saling hapus, jika dan hanya jika, (a) memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus antara aset dan liabilitas pajak kini dan (b) aset serta liabilitas pajak tangguhan tersebut terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama.

Perubahan atas liabilitas pajak dicatat ketika hasil pemeriksaan diterima atau, jika banding diajukan oleh Grup, ketika hasil banding telah ditentukan.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

r. Income Tax (continued)

Current Tax

The current tax payable is based on taxable profit for the year. The liability for current tax is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted by the end of the reporting period.

Management periodically evaluates the amount reported in the Annual Tax Return (SPT) in relation to the circumstances in which the applicable tax regulations are subject to interpretation and if necessary, the management will calculate the amount of fees that may arise.

Deferred Tax

Deferred tax is recognized using the liability method on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities with their carrying amount at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and for the carry forward of unused tax losses and unused tax credits to the extent the realization of such tax benefit is probable. The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the deferred tax assets to be utilized.

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Deferred tax is charged or credited in profit or loss, except when it relates to items charged or credited directly to equity, in which case the deferred tax is also charged or credited directly to equity.

Deferred tax assets and liabilities can be offset if, and only if, (a) there is a legally enforceable right to offset the current tax assets and liabilities and (b) the deferred tax assets and liabilities relate to the same taxable entity and the same taxation authority.

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed against by the Group, when the result of the appeal is determined.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN
(lanjutan)

s. Segmen Operasi

Segmen usaha dilaporkan secara konsisten dengan pelaporan internal yang diberikan kepada pengambil keputusan. Pengambil keputusan operasional bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya, menilai kerja segmen operasi dan membuat keputusan strategis.

t. Laba (Rugi) per Saham

Laba (rugi) per saham (LPS) dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Laba (rugi) per saham dilusian dihitung ketika Grup memiliki instrumen berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif.

Jika jumlah saham biasa atau efek berpotensi saham biasa naik dengan adanya penerbitan saham bonus (kapitalisasi agio saham), dividen saham (kapitalisasi laba) atau pemecahan saham, atau turun karena penggabungan saham (*reverse stock split*), maka perhitungan LPS/RPS dasar untuk seluruh periode sajian harus disesuaikan secara retrospektif.

u. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Laba atau rugi selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi. Aset non-moneter yang diukur pada nilai wajar dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal nilai wajar ditentukan. Selisih penjabaran akun ekuitas dan akun non-moneter serupa yang diukur pada nilai wajar diakui dalam komponen laba rugi.

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING
POLICIES (continued)

s. Operating Segments

Operating segments are reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker is responsible for allocating resources, assessing performance of the operating segments and making strategic decisions.

t. Earnings (Loss) per Share

Basic earnings (loss) per share (EPS) is computed by dividing net income (loss) with the weighted average number of shares outstanding during the period.

Diluted earnings (loss) per share is calculated when the Group has instruments which are dilutive potential ordinary shares.

If the number of common shares or convertible securities increases due to the issuance of bonus share (capitalization of additional paid-in capital), stock dividend (income capitalization) or stock split, or decrease due to reverse stock split, then basic EPS/LPS calculation for the period shall be adjusted retrospectively.

u. Foreign Currency Transactions and Balances

Transactions in foreign currency are translated into the functional currency using the exchange rates prevailing at the dates of the transactions. Foreign exchange gains and losses resulting from the settlement of such transactions and from the translation at year end exchange rates of monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are recognized in profit or loss. Non-monetary assets that are measured at fair value are translated using the exchange rate at the date that the fair value was determined. Translation differences on equities and similar non-monetary items measured at fair value are recognized in profit or loss.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing (lanjutan)

Pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan oleh Grup, sebagai berikut:

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
1 Dolar Amerika Serikat	14.979	15.731
1 Dolar Australia	10.612	10.581
1 Dolar Singapura	11.406	11.659

2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Foreign Currency Transactions and Balances (continued)

As of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the conversion rates used by the Group were the middle rates of Bank Indonesia, as follows:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	14.269	14.105	United States Dollar 1
	10.343	10.771	Australian Dollar 1
	10.533	10.644	Singapore Dollar 1

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah-jumlah pendapatan, beban, aset dan liabilitas yang dilaporkan serta pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada tiap-tiap akhir periode pelaporan.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi yang digunakan dalam mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian tersebut ditelaah secara berkala berdasarkan pengalaman historis dan berbagai faktor, termasuk ekspektasi dari kejadian-kejadian di masa depan yang mungkin terjadi. Namun, hasil aktual dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi. Ketidakpastian atas asumsi serta estimasi tersebut dapat menimbulkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas pada tahun berikutnya.

a. Pertimbangan

Pertimbangan-pertimbangan berikut dibuat oleh manajemen dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset dan liabilitas keuangan dengan menilai apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi aset dan liabilitas keuangan. Dengan demikian, aset dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup yang diungkapkan dalam Catatan 2g.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenue, expenses, assets and liabilities and the disclosure of contingent liabilities, at the reporting date.

The judgments, estimates and assumptions used in preparing the consolidated financial statements have been regularly reviewed based on historical experience and various factors, including expectation for future event that might occur. However, uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that could require a material adjustment to the carrying amount of the asset or liability affected in future periods.

a. Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and liabilities by judging if they meet the definition. Accordingly, the financial assets and liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclose in Note 2g.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

a. Pertimbangan (lanjutan)

Keberadaan Kontrak

Dokumen utama Grup untuk kontrak dengan pelanggan adalah pesanan pembelian yang disetujui dengan persyaratan yang diidentifikasi dengan jelas termasuk spesifikasi produk dan persyaratan pembayaran. Selain itu, bagian dari proses penilaian Grup sebelum pengakuan pendapatan adalah untuk menilai kemungkinan bahwa Grup akan mengumpulkan imbalan yang menjadi haknya untuk ditukar dengan barang yang dijual yang akan dialihkan kepada pelanggan.

Menentukan Apakah Suatu Kontrak Mengandung Sewa

Grup menggunakan pertimbangannya dalam menentukan apakah suatu kontrak berisi sewa. Saat dimulainya kontrak, Grup membuat penilaian apakah Grup berhak atas kontrak tersebut untuk memperoleh secara substansial semua manfaat ekonomi dari penggunaan aset yang diidentifikasi dan hak untuk mengarahkan penggunaan aset yang diidentifikasi.

b. Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun/periode berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penilaian untuk ECL

Grup membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada tingkat yang dianggap memadai untuk menyediakan kemungkinan piutang tak tertagih. Grup menggunakan matriks provisi untuk piutang usaha untuk menghitung ECL. Grup melakukan peninjauan berkala terhadap usia dan status akunnya, yang dirancang untuk mengidentifikasi akun yang mengalami penurunan nilai. Penilaian korelasi antara tingkat default yang diamati secara historis, perkiraan kondisi ekonomi dan ECL adalah perkiraan yang signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Jumlah tercatat dari piutang usaha diungkapkan pada Catatan 6 atas laporan keuangan konsolidasian.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

a. Judgments (continued)

Existence of a Contract

The Group's primary document for a contract with a customer is an approved purchase order with terms clearly identified including the product specification and payment terms. In addition, part of the assessment process of the Group before revenue recognition is to assess the probability that the Group will collect the consideration to which it will be entitled in exchange for the goods sold that will be transferred to the customer.

Determining whether a Contract Contains a Lease

The Group uses its judgment in determining whether a contract contains a lease. At inception of a contract, the Group makes an assessment whether it has the right to obtain substantially all the economic benefits from the use of the identified asset and the right to direct the use of the identified asset.

b. Estimates and Assumptions

The main assumptions related to the future and the main sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of material adjustments to the carrying value of assets and liabilities within the next year/period end are disclosed below. The Group's assumptions and estimates are based on reference available at the time the consolidated financial statements are prepared. Current condition and assumptions regarding future developments may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Group. These changes are reflected in the related assumptions as incurred.

Assessment for ECL

The Group maintains an allowance for impairment loss at a level considered adequate to provide for potential uncollectible receivables. The Group uses a provision matrix for trade receivables to calculate ECLs. The Group performs a regular review of the age and status of its accounts, designed to identify accounts for impairment. The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecasted economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The carrying amount of the trade receivables is disclosed in Note 6 to the consolidated financial statements.

3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Penyusutan Aset Tetap dan Aset Takberwujud

Biaya perolehan aset tetap dan aset takberwujud disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset selama 3 sampai 4 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri di mana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset dan, karenanya, biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Jumlah tercatat aset tetap dan aset takberwujud Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan pada Catatan 12 dan 14 atas laporan keuangan konsolidasian.

Estimasi Tingkat Suku Bunga Inkremental

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa. Oleh karena itu, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental yang relevan untuk mengukur liabilitas sewa.

Suku bunga pinjaman inkremental adalah suku bunga yang harus dibayar Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama dan dengan jaminan yang sama, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkungan ekonomi yang serupa. Oleh karena itu, suku bunga pinjaman inkremental mencerminkan jumlah yang harus dibayar Grup, yang memerlukan estimasi ketika tidak tersedia suku bunga yang dapat diobservasi dan untuk membuat penyesuaian untuk mencerminkan syarat dan ketentuan sewa. Grup mengestimasi kenaikan suku bunga pinjaman menggunakan input yang dapat diobservasi (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk mempertimbangkan kontrak tertentu dan estimasi spesifik entitas.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)

b. Estimates and Assumptions (continued)

Depreciation of Fixed Assets and Amortization of Intangible Assets

The acquisition costs of fixed assets and intangible assets are depreciated and amortized, respectively, using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of these assets to be within 3 to 4 years. These are the common life expectancies applied in the industry. Changes in the expected level of usage and technological developments may affect the economic useful lives and residual values of these assets and, therefore, future depreciation and amortization charges could be revised. The carrying amounts of the Group's fixed assets and intangible assets at the reporting date are disclosed in Notes 12 and 14 to the consolidated financial statements.

Estimating the Incremental Borrowing Rate

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the leases. Therefore, the Group uses its relevant incremental borrowing rate to measure lease liabilities.

The incremental borrowing rate is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. The incremental borrowing rate, therefore, reflects what the Group would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available and to make adjustments to reflect the terms and conditions of the lease. The Group estimates the incremental borrowing rate using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to consider certain contract and entity specific estimates.

**3. PERTIMBANGAN, ESTIMASI DAN ASUMSI
AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

b. Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan dan biaya imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pension, dan tingkat kematian. Hasil aktual yang berbeda dari asumsi yang ditetapkan Grup diperlakukan sesuai dengan kebijakan sebagaimana diatur dalam Catatan 2p atas laporan keuangan konsolidasian. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atau imbalan pasca kerja karyawan dan beban imbalan kerja.

Penjelasan lebih lanjut diungkapkan dalam Catatan 23 atas laporan keuangan konsolidasian.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan. Grup telah membukukan liabilitas untuk mengantisipasi hasil pemeriksaan pajak berdasarkan estimasi timbulnya tambahan pajak. Jika hasil pemeriksaan pajak berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah dibukukan, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

**4. PENYAJIAN KEMBALI PADA LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian terutama terkait penerapan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 telah disajikan kembali guna mencerminkan dampak penerapan retrospektif atas penerapan PSAK 38, dimana seolah-olah penggabungan tersebut terjadi sejak awal periode dimana entitas menjadi sepengendali.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS (continued)**

b. Estimates and Assumptions (continued)

Employee Benefits

The determination of the Group's estimated liabilities for employee benefits and employee benefits expenses is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuary and the Group's management in calculating such amounts. Those assumptions include, among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turnover rate, disability rate, retirement age, and mortality rate. Actual results that differ from the Group's assumptions are treated in accordance with the policies mentioned in Note 2p to the consolidated financial statements. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual result or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for employee benefits and employee benefits expense.

Further details are disclosed in Note 23 to the consolidated financial statements.

Income Tax

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain. The Group recognizes liabilities for anticipated tax audit issues based on estimates of whether additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

**4. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS**

The restatement of the consolidated financial statements is mainly related to the application of PSAK 38, "Business Combination of Entities Under Common Control".

The consolidated statements of financial position as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/ December 31, 2019, the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and consolidated statements of cash flows for the years ended December 31, 2021 and 2020 have been restated to reflect the impact of the retrospective application of PSAK 38, where as if the business combination has occurred since the beginning of the period in which the entities were under common control.

4. PENYAJIAN KEMBALI PADA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

4. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

"Efek Penyesuaian Proforma" yang dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian digunakan untuk menyajikan penyesuaian sebagai akibat penerapan PSAK 38 pada periode berjalan.

The "Effect of Proforma Adjustment" which was recorded in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income is used to present the adjustment as a result of the adoption of PSAK 38 in the current period.

Penyesuaian yang timbul dari penerapan PSAK 38 dalam laporan keuangan konsolidasian dirangkum dalam tabel berikut:

The adjustments that resulted from the application of PSAK 38 in the consolidated financial statements are summarized in the following tables:

<u>Laporan posisi keuangan konsolidasian</u>	<u>2021 (Disajikan sebelumnya As previously reported)</u>	<u>Penyesuaian / Adjustments</u>	<u>2021 (Disajikan kembali / As restated)</u>	<u>Consolidated statement of financial position</u>
Aset				Assets
Aset lancar				Current assets
Kas dan bank	6.928.434.305	3.168.132.356	10.096.566.661	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	8.619.338.408	4.790.905.614	13.410.244.022	Trade receivables
Piutang lain-lain	318.135.927	76.034.413	394.170.340	Other receivables
Aset kontrak	-	4.415.789.596	4.415.789.596	Contract assets
Biaya dibayar di muka	1.220.888.913	611.674.475	1.832.563.388	Prepaid expenses
Uang muka	23.290.389.929	1.788.554.457	25.078.944.386	Advances
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset pajak tangguhan	2.328.431.021	803.965.126	3.132.396.147	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	1.529.022.788	689.958.357	2.218.981.145	Fixed assets - net
Aset hak-guna - bersih	-	4.485.127.380	4.485.127.380	Right-of-use assets - net
Aset takberwujud - bersih	-	4.612.119.073	4.612.119.073	Intangible assets - net
Aset lain-lain	7.301.816.662	(3.816.013.293)	3.485.803.369	Other assets
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang usaha	10.149.680.775	2.703.764.796	12.853.445.571	Trade payables
Utang lain-lain	830.488.384	69.523.014.314	70.353.502.698	Other payables
Beban masih harus dibayar	1.351.954.388	5.358.280.721	6.710.235.109	Accrued expenses
Liabilitas kontrak	-	107.868.158	107.868.158	Contract liabilities
Utang pajak	5.956.505.859	2.420.760.663	8.377.266.522	Taxes payable
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	2.104.936.569	2.104.936.569	Current maturities of lease liabilities
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Utang pihak berelasi	36.439.190.646	(36.439.190.646)	-	Due to related parties
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	2.023.537.519	2.023.537.519	Lease liabilities, net of current maturities
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	10.244.702.210	268.205.925	10.512.908.135	Estimated liabilities for employee benefits
Defisiensi modal				Capital deficiency
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	(16.540.283.282)	(16.540.283.282)	Proforma equity from restructuring transaction of entities under common control
Defisit	(16.471.503.096)	(10.674.225.352)	(27.145.728.448)	Deficit
Penghasilan komprehensif lain	-	1.168.616.956	1.168.616.956	Other comprehensive income
Komponen ekuitas lainnya	399.038.787	(399.038.787)	-	Other equity component

4. PENYAJIAN KEMBALI PADA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)	2021 (Disajikan sebelumnya As previously reported)	Penyesuaian / Adjustments	2021 (Disajikan kembali / As restated)	4. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
<u>Laporan laba rugi dan Penghasilan komprehensif lain konsolidasian</u>				<u>Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income</u>
Pendapatan bersih	78.804.972.639	39.511.487.850	118.316.460.489	Net revenues
Beban pokok pendapatan	(14.853.267.732)	(50.372.025.287)	(65.225.293.019)	Cost of revenues
Beban umum dan administrasi	(51.940.822.731)	(3.316.928.975)	(55.257.751.706)	General and administrative expenses
Beban lain-lain - bersih	-	(2.731.154.181)	(2.731.154.181)	Other expenses - net
Pendapatan keuangan	-	1.020.026.512	1.020.026.512	Finance income
Beban keuangan	-	(462.506.337)	(462.506.337)	Finance costs
Pendapatan lain-lain	80.698.233	(80.698.233)	-	Other income
Beban lain-lain	(2.322.241.517)	2.322.241.517	-	Other expenses
Beban pajak penghasilan: Tangguhan	(2.378.724.085)	(190.841.618)	(2.569.565.703)	Income tax expense: Deferred
Efek penyesuaian proforma	-	9.606.646.446	9.606.646.446	Effect of proforma adjustment
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	(1.092.319.779)	1.032.117.134	(60.202.645)	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Pajak penghasilan terkait	240.310.351	(227.065.769)	13.244.582	Related income tax
<u>Laporan arus kas konsolidasian</u>				<u>Consolidated statement of cash flows</u>
Arus kas dari (untuk) aktivitas operasi	627.100.100	(6.189.194.435)	(5.562.094.335)	Cash flow from (for) operating activities
Arus kas dari (untuk) aktivitas investasi	800.624.056	(2.410.737.172)	(1.610.113.116)	Cash flow from (for) investing activities
Arus kas dari (untuk) aktivitas pendanaan	4.714.321.119	11.173.590.727	15.887.911.846	Cash flow from (for) financing activities
<u>Laporan posisi keuangan konsolidasian</u>	2020 (Disajikan sebelumnya As previously reported)	Penyesuaian / Adjustments	2020 (Disajikan kembali / As restated)	<u>Consolidated statement of financial position</u>
Aset				Assets
Aset lancar				Current assets
Kas dan bank	786.389.030	599.703.290	1.386.092.320	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	7.395.554.178	6.658.910.785	14.054.464.963	Trade receivables
Piutang lain-lain	209.253.026	73.997.088	283.250.114	Other receivables
Aset kontrak	-	671.757.120	671.757.120	Contract assets
Biaya dibayar di muka	916.705.883	342.650.086	1.259.355.969	Prepaid expenses
Uang muka	4.037.650.638	1.690.654.612	5.728.305.250	Advances
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset pajak tangguhan	4.466.844.755	1.221.872.513	5.688.717.268	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	953.852.387	481.016.884	1.434.869.271	Fixed assets - net
Aset hak-guna - bersih	-	6.273.042.675	6.273.042.675	Right-of-use assets
Aset takberwujud - bersih	-	6.918.178.609	6.918.178.609	Intangible assets - net
Aset lain-lain	9.292.000.534	(6.260.197.204)	3.031.803.330	Other assets

4. PENYAJIAN KEMBALI PADA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)	2020 (Disajikan sebelumnya As previously reported)	Penyesuaian / Adjustments	2020 (Disajikan kembali / As restated)	4. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
<u>Laporan posisi keuangan konsolidasian</u>				<u>Consolidated statement of financial position</u>
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang usaha	2.415.121.914	1.430.241.012	3.845.362.926	Trade payables
Utang lain-lain	1.350.093.266	50.230.854.135	51.580.947.401	Other payables
Beban masih harus dibayar	357.744.962	3.024.800.668	3.382.545.630	Accrued expenses
Liabilitas kontrak	-	155.902.349	155.902.349	Contract liabilities
Utang pajak	5.857.889.139	1.077.681.634	6.935.570.773	Taxes payable
Liabilitas sewa yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	2.191.637.869	2.191.637.869	Current maturities of lease liabilities
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Utang pihak berelasi	31.128.113.908	(31.128.113.908)	-	Due to related parties
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	-	3.671.742.219	3.671.742.219	Lease liabilities, net of current maturities
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	5.817.071.590	2.725.030.467	8.542.102.057	Estimated liabilities for employee benefits
Defisiensi modal				Capital deficiency
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	(7.585.358.405)	(7.585.358.405)	Proforma equity from restructuring transaction of entities under common control
Defisit	(22.755.232.563)	(7.087.358.386)	(29.842.590.949)	Deficit
Penghasilan komprehensif lain	-	1.215.575.019	1.215.575.019	Other comprehensive income
Komponen ekuitas lainnya	1.251.048.215	(1.251.048.215)	-	Other equity component
<u>Laporan laba rugi dan Penghasilan komprehensif lain konsolidasian</u>				<u>Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income</u>
Pendapatan bersih	48.763.290.040	24.755.886.273	73.519.176.313	Net revenues
Beban pokok pendapatan	(14.352.693.664)	(40.749.076.275)	(55.101.769.939)	Cost of revenues
Beban umum dan administrasi	(39.709.571.093)	2.733.891.897	(36.975.679.196)	General and administrative expenses
Beban lain-lain - bersih	-	(2.070.439.454)	(2.070.439.454)	Other expenses - net
Pendapatan keuangan	-	3.333.465.859	3.333.465.859	Finance income
Beban keuangan	-	(376.570.124)	(376.570.124)	Finance costs
Pendapatan lain-lain	424.663.118	(424.663.118)	-	Other income
Beban lain-lain	(1.423.583.656)	1.423.583.656	-	Other expenses
Beban pajak penghasilan: Tanggihan	413.793.896	1.871.590.818	2.285.384.714	Income tax expense: Deferred
Efek penyesuaian proforma	-	5.261.282.019	5.261.282.019	Effect of proforma adjustment
Pengukuran kembali liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	346.474.502	(95.775.793)	250.698.709	Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits
Pajak penghasilan terkait	(76.224.390)	21.070.674	(55.153.716)	Related income tax
<u>Laporan arus kas konsolidasian</u>				<u>Consolidated statement of cash flows</u>
Arus kas dari (untuk) aktivitas operasi	(7.156.012.008)	3.963.778.137	(3.192.233.871)	Cash flow from (for) operating activities
Arus kas dari (untuk) aktivitas investasi	(3.045.781.352)	545.564.614	(2.500.216.738)	Cash flow from (for) investing activities
Arus kas dari (untuk) aktivitas pendanaan	10.529.851.888	(4.515.398.151)	6.014.453.737	Cash flow from (for) financing activities

4. PENYAJIAN KEMBALI PADA LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)	2019 (Disajikan sebelumnya As previously reported)	Penyesuaian / Adjustments	2019 (Disajikan kembali / As restated)	4. RESTATEMENT OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)
<u>Laporan posisi keuangan konsolidasian</u>				<u>Consolidated statement of financial position</u>
Aset				Assets
Aset lancar				Current assets
Kas dan bank	458.330.502	593.672.532	1.052.003.034	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	4.185.769.142	1.799.755.215	5.985.524.357	Trade receivables
Aset kontrak	-	563.340.822	563.340.822	Contract assets
Biaya dibayar di muka	1.211.012.424	454.230.245	1.665.242.669	Prepaid expenses
Uang muka	49.334.143	515.936.867	565.271.010	Advances
Aset tidak lancar				Non-current assets
Aset pajak tangguhan	4.129.275.250	(670.788.980)	3.458.486.270	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	885.454.881	328.465.350	1.213.920.231	Fixed assets - net
Aset takberwujud - bersih	-	5.157.413.190	5.157.413.190	Intangible assets - net
Aset lain-lain	6.843.461.115	(5.039.119.546)	1.804.341.569	Other assets
Liabilitas				Liabilities
Liabilitas jangka pendek				Current liabilities
Utang usaha	2.104.937.458	30.096.035	2.135.033.493	Trade payables
Utang lain-lain	304.425.663	38.292.425.705	38.596.851.368	Other payables
Beban masih harus dibayar	140.906.812	1.040.238.579	1.181.145.391	Accrued expenses
Liabilitas kontrak	-	94.921.926	94.921.926	Contract liabilities
Utang pajak	3.045.943.817	1.577.698.522	4.623.642.339	Taxes payable
Liabilitas jangka panjang				Non-current liabilities
Utang pihak berelasi	21.644.926.794	(21.644.926.794)	-	Due to related parties
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	3.971.781.307	1.234.860.874	5.206.642.181	Estimated liabilities for employee benefits
Defisiensi modal				Capital deficiency
Proforma ekuitas dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	(14.115.331.137)	(14.115.331.137)	Proforma equity from restructuring transaction of entities under common control
Defisit	(16.871.131.204)	(2.846.309.937)	(19.717.441.141)	Deficit
Komponen ekuitas lainnya	980.798.103	(980.798.103)	-	Other equity component
Penghasilan komprehensif lain	-	1.020.030.026	1.020.030.026	Other comprehensive income

5. KAS DAN BANK

Akun ini terdiri dari:

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Kas	27.316.866	27.316.866
Kas di bank		
Rupiah		
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.227.073.958	2.372.703.553
PT Bank Raya Indonesia Tbk	297.720.486	10.280.754.892
PT Bank UOB Indonesia	274.641.782	188.198.820
PT Bank Victoria Internasional Tbk	106.411.595	22.829.029
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat	34.067.976	2.685.976
PT Bank DBS Indonesia	28.994.614	29.544.614
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	22.154.220	2.251.263
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	15.751.235	16.339.836
PT Bank CIMB Niaga Tbk	7.118.485	6.040.131
PT Bank Permata Tbk	4.286.334	4.326.334
PT Bank Pan Indonesia Tbk	4.069.181	3.718.712
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	3.577.546	3.602.546
PT Bank Mayapada Internasional Tbk	2.770.000	2.880.000
PT Bank ICBC Indonesia	2.563.187	2.593.187
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.562.223	2.775.669
PT Bank Central Asia Tbk	2.471.759	64.550.093
PT Bank Mega Tbk	1.980.428	2.017.321
PT Bank Mandiri Taspen	1.935.950	1.970.950
PT Bank Commonwealth	1.925.185	1.935.185
PT Bank Danamon Tbk	1.881.518	1.936.518
PT Bank OCBC NISP Tbk	1.823.846	1.873.846
PT Bank Sinarmas Tbk	1.725.000	-
PT Allo Bank Indonesia Tbk	1.406.560	45.843.167
PT Bank QNB Indonesia Tbk	854.293	884.293
PT Bank Maybank Internasional Tbk	-	-
Sub-jumlah	2.049.767.361	13.062.255.935

5. CASH ON HAND AND IN BANKS

This account consists of:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	15.001.209	3.591.215	Cash on hand
			Cash in banks
			Rupiah
	665.646.195	649.236.739	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	1.803.691	2.564.853	PT Bank Raya Indonesia Tbk
	101.853.189	3.771.301	PT Bank UOB Indonesia
	1.834.223	2.185.902	PT Bank Victoria Internasional Tbk
			PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat
	586.354	950.000	PT Bank DBS Indonesia
	9.941.612	27.442.570	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	-	-	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
	15.239.244	15.317.540	PT Bank CIMB Niaga Tbk
	94.027.123	2.915.645	PT Bank Permata Tbk
	2.431.584	2.566.824	PT Bank Pan Indonesia Tbk
	1.973.193	-	PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk
	3.698.000	-	PT Bank Mayapada Internasional Tbk
	2.156.000	2.888.000	PT Bank ICBC Indonesia
	2.812.940	2.994.384	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
	5.959.170.571	2.760.605	PT Bank Central Asia Tbk
	1.622.893	2.062.893	PT Bank Mega Tbk
	2.650.918	1.760.848	PT Bank Mandiri Taspen
	2.656.734	2.546.479	PT Bank Commonwealth
	2.055.185	2.218.185	PT Bank Danamon Tbk
	1.695.277	14.354.378	PT Bank OCBC NISP Tbk
	573.846	173.846	PT Bank Sinarmas Tbk
	-	-	PT Allo Bank Indonesia Tbk
	-	-	PT Bank QNB Indonesia Tbk
	2.410.258	3.285.637	PT Bank Maybank Internasional Tbk
	36.594.066	40.801.186	Sub-total
	6.913.433.096	782.797.815	

5. KAS DAN BANK (lanjutan)

5. CASH ON HAND AND IN BANKS (continued)

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Kas di bank (lanjutan)					Cash in banks (continued)
Dolar Singapura					Singapore Dollar
PT Bank UOB					PT Bank UOB
Indonesia	467.858.498	184.303.257	-	-	Indonesia
PT Bank CIMB					PT Bank CIMB
Niaga Tbk	308.634.722	908.804.360	-	-	Niaga Tbk
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	-	-	2.157.705.599	364.196.500	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Sub-jumlah	<u>776.493.220</u>	<u>1.093.107.617</u>	<u>2.157.705.599</u>	<u>364.196.500</u>	Sub-total
Dolar Amerika Serikat					United States Dollar
PT Bank UOB					PT Bank UOB
Indonesia	413.241.059	78.742.088	-	-	Indonesia
PT Bank CIMB					PT Bank CIMB
Niaga Tbk	356.735.525	800.715.403	-	-	Niaga Tbk
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	-	-	15.186.762	188.890.979	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Sub-jumlah	<u>769.976.584</u>	<u>879.457.491</u>	<u>15.186.762</u>	<u>188.890.979</u>	Sub-total
Dolar Australia Commonwealth Bank of Australia	105.047.474	61.835.364	995.239.995	46.615.811	Australian Dollar Commonwealth Bank of Australia
Jumlah	<u>3.728.601.505</u>	<u>15.123.973.273</u>	<u>10.096.566.661</u>	<u>1.386.092.320</u>	Total

Pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat saldo kas dan bank yang ditempatkan kepada pihak berelasi.

As of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there are no cash on hand and in banks placed with related parties.

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE RECEIVABLES

Akun ini terdiri dari:

This account consists of:

a. Berdasarkan pihak

a. Based on parties

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Pihak ketiga					Third parties
PT Bringin Inti Teknologi	12.933.477.130	12.933.477.136	-	-	PT Bringin Inti Teknologi
PT Indosat Tbk	3.181.413.302	3.181.413.302	1.926.903.000	936.909.864	PT Indosat Tbk
PT PGAS Telekomunikasi Nusantara	2.912.378.415	2.912.378.415	-	-	PT PGAS Telekomunikasi Nusantara
Kementerian Pertahanan	1.907.900.599	-	-	-	Ministry of Defense
Saldo terbawa	20.935.169.446	19.027.268.853	1.926.903.000	936.909.864	Balance carried forward

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

a. Berdasarkan pihak (lanjutan)

a. Based on parties (continued)

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Saldo bawaan	20.935.169.446	19.027.268.853	1.926.903.000	936.909.864	Balance brought forward
Energy Power Systems Australia	833.258.469	796.696.395	212.124.408	-	Energy Power Systems Australia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	667.417.418	204.411.375	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Pan Indonesia Tbk	646.336.350	93.186.720	438.131.320	-	PT Bank Pan Indonesia Tbk
Singapore Airlines Limited	527.767.669	482.787.531	412.363.964	-	Singapore Airlines Limited
Allianz Insurance Singapore Pte Ltd	517.581.218	1.277.523.266	95.806.730	534.147.852	Allianz Insurance Singapore Pte Ltd
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	500.150.000	-	-	1.170.350.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
State Bank of India	494.949.730	505.884.010	-	-	State Bank of India
Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited	297.665.665	770.659.900	290.937.598	62.971.501	Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited
Fujitsu Asia Pte Ltd	123.195.600	164.671.716	901.710.400	-	Fujitsu Asia Pte Ltd
Allianz Ayudhya General Insurance Public Company Limited	96.024.126	500.019.533	-	-	Allianz Ayudhya General Insurance Public Company Limited
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	-	1.000.000.000	1.000.000.000	-	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank BTPN Tbk	-	832.500.000	943.250.000	896.626.500	PT Bank BTPN Tbk
Vetassess	-	832.185.069	-	-	Vetassess
Capitol Health Limited	-	528.415.140	165.545.376	1.692.727.276	Capitol Health Limited
PT Hutchison 3 Indonesia	-	-	2.655.861.858	2.337.664.247	PT Hutchison 3 Indonesia
Philip Morris Products S A	-	-	554.035.730	828.241.572	Philip Morris Products S A
Allianz SE, Singapore Branch	-	-	-	603.621.240	Allianz SE, Singapore Branch
PT SRC Indonesia Sembilan	-	-	-	505.387.764	PT SRC Indonesia Sembilan
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 500.000.000)	5.273.630.555	6.235.479.551	3.959.542.278	4.717.149.580	Others (each below Rp 500,000,000)
Jumlah - pihak ketiga	30.913.146.246	33.251.689.059	13.556.212.662	14.285.797.396	Total - third parties
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang usaha	661.691.466	672.184.566	145.968.640	231.332.433	Less allowance for impairment of trade receivables
Sub-jumlah	30.251.454.780	32.579.504.493	13.410.244.022	14.054.464.963	Sub-total
Pihak berelasi (Catatan 32)					Related party (Note 32)
ITSEC Thailand Co. Ltd.	832.688.186	867.231.397	284.123.048	-	ITSEC Thailand Co. Ltd.
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang usaha	832.688.186	867.231.397	284.123.048	-	Less allowance for impairment of trade receivables
Sub-jumlah	-	-	-	-	Sub-total
Bersih	30.251.454.780	32.579.504.493	13.410.244.022	14.054.464.963	Net

6. PIUTANG USAHA (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Rupiah	22.930.614.163	23.678.577.513
Dolar Singapura	7.848.460.873	7.842.834.415
Dolar Australia	966.759.396	2.597.508.528
Jumlah	31.745.834.432	34.118.920.456
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang usaha	1.494.379.652	1.539.415.963
Bersih	30.251.454.780	32.579.504.493

c. Berdasarkan umur

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Belum jatuh tempo	7.004.472.570	28.998.985.813
Lewat jatuh tempo		
1 - 30 hari	22.287.191.025	2.474.568.802
31 - 60 hari	1.002.148.274	1.293.389.642
61 - 90 hari	506.322.425	303.584.577
Lebih dari 90 hari	945.700.138	1.048.391.622
Jumlah	31.745.834.432	34.118.920.456
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang usaha	1.494.379.652	1.539.415.963
Bersih	30.251.454.780	32.579.504.493

Mutasi cadangan penurunan nilai piutang usaha sebagai berikut:

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Saldo awal	1.539.415.963	430.091.688
Penambahan (Catatan 30)	83.158.578	1.109.324.275
Penghapusan	(128.194.889)	-
Saldo akhir	1.494.379.652	1.539.415.963

Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan penurunan nilai piutang usaha cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang.

Pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, telah menjaminkan sebagian piutang usahanya sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari PT Bank Raya Indonesia Tbk (lihat Catatan 19).

6. TRADE RECEIVABLES (continued)

b. Based on currency

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Rupiah	8.619.338.408	7.395.554.178	Rupiah
Dolar Singapura	4.715.951.502	4.802.737.250	Singapore Dollar
Dolar Australia	505.045.800	2.087.505.968	Australian Dollar
Jumlah	13.840.335.710	14.285.797.396	Total
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang usaha	430.091.688	231.332.433	Less allowance for impairment of trade receivables
Bersih	13.410.244.022	14.054.464.963	Net

c. Based on aging

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Belum jatuh tempo	12.852.855.642	12.283.184.513	Not yet due
Lewat jatuh tempo			Past due
1 - 30 hari	317.926.654	674.338.811	1 - 30 days
31 - 60 hari	151.553.330	1.090.163.002	31 - 60 days
61 - 90 hari	102.285.140	136.062.252	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	415.714.944	102.048.818	More than 90 days
Jumlah	13.840.335.710	14.285.797.396	Total
Dikurangi cadangan penurunan nilai piutang usaha	430.091.688	231.332.433	Less allowance for impairment of trade receivables
Bersih	13.410.244.022	14.054.464.963	Net

Movement in the allowance for impairment of trade receivables is as follows:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Saldo awal	231.332.433	-	Beginning balance
Penambahan (Catatan 30)	345.413.769	231.332.433	Additions (Note 30)
Penghapusan	(146.654.514)	-	Write-off
Saldo akhir	430.091.688	231.332.433	Ending balance

Management believes that the allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover possible losses which might arise from uncollectible receivables.

As of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, certain trade receivables were pledged as collateral to obtain loan from PT Bank Raya Indonesia Tbk (see Note 19).

7. PIUTANG LAIN-LAIN

a. Berdasarkan pihak

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Pihak ketiga Karyawan	546.893.275	464.581.609
Pihak berelasi (Catatan 32) ITSEC Thailand Co. Ltd.	-	84.154.662
StoneTree Cyber Security Ventures Pte. Ltd.	-	53.421.538
Sub-jumlah	-	137.576.200
Jumlah	546.893.275	602.157.809

b. Berdasarkan mata uang

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Rupiah	546.893.275	461.845.825
Dolar Singapura	-	140.311.984
Jumlah	546.893.275	602.157.809

Piutang lain-lain tidak dikenakan bunga dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih, sehingga, tidak terdapat penyisihan penurunan nilai atas piutang lain-lain.

Pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat piutang lain-lain yang dijadikan sebagai jaminan atas utang bank.

8. ASET KONTRAK

Akun ini merupakan tagihan pelanggan berdasarkan kontrak yang timbul pada saat Grup memenuhi kewajiban pelaksanaannya sejalan dengan kontrak yang telah disepakati. Grup mengakui aset kontrak untuk setiap pekerjaan yang dilakukan. Jumlah yang sebelumnya diakui sebagai aset kontrak direklasifikasi ke piutang usaha pada saat ditagih kepada pelanggan. Pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, saldo aset kontrak masing-masing sebesar Rp 10.732.984.691, Rp 8.259.710.289, Rp 4.415.789.596 dan Rp 671.757.120.

7. OTHER RECEIVABLES

a. Based on parties

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	318.135.928	206.421.722	Third party Employees
	76.034.412	76.828.392	Related parties (Note 32) ITSEC Thailand Co. Ltd. StoneTree Cyber Security Ventures Pte. Ltd.
	-	-	
Sub-total	76.034.412	76.828.392	Sub-total
Jumlah	394.170.340	283.250.114	Total

b. Based on currency

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	318.135.928	209.253.026	Rupiah
	76.034.412	73.997.088	Singapore Dollar
Jumlah	394.170.340	283.250.114	Total

Other receivables are non-interest bearing and can be collected at any time.

Management believes that all other receivables are collectible, therefore, no allowance for impairment of other receivables is provided.

As of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there are no other receivables pledged as collateral for bank loan.

8. CONTRACT ASSETS

This account represents customer's billing under contracts that arise when the Group satisfies its performance obligations in line with agreed contracts. The Group recognized a contract asset for any work performed. Any amount previously recognized as a contract asset is reclassified to trade receivables at the point at which it is invoiced to the customer. As of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the balance of contract assets amounted to Rp 10,732,984,691, Rp 8,259,710,289, Rp 4,415,789,596 and Rp 671,757,120, respectively.

9. BIAYA DIBAYAR DI MUKA

Akun ini terdiri dari:

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Asuransi	3.151.674.571	1.666.517.568	1.002.356.663	618.858.769	Insurance
luran keanggotaan	264.973.203	293.774.271	261.187.264	145.652.496	Memberships
Sewa	237.847.577	813.778.672	569.019.461	494.844.704	Rent
Jumlah	3.654.495.351	2.774.070.511	1.832.563.388	1.259.355.969	Total

10. UANG MUKA

Akun ini terdiri dari:

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Proyek	21.678.090.530	21.187.926.711	24.415.373.104	5.642.632.003	Project
Operasional	1.800.314.940	1.528.254.016	663.571.282	85.673.247	Operational
Jumlah	23.478.405.470	22.716.180.727	25.078.944.386	5.728.305.250	Total

Uang muka proyek merupakan biaya-biaya yang terjadi sehubungan dengan pekerjaan yang sedang diselesaikan oleh Grup.

9. PREPAID EXPENSES

This account consists of:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	1.002.356.663	618.858.769	Insurance
	261.187.264	145.652.496	Memberships
	569.019.461	494.844.704	Rent
Total	1.832.563.388	1.259.355.969	

10. ADVANCES

This account consists of:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	24.415.373.104	5.642.632.003	Project
	663.571.282	85.673.247	Operational
Total	25.078.944.386	5.728.305.250	

Project advance represents costs incurred in connection with ongoing projects completed by the Group.

11. BIAYA DITANGGUHKAN

Akun ini merupakan biaya-biaya yang ditanggung oleh Grup sehubungan dengan rencana untuk melakukan penawaran umum saham perdana, yang meliputi biaya audit, penjamin emisi, biro administrasi efek, konsultan hukum, notaris dan lain-lain. Pada tanggal 31 Januari 2023, saldo biaya ditangguhkan sebesar Rp 3.996.000.000.

11. DEFERRED CHARGES

This account represents expenses incurred by the Group in relation to its plan to conduct an initial public offering of shares, which include fees for audit, underwriter, securities administration bureau, legal consultants, notary and others. As of January 31, 2023, the balance of deferred charges amounted to Rp 3,996,000,000.

12. ASET TETAP

Rincian dan mutasi aset tetap adalah sebagai berikut:

12. FIXED ASSETS

The details and movements of fixed assets are as follows:

31 Januari 2023 / January 31, 2023						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Penyesuaian Terkait Translasi Mata Uang Asing / Adjustment due to Foreign Currency Translation	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Peralatan komputer	5.895.095.080	292.057.600	-	(21.744.846)	6.165.407.834	Computer equipment
Peralatan kantor	931.190.274	-	-	1.317.760	932.508.034	Office equipment
Aset dalam pembangunan	1.812.920.000	779.430.000	-	-	2.592.350.000	Asset under construction
Jumlah	8.639.205.354	1.071.487.600	-	(20.427.086)	9.690.265.868	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Peralatan komputer	3.186.328.522	78.180.871	-	-	3.264.509.393	Computer equipment
Peralatan kantor	582.268.291	12.039.007	-	787.519	595.094.817	Office equipment
Jumlah	3.768.596.813	90.219.878	-	787.519	3.859.604.210	Total
Nilai Buku Bersih	4.870.608.541				5.830.661.658	Net Book Value

12. ASET TETAP (lanjutan)

12. FIXED ASSETS (continued)

31 Desember 2022 / December 31, 2022						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Penyesuaian Terkait Translasi Mata Uang Asing / Adjustment due to Foreign Currency Translation	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Peralatan komputer	4.239.791.780	1.588.771.760	-	66.531.540	5.895.095.080	Computer equipment
Peralatan kantor	720.379.579	225.671.355	-	(14.860.660)	931.190.274	Office equipment
Aset dalam pembangunan	-	1.812.920.000	-	-	1.812.920.000	Asset under construction
Jumlah	<u>4.960.171.359</u>	<u>3.627.363.115</u>	<u>-</u>	<u>51.670.880</u>	<u>8.639.205.354</u>	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Peralatan komputer	2.252.223.681	949.504.342	-	(15.399.501)	3.186.328.522	Computer equipment
Peralatan kantor	488.966.533	93.301.758	-	-	582.268.291	Office equipment
Jumlah	<u>2.741.190.214</u>	<u>1.042.806.100</u>	<u>-</u>	<u>(15.399.501)</u>	<u>3.768.596.813</u>	Total
Nilai Buku Bersih	<u>2.218.981.145</u>				<u>4.870.608.541</u>	Net Book Value
31 Desember 2021 / December 31, 2021						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Penyesuaian Terkait Translasi Mata Uang Asing / Adjustment due to Foreign Currency Translation	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Peralatan komputer	2.706.211.123	1.538.025.533	-	(4.444.876)	4.239.791.780	Computer equipment
Peralatan kantor	661.482.738	72.087.583	-	(13.190.742)	720.379.579	Office equipment
Jumlah	<u>3.367.693.861</u>	<u>1.610.113.116</u>	<u>-</u>	<u>(17.635.618)</u>	<u>4.960.171.359</u>	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Peralatan komputer	1.558.428.845	705.900.176	-	(12.105.340)	2.252.223.681	Computer equipment
Peralatan kantor	374.395.745	114.570.788	-	-	488.966.533	Office equipment
Jumlah	<u>1.932.824.590</u>	<u>820.470.964</u>	<u>-</u>	<u>(12.105.340)</u>	<u>2.741.190.214</u>	Total
Nilai Buku Bersih	<u>1.434.869.271</u>				<u>2.218.981.145</u>	Net Book Value
31 Desember 2020 / December 31, 2020						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Penyesuaian Terkait Translasi Mata Uang Asing / Adjustment due to Foreign Currency Translation	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Peralatan komputer	2.009.826.595	686.676.609	-	9.707.919	2.706.211.123	Computer equipment
Peralatan kantor	456.521.204	189.174.710	-	15.786.824	661.482.738	Office equipment
Jumlah	<u>2.466.347.799</u>	<u>875.851.319</u>	<u>-</u>	<u>25.494.743</u>	<u>3.367.693.861</u>	Total
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Peralatan komputer	1.028.885.008	537.739.717	-	(8.195.880)	1.558.428.845	Computer equipment
Peralatan kantor	223.542.560	150.853.185	-	-	374.395.745	Office equipment
Jumlah	<u>1.252.427.568</u>	<u>688.592.902</u>	<u>-</u>	<u>(8.195.880)</u>	<u>1.932.824.590</u>	Total
Nilai Buku Bersih	<u>1.213.920.231</u>				<u>1.434.869.271</u>	Net Book Value

Untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, beban penyusutan aset tetap dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 90.219.878, Rp 74.305.921, Rp 1.042.806.100, Rp 820.470.964 dan Rp 688.592.902 (lihat Catatan 29).

For the one-month periods ended January 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, depreciation expense of fixed assets charged to general and administrative expenses amounted to Rp 90,219,878, Rp 74,305,921, Rp 1,042,806,100, Rp 820,470,964 and Rp 688,592,902, respectively (see Note 29).

12. ASET TETAP (lanjutan)

Aset dalam pembangunan merupakan instalasi sarana dan prasana kantor. Persentase penyelesaian aset dalam pembangunan pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing telah mencapai 90% dan 60%. Manajemen memperkirakan aset dalam pembangunan tersebut akan diselesaikan pada bulan April 2023.

Pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, aset tetap Grup tidak diasuransikan.

Pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, terdapat aset tetap tertentu berupa peralatan kantor dan peralatan komputer yang sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang operasional Grup dengan biaya perolehan masing-masing Rp 1.860.133.991, Rp 1.858.933.991, Rp 1.067.824.967 dan Rp 296.722.000.

Pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang dipakai sementara, dihentikan dari penggunaan aktif dan tidak diklasifikasikan sebagai tersedia untuk dijual.

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, manajemen telah mengkaji ulang taksiran masa manfaat dari aset tetap dan hasilnya telah sesuai. Masa manfaat dihitung berdasarkan periode estimasi dimana Grup akan menerima manfaat ekonomi di masa depan dengan mempertimbangkan perubahan keadaan atau peristiwa yang tidak terduga.

Pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang dijadikan sebagai jaminan atas utang bank.

13. ASET HAK-GUNA

Rincian dan mutasi aset hak-guna adalah sebagai berikut:

31 Januari 2023 / January 31, 2023						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Penyesuaian Terkait Translasi Mata Uang Asing / Adjustment due to Foreign Currency Translation	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Bangunan	14.101.765.529	-	-	(133.565.729)	13.968.199.800	Buildings
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Amortization
Bangunan	7.242.397.217	299.224.209	-	(94.701.878)	7.446.919.548	Buildings
Nilai Buku Bersih	6.859.368.312				6.521.280.252	Net Book Value

12. FIXED ASSETS (continued)

Asset under construction represents installation of office leasehold improvement. Percentage of completion of asset under construction as of January 31, 2023 and December 31, 2022 has reached 90% and 60%, respectively. Management estimates that asset under construction will be completed in April 2023.

As of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group's fixed assets are not insured.

As of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there are certain fixed assets in the form of office equipment and computer equipment which have been fully depreciated but are still being used to support the Group's operations with acquisition costs of Rp 1,860,133,991, Rp 1,858,933,991, Rp 1,067,824,967 and Rp 296,722,000. respectively.

As of January 31, 2023, December 31 2022, 2021 and 2020 there are no fixed assets that are used temporarily, terminated from active use nor classified as available for sale.

Based on management's review, there is no event or change in circumstances that indicated an impairment in value of fixed assets as of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020.

As of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the management has reviewed the estimated useful lives of fixed assets and has found them to be appropriate. The useful lives are based on the estimated period over which future economic benefits will be received by the Group, taking into account any unexpected adverse changes in circumstances or events.

As of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there are no fixed assets pledged as collateral for bank loan.

13. RIGHT-OF-USE ASSETS

The details and movements of right-of-use assets are as follows:

13. ASET HAK-GUNA (lanjutan)

13. RIGHT-OF-USE ASSETS (continued)

31 Desember 2022 / December 31, 2022						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Penyesuaian Terkait Translasi Mata Uang Asing / Adjustment due to Foreign Currency Translation	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Bangunan	9.499.479.049	4.861.513.765	(900.036.154)	640.808.869	14.101.765.529	Buildings
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Amortization
Bangunan	5.014.351.669	2.776.978.023	(835.317.045)	286.384.570	7.242.397.217	Buildings
Nilai Buku Bersih	4.485.127.380				6.859.368.312	Net Book Value
31 Desember 2021 / December 31, 2021						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Penyesuaian Terkait Translasi Mata Uang Asing / Adjustment due to Foreign Currency Translation	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Bangunan	8.754.223.541	839.792.119	-	(94.536.611)	9.499.479.049	Buildings
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Amortization
Bangunan	2.481.180.866	2.554.005.750	-	(20.834.947)	5.014.351.669	Buildings
Nilai Buku Bersih	6.273.042.675				4.485.127.380	Net Book Value
31 Desember 2020 / December 31, 2020						
	Saldo Awal / Beginning Balance	Penyesuaian atas penerapan PSAK 73 / Adjustment due to adoption of PSAK 73	Penambahan / Additions	Penyesuaian Terkait Translasi Mata Uang Asing / Adjustment due to Foreign Currency Translation	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost
Bangunan	-	370.650.331	8.383.573.210	-	8.754.223.541	Buildings
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Amortization
Bangunan	-	-	2.481.180.866	-	2.481.180.866	Buildings
Nilai Buku Bersih	-				6.273.042.675	Net Book Value

Grup mengakui aset hak-guna untuk sewa gedung kantor. Sewa berjalan untuk jangka waktu 2 sampai 3 tahun.

The Group recognized right-of-use assets for leases of office building. The leases run for a period of 2 to 3 years.

Untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, beban penyusutan aset hak-guna yang dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 299.224.209, Rp 231.414.835, Rp 2.776.978.023, Rp 2.554.005.750 dan Rp 2.481.180.866 (lihat Catatan 29).

For the one-month periods ended January 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, depreciation expense of right-of-use assets charged to general and administrative expenses amounted to Rp 299,224,209, Rp 231,414,835, Rp 2,776,978,023, Rp 2,554,005,750 and Rp 2,481,180,866, respectively (see Note 29).

14. ASET TAKBERWUJUD

Rincian dan mutasi aset takberwujud adalah sebagai berikut:

		31 Januari 2023 / January 31, 2023					
		Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance		
Biaya Perolehan						Acquisition Cost	
Perangkat lunak		6.918.178.609	-	-	6.918.178.609	Software	
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization	
Perangkat lunak		4.612.119.072	192.171.629	-	4.804.290.701	Software	
Nilai Buku Bersih		2.306.059.537			2.113.887.908	Net Book Value	
		31 Desember 2022 / December 31, 2022					
		Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance		
Biaya Perolehan						Acquisition Cost	
Perangkat lunak		6.918.178.609	-	-	6.918.178.609	Software	
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization	
Perangkat lunak		2.306.059.536	2.306.059.536	-	4.612.119.072	Software	
Nilai Buku Bersih		4.612.119.073			2.306.059.537	Net Book Value	
		31 Desember 2021 / December 31, 2021					
		Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Saldo Akhir / Ending Balance		
Biaya Perolehan						Acquisition Cost	
Perangkat lunak		6.918.178.609	-	-	6.918.178.609	Software	
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization	
Perangkat lunak		-	2.306.059.536	-	2.306.059.536	Software	
Nilai Buku Bersih		6.918.178.609			4.612.119.073	Net Book Value	
		31 Desember 2020 / December 31, 2020					
		Saldo Awal / Beginning Balance	Penambahan / Additions	Pengurangan / Deductions	Reklasifikasi / Reclassification	Saldo Akhir / Ending Balance	
Biaya Perolehan						Acquisition Cost	
Perangkat lunak		-	-	-	6.918.178.609	6.918.178.609	Software
Perangkat lunak dalam pengembangan		5.157.413.190	1.760.765.419	-	(6.918.178.609)	-	Software in development
Jumlah		5.157.413.190	1.760.765.419	-	-	6.918.178.609	Total
Akumulasi Amortisasi						Accumulated Amortization	
Perangkat lunak		-	-	-	-	-	Software
Nilai Buku Bersih		5.157.413.190				6.918.178.609	Net Book Value

Untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, beban penyusutan dibebankan pada beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 192.171.629, Rp 192.171.628, Rp 2.306.059.536, Rp 2.306.059.536 dan nihil (lihat Catatan 29).

Berdasarkan hasil penelaahan manajemen, tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

14. INTANGIBLE ASSETS

The details and movements of intangible assets are as follows:

For the one-month periods ended January 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, depreciation expenses charged to general and administrative expense amounted to Rp 192,171,629, Rp 192,171,628, Rp 2,306,059,536, Rp 2,306,059,536, and nil, respectively (see Note 29).

Based on management's review, there is no event or change in circumstances that indicated an impairment in value of intangible assets as of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020.

14. ASET TAKBERWUJUD (lanjutan)

Pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat aset takberwujud yang dijadikan sebagai jaminan atas utang bank.

15. UANG MUKA INVESTASI

Berdasarkan Nota Kesepahaman untuk Pembelian dan Penjualan Saham yang dilakukan oleh dan antara Perusahaan dan INV Management Pte. Ltd., pihak berelasi, pada tanggal 1 Oktober 2022, Perusahaan setuju untuk membeli seluruh saham yang dimiliki oleh INV Management Pte. Ltd. pada ITSEC Services Asia Pte. Ltd. dan ITSEC Australia Pty. Ltd.

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah yang telah dibayar di muka oleh perusahaan kepada INV Management Pte. Ltd. untuk mengakuisisi Perusahaan diatas adalah sebesar Rp 65.625.490.346.

Sesuai dengan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham tanggal 30 Januari 2023, Perusahaan telah menyelesaikan akuisisi ITSEC Services Asia Pte. Ltd. dan ITSEC Australia Pty. Ltd.

16. ASET LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Bank garansi	2.779.979.202	2.942.655.966
Jaminan deposit	1.786.073.374	1.805.759.260
Jumlah	4.566.052.576	4.748.415.226

Bank garansi merupakan jaminan yang diberikan kepada pelanggan terkait dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan.

Jaminan deposit merupakan uang deposit atas sewa kantor dan penggunaan telepon.

17. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA

Akun ini terdiri dari:

a. Berdasarkan pemasok

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Nextron Systems GmbH	1.539.625.604	-
PT Virtus Technology Indonesia	424.180.908	3.033.391.527
CV Bounga Solusi Informatika	354.989.100	354.989.100
Next Gen Distribution Pty Ltd	236.273.675	268.524.618
Atos (Australia) Pty Ltd	193.874.240	-
PT Westcon International Indonesia	151.165.684	151.165.684
Saldo terbawa	2.900.109.211	3.808.070.929

14. INTANGIBLE ASSETS (continued)

As of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there are no intangible assets pledged as collateral for bank loan.

15. ADVANCE FOR INVESTMENTS

Based on the Memorandum of Understanding for the Purchase and Sale of Shares entered into by and between the Company and INV Management Pte. Ltd., related party, on October 1, 2022, the Company agreed to buy all of the shares owned by INV Management Pte. Ltd. in ITSEC Services Asia Pte. Ltd. and in ITSEC Australia Pty. Ltd.

As of December 31, 2022, the amount paid in advance by the Company to INV Management Pte. Ltd. to acquire the above companies amounted to Rp 65,625,490,346.

In accordance with the Shareholders Circular Resolution dated January 30, 2023, the Company completed the acquisition of ITSEC Services Asia Pte. Ltd. and ITSEC Australia Pty. Ltd.

16. OTHER ASSETS

This account consists of:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	2.358.095.909	2.094.033.500	Bank guarantee
	1.127.707.460	937.769.830	Refundable deposits
Jumlah	3.485.803.369	3.031.803.330	Total

Bank guarantee represents guarantee given to customers related to the ongoing projects.

Refundable deposits represents security deposits for office rent and phone usage.

17. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES

This account consists of:

a. Based on suppliers

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	886.425.566	-	Nextron Systems GmbH
	3.152.864.000	-	PT Virtus Technology Indonesia
	-	-	CV Bounga Solusi Informatika
	-	-	Next Gen Distribution Pty Ltd
	-	-	Atos (Australia) Pty Ltd
	151.165.684	-	PT Westcon International Indonesia
Saldo terbawa	4.190.455.250	-	Balance carried forward

17. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA (lanjutan)

a. Berdasarkan pemasok (lanjutan)

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Saldo bawaan	2.900.109.211	3.808.070.929
PT Tacyber Solusi Indonesia	125.250.000	-
Secureworks Inc.	108.622.074	412.315.433
PT SAS Insititute	-	3.892.553.056
M.Tech Products Pty Ltd	-	445.174.413
BlueChip Infotech Pty Ltd	-	363.192.825
KnowBe4 Inc	-	174.197.119
EMT Distribution Pty Ltd	-	121.512.204
Spirent Communications (Asia) Limited	-	109.373.078
Checkmarx Inc	-	-
Forward Defense Equipment & Services LLC	-	-
ISEC Sp. zo.o	-	-
StraightUp Consultants Pty Ltd	-	-
Darktrace Ltd	-	-
Illumio	-	-
Paladion Networks Private Limited	-	-
Jumlah	3.133.981.285	9.326.389.057

b. Berdasarkan mata uang

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Dolar Singapura	1.539.625.604	283.570.197
Rupiah	1.164.207.766	7.844.414.800
Dolar Australia	430.147.915	1.198.404.060
Jumlah	3.133.981.285	9.326.389.057

c. Berdasarkan umur

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Belum jatuh tempo	2.139.766.165	5.086.468.783
Lewat jatuh tempo		
1 - 30 hari	-	2.445.356.828
31 - 60 hari	124.570.363	-
61 - 90 hari	76.300.000	322.549.953
Lebih dari 90 hari	793.344.757	1.472.013.493
Jumlah	3.133.981.285	9.326.389.057

17. TRADE PAYABLES - THIRD PARTIES (continued)

a. Based on suppliers (continued)

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	4.190.455.250	-	Balance brought forward
	-	-	PT Tacyber Solusi Indonesia
	239.609.086	1.647.926.029	Secureworks Inc.
	6.104.196.279	-	PT SAS Insititute
	437.406.384	935.395.083	M.Tech Products Pty Ltd
	23.925.672	60.780.753	BlueChip Infotech Pty Ltd
	110.470.058	59.276.436	KnowBe4 Inc
	-	-	EMT Distribution Pty Ltd
	-	-	Spirent Communications (Asia) Limited
	914.319.598	487.463.268	Checkmarx Inc
	351.540.648	-	Forward Defense Equipment & Services LLC
	247.696.476	-	ISEC Sp. zo.o
	131.420.520	-	StraightUp Consultants Pty Ltd
	102.405.600	159.949.350	Darktrace Ltd
	-	295.987.080	Illumio
	-	198.584.927	Paladion Networks Private Limited
Total	12.853.445.571	3.845.362.926	

b. Based on currency

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Dolar Singapura	2.510.452.346	546.739.704	Singapore Dollar
Rupiah	9.647.835.049	1.647.926.029	Rupiah
Dolar Australia	695.158.176	1.650.697.193	Australian Dollar
Total	12.853.445.571	3.845.362.926	

c. Based on aging

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
	9.397.223.256	2.753.781.347	Not yet due
	2.636.797.581	820.694.495	Past due
	-	8.088.822	1 - 30 days
	701.942.936	201.381.728	31 - 60 days
	117.481.798	61.416.534	61 - 90 days
	-	-	More than 90 days
Total	12.853.445.571	3.845.362.926	

Pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 31 Desember 2021 dan 2020, tidak terdapat jaminan sehubungan dengan utang usaha di atas.

As of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, there is no collateral regarding the above trade payables.

18. UTANG LAIN-LAIN

18. OTHER PAYABLES

a. Berdasarkan pihak

a. Based on parties

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
<u>Pihak ketiga</u>					<u>Third parties</u>
The Inspira	1.005.194.870	1.365.666.815	456.553.128	-	The Inspira
PT Lippo General Insurance Tbk	895.158.000	-	-	-	PT Lippo General Insurance Tbk
PT Profindo Karya Utama	836.496.000	-	-	-	PT Profindo Karya Utama
Radius Suharta	317.255.736	184.204.918	-	-	Radius Suharta
BPJS Tenaga Kerja	255.485.759	255.485.759	-	-	BPJS Tenaga Kerja
PT Grab Indonesia	201.189.625	-	-	-	PT Grab Indonesia
Nasoetion & Atyanto	183.150.000	-	-	-	Nasoetion & Atyanto
JW Marriot	143.990.000	143.990.000	-	-	JW Marriot
PT Optimal Tata Mandiri	143.761.650	103.785.000	230.679.180	-	PT Optimal Tata Mandiri
Venture Haven Pte. Ltd.	125.328.709	21.988.874	-	-	Venture Haven Pte. Ltd.
Infinity Consulting Pte. Ltd.	121.963.644	-	-	-	Infinity Consulting Pte. Ltd.
Infinity Assurance LLP	112.107.996	-	-	-	Infinity Assurance LLP
PT Empat Kosong Delapan Indonesia	109.335.000	-	-	-	PT Empat Kosong Delapan Indonesia
PT Marsh Indonesia	-	-	533.852.067	553.956.939	PT Marsh Indonesia
TenTen Partners Pte. Ltd.	-	-	249.097.498	-	TenTen Partners Pte. Ltd.
AsiaCloud Solution Private Limited	-	-	125.575.814	86.099.316	AsiaCloud Solution Private Limited
PT Asuransi Alianz Life Indonesia	-	-	-	421.861.179	PT Asuransi Alianz Life Indonesia
PT Chitalex Peni Oliver James Associates	-	-	-	295.036.560	PT Chitalex Peni Oliver James Associates
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	404.751.137	1.001.276.169	1.064.926.563	726.386.356	Others (each below Rp 100,000,000)
Sub-jumlah	<u>4.855.168.126</u>	<u>3.076.397.535</u>	<u>2.660.684.250</u>	<u>2.350.738.918</u>	Sub-total
<u>Pihak berelasi</u>					<u>Related parties</u>
INV Management Pte. Ltd.	2.828.407.365	55.977.682.924	42.928.706.263	35.746.017.766	INV Management Pte. Ltd.
Dannacher Holdings LLC	-	75.036.870.000	-	-	Dannacher Holdings LLC
StoneTree Cyber Security Ventures Pte. Ltd.	-	15.980.044.032	22.827.514.921	11.527.892.893	StoneTree Cyber Security Ventures Pte. Ltd.
Marek Bialoglowy	-	50.000.000	987.842.020	997.635.320	Marek Bialoglowy
PT StoneTree Intellectual Property	-	45.000.000	-	-	PT StoneTree Intellectual Property
Numisec Pte. Ltd.	-	-	515.112.600	520.491.600	Numisec Pte. Ltd.
StoneTree International Limited	-	-	287.051.500	290.049.000	StoneTree International Limited
PT Numisec International Indonesia	-	-	146.591.144	148.121.904	PT Numisec International Indonesia
Sub-jumlah	<u>2.828.407.365</u>	<u>147.089.596.956</u>	<u>67.692.818.448</u>	<u>49.230.208.483</u>	Sub-total
Jumlah	<u>7.683.575.491</u>	<u>150.165.994.491</u>	<u>70.353.502.698</u>	<u>51.580.947.401</u>	Total

18. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

b. Berdasarkan mata uang

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Rupiah	6.069.160.657	122.011.170.425
Dolar Australia	1.380.343.194	22.838.716.472
Dolar Singapura	234.071.640	5.316.107.594
Jumlah	7.683.575.491	150.165.994.491

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn No. 66-67 tanggal 26 Januari 2023, Dannacher Holdings LLC menandatangani Perjanjian Jual Beli Piutang untuk mengalihkan hak atas piutangnya dari Perusahaan kepada MB Investment Management Pte Ltd dan INV Management Pte. Ltd., sebesar Rp 92.477.518.375.

Berdasarkan Akta Notaris No. 68-84 tanggal 26 Januari 2023 dari Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, StoneTree Cyber Security Ventures Pte. Ltd. menandatangani Perjanjian Jual Beli Piutang untuk mengalihkan hak atas piutangnya dari Perusahaan kepada manajemen dan karyawan tertentu Grup, sebesar Rp 12.312.426.500.

Pada tanggal 27 Januari 2023 StoneTree Cyber Security Venture Pte. Ltd. mengadakan beberapa Perjanjian Pengalihan Piutang dengan beberapa anggota manajemen dan karyawan Grup untuk mengalihkan haknya atas piutangnya dari Perusahaan sebesar Rp 2.007.348.775.

Berdasarkan Akta Notaris Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn No. 97 tanggal 30 Januari 2023, seluruh kreditur baru Perusahaan di atas beserta INV Management Pte. Ltd. mengonversi piutangnya menjadi saham Perusahaan (lihat Catatan 24).

Perusahaan menandatangani perjanjian pinjaman dengan beberapa pihak berelasi. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga dan dapat dibayarkan sewaktu-waktu.

Pinjaman dari pihak berelasi digunakan untuk modal kerja Grup.

Berikut adalah rincian utang lain-lain yang dikonversi menjadi modal saham:

Pihak-Pihak Berelasi / Related Parties	Utang lain-lain / Other payables	Pemegang saham / Shareholders	Utang lain-lain dikonversi menjadi modal saham / Other payables converted into share capital
Dannacher Holdings LLC	49.284.698.525	INV Management Pte. Ltd.	49.284.698.525
Dannacher Holdings LLC	43.192.819.850	MB Investment Management PTE. LTD	43.192.819.850
Sub-jumlah / Sub-total	92.477.518.375	Sub-jumlah / Sub-total	92.477.518.375
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	4.024.379.925	Matthew Owen Marsden	4.024.379.925
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	1.105.546.575	MB Investment Management PTE. LTD	1.105.546.575
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	950.000.000	Bambang Susilo	950.000.000
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	950.000.000	Andri Utama Putra	950.000.000
Saldo terbawa / Balance carried forward	7.029.926.500	Saldo terbawa / Balance carried forward	7.029.926.500

18. OTHER PAYABLES (continued)

b. Based on currency

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Rupiah	39.401.283.041	34.546.481.632	Rupiah
Dolar Australia	15.267.019.919	10.275.738.649	Australian Dollar
Dolar Singapura	15.685.199.738	6.758.727.120	Singapore Dollar
Jumlah	70.353.502.698	51.580.947.401	Total

Based on Notarial Deeds No. 66-67 dated January 26, 2023 of Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, Dannacher Holdings LLC entered into Sale and Purchase Agreement of Receivables to transfer its right over its receivables from the Company to MB Investment Management Pte Ltd and INV Management Pte. Ltd., amounting Rp 92,477,518,375.

Based on Notarial Deeds No. 68-84 dated January 26, 2023 of Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, StoneTree Cyber Security Ventures Pte. Ltd. entered into Sale and Purchase Agreement of Receivables to transfer its right over its receivables from the Company to certain members of management and employees of the Group, which amounted to Rp 12,312,426,500.

On January 27, 2023 StoneTree Cyber Security Venture Pte. Ltd. entered into several Receivables Transfer Agreements with certain members of management and employees of the Group to transfer its rights over its receivables from the Company which amounted to Rp 2,007,348,775.

Based on Notarial Deed No. 97 dated January 30, 2023 of Dr. Sugih Haryati, SH., M.Kn, all of the Company's new creditors above along with INV Management Pte. Ltd. converted their receivables to Company's shares (see Note 24).

The Company entered into loan agreements with certain related parties. The loans bear no interest and repayable on demand.

Loans from related parties were used by the Group for working capital purposes.

The following are details of other payables converted into share capital:

18. UTANG LAIN-LAIN (lanjutan)

18. OTHER PAYABLES (continued)

Pihak-Pihak Berelasi / Related Parties	Utang lain-lain / Other payables	Pemegang saham / Shareholders	Utang lain-lain dikonversi menjadi modal saham / Other payables converted into share capital
Saldo bawaan / Balance brought forward	7.029.926.500	Saldo bawaan / Balance brought forward	7.029.926.500
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	950.000.000	Birma Kurniawan	950.000.000
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	950.000.000	Radius Suharta	950.000.000
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	625.000.000	Eko Prasudi Widiyanto	625.000.000
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	625.000.000	Atik Pilihanto	625.000.000
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	625.000.000	Antonius Andy Wijaya	625.000.000
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	252.500.000	Eko Prasetyo	252.500.000
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	252.500.000	Junior Lazuardi	252.500.000
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	252.500.000	Rio Aseptia	252.500.000
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	252.500.000	Muhammad Ray Ramadhan	252.500.000
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	157.500.000	Victor Cristian Maumaya	157.500.000
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	132.500.000	Augusta Bogie Satria Nugroho	132.500.000
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	112.500.000	Doni Mora	112.500.000
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	95.000.000	Henky Tornado	95.000.000
Sub-jumlah / Sub-total	<u>12.312.426.500</u>	Sub-jumlah / Sub-total	<u>12.312.426.500</u>
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	839.848.775	Alvin Jude Rafferty	839.848.775
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	475.000.000	Chia Ping Boon	475.000.000
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	475.000.000	Lim Juat Chong	475.000.000
Stonetree Cyber Security Ventures PTE. LTD	217.500.000	Mariusz March	217.500.000
Sub-jumlah / Sub-total	<u>2.007.348.775</u>	Sub-jumlah / Sub-total	<u>2.007.348.775</u>
INV Management Pte. Ltd.	26.723.703.900	INV Management Pte. Ltd.	26.723.703.900
Jumlah / Total	<u>133.520.997.550</u>	Jumlah / Total	<u>133.520.997.550</u>

19. UTANG BANK JANGKA PENDEK

19. SHORT-TERM BANK LOAN

PT Bank Raya Indonesia Tbk

PT Bank Raya Indonesia Tbk

Pada tanggal 30 November 2022, Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman dengan PT Bank Raya Indonesia Tbk. Pinjaman tetap reguler ini merupakan fasilitas pinjaman *revolving* dan memiliki tingkat suku bunga 12,5% per tahun. Fasilitas pinjaman tersebut digunakan selama 12 bulan dan maksimal plafon sebesar Rp 10.000.000.000.

On November 30, 2022, the Company entered into a loan agreement with PT Bank Raya Indonesia Tbk. The loan which is a fixed regular loan is a revolving credit facility and bears an interest of 12.5% per annum. The credit facility is for 12 months and with a ceiling of Rp 10,000,000,000.

Fasilitas ini dijamin dengan SPK/PO/Invoice/Tagihan atas nama Perusahaan dengan jumlah sebesar Rp 12.500.000.000.

The above credit facility is secured by SPK/PO/Invoice/Tagihan under the name of the Company for the amount of Rp 12,500,000,000.

Selama fasilitas pinjaman masih berlaku, Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut tanpa pemberitahuan tertulis kepada PT Bank Raya Indonesia Tbk, diantaranya:

As the credit facility still available, the Company is not allowed to conduct the following without prior written notification to PT Bank Raya Indonesia Tbk, such as:

19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)

PT Bank Raya Indonesia Tbk (lanjutan)

- Melakukan merger, akuisisi, penjualan asset Perusahaan kepada pihak lain.
- Melakukan perubahan bentuk perusahaan atau merubah susunan pengurus dan komposisi permodalan.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak lain dan atau menjaminkan kekayaan perusahaan kepada pihak lain
- Melakukan penyertaan kepada perusahaan lain, kecuali yang telah ada saat ini.
- Mengadakan transaksi dengan seseorang atau suatu pihak termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal dan melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
- Mengajukan permohonan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau mengajukan pailit kepada Pengadilan Niaga untuk Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau mengajukan atau pailit diri debitur sendiri.

Berdasarkan Surat No. R.7/1002/NBU/03/2023 tanggal 27 Februari 2023, PT Bank Raya Indonesia Tbk menyetujui beberapa rencana Perusahaan seperti perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka (lihat Catatan 37).

20. LIABILITAS SEWA

Akun ini terdiri dari:

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Liabilitas sewa	6.288.574.037	6.827.876.506	4.128.474.088	5.863.380.088	Lease liabilities
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	3.246.927.329	3.258.168.423	2.104.936.569	2.191.637.869	Less current maturities
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>3.041.646.708</u>	<u>3.569.708.083</u>	<u>2.023.537.519</u>	<u>3.671.742.219</u>	Net of current maturities

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Saldo awal	6.827.876.506	4.128.474.088	5.863.380.088	-	Beginning balance
Penambahan	-	4.861.513.765	839.792.119	8.754.223.541	Additions
Penambahan bunga	57.606.692	190.020.401	286.103.448	238.866.384	Accretion of interest
Pembayaran	(596.909.161)	(2.352.131.748)	(2.860.801.567)	(3.129.709.837)	Repayments
Saldo Akhir	<u>6.288.574.037</u>	<u>6.827.876.506</u>	<u>4.128.474.088</u>	<u>5.863.380.088</u>	Ending Balance

19. SHORT-TERM BANK LOAN (continued)

PT Bank Raya Indonesia Tbk (continued)

- Conduct mergers, acquisitions, selling the Company's assets to other parties.
- Change the Company's status or the composition of the management and capital structure.
- Act as a guarantor to other parties and or placed the Company's assets to the other parties
- Place an investment to other companies, except for the existing ones.
- Conduct transactions with a person or party, including but not limited to the affiliated companies, with inappropriate manners and unusual practices and conduct purchases at a higher price and sell at a lower price than market.
- Submit an application for Suspension of Obligations for Payment of Debt (PKPU) or filing for bankruptcy to the Commercial Court for Suspension of Obligations for Payment of Debt (PKPU) or filing for bankruptcy or the debtor himself.

Based on the Letter No. R.7/1002/NBU/03/2023 dated February 27, 2023, PT Bank Raya Indonesia Tbk approved certain Company's initiatives such as change in the Company's form from being a private company to become a public company among other things (see Note 37).

20. LEASE LIABILITIES

This account consists of:

The movements of lease liabilities are as follows:

20. LIABILITAS SEWA (lanjutan)

Analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Kurang dari satu tahun	3.590.144.814	3.506.011.475	2.325.316.921	2.463.346.639	Less than one year
Satu tahun sampai tiga tahun	3.455.119.209	3.569.492.124	2.336.887.708	4.172.630.374	One year up to three years
Jumlah	7.045.264.023	7.075.503.599	4.662.204.629	6.635.977.013	Total
Biaya keuangan Mendatang	(756.689.986)	(247.627.093)	(533.730.541)	(772.596.925)	Future finance charges
Sebagaimana Dilaporkan	6.288.574.037	6.827.876.506	4.128.474.088	5.863.380.088	As reported

20. LEASE LIABILITIES (continued)

The maturity analysis of undiscounted lease payments is as follows:

Berikut ini adalah jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian terkait sewa dengan aset hak-guna dan liabilitas sewa yang diakui:

The following are the amounts recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income relating to lease with recognized right-of-use assets and lease liabilities:

	2023 (Satu Bulan / One Month)	2022 (Satu Bulan / One Month) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun/ One Year)	2021 (Satu Tahun/ One Year)	2020 (Satu Tahun/ One Year)	
Beban penyusutan aset hak-guna (Catatan 13 dan 29)	299.224.209	231.414.835	2.776.978.023	2.554.005.750	2.481.180.866	Depreciation of right-of-use assets (Notes 13 and 29)
Penambahan bunga atas liabilitas sewa (Catatan 30)	57.606.692	15.835.033	190.020.401	286.103.448	238.866.384	Accretion of interest on lease liabilities (Note 30)
Jumlah	356.830.901	247.249.868	2.966.998.424	2.840.109.198	2.720.047.250	Total

21. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

Akun ini terdiri dari:

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Jasa profesional Gaji, bonus dan tunjangan	3.529.295.100	608.599.800	-	-	Professional fees
Komisi penjualan	3.204.421.670	3.387.608.280	3.880.340.929	1.894.662.531	Salaries, bonus and allowances
Lain-lain	2.507.180.769	2.279.289.138	2.421.014.627	1.200.739.118	Sales commission
	901.078.600	732.587.992	408.879.553	287.143.981	Others
Jumlah	10.141.976.139	7.008.085.210	6.710.235.109	3.382.545.630	Total

21. ACCRUED EXPENSES

This account consists of:

22. PERPAJAKAN

a. Utang Pajak

Akun ini terdiri dari:

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020
Perusahaan				
Pajak penghasilan:				
Pasal 4(2)	104.523.900	56.780.244	405.490	29.633.947
Pasal 21				
2020	748.050.347	748.050.347	2.014.261.289	3.913.206.645
2021	2.263.152.681	2.263.152.681	3.562.541.710	-
2022	1.733.209.456	1.733.209.456	-	-
2023	608.344.458	-	-	-
Pasal 23	545.173.483	464.323.169	191.492.856	390.002
Pasal 25	3.518.008	3.518.008	-	-
Pasal 26	49.178.264	49.178.264	-	58.816.000
Pasal 29				
2020	-	-	-	98.367.698
2022	458.710.310	458.710.310	-	-
2023	265.957.806	-	-	-
Pajak Pertambahan				
Nilai	919.291.860	954.380.291	33.736.697	1.757.474.847
Surat Ketetapan				
Pajak	423.735.432	423.735.432	-	-
Sub-jumlah	8.122.846.005	7.155.038.202	5.802.438.042	5.857.889.139
Entitas Anak				
Pajak penghasilan:				
Pajak Pertambahan				
Nilai	1.170.104.476	1.330.550.169	2.480.646.360	974.807.813
Pajak terkait				
karyawan	380.943.022	220.243.515	94.182.120	102.873.821
Sub-jumlah	1.551.047.498	1.550.793.684	2.574.828.480	1.077.681.634
Jumlah	9.673.893.503	8.705.831.886	8.377.266.522	6.935.570.773

Jumlah Surat Ketetapan Pajak diatas dilunasi Perusahaan pada tanggal 9 Maret 2023.

b. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran pajak terutang (rugi fiskal) untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2023 (Satu Bulan / One Month)	2022 (Satu Bulan / One Month) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)
Rugi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(3.018.577.393)	(2.430.230.465)	(8.880.400.243)	(4.340.218.242)	(17.671.816.541)

Losses before income tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income

22. TAXATION

a. Taxes Payable

This account consists of:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020
The Company		
Income taxes:		
Article 4(2)		
Article 21		
2020		
2021		
2022		
2023		
Article 23		
Article 25		
Article 26		
Article 29		
2020		
2022		
2023		
Value-Added		
Tax		
Tax Assessment		
Letter		
Sub-total		
Subsidiaries		
Income taxes:		
Value-Added		
Tax		
Employee		
related taxes		
Sub-total		
Total		

The amount in the above Tax Assessment Letters was paid by the Company on March 9, 2023.

b. Corporate Income Tax

Reconciliation between losses before income tax as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and the estimated taxable income (fiscal losses) for the one-month periods ended January 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 is as follows:

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

b. Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)

b. Corporate Income Tax (continued)

	2023 (Satu Bulan) / (One Month)	2022 (Satu Bulan / One Month) (Tidak Diaudit) / (Unaudited)	2022 (Satu Tahun)/ (One Year)	2021 (Satu Tahun)/ (One Year)	2020 (Satu Tahun)/ (One Year)	
Dikurangi laba (rugi) sebelum pajak penghasilan entitas anak	(3.288.901.727)	65.819.037	(11.561.923.344)	(9.606.646.444)	(5.261.282.019)	Less income (losses) before income tax of the subsidiaries
Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan Perusahaan	270.324.334	(2.496.049.502)	2.681.523.101	5.266.428.202	(12.410.534.522)	Income (losses) before income tax of the Company
Beda temporer:						Temporary differences:
Sewa	(17.494.726)	-	220.266.724	(81.451.096)	(253.682.123)	Leases
Imbalan kerja karyawan	495.121.875	385.279.865	5.396.172.777	1.910.603.431	3.586.158.585	Employee benefits
Beban penyisihan piutang usaha	-	-	424.020.418	345.413.769	231.332.433	Impairment of trade receivables
Beda permanen:						Permanent differences:
Pendapatan yang tidak dikenakan pajak	(4.498.211)	(8.862.607)	(67.671.326)	(72.665.208)	(78.120.679)	Non-taxable income
Beban yang tidak dapat dikurangkan	465.445.846	157.148.242	6.359.261.994	6.147.005.961	2.100.542.864	Non-deductible expenses
Taksiran laba fiskal untuk periode/ tahun berjalan	1.208.899.118	(1.962.484.002)	15.013.573.688	13.515.335.059	(6.824.303.442)	Estimated taxable income (fiscal losses) for the period/year
Taksiran laba fiskal (rugi fiskal) untuk periode/tahun berjalan - (pembulatan)	1.208.899.000	(1.962.484.000)	15.013.573.000	13.515.335.000	(6.824.303.000)	Estimated taxable income (fiscal losses) for the period/year (rounded-off)
Taksiran rugi fiskal 2019	-	-	-	(10.513.749.951)	(10.513.749.951)	Estimated fiscal losses 2019
2020	-	(3.822.718.338)	(3.822.718.334)	(6.824.303.442)	-	2020
Akumulasi rugi fiskal	-	(3.822.718.338)	(3.822.718.334)	(17.338.053.393)	(10.513.749.951)	Accumulated fiscal losses
Taksiran laba fiskal (rugi fiskal) untuk periode/tahun berjalan	1.208.899.118	(5.785.202.340)	11.190.855.354	(3.822.718.334)	(17.338.053.393)	Estimated taxable income (fiscal losses) for the period/year
Beban pajak penghasilan kini: Perusahaan	265.957.806	-	2.461.988.178	-	-	Current income tax expense: The Company
Dikurangi pajak dibayar di muka: Perusahaan	-	-	2.003.277.868	-	-	Less prepaid tax: The Company
Taksiran utang pajak penghasilan Pasal 29	265.957.806	-	458.710.310	-	-	Estimated income tax payable Article 29

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. adalah sebagai menjadi dasar dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan badan.

Taxable income resulting from reconciliation for for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 is the basis for filing of Annual Tax Return (SPT) corporate income tax.

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

c. Pajak Tangguhan

c. Deferred Tax

Rincian aset pajak tangguhan pada tanggal
 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan
 2020 adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets as of
 January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and
 2020 are as follows:

		31 Januari 2023 / January 31, 2023				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Benefit Credited to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance		
Perusahaan					The Company	
Imbalan kerja karyawan	3.440.547.273	108.926.812	300.288.674	3.849.762.759	Employee benefits	
Sewa	(25.270.627)	(44.811.598)	-	(70.082.225)	Leases	
Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha	145.572.122	-	-	145.572.122	Allowance for impairment of trade receivables	
Jumlah	3.560.848.768	64.115.214	300.288.674	3.925.252.656	Total	
		31 Desember 2022 / December 31, 2022				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss	Beban Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dibebankan pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expense Charged to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance		
Perusahaan					The Company	
Rugi fiskal	840.998.035	(840.998.035)	-	-	Fiscal loss	
Imbalan kerja karyawan	2.312.839.790	1.187.158.011	(59.450.528)	3.440.547.273	Employee benefits	
Sewa	(73.729.308)	48.458.681	-	(25.270.627)	Leases	
Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha	52.287.630	93.284.492	-	145.572.122	Allowance for impairment of trade receivables	
Jumlah	3.132.396.147	487.903.149	(59.450.528)	3.560.848.768	Total	
		31 Desember 2021 / December 31, 2021				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss	Manfaat Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Benefit Credited to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance		
Perusahaan					The Company	
Rugi fiskal	3.814.371.747	(2.973.373.712)	-	840.998.035	Fiscal loss	
Imbalan kerja karyawan	1.879.262.453	420.332.755	13.244.582	2.312.839.790	Employee benefits	
Sewa	(55.810.067)	(17.919.241)	-	(73.729.308)	Leases	
Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha	50.893.135	1.394.495	-	52.287.630	Allowance for impairment of trade receivables	
Jumlah	5.688.717.268	(2.569.565.703)	13.244.582	3.132.396.147	Total	

22. PERPAJAKAN (lanjutan)

22. TAXATION (continued)

c. Pajak Tangguhan (lanjutan)

c. Deferred Tax (continued)

	31 Desember 2020 / December 31, 2020				
	Saldo Awal / Beginning Balance	Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi / Deferred Income Tax Benefit (Expense) Credited (Charged) to Profit or Loss	Beban Pajak Penghasilan Tangguhan yang Dibebankan pada Penghasilan Komprehensif Lain / Deferred Income Tax Expense Charged to Other Comprehensive Income	Saldo Akhir / Ending Balance	The Company
Perusahaan					Fiscal loss
Rugi fiskal	2.313.024.990	1.501.346.757	-	3.814.371.747	Employee benefits
Imbalan kerja karyawan	1.145.461.280	788.954.889	(55.153.716)	1.879.262.453	Leases
Sewa	-	(55.810.067)	-	(55.810.067)	Allowance for impairment of trade receivables
Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha	-	50.893.135	-	50.893.135	
Jumlah	3.458.486.270	2.285.384.714	(55.153.716)	5.688.717.268	Total

Pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, entitas anak tidak mengakui aset pajak tangguhan atas rugi fiskal yang belum digunakan karena mereka berkeyakinan bahwa kemungkinan besar penghasilan kena pajak di masa depan tidak akan tersedia untuk memanfaatkan rugi fiskal yang belum digunakan tersebut.

As of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the subsidiaries did not recognize deferred tax asset on unused fiscal losses since they believe that it is not probable that future taxable income will be available against which these unused fiscal losses can be utilized.

d. Perubahan Tarif Pajak

d. Tax Rate Changes

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-undang yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat ("DPR") pada 16 Mei 2020 sebagai Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 ("UU No. 2/2020"). UU No. 2/2020 mengatur antara lain penyesuaian tarif pajak penghasilan badan menjadi 22% yang berlaku pada tahun pajak 2020 dan 2021 dan menjadi 20% yang berlaku mulai tahun pajak 2022.

On March 31, 2020, the Government issued Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia No. 1 Year 2020 regarding State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or in the Context of Facing Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability into Law, which has been approved by the House of Representatives ("DPR") on May 16, 2020 as Law No. 2 Year 2020 ("Law No. 2/2020"). Law No. 2/2020 stipulates, among other things, adjustment of the corporate income tax rate to 22% which applies in fiscal years 2020 and 2021 and to 20% which applies from fiscal year 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ("UU HPP") telah diterbitkan. UU HPP antara lain mengatur kenaikan tarif PPN menjadi 11% efektif sejak 1 April 2022 dan 12% efektif paling lambat 1 Januari 2025. dan tarif pajak penghasilan badan bagi Wajib Pajak Badan dan Bentuk Usaha Tetap dari tahun fiskal 2022 tetap pada 22%.

On October 29, 2021, Law No. 7 Year 2021 on Harmonization of Tax Regulations (the "HPP Law") was issued. The HPP Law, among other things, stipulates an increase in the VAT rate to 11% effective from April 1, 2022 and to 12% at the latest by January 1, 2025, and that the corporate income tax rate for Corporate Taxpayers and Permanent Establishments from fiscal year 2022 remains at 22%.

23. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN

Pada tanggal 31 Januari 2023, Grup mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria KKA Riana dan Rekan No. 4171/III/23/KKA-RM pada tanggal 24 Maret 2023, dan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Grup mencatat liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan berdasarkan perhitungan laporan aktuaria KKA Riana dan Rekan No. 4108/III/23/KKA-RM pada tanggal 2 Maret 2023 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Usia pensiun	55 tahun / years	55 tahun / years	55 tahun / years	55 tahun / years	Retirement age
Tingkat kenaikan gaji	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	Salary increase rate
Tingkat diskonto	7,25% per tahun / per year	7,50% per tahun / per year	7,50% per tahun / per year	7,25% per tahun / per year	Discount rate
Tingkat mortalita	100% TMI IV 5% sampai usia 30 tahun kemudian menurun linear sampai dengan 0% pada usia 55 tahun / 5% up to 30 years then decreased	100% TMI IV 5% sampai usia 30 tahun kemudian menurun linear sampai dengan 0% pada usia 55 tahun / 5% up to 30 years then decreased	100% TMI IV 5% sampai usia 30 tahun kemudian menurun linear sampai dengan 0% pada usia 55 tahun / 5% up to 30 years then decreased	100% TMI IV 5% sampai usia 30 tahun kemudian menurun linear sampai dengan 0% pada usia 55 tahun / 5% up to 30 years then decreased	Mortality rate
Tingkat pengunduran diri	linearly to 0% at 55 years	linearly to 0% at 55 years	linearly to 0% at 55 years	linearly to 0% at 55 years	Resignation rate

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefits expense recognized in consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	2023 (Satu Bulan / One Month)	2022 (Satu Bulan / One Month) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
Beban jasa kini	400.325.912	321.496.898	4.610.125.566	1.420.069.673	3.209.764.963	Current service cost
Beban bunga	94.795.963	63.782.967	786.047.213	490.533.760	376.393.622	Interest cost
Jumlah	495.121.875	385.279.865	5.396.172.779	1.910.603.433	3.586.158.585	Total
Pengukuran kembali atas liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	1.364.948.516	1.147.079.016	(270.229.672)	60.202.645	(250.698.709)	Total Remeasurement of estimated liabilities for employee benefits

23. LIABILITAS DIESTIMASI ATAS IMBALAN KERJA KARYAWAN (lanjutan)

23. ESTIMATED LIABILITIES FOR EMPLOYEE BENEFITS (continued)

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movement of estimated liabilities for employee benefits in the consolidated statements of financial position is as follows:

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Saldo awal	15.638.851.242	10.512.908.135	8.542.102.057	5.206.642.181	Beginning balance
Beban tahun berjalan (Catatan 29)	495.121.875	5.396.172.779	1.910.603.433	3.586.158.585	Expense in current year (Note 29)
Pengukuran kembali kerugian (keuntungan) aktuarial	1.364.948.516	(270.229.672)	60.202.645	(250.698.709)	Remeasurement of actuarial loss (gain)
Saldo akhir	17.498.921.633	15.638.851.242	10.512.908.135	8.542.102.057	Ending balance

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The sensitivity analysis of estimated liabilities for employee benefits is as follows:

31 Januari 2023 / January 31, 2023					
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability					
	Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(1.736.690.761)	2.010.177.775		Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	1.973.188.070	(1.740.528.916)		Salary growth rate
31 Desember 2022 / December 31, 2022					
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability					
	Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(1.573.329.308)	1.822.361.332		Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	1.780.035.821	(1.569.417.560)		Salary growth rate
31 Desember 2021 / December 31, 2021					
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability					
	Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(1.130.119.155)	1.314.499.011		Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	1.282.393.718	(1.126.044.573)		Salary growth rate
1 Desember 2020 / December 31, 2020					
Dampak terhadap Liabilitas Imbalan Pasti / Impact on Defined Benefit Liability					
	Perubahan Asumsi / Change in Assumptions	Kenaikan Asumsi / Increase in Assumptions	Penurunan Asumsi / Decrease in Assumptions		
Tingkat diskonto	1%	(976.490.104)	1.141.343.107		Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	1.108.576.913	(969.194.592)		Salary growth rate

24. MODAL SAHAM

Rincian susunan pemegang saham dan masing-masing persentase kepemilikan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

31 Januari 2023 / January 31, 2023				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
INV Management Pte. Ltd.	3.139.336.097	57,70%	78.483.402.425	INV Management Pte. Ltd.
MB Investment Management Pte. Ltd.	1.772.934.657	32,59%	44.323.366.425	MB Investment Management Pte. Ltd.
Matthew Owen Marsden	160.975.197	2,96%	4.024.379.925	Matthew Owen Marsden
Bima Kurniawan	38.000.000	0,70%	950.000.000	Bima Kurniawan
Bambang Susilo	38.000.000	0,70%	950.000.000	Bambang Susilo
Andri Utama Putra	38.000.000	0,70%	950.000.000	Andri Utama Putra
Radius Suharta	38.000.000	0,70%	950.000.000	Radius Suharta
Alvin Jude Rafferty	33.593.951	0,62%	839.848.775	Alvin Jude Rafferty
Eko Prasudi Widiyanto	25.000.000	0,46%	625.000.000	Eko Prasudi Widiyanto
Antonius Andy Wijaya	25.000.000	0,46%	625.000.000	Antonius Andy Wijaya
Atik Pilihanto	25.000.000	0,46%	625.000.000	Atik Pilihanto
Chia Ping Boon	19.000.000	0,35%	475.000.000	Chia Ping Boon
Lim Juat Chong	19.000.000	0,35%	475.000.000	Lim Juat Chong
Eko Prasetyo	10.100.000	0,19%	252.500.000	Eko Prasetyo
Junior Lazuardi	10.100.000	0,19%	252.500.000	Junior Lazuardi
Muhammad Ray Ramadhan	10.100.000	0,19%	252.500.000	Muhammad Ray Ramadhan
Rio Aseptia	10.100.000	0,19%	252.500.000	Rio Aseptia
Mariusz Marcinkiewicz	8.700.000	0,15%	217.500.000	Mariusz Marcinkiewicz
Victor Christian Mamuaya	6.300.000	0,11%	157.500.000	Victor Christian Mamuaya
Augusta Bogie Satria Nugroho	5.300.000	0,09%	132.500.000	Augusta Bogie Satria Nugroho
Doni Mora, SE	4.500.000	0,08%	112.500.000	Doni Mora, SE
Henky Tornado	3.800.000	0,06%	95.000.000	Henky Tornado
Jumlah	5.440.839.902	100,00%	136.020.997.550	Total
31 Desember 2022, 2021 dan 2020 / December 31, 2022, 2021 and 2020				
Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership	Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
INV Management Pte Ltd	990	99,00%	2.475.000.000	INV Management Pte Ltd
Marek Bialoglowy	10	1,00%	25.000.000	Marek Bialoglowy
Jumlah	1.000	100,00%	2.500.000.000	Total

Berdasarkan Akta Notaris No. 97 tanggal 30 Januari 2023 oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., para pemegang saham menyetujui untuk:

- Jual beli saham antara Tuan Marek Bialoglowy dengan MB Investment Management mengenai 10 saham milik Tuan Marek Bialoglowy sejumlah Rp 25.000.000;
- Peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi sebesar Rp 544.083.990.200;
- Peningkatan modal disetor Perusahaan dikarenakan adanya konversi utang Perusahaan menjadi Rp 136.020.997.550, sekaligus menyetujui masuknya pemegang saham baru kedalam Perusahaan;
- Penurunan nilai per saham menjadi Rp 25 per saham

Based on Notarial Deed No. 97 dated January 30, 2023 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., the shareholders agreed to the following:

- Sale and purchase of shares between Mr. Marek Bialoglowy and MB Investment Management regarding the 10 shares owned by Mr. Marek Bialoglowy for the amount of Rp 25,000,000;
- Increase the authorized capital of the Company to Rp 544,083,990,200;
- Increase the Company's paid-up capital due to the conversion of the Company's debt to Rp 136,020,997,550, as well as approving the entry of new shareholders into the Company;
- Decrease in the par value of shares to Rp 25 per share.

24. MODAL SAHAM (lanjutan)

Berdasarkan konversi kreditur piutang menjadi saham Perusahaan yang mengakibatkan peningkatan modal disetor Perusahaan, penurunan nilai nominal saham dan jual beli saham sebagaimana tersebut di atas, pemegang saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh / Number of Shares Issued and Fully Paid
INV Management Pte. Ltd.	3.139.336.097
MB Investment Management Pte. Ltd.	1.772.934.657
Matthew Owen Marsden	160.975.197
Bima Kurniawan	38.000.000
Bambang Susilo	38.000.000
Andri Hutama Putra	38.000.000
Radius Suharta	38.000.000
Alvin Jude Rafferty	33.593.951
Eko Prasudi Widiyanto	25.000.000
Antonius Andy Wijaya	25.000.000
Atik Pilihanto	25.000.000
Chia Ping Boon	19.000.000
Lim Juat Chong	19.000.000
Eko Prasetyo	10.100.000
Junior Lazuardi	10.100.000
Muhammad Ray Ramadhan	10.100.000
Rio Aseptia	10.100.000
Mariusz Marcinkiewicz	8.700.000
Victor Christian Mamuaya	6.300.000
Augusta Bogie Satria Nugroho	5.300.000
Doni Mora, SE	4.500.000
Henky Tornado	3.800.000
Jumlah	5.440.839.902

Perubahan Anggaran Dasar di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006456.AH.01.02.Tahun 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0017696.

Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi untuk memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan. Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

24. SHARE CAPITAL (continued)

Due to the conversion of creditors' receivables to Company's shares which resulted to the increase in the Company's paid in capital, decrease in par value per share, and sale and purchase of shares as mentioned above, the Company's shareholders are now as follows:

Jumlah (Rp) / Total (Rp)	Shareholders
78.483.402.425	INV Management Pte. Ltd. MB Investment Management Pte. Ltd.
44.323.366.425	Matthew Owen Marsden
950.000.000	Bima Kurniawan
950.000.000	Bambang Susilo
950.000.000	Andri Hutama Putra
950.000.000	Radius Suharta
839.848.775	Alvin Jude Rafferty
625.000.000	Eko Prasudi Widiyanto
625.000.000	Antonius Andy Wijaya
625.000.000	Atik Pilihanto
475.000.000	Chia Ping Boon
475.000.000	Lim Juat Chong
252.500.000	Eko Prasetyo
252.500.000	Junior Lazuardi
252.500.000	Muhammad Ray Ramadhan
252.500.000	Rio Aseptia
217.500.000	Mariusz Marcinkiewicz
157.500.000	Victor Christian Mamuaya
132.500.000	Augusta Bogie Satria Nugroho
112.500.000	Doni Mora, SE
95.000.000	Henky Tornado
136.020.997.550	Total

The amendment of the Articles of Association was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on its Decision Letter No. AHU-0006456.AH.01.02.Tahun 2023 and Acceptance Notification Letter No. AHU-AH.01.03-0017696.

Capital Management

The primary objective of the capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in line with changes in economic conditions, to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, return of capital to shareholders or issue new shares.

24. MODAL SAHAM (lanjutan)

Pengelolaan Modal (lanjutan)

Grup mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Kebijakan Grup adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka dalam industri untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Utang bersih dihitung sebagai utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, utang bank jangka pendek dan liabilitas sewa dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas (defisiensi modal) seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Jumlah utang	36.569.531.915	183.280.571.695	94.045.657.466	64.672.236.045	Total liabilities
Dikurangi kas dan bank	3.728.601.505	15.123.973.273	10.096.566.661	1.386.092.320	Less cash on hand and in banks
Utang bersih	32.840.930.410	168.156.598.422	83.949.090.805	63.286.143.725	Net liabilities
Jumlah ekuitas (defisiensi modal)	35.463.179.968	(37.742.412.593)	(39.880.994.774)	(33.575.974.335)	Total equity (capital deficiency)
Rasio pengungkit	0,93	(4,46)	(2,10)	(1,88)	Gearing ratio

24. SHARE CAPITAL (continued)

Capital Management (continued)

The Group monitors its capital using gearing ratio by dividing net debt with the total capital.

The Group's policy is to maintain a gearing ratio within the range of gearing ratios of the leading companies in the industry in order to secure funds at a reasonable cost.

Net debt is calculated as trade payables - third parties, other payables, accrued expenses, short-term bank loan and lease liabilities less cash on hand and in banks. The total capital is calculated as equity (capital deficiency) as shown in the consolidated statements of financial position.

The computation of gearing ratio is as follows:

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Akun ini terdiri dari:

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Dampak atas peningkatan modal saham pada entitas anak	694.876.284	-	-	-	Effect of the increase in share capital of the subsidiary
Aset pengampunan pajak	136.400.000	136.400.000	136.400.000	136.400.000	Tax amnesty assets
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependengali	(71.002.420.544)	-	-	-	Difference in value arising from restructuring transactions of entities under common control
Jumlah	(70.171.144.260)	136.400.000	136.400.000	136.400.000	Total

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

This account consists of:

26. DEFISIT

Undang-undang Perseroan Terbatas Republik Indonesia No. 40/2007, yang dikeluarkan di bulan Agustus 2007, mengharuskan pembentukan cadangan umum dari laba bersih sejumlah minimal 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Cadangan umum ini disajikan sebagai saldo laba dicadangkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Tidak ada batasan waktu untuk membentuk cadangan tersebut.

26. DEFICITS

The Limited Liability Company Law of the Republic of Indonesia No. 40/2007, issued in August 2007, requires the establishment of a general reserve from net income amounting to at least 20% of a company's issued and paid-up capital. This general reserve is presented as appropriated retained earnings in the consolidated statements of financial position. There is no time limit on the establishment of the reserve.

26. DEFISIT (lanjutan)

Pada tanggal 31 Januari 2023, Grup belum mencadangkan saldo laba karena masih mengalami defisit.

27. PENDAPATAN BERSIH

Rincian pendapatan bersih adalah sebagai berikut:

	2023 (Satu Bulan / One Month)	2022 (Satu Bulan / One Month) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
Jasa	7.335.565.225	6.073.325.979	147.181.301.760	84.685.253.156	56.572.539.329	Services
Penjualan barang	1.784.234.228	42.411.769	8.017.432.207	10.472.563.003	4.337.431.887	Product sales
Jasa perangkat lunak	85.301.688	493.325.241	31.059.728.242	20.694.049.903	9.744.541.432	Software services
Lain-lain	77.490.018	69.383.560	761.813.460	2.464.594.427	2.864.663.665	Others
Jumlah	9.282.591.159	6.678.446.549	187.020.275.669	118.316.460.489	73.519.176.313	Total

Untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, seluruh pendapatan bersih Grup merupakan pendapatan dari pihak ketiga.

Untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, terdapat pendapatan dari pihak tertentu dengan nilai pendapatan kumulatif yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih dengan rincian sebagai berikut:

	2023 (Satu Bulan / One Month)	2022 (Satu Bulan / One Month) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.128.800.000	1.688.716.272	4.190.647.977	3.758.822.727	4.232.950.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	112.612.613	-	26.961.955.089	15.599.462.213	6.899.587.114	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bringin Inti Teknologi	-	-	37.587.691.912	12.903.509.504	-	PT Bringin Inti Teknologi
PT Hutchison 3 Indonesia	-	-	-	11.576.963.336	12.484.341.940	PT Hutchison 3 Indonesia
	2023 (Satu Bulan / One Month)	2022 (Satu Bulan / One Month) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12%	25%	2%	3%	6%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1%	-	14%	13%	9%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bringin Inti Teknologi	-	-	20%	11%	-	PT Bringin Inti Teknologi
PT Hutchison 3 Indonesia	-	-	-	10%	17%	PT Hutchison 3 Indonesia

26. DEFICITS (continued)

As of January 31, 2023, the Group has not yet set up a statutory reserve as the Group is still experiencing a deficit.

27. NET REVENUES

The details of net revenues are as follows:

For the one-month periods ended January 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group's net revenues represent all revenues from third parties.

For the one-month periods ended January 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, revenues from certain parties with cumulative revenue value that exceeded 10% of the net revenues are as follows:

28. BEBAN POKOK PENDAPATAN

Rincian beban pokok pendapatan adalah sebagai berikut:

	2023 (Satu Bulan / One Month)	2022 (Satu Bulan / One Month) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
Jasa	5.410.703.213	2.234.878.964	79.370.418.916	41.796.422.753	36.857.491.323	Services
Penjualan barang	1.557.996.351	153.231.344	8.211.918.875	5.945.368.037	3.749.184.476	Product sales
Jasa perangkat lunak	156.937.437	553.292.666	28.402.180.736	16.944.673.601	13.402.478.563	Software services
Lain-lain	-	-	-	538.828.628	1.092.615.577	Others
Jumlah	7.125.637.001	2.941.402.974	115.984.518.527	65.225.293.019	55.101.769.939	Total

Untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Januari 2023 dan 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat pembelian kepada pihak tertentu yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih.

28. COST OF REVENUES

The details of cost of revenues are as follows:

For the one-month periods ended January 31, 2023 and 2022 and for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, there is no purchase from a particular party that exceeded 10% of the net revenues.

29. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	2023 (Satu Bulan / One Month)	2022 (Satu Bulan / One Month) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
Gaji, tunjangan dan upah	2.761.144.344	3.030.386.064	28.089.287.311	22.155.965.433	14.582.146.955	Salaries, wages and allowances
Pajak	608.344.458	457.131.686	5.209.475.307	4.673.041.785	3.975.661.091	Taxes
Asuransi	567.941.895	474.331.818	6.504.651.513	4.622.282.356	2.957.138.978	Insurance
Imbalan kerja (Catatan 23)	495.121.875	385.279.865	5.396.172.779	1.910.603.433	3.586.158.585	Employee benefits (Note 23)
Kantor	386.579.517	67.192.983	1.589.385.736	1.540.880.291	780.321.762	Office
Langganan	300.895.321	73.342.400	1.393.665.695	1.217.144.043	656.808.008	Subscriptions
Penyusutan aset hak-guna (Catatan 13)	299.224.209	231.414.835	2.776.978.023	2.554.005.750	2.481.180.866	Depreciation of right-of-use assets (Note 13)
Jamuan	293.693.480	26.557.106	4.003.261.089	283.105.112	363.848.546	Entertainment
Transportasi	255.820.614	144.601.568	2.299.617.328	1.258.152.933	921.600.240	Transportation
Komisi penjualan	253.211.031	210.292.387	4.303.507.824	3.765.332.355	1.812.736.410	Sales commission
Periklanan	206.079.793	58.479.368	798.512.240	527.694.371	168.944.990	Advertising
Perjalanan dinas	197.552.736	2.053.393	418.229.029	76.243.340	84.942.444	Official travel
Amortisasi aset takberwujud (Catatan 14)	192.171.629	192.171.628	2.306.059.536	2.306.059.536	-	Amortization of intangible assets (Note 14)
Jasa profesional	178.943.830	80.789.392	1.823.966.852	402.811.900	137.842.867	Professional fees
Penyusutan aset tetap (Catatan 12)	90.219.878	74.305.921	1.042.806.100	820.470.964	688.592.902	Depreciation of fixed assets (Note 12)
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 100.000.000)	529.463.667	187.028.969	7.732.091.458	7.143.958.104	3.777.754.552	Others (each below Rp 100,000,000)
Jumlah	7.616.408.277	5.695.359.383	75.687.667.820	55.257.751.706	36.975.679.196	Total

29. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

The details of general and administrative expenses are as follows:

30. PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Rincian pendapatan (beban) lain-lain adalah sebagai berikut:

	2023 (Satu Bulan / One Month)	2022 (Satu Bulan / One Month) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
Laba (rugi) selisih kurs	3.003.126.463	(6.304.135)	(2.191.841.235)	(1.638.868.498)	(798.294.334)	Gain (loss) on foreign exchange
Beban bunga atas liabilitas sewa (Catatan 20)	(57.606.692)	(15.835.033)	(190.020.401)	(286.103.448)	(238.866.384)	Interest on lease liabilities (Note 20)
Cadangan kerugian atas penurunan nilai atas piutang usaha (Catatan 6)	(83.158.578)	(6.034.316)	(1.109.324.275)	(345.413.769)	(231.332.433)	Allowance for impairment loss of trade receivables (Note 6)
Lain-lain - bersih	(105.211.800)	(421.091.017)	(901.570.769)	(460.768.466)	(801.946.303)	Others - net
Bersih	<u>2.757.149.393</u>	<u>(449.264.501)</u>	<u>(4.392.756.680)</u>	<u>(2.731.154.181)</u>	<u>(2.070.439.454)</u>	Net

30. OTHER INCOME (EXPENSES)

The details of other income (expenses) are as follows:

31. LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba (rugi) per saham dasar adalah sebagai berikut:

	2023 (Satu Bulan / One Month)	2022 (Satu Bulan / One Month) (Tidak Diaudit / Unaudited)	2022 (Satu Tahun / One Year)	2021 (Satu Tahun / One Year)	2020 (Satu Tahun / One Year)	
Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(3.220.419.983)	(1.979.541.450)	707.438.072	2.696.862.501	(10.125.149.808)	Net income (losses) attributable to owners of the parent entity
Jumlah rata-rata tertimbang saham	5.440.839.902	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	Weighted average number of shares
Laba (rugi) per saham dasar	<u>(0,59)</u>	<u>(19,80)</u>	<u>7,07</u>	<u>26,97</u>	<u>(101,25)</u>	Basic earnings (losses) per share

31. BASIC EARNINGS (LOSSES) PER SHARE

The calculation of basic earnings (losses) per share is as follows:

32. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

Sifat hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

32. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The nature relationship and transactions with related parties are as follows:

Pihak-Pihak Berelasi / Related Parties	Sifat Hubungan / Nature of Relationship	Sifat Transaksi / Nature of Transactions
INV Management Pte. Ltd.	Entitas Induk Langsung / Immediate Parent Entity	Utang lain-lain / Other payables
StoneTree Cyber Security Ventures Pte. Ltd.	Entitas Terakhir / Ultimate Parent Entity	Piutang lain-lain dan utang lain-lain / Other receivables and other payables
Marek Bialoglowy	Pemegang Saham / Shareholder	Utang lain-lain / Other payables
PT Numisec International Indonesia	Perusahaan Asosiasi / Associate Company	Utang lain-lain / Other payables
Numisec Pte. Ltd.	Perusahaan Asosiasi / Associate Company	Utang lain-lain / Other payables
StoneTree International Limited	Perusahaan Asosiasi / Associate Company	Utang lain-lain / Other payables
PT StoneTree Intellectual Property	Perusahaan Asosiasi / Associate Company	Utang lain-lain / Other payables
Dannacher Holdings LLC	Perusahaan Asosiasi / Associate Company	Utang lain-lain / Other payables
ITSEC Thailand Co. Ltd.	Entitas Sepengendali / Under Common Control	Piutang usaha dan piutang lain-lain / Trade receivables and other receivables

32. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)

Dalam kegiatan normal usahanya. Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi. sebagai berikut:

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020	
Piutang usaha ITSEC Thailand Co. Ltd.	<u>832.688.186</u>	<u>867.231.397</u>	<u>284.123.048</u>	-	Trade receivables ITSEC Thailand Co. Ltd.
Persentase terhadap Jumlah Aset	<u>0,84%</u>	<u>0,51%</u>	<u>0,39%</u>	-	Percentage to Total Assets
Piutang lain-lain ITSEC Thailand Co. Ltd.	-	84.154.662	76.034.412	76.828.392	Other receivables ITSEC Thailand Co. Ltd.
Stonetree Cyber Security Ventures Pte Ltd.	-	53.421.538	-	-	Stonetree Cyber Security Ventures Pte Ltd.
Jumlah	<u>-</u>	<u>137.576.200</u>	<u>76.034.412</u>	<u>76.828.392</u>	Total
Persentase terhadap Jumlah Aset	<u>-</u>	<u>0,08%</u>	<u>0,10%</u>	<u>0,16%</u>	Percentage to Total Assets
INV Management Pte. Ltd.	2.828.407.365	55.977.682.924	42.928.706.263	35.746.017.766	INV Management Pte. Ltd.
Dannacher Holdings LLC	-	75.036.870.000	-	-	Dannacher Holdings LLC
StoneTree Cyber Security Ventures Pte. Ltd.	-	15.980.044.032	22.827.514.921	11.527.892.893	StoneTree Cyber Security Ventures Pte. Ltd.
Marek Bialoglowy PT StoneTree Intellectual Property Numisec Pte. Ltd.	-	50.000.000	987.842.020	997.635.320	Marek Bialoglowy PT StoneTree Intellectual Property Numisec Pte. Ltd.
StoneTree International Limited	-	-	287.051.500	290.049.000	StoneTree International Limited
PT Numisec International Indonesia	-	-	146.591.144	148.121.904	PT Numisec International Indonesia
Jumlah	<u>2.828.407.365</u>	<u>147.089.596.956</u>	<u>67.692.818.448</u>	<u>49.230.208.483</u>	Total
Persentase terhadap Jumlah Liabilitas	<u>4,43%</u>	<u>70,79%</u>	<u>59,88%</u>	<u>94,97%</u>	Percentage to Total Liabilities

Pengungkapan bahwa transaksi pihak berelasi dilakukan dengan persyaratan yang setara dengan yang berlaku dalam transaksi wajar dilakukan hanya jika persyaratan tersebut dapat dibuktikan.

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties, as follows:

Disclosures that related party transactions were made on terms equivalent to those that prevail in arm's length transactions are made only if such terms can be substantiated.

33. INSTRUMEN KEUANGAN

Berikut ini adalah jumlah tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Grup pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

- Kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, aset kontrak dan aset lain-lain

Seluruh aset keuangan di atas akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga jumlah tercatat aset keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

33. FINANCIAL INSTRUMENTS

The following are the carrying amounts and estimated fair values of financial assets and financial liabilities of the Group as of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020:

- Cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables, contract assets and other assets

All of the above financial assets are due within 12 months, thus the carrying amounts of the financial assets approximate their fair values.

33. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

- Utang usaha - pihak ketiga, utang lain-lain, beban masih harus dibayar dan utang bank jangka pendek

Seluruh liabilitas keuangan di atas merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sehingga jumlah tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

- Liabilitas sewa

Nilai wajar liabilitas sewa diestimasi dengan mendiskontokan nilai sekarang dari arus kas masa depan dengan menggunakan kenaikan suku bunga pinjaman.

34. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup memiliki risiko mata uang asing, risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Grup untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Grup.

a. Risiko Mata Uang Asing

Risiko nilai tukar mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa mendatang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Grup mengelola eksposur mata uang asing dengan mencocokkan, sebisa mungkin individu mata uang. Jumlah eksposur mata uang asing neto Grup pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam tabel di bawah ini:

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	
	Mata Uang Asing / Foreign Currency Amount	Setara Mata Uang Rupiah / Rupiah Equivalent
Aset Moneter		
Kas dan bank		
Dolar Amerika Serikat	51.404	769.976.584
Dolar Singapura	68.078	776.493.220
Dolar Australia	9.899	105.047.474
Piutang usaha		
Dolar Singapura	688.100	7.848.460.873
Dolar Australia	91.101	966.759.396
Aset kontrak		
Dolar Singapura	174.945	1.995.426.510
Aset lain-lain		
Dolar Australia	33.177	352.075.662
Jumlah		12.814.239.719
Liabilitas		
Utang usaha - pihak ketiga		
Dolar Singapura	134.984	1.539.625.604
Dolar Australia	40.534	430.147.915
Utang lain-lain		
Dolar Singapura	20.522	234.071.640
Dolar Australia	130.074	1.380.343.194
Beban masih harus dibayar		
Dolar Singapura	394.453	4.499.127.267
Dolar Australia	89.565	950.467.300
Jumlah		9.033.782.920
Bersih		3.780.456.799

33. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

- Trade payables - third parties, other payables, accrued expenses and short-term bank loan

All of the above financial liabilities are due within 12 months, thus the carrying amounts of the financial liabilities approximate their fair values.

- Lease liabilities

The fair value of lease liabilities is estimated as the present value of all future cash flows discounted using incremental borrowing rate.

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is exposed to foreign currency risk, credit risk and liquidity risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Group's risk management process to ensure the appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Group's activities.

a. Foreign Currency Risk

Foreign exchange risk is the risk that the fair value of cash flows of a financial instrument in the future will fluctuate due to changes in foreign exchange rates.

The Group manages its foreign currency exposure by matching, as much as possible, receipts and payments of each individual currency. The amount of the Group's net foreign currency exposure at the reporting date is disclosed in the table below:

Monetary Assets	
Cash on hand and in banks	
United States Dollar	
Singapore Dollar	
Australian Dollar	
Trade receivables	
Singapore Dollar	
Australian Dollar	
Contract assets	
Singapore Dollar	
Other assets	
Australian Dollar	
Total	
Monetary Liabilities	
Trade payables - third parties	
Singapore Dollar	
Australian Dollar	
Other payables	
Singapore Dollar	
Australian Dollar	
Accrued expenses	
Singapore Dollar	
Australian Dollar	
Total	
Net	

34. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risiko Mata Uang Asing (lanjutan)

a. Foreign Currency Risk (continued)

	31 Desember 2020 / Desember 31, 2020		
	Mata Uang Asing / Foreign Currency Amount	Setara Mata Uang Rupiah / Rupiah Equivalent	
Aset Moneter			Monetary Assets
Kas dan bank			Cash on hand and in banks
Dolar Amerika Serikat	13.392	188.890.979	United States Dollar
Dolar Singapura	34.216	364.196.500	Singapore Dollar
Dolar Australia	4.328	46.615.811	Australian Dollar
Piutang usaha			Trade receivables
Dolar Singapura	451.215	4.802.737.250	Singapore Dollar
Dolar Australia	193.808	2.087.505.968	Australian Dollar
Piutang lain-lain			Other receivables
Dolar Singapura	6.952	73.997.088	Singapore Dollar
Aset kontrak			Contract assets
Dolar Singapura	55.619	592.008.636	Singapore Dollar
Dolar Australia	7.404	79.748.484	Australian Dollar
Jumlah		8.235.700.716	Total
Liabilitas Moneter			Monetary Liabilities
Utang usaha - pihak ketiga			Trade payables - third parties
Dolar Singapura	51.366	546.739.704	Singapore Dollar
Dolar Australia	153.253	1.650.697.193	Australian Dollar
Utang lain-lain			Other payables
Dolar Singapura	641.671	6.758.727.120	Singapore Dollar
Dolar Australia	954.019	10.275.738.649	Australian Dollar
Beban masih harus dibayar			Accrued expenses
Dolar Singapura	106.265	1.131.087.822	Singapore Dollar
Dolar Australia	25.085	270.189.991	Australian Dollar
Jumlah		20.633.180.479	Total
Bersih		(12.397.479.763)	Net

Grup melakukan transaksi bisnis sebagian dalam Dolar Amerika Serikat, Dolar Singapura dan Dolar Australia dan oleh karena itu terekspos risiko mata uang asing. Grup tidak memiliki kebijakan khusus untuk lindung nilai mata uang asing. Namun manajemen senantiasa memantau eksposur valuta asing dan mempertimbangkan risiko lindung nilai valuta asing yang signifikan manakala kebutuhan tersebut timbul.

The Group has business transactions in United States Dollar, Singapore Dollar and Australian Dollar, therefore, are exposed to foreign exchange risk. The Group does not have a foreign currency hedging policy. However, management monitors foreign exchange exposure and will consider hedging significant foreign exchange risk should the need arises.

Tabel berikut menjelaskan sensitivitas Grup atas perubahan kurs Rupiah terhadap mata uang asing. Tingkat sensitivitas di bawah ini merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi atas nilai kurs valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup akun-akun moneter dalam mata uang asing.

The following tables detail the Group's sensitivity to changes in Rupiah against the foreign currencies. The sensitivity rate below represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items.

Tabel di bawah juga menggambarkan dampak terhadap laba atau rugi setelah pajak dan ekuitas Grup ketika mata uang di atas mengalami penguatan dalam besaran persentase tertentu terhadap Rupiah, di mana semua variabel lain dianggap konstan. Perubahan dalam persentase yang sama dari melemahnya mata uang di atas terhadap Rupiah, akan memberikan dampak yang sama namun dalam arah yang berlawanan terhadap laba atau rugi dan ekuitas.

The following tables also indicate the effect after tax in profit or loss and equity of the Group wherein the above currencies strengthen at a certain percentage against the Rupiah, with all other variables held constant. For the same percentage of weakening of the above currencies against the Rupiah, there would be an equal and opposite impact on profit or loss and equity.

34. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risiko Mata Uang Asing (lanjutan)

a. Foreign Currency Risk (continued)

31 Januari 2023 / January 31, 2023

	Tingkat Sensitivitas / Sensitivity Rate	Dampak pada / Effect on		
		Laba Rugi / Profit or Loss	Ekuitas / Equity	
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
Menguat	1%	11.438.512	11.438.512	Strengthened
Melemah	1%	(11.438.512)	(11.438.512)	Weakened
Dolar Australia				Australian Dollar
Menguat	1%	(6.843.229)	(6.843.229)	Strengthened
Melemah	1%	6.843.229	6.843.229	Weakened
Dolar Singapura				Singapore Dollar
Menguat	1%	32.203.012	32.203.012	Strengthened
Melemah	1%	(32.203.012)	(32.203.012)	Weakened

31 Desember 2022 / December 31, 2022

	Tingkat Sensitivitas / Sensitivity Rate	Dampak pada / Effect on		
		Laba Rugi / Profit or Loss	Ekuitas / Equity	
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
Menguat	1%	21.708.758	21.708.758	Strengthened
Melemah	1%	(21.708.758)	(21.708.758)	Weakened
Dolar Australia				Australian Dollar
Menguat	1%	(429.868.785)	(429.868.785)	Strengthened
Melemah	1%	429.868.785	429.868.785	Weakened
Dolar Singapura				Singapore Dollar
Menguat	1%	4.528.295	4.528.295	Strengthened
Melemah	1%	(4.528.295)	(4.528.295)	Weakened

31 Desember 2021 / December 31, 2021

	Tingkat Sensitivitas / Sensitivity Rate	Dampak pada / Effect on		
		Laba Rugi / Profit or Loss	Ekuitas / Equity	
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
Menguat	1%	137.687	137.687	Strengthened
Melemah	1%	(137.687)	(137.687)	Weakened
Dolar Australia				Australian Dollar
Menguat	1%	(369.897.797)	(369.897.797)	Strengthened
Melemah	1%	369.897.797	369.897.797	Weakened
Dolar Singapura				Singapore Dollar
Menguat	1%	(90.102.383)	(90.102.383)	Strengthened
Melemah	1%	90.102.383	90.102.383	Weakened

31 Desember 2020 / December 31, 2020

	Tingkat Sensitivitas / Sensitivity Rate	Dampak pada / Effect on		
		Laba Rugi / Profit or Loss	Ekuitas / Equity	
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
Menguat	1%	7.117.927	7.117.927	Strengthened
Melemah	1%	(7.117.927)	(7.117.927)	Weakened
Dolar Australia				Australian Dollar
Menguat	1%	(391.454.937)	(391.454.937)	Strengthened
Melemah	1%	391.454.937	391.454.937	Weakened
Dolar Singapura				Singapore Dollar
Menguat	1%	(72.981.255)	(72.981.255)	Strengthened
Melemah	1%	72.981.255	72.981.255	Weakened

34. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Grup melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Grup mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Grup adalah sebagai berikut:

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Credit Risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract leading to a financial loss. The Group's objective is to seek continuous revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure.

The Group trades only with recognized and creditworthy third parties. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Group's exposure to bad debts is not significant.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the consolidated statements of financial position.

As of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020, the credit quality of each class of financial assets based on the Group's assessment is as follows:

31 Januari 2023 / January 31, 2023						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai / Neither past due nor impaired	Jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai / Past due but not impaired	Lewat jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai / Past due and impaired	Pencadangan / Allowance	Jumlah / Total	
Kas dan bank	3.728.601.505	-	-	-	3.728.601.505	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	7.004.472.570	22.287.191.025	2.454.170.837	(1.494.379.652)	30.251.454.780	Trade receivables
Piutang lain-lain	546.893.275	-	-	-	546.893.275	Other receivables
Aset kontrak	10.732.984.691	-	-	-	10.732.984.691	Contract assets
Aset lain-lain	4.566.052.576	-	-	-	4.566.052.576	Other assets
Jumlah	26.579.004.617	22.287.191.025	2.454.170.837	(1.494.379.652)	49.825.986.827	Total
31 Desember 2022 / December 31, 2022						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai / Neither past due nor impaired	Jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai / Past due but not impaired	Lewat jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai / Past due and impaired	Pencadangan / Allowance	Jumlah / Total	
Kas dan bank	15.123.973.273	-	-	-	15.123.973.273	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	28.998.985.813	2.474.568.802	2.645.365.841	(1.539.415.963)	32.579.504.493	Trade receivables
Piutang lain-lain	602.157.809	-	-	-	602.157.809	Other receivables
Aset kontrak	8.259.710.289	-	-	-	8.259.710.289	Contract assets
Aset lain-lain	4.748.415.226	-	-	-	4.748.415.226	Other assets
Jumlah	57.733.242.410	2.474.568.802	2.645.365.841	(1.539.415.963)	61.313.761.090	Total

34. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Risiko Kredit (lanjutan)

b. Credit Risk (continued)

31 Desember 2021 / December 31, 2021						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai / Neither past due nor impaired	Jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai / Past due but not impaired	Lewat jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai / Past due and impaired	Pencadangan / Allowance	Jumlah / Total	
Kas dan bank	10.096.566.661	-	-	-	10.096.566.661	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	12.852.855.642	317.926.654	669.553.414	(430.091.688)	13.410.244.022	Trade receivables
Piutang lain-lain	394.170.340	-	-	-	394.170.340	Other receivables
Aset kontrak	4.415.789.596	-	-	-	4.415.789.596	Contract assets
Aset lain-lain	3.485.803.369	-	-	-	3.485.803.369	Other assets
Jumlah	31.245.185.608	317.926.654	669.553.414	(430.091.688)	31.802.573.988	Total
31 Desember 2020 / December 31, 2020						
	Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai / Neither past due nor impaired	Jatuh tempo namun tidak mengalami penurunan nilai / Past due but not impaired	Lewat jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai / Past due and impaired	Pencadangan / Allowance	Jumlah / Total	
Kas dan bank	1.386.092.320	-	-	-	1.386.092.320	Cash on hand and in banks
Piutang usaha	12.283.184.513	674.338.811	1.328.274.072	(231.332.433)	14.054.464.963	Trade receivables
Piutang lain-lain	283.250.114	-	-	-	283.250.114	Other receivables
Aset kontrak	671.757.120	-	-	-	671.757.120	Contract assets
Aset lain-lain	3.031.803.330	-	-	-	3.031.803.330	Other assets
Jumlah	17.656.087.397	674.338.811	1.328.274.072	(231.332.433)	19.427.367.847	Total

c. Risiko Likuiditas

c. Liquidity Risk

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Grup atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds. The Group's exposure to liquidity risk arises primarily from mismatch of the maturities of financial assets and liabilities.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Januari 2023, 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

The following table summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as of January 31, 2023, December 31, 2022, 2021 and 2020:

31 Januari 2023 / January 31, 2023						
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga dan provisi / Interest and provision	Jumlah / Total	
Utang usaha						Trade payables
- pihak ketiga	3.133.981.285	-	-	-	3.133.981.285	- third parties
Utang lain-lain	7.683.575.491	-	-	-	7.683.575.491	Other payables
Utang bank jangka pendek	10.486.603.083	-	-	(1.165.178.120)	9.321.424.963	Short-term bank loan
Beban masih harus dibayar	10.141.976.139	-	-	-	10.141.976.139	Accrued expenses
Liabilitas sewa	3.590.144.814	3.455.119.209	-	(756.689.986)	6.288.574.037	Lease liabilities
Jumlah	35.036.280.812	3.455.119.209	-	(1.921.868.106)	36.569.531.915	Total

34. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO
 KEUANGAN (lanjutan)

34. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND
 POLICIES (continued)

c. Risiko Likuiditas (lanjutan)

c. Liquidity Risk (continued)

31 Desember 2022 / December 31, 2022						
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga dan provisi / Interest and provision	Jumlah / Total	
Utang usaha						Trade payables
- pihak ketiga	9.326.389.057	-	-	-	9.326.389.057	- third parties
Utang lain-lain	150.165.994.491	-	-	-	150.165.994.491	Other payables
Utang bank jangka pendek	11.196.254.735	-	-	(1.244.028.304)	9.952.226.431	Short-term bank loan
Beban masih harus dibayar	7.008.085.210	-	-	-	7.008.085.210	Accrued expenses
Liabilitas sewa	3.506.011.475	3.569.492.124	-	(247.627.093)	6.827.876.506	Lease liabilities
Jumlah	181.202.734.968	3.569.492.124	-	(1.491.655.397)	183.280.571.695	Total
31 Desember 2021 / December 31, 2021						
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga dan provisi / Interest and provision	Jumlah / Total	
Utang usaha						Trade payables
- pihak ketiga	12.853.445.571	-	-	-	12.853.445.571	- third parties
Utang lain-lain	70.353.502.698	-	-	-	70.353.502.698	Other payables
Beban masih harus dibayar	6.710.235.109	-	-	-	6.710.235.109	Accrued expenses
Liabilitas sewa	2.325.316.921	2.336.887.708	-	(533.730.541)	4.128.474.088	Lease liabilities
Jumlah	92.242.500.299	2.336.887.708	-	(533.730.541)	94.045.657.466	Total
31 Desember 2020 / December 31, 2020						
	Kurang dari 1 tahun / Less than 1 year	1 sampai 2 tahun / 1 to 2 years	Lebih dari 2 tahun / More than 2 years	Bunga dan provisi / Interest and provision	Jumlah / Total	
Utang usaha						Trade payables
- pihak ketiga	3.845.362.926	-	-	-	3.845.362.926	- third parties
Utang lain-lain	51.580.947.401	-	-	-	51.580.947.401	Other payables
Beban masih harus dibayar	3.382.545.630	-	-	-	3.382.545.630	Accrued expenses
Liabilitas sewa	2.463.346.639	4.172.630.374	-	(772.596.925)	5.863.380.088	Lease liabilities
Jumlah	61.272.202.596	4.172.630.374	-	(772.596.925)	64.672.236.045	Total

31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Januari 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2022, 2021, Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. INFORMASI SEGMENT

35. SEGMENT INFORMATION

Grup melaporkan segmen-segmen berdasarkan PSAK 5 berdasarkan tipe pendapatan dan pasar geografis sebagai berikut:

The Group reported segments under PSAK 5 based on the revenue type and geographical market as follows:

a. Tipe Pendapatan

a. Revenue Type

31 Januari 2023 / January 31, 2023

	Jasa Pengelolaan Fraud / Fraud Management Services	Pengujian Penetrasi dan Keamanan Aplikasi / Penetration Testing and Application Security	Tatakelola, Risiko dan Kepatuhan / Governance, Risk and Compliance	Layanan Keamanan Terkelola / Managed Security Services	Keamanan Telekomunikasi / Telecommunications Security	Jumlah / Total	CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN							
Pendapatan bersih	-	4.016.094.569	-	5.266.496.590	-	9.282.591.159	Net revenues
Beban pokok pendapatan	-	(2.408.538.480)	-	(4.717.098.521)	-	(7.125.637.001)	Cost of revenues
Laba Kotor	-	1.607.556.089	-	549.398.069	-	2.156.954.158	Gross Profit
Beban umum dan administrasi Lain-lain - bersih	(1.414.390.076)	(2.511.893.643)	(570.106.520)	(2.576.307.141)	(543.710.897)	(7.616.408.277)	General and administrative expenses
Laba (Rugi) Usaha	(1.414.390.076)	331.230.412	(570.106.520)	(505.327.645)	(543.710.897)	(2.702.304.726)	Income (Losses) From Operations
Pendapatan Keuangan	-	124.726.118	-	153.598.143	-	278.324.261	Finance income
Beban keuangan	-	(266.458.147)	-	(328.138.781)	-	(594.596.928)	Finance costs
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	(1.414.390.076)	189.498.383	(570.106.520)	(679.868.283)	(543.710.897)	(3.018.577.393)	Income (Losses) Before Income Tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN							CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset							Assets
Aset segmen	27.367.979.380	31.253.734.118	11.031.000.886	28.484.080.737	1.209.175.001	99.345.970.122	Segment assets
Liabilitas							Liabilities
Liabilitas segmen	17.092.983.406	19.520.533.021	6.889.769.275	17.790.656.198	2.588.848.254	63.882.790.154	Segment liabilities

35. INFORMASI SEGMENT (lanjutan) 35. SEGMENT INFORMATION (continued)

a. Tipe Pendapatan (lanjutan)

a. Revenue Type (continued)

31 Desember 2022 / December 31, 2022

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	Jasa Pengelolaan Fraud / Fraud Management Services	Pengujian Penetrasi dan Keamanan Aplikasi / Penetration Testing and Application Security	Tatakelola, Risiko dan Kepatuhan / Governance, Risk and Compliance	Layanan Keamanan Terkelola / Managed Security Services	Keamanan Telekomunikasi / Telecommunications Security	Jumlah / Total	CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME	
							Net revenues	Cost of revenues
Pendapatan bersih	53.834.234.329	67.803.002.273	7.682.220.571	56.047.955.888	1.652.862.608	187.020.275.669		
Beban pokok pendapatan	(33.386.421.481)	(42.049.443.811)	(4.764.289.064)	(34.759.307.005)	(1.025.057.166)	(115.984.518.527)		
Laba Kotor	20.447.812.848	25.753.558.462	2.917.931.507	21.288.648.883	627.805.442	71.035.757.142	Gross Profit	
Beban umum dan administrasi	(21.717.533.072)	(27.352.742.407)	(3.099.122.360)	(22.610.581.367)	(907.688.614)	(75.687.667.820)	General and administrative expenses	
Lain-lain - bersih	(1.264.465.533)	(1.592.565.780)	(180.441.001)	(1.316.461.714)	(38.822.652)	(4.392.756.680)	Others - net	
Rugi Usaha	(2.534.185.757)	(3.191.749.725)	(361.631.854)	(2.638.394.198)	(318.705.824)	(9.044.667.358)	Losses From Operations	
Pendapatan keuangan	458.878.541	577.947.158	65.482.610	477.748.119	14.088.863	1.594.145.291	Finance income	
Beban keuangan	(411.593.856)	(518.393.166)	(58.735.019)	(428.519.038)	(12.637.097)	(1.429.878.176)	Finance costs	
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(2.486.901.072)	(3.132.195.733)	(354.884.263)	(2.589.165.117)	(317.254.058)	(8.880.400.243)	Losses Before Income Tax	
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN							CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION	
Aset							Assets	
Aset segmen	48.957.058.357	61.660.309.288	6.986.240.735	50.970.225.197	1.452.554.255	170.026.387.832	Segment assets	
Liabilitas							Liabilities	
Liabilitas segmen	59.751.986.309	75.256.277.237	8.526.692.060	62.209.052.188	2.024.792.631	207.768.800.425	Segment liabilities	

31 Desember 2022, 2021 Dan 2020

December 31, 2022, 2021 And 2020

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Januari 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

And For The One-Month Period Ended January, 31 2023
And For The Years Ended

31 Desember 2022, 2021, Dan 2020

December 31, 2022, 2021, And 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. INFORMASI SEGMENT (lanjutan) 35. SEGMENT INFORMATION (continued)

a. Tipe Pendapatan (lanjutan)

a. Revenue Type (continued)

31 Desember 2021 / December 31, 2021

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	Jasa Pengelolaan Fraud / Fraud Management Services	Pengujian Penetrasi dan Keamanan Aplikasi / Penetration Testing and Application Security	Tatakelola, Risiko dan Kepatuhan / Governance, Risk and Compliance	Layanan Keamanan Terkelola / Managed Security Services	Keamanan Telekomunikasi / Telecommunications Security	Jumlah / Total	CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME	
							Net revenues	Cost of revenues
Pendapatan bersih	19.373.112.144	50.287.743.898	1.471.186.612	47.184.417.835	-	118.316.460.489		
Beban pokok pendapatan	(10.679.975.644)	(27.722.540.189)	(811.033.202)	(26.011.743.984)	-	(65.225.293.019)		
Laba Kotor	8.693.136.500	22.565.203.709	660.153.410	21.172.673.851	-	53.091.167.470		Gross Profit
Beban umum dan administrasi	(9.047.892.543)	(23.486.061.487)	(687.093.445)	(22.036.704.231)	-	(55.257.751.706)		General and administrative
Lain-lain - bersih	(447.198.606)	(1.160.815.506)	(33.960.089)	(1.089.179.980)	-	(2.731.154.181)		expenses
Rugi Usaha	(801.954.649)	(2.081.673.284)	(60.900.124)	(1.953.210.360)	-	(4.897.798.417)		Losses From Operations
Pendapatan keuangan	167.018.925	433.539.271	12.683.352	406.784.964	-	1.020.026.512		Finance income
Beban keuangan	(75.730.690)	(196.577.892)	(5.750.959)	(184.446.796)	-	(462.506.337)		Finance costs
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(710.666.414)	(1.844.711.905)	(53.967.731)	(1.730.872.192)	-	(4.340.218.242)		Losses Before Income Tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN								CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset								Assets
Aset segmen	11.979.645.881	31.096.158.406	909.729.655	29.177.171.565	-	73.162.705.507		Segment assets
Liabilitas								Liabilities
Liabilitas segmen	18.509.751.506	48.046.676.055	1.405.623.340	45.081.649.380	-	113.043.700.281		Segment liabilities

31 Desember 2022, 2021 Dan 2020

December 31, 2022, 2021 And 2020

Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Januari 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal

And For The One-Month Period Ended January, 31 2023
And For The Years Ended

31 Desember 2022, 2021, Dan 2020

December 31, 2022, 2021, And 2020

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

35. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

35. SEGMENT INFORMATION (continued)

a. Tipe Pendapatan

a. Revenue Type

31 Desember 2020 / December 31, 2020

	Jasa Pengelolaan Fraud / Fraud Management Services	Pengujian Penetrasi dan Keamanan Apikasi / Penetration Testing and Application Security	Tatakelola, Risiko dan Kepatuhan / Governance Risk Compliance	Layanan Keamanan Terkelola / Managed Security Services	Keamanan Telekomunikasi / Managed Security Services	Jumlah / Total	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN							STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan bersih	-	26.987.934.638	6.334.841.667	40.196.400.008	-	73.519.176.313	Net revenues
Beban pokok pendapatan	-	(20.227.143.994)	(4.747.890.355)	(30.126.735.590)	-	(55.101.769.939)	Cost of revenues
Laba Kotor	-	6.760.790.644	1.586.951.312	10.069.664.418	-	18.417.406.374	Gross Profit
Beban umum dan administrasi	-	(13.573.291.533)	(3.186.040.499)	(20.216.347.164)	-	(36.975.679.196)	General and administrative expenses
Lain-lain - bersih	-	(760.031.429)	(178.401.157)	(1.132.006.868)	-	(2.070.439.454)	Others - net
Laba (Rugi) Usaha	-	(7.572.532.318)	(1.777.490.344)	(11.278.689.614)	-	(20.628.712.276)	Income (Losses) From Operations
Pendapatan keuangan	-	1.223.672.016	287.230.890	1.822.562.953	-	3.333.465.859	Finance income
Beban keuangan	-	(138.234.001)	(32.447.481)	(205.888.642)	-	(376.570.124)	Finance costs
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	-	(6.487.094.303)	(1.522.706.935)	(9.662.015.303)	-	(17.671.816.541)	Income (Losses) Before Income Tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN							CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset							Assets
Aset segmen	-	17.153.916.119	4.026.515.702	25.549.405.068	-	46.729.836.889	Segment assets
Liabilitas							Liabilities
Liabilitas segmen	-	29.479.220.158	6.919.617.772	43.906.973.294	-	80.305.811.224	Segment liabilities

35. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

b. Pasar Geografis (lanjutan)

35. SEGMENT INFORMATION (continued)

b. Geographical Market (continued)

	31 Januari 2023 / January 31, 2023			Jumlah / Total	
	Indonesia / Indonesia	Singapura / Singapore	Australia / Australia		
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN					CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan bersih	5.586.997.475	3.113.204.620	582.389.064	9.282.591.159	Net revenues
Beban pokok pendapatan	(3.126.804.236)	(3.044.896.611)	(953.936.154)	(7.125.637.001)	Cost of revenues
Laba Kotor	2.460.193.239	68.308.009	(371.547.090)	2.156.954.158	Gross Profit
Beban umum dan administrasi	(4.889.391.162)	(1.995.563.931)	(731.453.184)	(7.616.408.277)	General and administrative expenses
Lain-lain - bersih	2.983.702.746	(243.749.797)	17.196.444	2.757.149.393	Others - net
Laba (Rugi) Usaha	554.504.823	(2.171.005.719)	(1.085.803.830)	(2.702.304.726)	Income (Losses) From Operations
Pendapatan keuangan	277.748.211	576.050	-	278.324.261	Finance income
Beban keuangan	(561.928.700)	(15.461.182)	(17.207.046)	(594.596.928)	Finance costs
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	270.324.334	(2.185.890.851)	(1.103.010.876)	(3.018.577.393)	Income (Losses) Before Income Tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset					Assets
Aset segmen	81.166.915.862	14.318.808.996	3.860.245.264	99.345.970.122	Segment assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segmen	48.808.586.988	9.294.915.242	5.779.287.924	63.882.790.154	Segment liabilities

35. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

35. SEGMENT INFORMATION (continued)

b. Pasar Geografis (lanjutan)

b. Geographical Market (continued)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	31 Desember 2022 / December 31, 2022			Jumlah / Total	CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
	Indonesia / Indonesia	Singapura / Singapore	Australia / Australia		
Pendapatan bersih	136.626.196.785	37.783.426.304	12.610.652.580	187.020.275.669	Net revenues
Beban pokok pendapatan	(84.124.150.479)	(22.487.303.648)	(9.373.064.400)	(115.984.518.527)	Cost of revenues
Laba Kotor	52.502.046.306	15.296.122.656	3.237.588.180	71.035.757.142	Gross Profit
Beban umum dan administrasi Lain-lain - bersih	(45.862.704.856) (3.076.191.152)	(20.114.208.482) (1.508.314.944)	(9.710.754.482) 191.749.416	(75.687.667.820) (4.392.756.680)	General and administrative expenses Others - net
Laba (Rugi) Usaha	3.563.150.298	(6.326.400.770)	(6.281.416.886)	(9.044.667.358)	Income (Losses) From Operations
Pendapatan keuangan	217.697.099	1.376.448.192	-	1.594.145.291	Finance income
Beban keuangan	(1.099.324.296)	(213.145.760)	(117.408.120)	(1.429.878.176)	Finance costs
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	2.681.523.101	(5.163.098.338)	(6.398.825.006)	(8.880.400.243)	Income (Losses) Before Income Tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN				CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION	
Aset				Assets	
Aset segmen	122.773.799.253	20.440.112.378	26.812.476.201	170.026.387.832	Segment assets
Liabilitas				Liabilities	
Liabilitas segmen	166.357.235.419	13.093.158.551	28.318.406.445	207.768.800.415	Segment liabilities

31 Desember 2022, 2021 Dan 2020
Dan Untuk Periode Satu Bulan Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Januari 2023
Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal-Tanggal
31 Desember 2022, 2021, Dan 2020
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

35. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

35. SEGMENT INFORMATION (continued)

b. Pasar Geografis (lanjutan)

b. Geographical Market (continued)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	31 Desember 2021 / December 31, 2021			Jumlah / Total	CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
	Indonesia / Indonesia	Singapura / Singapore	Australia / Australia		
Pendapatan bersih	78.804.972.639	30.955.316.952	8.556.170.898	118.316.460.489	Net revenues
Beban pokok pendapatan	(42.016.987.754)	(16.484.910.279)	(6.723.394.986)	(65.225.293.019)	Cost of revenues
Laba Kotor	36.787.984.885	14.470.406.673	1.832.775.912	53.091.167.470	Gross Profit
Beban umum dan administrasi Lain-lain - bersih	(29.199.466.177) (2.227.785.570)	(17.394.878.886) (303.248.297)	(8.663.406.643) (200.120.314)	(55.257.751.706) (2.731.154.181)	General and administrative expenses Others - net
Laba (Rugi) Usaha	5.360.733.138	(3.227.720.510)	(7.030.751.045)	(4.897.738.417)	Income (Losses) From Operations
Pendapatan keuangan	80.698.237	939.328.275	-	1.020.026.512	Finance income
Beban keuangan	(175.003.173)	(287.503.164)	-	(462.506.337)	Finance costs
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	5.266.428.202	(2.575.895.399)	(7.030.751.045)	(4.340.218.242)	Income (Losses) Before Income Tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN	CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION				
Aset	Assets				
Aset segmen	43.556.022.310	25.780.656.993	3.826.026.204	73.162.705.507	Segment assets
Liabilitas	Liabilities				
Liabilitas segmen	66.896.733.804	26.582.958.035	19.564.008.442	113.043.700.281	Segment liabilities

35. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

35. SEGMENT INFORMATION (continued)

b. Pasar Geografis (lanjutan)

b. Geographical Market (continued)

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN	31 Desember 2020 / December 31, 2020			Jumlah / Total	CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
	Indonesia / Indonesia	Singapura / Singapore	Australia / Australia		
Pendapatan bersih	48.763.290.040	18.040.606.023	6.715.280.250	73.519.176.313	Net revenues
Beban pokok pendapatan	(38.830.170.708)	(10.523.842.769)	(5.747.756.462)	(55.101.769.939)	Cost of revenues
Laba Kotor	9.933.119.332	7.516.763.254	967.523.788	18.417.406.374	Gross Profit
Beban umum dan administrasi	(20.987.355.786)	(10.567.913.268)	(5.420.410.142)	(36.975.679.196)	General and administrative expenses
Lain-lain - bersih	(1.666.930.015)	(411.053.335)	(2.456.104)	(2.070.439.454)	Others - net
Rugi Usaha	(12.711.166.469)	(3.462.203.349)	(4.455.342.458)	(20.628.712.276)	Losses From Operations
Pendapatan keuangan	424.660.881	1.212.683.978	1.696.121.000	3.333.465.859	Finance income
Beban keuangan	(124.028.934)	(252.541.190)	-	(376.570.124)	Finance costs
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(12.410.534.522)	(2.502.060.561)	(2.759.221.458)	(17.671.816.541)	Losses Before Income Tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset					Assets
Aset segmen	25.365.247.920	16.239.251.811	5.125.337.158	46.729.836.889	Segment assets
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas segmen	51.355.863.850	14.476.211.583	14.473.735.791	80.305.811.224	Segment liabilities

36. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

Aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas sebagai berikut:

	31 Januari 2023 / January 31, 2023	31 Desember 2022 / December 31, 2022
Penambahan modal saham melalui konversi utang	133.520.997.550	-

36. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

Activities not affecting cash flows are as follows:

	31 Desember 2021 / December 31, 2021	31 Desember 2020 / December 31, 2020
Addition of share capital through conversion of payables	-	-

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Perubahan Status, Penerbitan Saham, dan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan

Berdasarkan Akta Notaris No. 77 oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. tanggal 28 Februari 2023, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

- Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang lama dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit de charge*) sepenuhnya kepada mereka.
- Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi yang baru, sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Patrick Rudolf Dannacher	:
Komisaris Independen	:	Richardus Eko Indrajit	:
Komisaris Independen	:	Agustinus Nicholas L. Tobing	:
Komisaris	:	Rico Rizal Budidarmo	:
Komisaris	:	Yulius C Rusli	:
Komisaris	:	Joseph Edi Hut Lumban Gaol	:

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Andri Utama Putra	:
Wakil Direktur Utama	:	Marek Bialoglowy	:
Direktur	:	Eko Prasudi Widiyanto	:
Direktur	:	Bima Kurniawan	:
Direktur	:	Bambang Susilo	:
Direktur	:	Doni Mora, SE	:

- Melakukan penawaran umum perdana saham Perusahaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.008.734.800 saham dan mencatatkan saham-saham tersebut pada Bursa Efek Indonesia serta merubah status Perusahaan dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.
- Mencatatkan seluruh saham Perusahaan setelah dilaksanakannya Penawaran Umum di Pasar Modal, termasuk saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham lama pada Bursa Efek Indonesia.

37. EVENTS AFTER REPORTING DATE

The Change of the Company's Status, Issuance of Shares and the Change in the Composition of the Company's Management

Based on Notarial Deed No. 77 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn. dated February 28, 2023, the shareholders approved the following:

- Respectfully dismiss all former members of the Boards of Commissioners and Directors by granting them full release and discharge (*acquit de charge*).
- Appointment of new members of the Boards of Commissioners and Directors, as follows:

Board of Commissioners

President Commissioner
Independent Commissioner
Independent Commissioner
Commissioner
Commissioner

Board of Directors

President Director
Vice-President Director
Director
Director
Director

- Conduct an initial public offering of the Company's shares with a maximum amount of 1,008,734,800 shares and list these shares in the Indonesia Stock Exchange, and change the status of the Company from a Private Company to a Public Company.
- List all of the Company's shares after the Public Offering in the Capital Market, including shares owned by the old shareholders in the Indonesia Stock Exchange.

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Perubahan Status, Penerbitan Saham, dan Perubahan Susunan Pengurus Perusahaan (lanjutan)

- e. Memberikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk melakukan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Saham.
- f. Memberikan kuasa kepada Dewan Direksi untuk menyatakan mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum.
- g. Mengubah dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perusahaan menjadi Perseroan Terbuka.

Perubahan tersebut di atas telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014658.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 8 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0036663 dan AHU-AH.01.09-0098452 tanggal 3 Maret 2023.

Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi, Komite Audit, Audit Internal, dan Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 196/ADM/ITSECASIA/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, Dewan Komisaris Perusahaan menyetujui mengangkat Komite Nominasi dan Remunerasi dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Richardus Eko Indrajit	:	Chairman
Anggota	:	Rico Rizal Budidarmo	:	Member
Anggota	:	Ratri Vibuthi W.W	:	Member

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 197/ADM/ITSECASIA/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, para Dewan Komisaris menyetujui penunjukan susunan Komite Audit Perusahaan sebagai berikut:

Ketua	:	Agustinus Nicholas L Tobing	:	Chairman
Anggota	:	Arini Imamawati	:	Member
Anggota	:	Tjeppey Kustiwa	:	Member

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 198/ADM/ITSECASIA/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, memutuskan bahwa Dewan Direksi menyetujui penunjukan Viko Setiyawan sebagai Corporate Secretary Perusahaan.

37. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

The Change of the Company's Status, Issuance of Shares and the Change in the Composition of the Company's Management (continued)

- e. Authorize the Board of Directors to take any necessary actions in connection with the Public Offering of Shares.
- f. Authorize the Board of Directors to state the certainty of the number of shares issued and paid up for the execution of the Public Offering.
- g. Amend and compile the entire Articles of Association of the Company in connection with the change in the status of the Company to a Public Company.

The amendments were approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decision Letter No. AHU-0014658.AH.01.02.Tahun 2023 dated March 8, 2023 and Acceptance Notification Letters No. AHU-AH.01.03-0036663 and AHU-AH.01.09-0098452 dated March 3, 2023.

Appointment of Nomination and Remuneration Committee, Audit Committee, Internal Audit, and Corporate Secretary

Based on the Decision of the Board of Commissioners No. 196/ADM/ITSECASIA/III/2023 dated March 9, 2023, the Company's Board of Commissioners approved the appointment of the Nomination and Remuneration Committee with the composition as follows:

Based on the Decision of the Board of Commissioners No. 197/ADM/ITSECASIA/III/2023 dated March 9, 2023, the Board of Commissioners approved the appointment of the Company's Audit Committee with the composition as follows:

Based on the Decision of the Board of Directors No. 198/ADM/ITSECASIA/III/2023 dated March 9, 2023, the Board of Directors approved the appointment of Viko Setiyawan as Corporate Secretary of the Company.

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN
(lanjutan)

**Pengangkatan Komite Nominasi dan Remunerasi,
Komite Audit, Audit Internal, dan Sekretaris
Perusahaan (lanjutan)**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 199/ADM/ITSECASIA/III/2023 tanggal 9 Maret 2023, memutuskan bahwa Dewan Direksi menyetujui penunjukan Donny Utama sebagai Audit Internal Perusahaan.

Surat Persetujuan

Berdasarkan perjanjian pinjaman Perusahaan terikat dengan pembatasan tertentu yang diatur pada syarat-syarat dan ketentuan umum pada perjanjian pinjaman dengan PT Bank Raya Indonesia Tbk yang mewajibkan Perusahaan untuk memperoleh persetujuan tertulis dari PT Bank Raya Indonesia Tbk untuk perubahan klausul tersebut. Perusahaan telah mengajukan permohonan perubahan klausul hal-hal yang tidak boleh dilakukan Perusahaan serta telah disetujui oleh PT Bank Raya Indonesia Tbk berdasarkan surat keterangan kredit No. R.7/1002/NBU/03/2023 pada 27 Februari 2023 untuk beberapa klausul sebagai berikut:

- a. Melakukan pembelian saham sebagai berikut:
 - ITSEC Services Asia Pte. Ltd. sebanyak 2.494.724 saham senilai USD 3.833.760 dari INV Management Pte. Ltd.
 - ITSEC Australia Pty. Ltd. sebanyak 2.065.542 saham senilai USD 1.160.886 dari INV Management Pte. Ltd.
- b. Peningkatan modal dasar Perusahaan menjadi Rp 544.083.990.200.
- c. Peningkatan modal disetor Perusahaan menjadi Rp 136.020.997.550.
- d. Perubahan nominal saham menjadi Rp 25 per lembar saham.
- e. Perubahan bentuk Perusahaan semula tertutup menjadi terbuka (Tbk).
- f. Perubahan susunan pengurus Perusahaan.

Informasi Pajak Lainnya

Pada bulan Maret 2023, Perusahaan menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar untuk Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Final Pasal 4(2) terkait tahun pajak 2018. Total kurang bayar ditambah denda berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar tersebut sebesar Rp 975.962.697. Pajak kurang bayar tersebut dibayar pada tanggal 20 April 2023.

37. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

**Appointment of Nomination and Remuneration
Committee, Audit Committee, Internal Audit, and
Corporate Secretary (continued)**

Based on the Decision of the Board of Directors No. 199/ADM/ITSECASIA/III/2023 dated March 9, 2023, the Board of Directors approved the appointment of Donny Utama as Internal Auditor of the Company.

Approval Letter

Based on the loan agreement, the Company is bound by certain restrictions which are stipulated in the general terms and conditions of the loan agreement the Company entered into with PT Bank Raya Indonesia Tbk which requires the Company to obtain written approval from PT Bank Raya Indonesia Tbk for the amendment of the said clause. The Company has submitted a request to change the clause on matters that the Company should not do and has obtained approval from PT Bank Raya Indonesia Tbk based on letter No. R.7/1002/NBU/03/2023 dated February 27, 2023, as follows:

- a. Purchase of shares, as follows:
 - ITSEC Services Asia Pte. Ltd. 2,494,724 shares for the amount of USD 3,833,760 from INV Management Pte. Ltd.
 - ITSEC Australia Pty. Ltd. 2,065,542 shares for the amount of USD 1,160,886 from INV Management Pte. Ltd.
- b. Increase the Company's authorized capital to Rp 544,083,990,200.
- c. Increase the Company's paid-in capital to Rp 136,020,997,550.
- d. Change the share par value to Rp 25 per share.
- e. Change the form of the Company from a private company to a public company (Tbk).
- f. Change the composition of the Company's management.

Other Tax Information

In March 2023, the Company received several Tax Underpayment Assessment Letters for Income Tax Article 21, Value-Added Tax and Final Tax Article 4(2) relating to fiscal year 2018. The total underpayment including penalties based on the above Tax Underpayment Assessment Letters amounted to Rp 975,962,697. The tax underpayment was paid on April 20, 2023.

37. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN (lanjutan)

Perjanjian Pinjaman

Pada tanggal 1 Februari 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman dengan StoneTree International Limited, pihak berelasi, dengan jumlah pokok pinjaman sebesar \$AS 750.000, yang ditransfer setiap bulan dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan untuk modal kerja Perusahaan dan entitas anak. Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 4% per tahun dan akan dilunasi seluruhnya pada 1 Februari 2026.

Perubahan Entitas Induk Terakhir

Berdasarkan Akta Notaris No. 112 tanggal 28 Maret 2023, oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., entitas induk terakhir Perusahaan sekarang adalah StoneTree International Limited.

38. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

Grup mempunyai perjanjian-perjanjian dan ikatan penting dengan pihak-pihak ketiga, sebagai berikut:

Perjanjian Sewa Ruang Kantor

Berdasarkan Perjanjian Sewa Ruang Kantor No. 016/GLI-NH/LA/ITSEC/X/2022 tanggal 12 Oktober 2022, PT Graha Lestari Internusa, selaku pemilik ruang kantor, menyetujui menyewakan ruang kantor kepada Perusahaan dengan seluruhnya seluas 585 m² yang berlokasi di Gedung Noble House Lantai 11 Unit No. 2 dan 3, Jakarta Selatan. Jangka waktu sewa adalah 1 Desember 2022 sampai dengan 30 November 2025.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kontrak Ruko No. 6 tanggal 9 November 2017, yang telah diperpanjang dengan Akta Perjanjian Perpanjang Kontrak Ruko No. 12 tanggal 18 Oktober 2021, Perusahaan menyetujui untuk menyewa bangunan ruko The Icon Business Park Blok J No. 006. Jangka waktu sewa adalah 1 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2023.

37. EVENTS AFTER REPORTING DATE (continued)

Loan agreement

On February 1, 2023, the Company entered into a Loan Agreement with StoneTree International Limited, a related party, with principal amount of US\$ 750,000, which will be transferred monthly, from time to time as needed by the Company and subsidiaries for working capital purposes. This loan bears an interest at a rate of 4% per annum and will be paid in full on February 1, 2026.

Changes in Ultimate Parent Entity

Based on Notarial Deed No. 112 dated March 28, 2023 of Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., the ultimate parent entity of the Company is now StoneTree International Limited.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

The Group has significant agreements and commitments with third parties, as follows:

Office Space Lease Agreements

Based on Office Unit Lease Agreement No. 016/GLI-NH/LA/ITSEC/X/2022 dated October 12, 2022, PT Graha Lestari Internusa, as the office space owner, agreed to lease office space with a total area of 585 m² to the Company which is located at Gedung Noble House 11th Floor Unit No. 2 and 3, South Jakarta. The lease period is from December 1, 2022 to November 30, 2025.

Based on Shop Lease Agreement No. 6 dated November 9, 2017, which has been extended by Shop Lease Agreement No. 12 dated October 18, 2021, the Company entered into a lease of a shop building at The Icon Business Park Blok J No. 006. The lease period is from December 1, 2021 to November 30, 2023.

39. PENERBITAN AMENDEMENT PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

DSAK IAI telah menerbitkan amendemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang akan berlaku efektif atas laporan keuangan konsolidasian untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan";
- Amendemen PSAK 73, "Sewa tentang Liabilitas Sewa pada Transaksi Jual dan Sewa-Balik".

Grup masih mengevaluasi dampak dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan amendemen di atas dan belum dapat menentukan dampak yang timbul terkait dengan hal tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

40. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Pada tanggal 5 Mei 2023, sehubungan dengan rencana Grup untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham PT ITSEC Asia Tbk, manajemen telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Januari 2023 dan 31 Desember 2022 dan untuk periode satu bulan yang berakhir pada tanggal 31 Januari 2023 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Laporan keuangan konsolidasian tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa tambahan pengungkapan pada laporan posisi keuangan konsolidasian, laporan arus kas konsolidasian, dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian dengan rincian di bawah ini:

- Laporan posisi keuangan konsolidasian, "Perubahan penyajian akun piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar dan utang pajak";
- Laporan arus kas konsolidasian, "Penyesuaian aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan";
- Catatan 1c, "Perubahan pengungkapan persentase kepemilikan dan jumlah aset (sebelum eliminasi)";
- Catatan 4, "Penyesuaian pengungkapan penyajian kembali pada laporan keuangan konsolidasian";
- Catatan 6, "Penyesuaian pengungkapan piutang usaha";
- Catatan 7, "Penyesuaian pengungkapan piutang lain-lain";
- Catatan 17, "Penyesuaian pengungkapan utang usaha";
- Catatan 18, "Penyesuaian pengungkapan dan penambahan pengungkapan utang lain-lain";
- Catatan 21, "Penyesuaian pengungkapan beban masih harus dibayar";
- Catatan 22a, "Penyesuaian pengungkapan utang pajak";

39. ISSUANCE OF AMENDMENTS TO STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS

DSAK IAI has issued the following amendments to Statements of Financial Accounting Standards which will be applicable to the consolidated financial statements with annual period beginning on or after January 1, 2024:

- Amendments to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements on Non-Current Liabilities with Covenants";
- Amendments to PSAK 73, "Leases on Lease Liability in a Sale and Leaseback".

The Group is still evaluating the effects of these amendments to Statements of Financial Accounting Standards and has not yet determined the related effects on the consolidated financial statements.

40. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

On May 5, 2023, in relation with the proposed Initial Public Offering of Shares of PT ITSEC Asia Tbk, management reissued the consolidated financial statements as of January 31, 2023 and December 31, 2022 and for the one-month period ended January 31, 2023 and for the year ended December 31, 2022. The consolidated financial statements were reissued with additional disclosures and changes in the consolidated statements of financial position, consolidated statements of cash flows, and notes to the consolidated financial statements with details below:

- Consolidated statements of financial position, "Changes in presentation of trade receivables, other receivables, trade payables, other payables, accrued expenses and taxes payable";
- Consolidated statements of cash flows, "Adjustments in operating and financing activities";
- Note 1c, "Changes in disclosure of the percentage of ownership and total assets (before elimination)";
- Note 4, "Adjustment in restatement of the consolidated financial statements";
- Note 6, "Adjustment in trade receivables disclosure";
- Note 7, "Adjustment in other receivables disclosure";
- Note 17, "Adjustment in trade payables disclosure";
- Note 18, "Adjustment and additional disclosure on other payables";
- Note 21, "Adjustment in accrued expenses disclosure";
- Note 22a, "Adjustment in taxes payable disclosure";

40. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)

- Catatan 25, "Penambahan pengungkapan tambahan modal disetor";
- Catatan 26, "Penambahan pengungkapan defisit";
- Catatan 32, "Penyesuaian pengungkapan hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi";
- Catatan 34, "Penyesuaian pengungkapan kebijakan dan tujuan manajemen risiko keuangan";
- Catatan 35, "Penyesuaian pengungkapan informasi segmen"; dan
- Catatan 37, "Penambahan pengungkapan peristiwa setelah tanggal pelaporan".

40. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (continued)

- *Note 25, "Additional disclosure on additional paid-in capital";*
- *Note 26, "Additional disclosure on deficits";*
- *Note 32, "Adjustment in relationship and transactions with related parties disclosure";*
- *Note 34, "Adjustment in financial risk management objectives and policies disclosure";*
- *Note 35, "Adjustment in segment information disclosure"; and*
- *Note 37, "Additional disclosure on events after reporting date".*





PT ITSEC Asia

Noble House, Lt. 11
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kuningan,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Indonesia

www.itsec.asia
+62 (21) 29783050
contact@itsecasia.com

